



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN KHUSUS SOEKARNO-HATTA  
DALAM PERUNDINGAN INDONESIA-BELANDA  
DI LINGGAJATI**

**DISERTASI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor**

**RUSHDY HOESEIN  
NPM : 870415003Y**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
JAKARTA  
JUNI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**



**RUSHDY HOESEIN  
NPM : 870415003Y**

**Jakarta 27 Juni 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Rushdy Hoesein  
NPM : 870415003Y  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul Disertasi : Peran Khusus Soekarno-Hatta Dalam Perundingan  
Indonesia-Belanda di Linggajati

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof.Dr R.Z Leirissa

Kopromotor : Dr Suharto

Kopromotor : Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti

Tim Penguji : Dr Priyanto Wibowo (Ketua)

Dr Daniel Dhakidae

Dr Saleh A.Djamhari

Dr Lilie Suratminto

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 27 Juni 2009

Oleh  
Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

Dr Bambang Wibawarta  
NPM 1882165

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis amat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinNya disertasi ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof Dr R.Z. Leirissa yang bertindak selaku Promotor sejak disertasi ini masih berbentuk buah pikir, proposal, diseminarkan dan sampai siap diajukan kedalam sidang ujian. Bagi penulis Prof .Leirissa tidak hanya sebagai guru, tetapi juga teman diskusi yang sangat menyenangkan. Ditengah-tengah kesibukannya, beliau selalu menyempatkan diri untuk membimbing penulis dalam penulisan disertasi ini. Beliaulah yang menjadi inspirator dalam penulisan tema sejarah diplomasi.

Begitu juga diucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti dan Dr. Suharto yang masing-masing bertindak selaku Kopromotor, yang telah membimbing dalam penulisan disertasi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Dr Priyanto Wibowo selaku ketua Departemen Sejarah yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar dan dalam penulisan disertasi. Kepada Prof Dr I.Ketut Surajaya, Dr Saleh A.Djamhari, Dr Anhar Gonggong, penulis mengucapkan terima kasih yang telah bersedia memberikan koreksi dari sejak proposal sampai seminar hasil.

Tidak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Dekan FIB UI, para dosen Ilmu Budaya dan Ilmu Sejarah, yang telah mengajar sejak awal perkuliahan pada tahun 2004 sampai berakhirnya ujian tahun 2009. Terima kasih diucapkan pula kepada pimpinan jurusan Sejarah FIBUI, Dr Priyanto Wibowo dan para staf administrasi khususnya kepada Ibu Tri Wahyuning M.Irsyam MSi, sdr Wiwik, sdr Arie dan lain-lain yang bertugas dalam lingkungan Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok periode 2004-2009.

Demikian diucapkan terima kasih kepada para penguji akhir, Prof.Dr R.Z Leirissa, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, Dr Suharto, Dr Daniel Dhakidae, Dr Saleh A.Djamhari dan Dr Lilie Suratminto.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada, Bapak Soedarpo Sastrosatomo.Alm, Bapak. Let.Jen (Purn) Himawan Soetanto, Bapak Laks.Ma (Purn) Urip Santoso, Kolonel (Purn) Pamoe Rahardjo.Alm, Bapak Let.Kol (Purn)

Islam Salim.Alm, Bapak Mayor (Purn) Oetarjo, dan Bapak Mayor (Purn) Alwin Nurdin, yang telah bersedia diwawancarai selaku pelaku maupun saksi hidup. Juga ucapan terima kasih disampaikan kepada semua nara sumber lainnya yang telah diwawancarai dan mengizinkan dokumen pribadinya untuk diketahui. Tidak lupa disampaikan terima kasih kepada pimpinan dan staf Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Erasmus Huis Kedutaan Besar Belanda di Jakarta yang telah mengizinkan digunakannya berbagai sumber-sumber arsip penting.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman kuliah selama pendidikan berlangsung, khususnya kepada Dr Restu Gunawan, Dr Wagiono dan Iwan Gunawan MA yang telah banyak saling mendorong sehingga masa perkuliahan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, istri tercinta dan putra-putri tersayang di rumah yang telah memberikan suasana gembira dan dorongan moral kepada penulis sehingga memunculkan semangat untuk segera menyelesaikan tulisan ini.

Jakarta 27 Juni 2009



( Rushdy Hoesein )

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rushdy Hoesein  
NPM : 870415003Y  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Departemen : Ilmu Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia  
Jenis karya : Disertasi

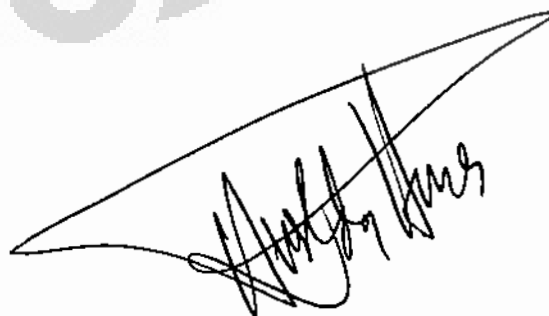
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **Peran Khusus Soekarno-Hatta Dalam Perundingan Indonesia-Belanda di Linggajati.**

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Juni 2009  
Yang menyatakan



( Rushdy Hoesein )

## ABSTRAK

Nama : Rushdy Hoesein  
NPM : 870415003Y  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul Disertasi : Peran Khusus Soekarno-Hatta Dalam Perundingan Indonesia-Belanda di Linggajati

Disertasi ini merupakan karya tulis hasil penelitian Sejarah Diplomasia mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Masalah yang menjadi materi penelitian adalah peristiwa perundingan Indonesia-Belanda pada tahun 1946-1947. Delegasi Belanda terdiri dari Prof.Ir.W.Schermerhorn, F.de Boer dan MJM.van Poll. Delegasi Indonesia terdiri dari Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirta Prodjo dan dr A.K.Gani. Perundingan ini khususnya yang berlangsung di Linggajati Kuningan Jawa Barat, yang kemudian berhasil memunculkan dokumen persetujuan yang diparaf pada 15 November 1946 dan ditanda tangani pada 25 Maret 1947 amatlah penting. Karena merupakan tonggak awal persetujuan dalam rangka proses dekolonisasi di Indonesia. Jalannya perundingan tidaklah mulus karena perbedaan sudut pandang Indonesia dan Belanda soal Negara Indonesia Serikat dan rencana kerja sama Indonesia-Belanda pasca dekolonisasi, khususnya yang menyangkut UNI Indonesia-Belanda serta perwakilan RI di luar negeri pada periode masa peralihan. Meskipun pihak Inggris yang bertindak sebagai penengah telah berusaha sejauh mungkin agar perundingan sukses, kedua delegasi yang berunding, mengalami hambatan pada beberapa pasal-pasal tertentu. Akhirnya atas campur tangan, kebijakan dan keputusan yang diambil Soekarno-Hatta lah perundingan bisa selesai. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan hal tersebut dengan berbagai alasannya.

## ABSTRACT

Name : Rushdy Hoesein  
NPM : 870415003Y  
Study Program : History  
Dissertation Title : Soekarno-Hatta Special role in Indonesia-  
Netherland's negotiation at Linggajati

This dissertation is a documentation of research about diplomacy history by a doctoral degree student in history study program, in the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia. The main issue of the research was the event of an agreement between Indonesia and Netherland in Indonesia which happened in the 1946-1947. Indonesian delegation consisted of Premier Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirtoprodjo and dr A.K.Gani. And Dutch delegation consisted of Prof.Ir W.Schermerhorn, F.de Boer and MJM.van Poll. This negotiation especially the one at Linggajati Kuningan West Java, which was succeed, produced an agreement document which initialed at November 15<sup>th</sup> 1946 and signed at March 25<sup>th</sup> 1947 .

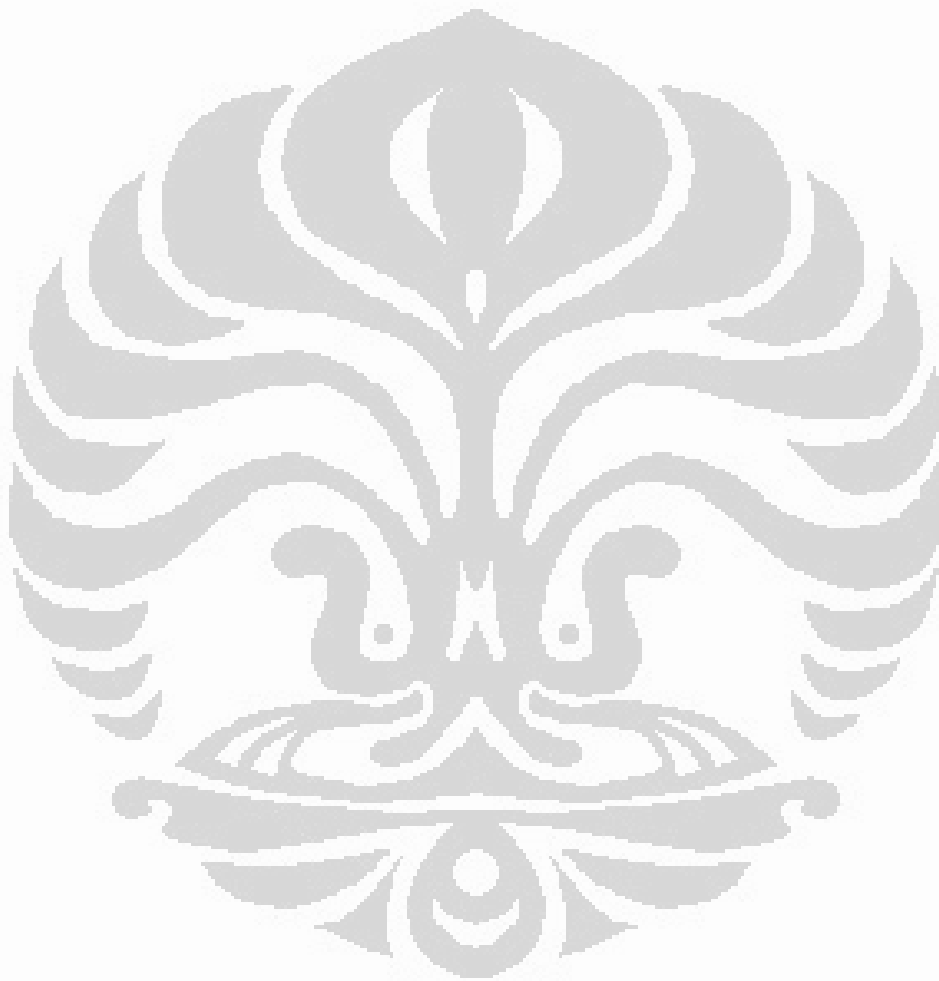
This event is very important because it was the beginning of an agreement in the process of the decolonization in Indonesia. That negotiation was not running so smooth because there was different points of view between Indonesia and Netherlands about the Issue of United Indonesian Republic and about the cooperation plan between Indonesia and Netherland after the decolonization, especially about the UNI Indonesia-Netherland and about the Indonesia Republic international representative, at the transition periode. Although the British as a mediator already try to help to make it a success, both of delegacies found obstacles at some sections of the agreement document. Finally Soekarno-Hatta made an important role in helping them out by making good decisions and policy. This research was intended to prove the importance of that role and to find the evidence about that theory.



## Daftar isi

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAKS	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	214
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Penelitian Terdahulu	10
1.5 Metodologi Penelitian	10
1.6 Metode dan Sumber Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
<b>BAB 2 ANTARA KEMERDEKAAN DAN DEKOLONISASI</b>	<b>14</b>
2.1 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	14
2.2 Kebijakan Sekutu Termasuk Belanda, Sesudah Perang Dunia II di Indonesia	34
2.3 Kabinet Sjahrir Terbentuk	46
2.4 Keadaan Dalam Negeri Belanda Selama Perang dan Pasca Perang Dunia II	61
2.5 Kebijakan Pemerintahan Kabinet Schermerhorn	64
<b>BAB 3 PERUNDINGAN INDONESIA-BELANDA</b>	<b>71</b>
3.1 Awal Perundingan	71
3.2 Konferensi Malino dan Bangkitnya Golongan non Republik.	105
3.3 Pro dan Kontra Perundingan Indonesia-Belanda.	110
3.4 Peran dan Kebijakan Presiden Soekarno.	115
3.5 Masalah Militer di pihak Belanda dan Indonesia.	124
<b>BAB 4 PERSETUJUAN LINGGAJATI</b>	<b>129</b>
4.1 Gencatan Senjata	129
4.2 Jalannya Perundingan Politik di Jakarta	133
4.3 Perundingan di Linggajati	152
4.4 Pelaksanaan Ratifikasi oleh K.N.I.P dan Parlemen Belanda.	185
4.5 Naskah Linggajati Disandangi Ditandatangani 25 Maret 1947	188
4.6 Kebijakan Kabinet Beel dan Kendala yang Muncul	193
4.7 Faktor Politik, Militer, dan Ekonomi	197
4.8 Keadaan Dalam Negeri, Menjelang Agresi Militer Belanda Pertama	201

<b>BAB 5 KESIMPULAN</b>	203
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	206
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b>	213
<b>LAMPIRAN</b>	216
1. Konsep Persetujuan Linggajati	216
2. Persetujuan Linggajati yang di paraf tanggal 15 November 1946.	220
<b>DAFTAR SURAT KABAR DAN MAJALAH SEBAGAI SUMBER</b>	225
<b>BIODATA</b>	226



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda yang menjajah Indonesia sebelum perang, berusaha kembali dengan memanfaatkan sekutu yang keluar sebagai pemenang perang dunia kedua. Sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara Inggris, mendarat di Jawa dan Sumatera pada akhir September 1945, dengan tujuan utama melucuti Jepang dan menyelamatkan tawanan perang kaum sekutu serta kaum interniran (*Allied Prisoners of War and Internees* atau APWI).<sup>1</sup>

Organisasi militer sekutu di Asia Tenggara bernama *South East Asia Command* (SEAC) dibawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten.<sup>2</sup> Bersama rombongan sekutu ini, terdapat sejumlah pegawai sipil dan militer Belanda.

Langkah pertama Belanda ketika tiba di Indonesia, adalah membuka kegiatan pemerintahan sipil Hindia Belanda (*Netherlands Indie Civil Administration* disingkat NICA), di Jakarta.<sup>3</sup> Pimpinan NICA, Letnan Gubernur Jenderal Dr. HJ van Mook tiba resmi di Batavia dari Brisbane Australia pada tanggal 2 Oktober 1945.

Laksamana Mountbatten sebagai pimpinan tertinggi sekutu di Asia Tenggara (*Supreme Allied Comander South East Asia* atau SACSEA), mendapat laporan dari berbagai pihak bahwa telah berdiri sebuah negara Republik Indonesia yang didukung rakyat. Mountbatten mendesak agar van Mook berhubungan dengan para pemimpin Republik Indonesia itu.<sup>4</sup> Untuk ini pada tanggal 23 Oktober 1945, Panglima Tentara Sekutu Hindia Belanda (*Allied Forces Netherlands East Indie* atau AFNEI), Letnan Jenderal Philip Christison, memelopori pertemuan para pemuka Indonesia-Belanda, khususnya antara Soekarno dan van Mook.<sup>5</sup> Namun hal ini tidak dapat disetujui pemerintah Belanda

---

<sup>1</sup>. Yong Mun Cheong, *H.J van Mook and Indonesian Independence* ; The Hague: Martinus Nijhof, 1982, hal 42.

<sup>2</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit*, hal 31.

<sup>3</sup>. *Ibid.*

<sup>4</sup>. Philip Ziegler, *MOUNTBATTEN The Official Biography* ; London: Collins, 1983, hal 334

<sup>5</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit*, hal 44, Kem.Pen R.I, *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia 1945-1949* ;

di Den Haag karena menganggap Soekarno sebagai kolaborator Jepang yang memusuhi Belanda.<sup>6</sup>

Sejak tanggal 14 November 1945 di dalam negeri Republik Indonesia terjadi perubahan tatanan politik. Sutan Sjahrir terpilih sebagai Perdana Menteri.<sup>7</sup> Sejak itu kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia terutama menempuh jalan diplomasi atau berunding dengan Belanda. Perundingan-perundingan segera dilakukan antara kedua pemerintahan. Dari pihak Indonesia, perundingan ini dianggap sebagai perundingan antara sesama negara merdeka dan berdaulat. Namun sikap pemerintah Belanda tetap menganggap bahwa wilayah kolonialnya masih utuh. Dengan demikian awal perundingan Indonesia-Belanda berjalan lambat dan tersendat-sendat.

Mengawali perundingan-perundingan Indonesia Belanda, pada tanggal 6 November 1945 van Mook menerbitkan sebuah dokumen yang isinya, Indonesia akan memiliki kedudukan sendiri di masa depan.<sup>8</sup> Tapi tanpa menyebut kemerdekaan R.I sebagai sebuah kenyataan politik. Adapun kebijakan pemerintah Belanda didasarkan pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942.

Tanggal 17 November 1945 diadakan perundingan resmi pertama Indonesia Belanda yang ditengahi Inggris bertempat di markas besar tentara sekutu di Jakarta. Dalam kesempatan ini, di bahas usulan Belanda tanggal 6 November 1945 diatas. Pertemuan tiga setengah jam tersebut tidak melahirkan satu keputusan apapun.<sup>9</sup> Namun pihak Indonesia tetap berusaha untuk melanjutkan perundingan, meskipun usulan 6 November van Mook itu dianggap tidak memadai untuk dijadikan landasan perundingan.

Karena perundingan Indonesia-Belanda tidak membawa hasil, tanggal 6 Desember 1945 van Mook diundang oleh Mountbatten ke Singapura.<sup>10</sup> Setelah itu

---

Jakarta: Kem.Pen R.I, 1949, hal 351.

<sup>6</sup>. Lihat Yong Mun Cheong, *op.,cit*, hal 43-44.

<sup>7</sup>. Sjahrir, terpilih sebagai Perdana Menteri. 14 November 1945, serah terima baru dilaksanakan tanggal 23 November 1945, lihat: Rosihan Anwar, *Soedarpo Satrosatomo: Bertumbuh Melawan Arus* Jakarta: Pusdok Guntur 49, 2001, hal 102

<sup>8</sup>. Dokumen ini dikenal sebagai "Dokumen van Mook". Isinya tidak banyak berbeda dengan pidato Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942. Lihat Osman Raliby, *Documenta Historica; Jakarta: Bulan Bintang, 1953*, hal 82. Lihat juga lampiran XVI dalam buku yang sama. Bahan lengkap lihat lamp. 001.

<sup>9</sup>. *Ibid*; hal 102-103.

<sup>10</sup>. Sebenarnya ini adalah undangan kedua. Undangan pertama terjadi pada tanggal 10 Oktober 1945. Lihat Yong Mun Cheong, *op.,cit*, hal 43.

van Mook berangkat ke Den Haag pada tanggal 16 Desember 1945 untuk membicarakan hasil perundingan Singapura kepada Pemerintah Belanda.

Kabinet Belanda kemudian memutuskan mengirim utusan ke Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri Schermerhorn. Maksudnya untuk berbicara langsung dengan pimpinan pemerintah Inggris yaitu Perdana Menteri Clement Attlee. Pertemuan itu berlangsung di Chequers pada tanggal 27 Desember 1945.<sup>11</sup> Dalam pertemuan tersebut telah disepakati antara lain, Inggris tetap mendukung perundingan Indonesia-Belanda, dan untuk itu akan ditugaskan Sir Archibald Clark Kerr seorang diplomat Inggris ke Jakarta sebagai penengah perundingan Indonesia-Belanda. Disamping itu pihak Inggris juga memberitahu bahwa pasukan sekutu akan ditarik dari Indonesia dalam waktu dekat.

Setelah kembali ke Jakarta dan berunding lagi dengan pihak Indonesia pada tanggal 10 Februari 1946, van Mook mengajukan usulan pembentukan suatu "Persemakmuran Bersama" (*Commonwealth*) Indonesia dengan Belanda.<sup>12</sup> Perdana Menteri Sjahrir kurang setuju bahkan menuntut lebih dahulu pengakuan eksistensi Republik Indonesia.<sup>13</sup> Dalam perundingan lanjutan yang kini ditengahi Clark Kerr itu, pada tanggal 13, 16, dan 17 Maret 1946, Sjahrir juga tetap ngotot agar kekuasaan Republik Indonesia diakui di seluruh bekas Hindia Belanda.

Dalam perundingan Tanggal 23 Maret 1946, van Mook memunculkan wacana baru, yaitu untuk meniru apa yang dilakukan Perancis di Indocina.<sup>14</sup> Mengikuti contoh itu van Mook lalu merumuskan gagasannya mengenai sebuah negara federal Indonesia dimana RI termasuk sebagai salah satu negara bagiannya. Negara federasi Indonesia ini akan dipayungi oleh sebuah Uni Indonesia-Belanda. Sjahrir tertarik dan mengusulkan hal ini supaya dibuat dalam perjanjian tertulis.<sup>15</sup>

Pada tanggal 25 Maret 1946 van Mook mengumumkan usulan tertulis itu yang terdiri atas empat hal, di mana intinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>. Chequers adalah tempat peristirahatan Perdana Menteri Inggris dekat London.

<sup>12</sup>. Yong Mun Cheong, *op., cit.*, hal 66-72

<sup>13</sup>. *Ibid*, hal 73-79

<sup>14</sup>. Perancis berunding dengan Ho Chi Min yang telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Vietnam di Hanoi. Perancis mengusulkan mengakui kekuasaan Vietnam dengan imbalan federasi Indocina terdiri dari tiga bagian Indocina dipayungi Uni Indocina-Perancis. Lihat Yong Mun Cheong, *op., cit.*, hal 76

<sup>15</sup>. Van der Wal *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands –Indonesische Betrekkingen 1945-19149 jilid IV*; S.Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1972, hal 624

1. Belanda mengakui RI sebagai kekuasaan *de facto* atas Jawa, kecuali wilayah yang dikuasai oleh *Allied Military Administration Civil Affairs Branch* (AMACAB). Pihak RI akan bekerja sama dengan pihak Belanda guna membentuk sebuah negara federasi yang merdeka dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya.
2. RI menyetujui didatangkannya tentara Belanda untuk membantu tugas SEAC.
3. Indonesia-Belanda setuju akan menghentikan permusuhan;
4. Pemerintah Belanda bersama RI dan wilayah di luar kekuasaan R.I akan mengusahakan struktur politik pemerintahan yang cocok untuk Indonesia di masa depan serta hubungannya dengan kerajaan Belanda.<sup>16</sup>

Usulan ini tanggal 27 Maret 1946 dibahas bersama, dan disetujui berbentuk apa yang dinamakan "*Preliminaire overeenkomst tusschen de nagenoemde hooge contracteerende partijen*". pada tanggal 30 Maret 1946. Bagi pihak Belanda untuk memutuskan perubahan yang menyangkut ketatanegaraan dalam negeri, perlu lebih dahulu mendapat persetujuan pemerintah di Den Haag. Van Mook mengusulkan perundingan dilanjutkan di Belanda.

Perundingan Indonesia-Belanda selanjutnya dilakukan di Hoge Veluwe di negeri Belanda pada tanggal 14 April 1946.<sup>17</sup> Perdana Menteri Sjahrir tidak hadir, tapi menyerahkan tugas perundingan kepada Menteri Kehakiman Mr. Suwandi, Menteri Dalam Negeri dr. Sudarsono dan Sekretaris Negara A.K. Pringgodigdo. Perundingan Hoge Veluwe ini gagal dan tidak membuahkan kesepakatan. Setelah itu perundingan Indonesia-Belanda terhenti beberapa bulan. Kebetulan di negeri Belanda sedang berlangsung pemilu yang dimenangkan oleh partai Katolik. Hasil pemilu antara lain diangkatnya Perdana Menteri Belanda baru yang berasal dari *Katholieke Volkspartij* (KVP) yaitu Dr LJM. Beel.

Sekitar Agustus 1946 Inggris kembali mendesak Indonesia dan Belanda agar berunding lagi. Hal ini antara lain karena Inggris merencanakan akan menarik diri dari Jawa dan Sumatra pada tanggal 30 November 1946. Untuk ini pemerintah Belanda menyiapkan sebuah delegasi guna berunding dengan RI. Delegasi terdiri dari Prof. Ir W.Schermerhorn, mantan Perdana Menteri Belanda (anggota *Partij*

---

<sup>16</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit.* hal 76

<sup>17</sup>. Hoge Veluwe, sebuah tempat peristirahan dan perburuan bagi orang Belanda dimasa lalu.

*van de Arbeid* disingkat PvDA), MJM van Poll (anggota KVP), dan F. de Boer (anggota Partai Liberal).<sup>18</sup> Delegasi ini bernama Komisi Jenderal atau dalam bahasa Belanda, *Commissie Generaal (C.G)*. Sebagai penengah perundingan, pada bulan Mei 1946 Inggris menunjuk Lord MWL.Killearn guna menggantikan Archibald Clark Kerr. Komisi Jenderal tiba resmi di Jakarta pada tanggal 18 September 1946.

Tanggal 2 Oktober 1946 Lord Killearn mengundang Sjahrir dan Schermerhorn ke tempat menginapnya untuk santap siang. Kemudian Lord Killearn membiarkan mereka berdua berbicara secara pribadi dan saling berkenalan. Dalam kesempatan tersebut, Schermerhorn berkata: “Sebagai sesama orang Sosialis, secara moral kita berdua wajib mengusahakan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak”. Schermerhorn mengusulkan agar Sukarno-Hatta ikut dalam perundingan Indonesia-Belanda.<sup>19</sup> Meskipun saat itu Sjahrir tidak setuju, belakangan hal ini terwujud juga dalam perundingan di Linggajati.

Sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh semua pihak, sebelum perundingan politik akan diadakan perundingan gencatan senjata lebih dahulu. Maka tanggal 9 Oktober 1946, bertempat di konsulat Inggris Jakarta mulailah diadakan perundingan gencatan senjata yang dipimpin Lord Killearn. Pada tanggal 14 Oktober 1946 kesepakatan gencatan senjata disetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak Republik Indonesia, Belanda dan Inggris.

Perundingan yang dikenal sebagai perundingan Linggajati, adalah perundingan politik yang meliputi perundingan formal sebanyak 11 kali. Dimulai perundingan pertama pada tanggal 22 Oktober 1946 sampai perundingan ke 4 yang berlangsung di Jakarta, kemudian perundingan ke 5 sampai ke 8 di Linggajati Kuningan Jawa Barat. Perundingan ke 9 sampai ke 11, kembali di Jakarta. Selain itu terjadi pula 4 kali perundingan informal di Jakarta dan Kabupaten Kuningan.

Dalam perundingan informal pada tanggal 12 November 1946 di pendopo Kabupaten Kuningan antara Komisi Jenderal dan Presiden Soekarno serta wakil Presiden Mohamad Hatta, terjadi hal yang menentukan jalannya sejarah perundingan. Saat itu Sukarno muncul sebagai tokoh yang mengambil keputusan

---

<sup>18</sup>. Partai Liberal Belanda adalah partai yang mewakili para pengusaha Belanda.

<sup>19</sup>. W.Schermerhorn, *Het Dagboek van Schermerhorn* ; Groningen: Wolters-Noordhoff NV, 1970, hal 19.

akhir untuk menyepakati dasar-dasar persetujuan Linggajati, meskipun saat itu masih banyak pasal-pasal yang belum disetujui bersama oleh delegasi Indonesia dan Belanda. Akibatnya perundingan di Linggajati dapat diakhiri dan pada tanggal 15 November 1946, naskah persetujuan Indonesia-Belanda tersebut diparaf bersama di Jakarta.

## 1.2 Permasalahan

Antara lain, karena atas desakan Inggrislah Indonesia-Belanda memasuki periode perundingan menuju proses dekolonisasi. Hal ini baru serius bisa terjadi pada bulan Agustus 1946. Pada saat itu pemerintah Belanda melalui undang-undang membentuk Komisi Jenderal, yaitu sebuah badan pemerintah yang dipimpin Prof. Ir. W.Schermerhorn, sebagai delegasi resmi untuk berunding dengan pihak Republik Indonesia. Di Indonesia juga dipersiapkan sebuah delegasi yang sama yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Anggotanya adalah Mr Mohammad Roem, Mr Soesanto Tirtoprodjo, dan dr .AK.Gani.

Perundingan politik Indonesia-Belanda secara resmi mulai berlangsung sejak tanggal 22 Oktober 1946 sampai dengan 15 November 1946. Perundingan ini disebut sebagai perundingan Linggajati, karena meskipun diawali dan diakhiri di Jakarta, keputusan penting dilaksanakan di Linggajati, Kuningan Jawa Barat.

Sebelum perundingan, Sjahrir dan Schermerhorn bertemu pada tanggal 18 Oktober 1946 untuk menentukan agenda perundingan. Juga disepakati bahwa perundingan akan berlangsung bergantian di tempat kediaman Sjahrir di Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan di tempat kediaman Schermerhorn di Rijswijk (sekarang Istana Negara Jakarta). Ketua sidang akan dijabat secara bergantian oleh Schermerhorn dan Sjahrir.<sup>20</sup>

Empat kali perundingan formal pertama diselenggarakan di Jakarta guna membicarakan materi pokok yang harus lebih dahulu disetujui kedua belah pihak. Tiga hal mendasar yang dirundingkan adalah kedaulatan Republik Indonesia, ketatanegaraan pada negara yang akan dibangun kemudian yang bernama Negara

---

<sup>20</sup>. Sjahrir di istana Rijswijk dan Schermerhorn di Pegangsaan Timur 56.



Indonesia Serikat (NIS) dan sebuah UNI Indonesia-Belanda sebagai wadah kerja sama kedua pihak.

Soal yang pertama, Republik Indonesia dirundingkan hanya untuk disepakati berbentuk negara yang berkuasa secara *de facto* pada wilayah Jawa, Madura dan Sumatera saja kecuali daerah yang dikuasai sekutu. Yang kedua soal NIS, setelah dirundingkan, diusahakan untuk disetujui sebuah rancangan ketatanegaraan meliputi seluruh bekas Hindia Belanda yang dibangun bersama yang berbentuk sebuah negara merdeka berdasarkan federasi. Mengenai yang ketiga yaitu soal UNI, diusahakan untuk disetujui Indonesia-Belanda akan mengadakan kerja sama untuk kepentingan bersama.

Kalau yang pertama dan kedua tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, namun soal UNI ini hampir tidak terdapat kesepakatan dan selalu ada pasal-pasal yang mengganjal. Pihak Belanda, terutama salah satu anggota delegasi Belanda, yaitu Van Poll dari KVP, selalu memperjuangkan adanya UNI Indonesia-Belanda ini, tapi RI selalu menolaknya. Bahkan anggota delegasi Indonesia (statusnya sebagai anggota pengganti), Amir Sjarifudin menyatakan kekhawatirannya jangan-jangan UNI menjadi sebuah "*superstaat*" (Negara super). Juga dialami hambatan perundingan dalam mengusahakan persetujuan agar Republik Indonesia memiliki perwakilan sendiri di luar negeri dalam masa pemerintahan peralihan.

Delegasi RI mengusulkan penyusunan sebuah draft persetujuan yang akan menjadi landasan perundingan selanjutnya. Pada tanggal 3 November 1946 pihak Belanda menyerahkan konsep mereka. Konsep persetujuan Linggajati versi Belanda inilah yang dipakai untuk perundingan selanjutnya.

Ketika konsep persetujuan dari pihak Belanda di atas dibawa Sjahrir ke ibu kota Yogyakarta, ternyata hal ini memunculkan banyak penolakan khususnya dari pihak Parlemen dimana Masjumi dan PNI menguasai suara terbanyak. Ketika kembali ke Jakarta, hal ini dibicarakan Sjahrir dengan Schermerhorn dalam perundingan informal tanggal 5 November 1946. Saat itu Schermerhorn mengusulkan agar Sukarno dan Hatta dihadirkan saja dalam pertemuan selanjutnya. Maksudnya untuk melibatkan Presiden dan Wakil Presiden. Tapi karena Sukarno-Hatta tidak mungkin ke Jakarta dan delegasi Belanda tidak diizinkan pemerintahnya ke Yogyakarta, jalan keluar ditawarkan pihak Indonesia atas saran Maria Ulfah, perundingan selanjutnya berlangsung di Linggajati

Kuningan Jawa Barat.<sup>21</sup> Soekarno-Hatta bersedia terlibat dalam perundingan tersebut dan menginap di kabupaten Kuningan.

Sebelum perundingan, Sjahrir pernah memberitahukan delegasi Belanda, kalau perundingan gagal ia akan meletakkan jabatan. Schermerhorn juga menyatakan, kalau perundingan gagal dia dan rombongannya kembali ke Negeri Belanda.<sup>22</sup> Bahkan pimpinan tentara Belanda mengumumkan, kalau sampai 30 November 1946 tidak tercapai kesepakatan, Belanda akan menyerbu Yogyakarta.

Mulai tanggal 11 November 1946, perundingan berlangsung di Linggajati. Perundingan sampai tanggal 12 November sore, berjalan amat alot sehingga banyak pasal yaitu pasal 2, 7, 9 dan 16 terpaksa ditunda pembahasannya. Kebetulan pada tanggal 12 November 1946, ketika rehat makan siang, Sukarno-Hatta datang dari Kuningan dan ikut makan. Saat itu Schermerhorn yang duduk satu meja dengan Presiden, bertanya kepada Sukarno kapan bisa bicara dengannya soal perundingan Indonesia-Belanda ? Lalu dijawab Presiden, nanti malam saja di Kuningan, kira-kira jam 18.00. Maka setelah perundingan sore hari berakhir, tanggal 12 November 1946 malam delegasi Belanda menghadap Presiden Soekarno di pendopo Kabupaten Kuningan. Sjahrir tidak hadir Amir Sjarifudin dan A.K.Gani hadir.

Keterlibatan Sukarno-Hatta dalam perundingan informal 12 November 1946 malam di Kuningan amat penting, karena Presiden Republik Indonesia sendiri yang memutuskan menyetujui naskah perundingan di mana status RI jelas dalam pasal-pasal yang telah disetujui. Karena Schermerhorn dalam penjelasannya menyepakati bukan hanya status RI saja, tetapi suatu rancangan besar sistem ketatanegaraan Indonesia masa datang yang berdaulat yang bernama Negara Indonesia Serikat (NIS).<sup>23</sup> Padahal masih banyak pasal yang menggajal yang belum disetujui bersama kedua delegasi. Dalam kesempatan ini pula Soekarno berjanji untuk mempertaruhkan jabatan dan kedudukannya untuk membela hasil perundingan Indonesia-Belanda di Linggajati. Dan hal ini memang ditepati

---

<sup>21</sup>. Menteri Sosial Kabinet Sjahrir kedua. Ali Budiardjo dalam buku AB Lopian & PJ Drooglever, *Menelusuri jalur Linggarjat* ; Jakarta : Grafiti 1992, hal 17

<sup>22</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit.* hal 95.

<sup>23</sup>. Hal ini berkaitan karena Soekarno-Hatta mendengar bahwa Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk itu adalah negara yang berdaulat, tiba-tiba Soekarno menjadi sangat gembira. Ia mengatakan kalau memang akan dibentuk negara yang berdaulat (maksudnya : sehingga Belanda harus angkat kaki dari Indonesia), maka ia bisa menerima semua pasal yang dirundingkan, termasuk yang belum disepakati.

Soekarno-Hatta dengan mengadakan kampanye di beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Timur, agar persetujuan Linggajati dapat diterima rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penelitian ini terutama akan membahas jalannya perundingan dan seberapa jauh peranan Sukarno Hatta dalam proses perundingan Linggajati tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

- a Mengapa perundingan Indonesia-Belanda lanjutan dilaksanakan di Linggajati?
- b Mengapa Sukarno-Hatta bisa menyetujui seluruh isi draft persetujuan Linggajati itu di Kuningan, padahal masih banyak pasal yang belum dibicarakan dan disetujui oleh kedua delegasi ?
- c Mengapa Sukarno-Hatta mempertaruhkan kedudukan dan martabatnya dengan mengadakan kampanye di seluruh Jawa segera setelah ia dan Hatta meninggalkan Kuningan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai sebuah penelitian sejarah diplomasi soal perundingan politik Indonesia-Belanda pada tahun 1945-1946-1947, maka penulisan bertujuan untuk:

1. Memahami dinamika perundingan Indonesia-Belanda guna menuju proses dekolonisasi di Indonesia termasuk peranan Inggris sebagai penengah dan penguasa Asia Tenggara..
2. Mengerti bagaimana jalannya perundingan politik yang dilakukan kedua delegasi sejak November tahun 1945 sampai Juli 1947 sehingga bisa terjadi persetujuan dan bagaimana hambatan-hambatannya yang muncul.
3. Memahami seberapa besar peranan dan kemampuan delegasi Indonesia dalam semua perundingan di atas serta bagaimana peranan khusus Sukarno Hatta dalam perundingan di Linggajati sehingga bisa dicapai dasar-dasar Persetujuan Indonesia-Belanda.
4. Membuktikan perundingan Linggajati merupakan sebuah perundingan dasar bagi perundingan selanjutnya guna mencapai tujuan dekolonisasi dan merupakan sebuah kesuksesan politik luar negeri RI (*political achievement* RI) yang pertama dalam rangkaian strategi perjuangan diplomasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Indonesia.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang perundingan dan persetujuan Linggajati telah dilakukan oleh Dr Ide Anak Agung Gde Agung, SH yang diterbitkan dalam bukunya berjudul "*Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*".<sup>24</sup> Menurut penulis dalam buku tersebut penelitian yang dikerjakan kurang cermat dilakukan dan beberapa hal kurang diperhatikan seperti alasan-alasan Inggris mendorong Belanda agar berunding dengan Indonesia. Dalam buku tersebut peranan Sjahrir dan khususnya peranan Soekarno Hatta tidak dijelaskan baik peristiwanya maupun alasan-alasan terkait. Bahan perundingan Linggajati yang dipersiapkan Belanda dan diserahkan pada tanggal 3 November 1946, oleh penulis kurang sempurna diterjemahkan sehingga ada perbedaan kata dengan naskah persetujuan yang diparaf.

Selain buku di atas, juga telah diterbitkan sebuah buku yang ditulis oleh KML Tobing berjudul "*Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*".<sup>25</sup> Buku ini tidak berbicara soal proses perundingan, tapi justru diawali dengan sudah selesainya perundingan dan tercapainya persetujuan dengan naskah yang selesai diparaf dan ditandatangani. Kemudian sejak pertengahan buku yang dibicarakan adalah konflik militer Indonesia Belanda dalam Agresi Militer Belanda pertama.

#### 1.5 Metodologi Penelitian

Disertasi ini menggunakan pendekatan narativisme, di mana semua perhatian diarahkan pada pengetahuan historis yang diwujudkan dalam sebuah penuturan sejarah yang meyakinkan (*credible*) dan objektif.<sup>26</sup> Pendekatan melalui penuturan historis ini berusaha melukiskan budaya politik dan jalannya perundingan diplomasi dari masing-masing negara yaitu Indonesia, Belanda, dan Inggris, dan juga sikap serta kebijakan khas dari masing-masing pemerintahan terkait pada tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggajati.

---

<sup>24</sup>. Lihat Dr Mr Ide Anak Agung Gde Agung. *Persetujuan Linggajati Prolog & Epilog* ; Surakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 1995.

<sup>25</sup>. Lihat KML.Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* ; Jakarta: NV Saptodadi, 1986.

<sup>26</sup>. Lihat M.C Lemon. *Philosophy of History*: London-Newyork: Routledge Taylor & Francis Group, 2003, hal 299.

Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka, pada tahun 1945-1946 mempunyai keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, sedangkan Belanda tetap bersikeras ingin menjajah kembali Indonesia. Keadaan ini dituturkan lebih lanjut dengan memunculkan hal, karena penyelesaian militer kurang bisa disetujui oleh kedua pemerintahan, maka mereka mengusahakan cara penyelesaian melalui jalan perundingan yang disesuaikan pada kondisi yang ada. Untuk ini diselenggarakan perundingan diplomasi di mana kedua pemerintahan menunjuk delegasinya masing-masing. Akhirnya persetujuan bisa dicapai dan naskah diparaf serta ditandatangani.

Juga diungkapkan, kondisi politik internasional dan kondisi politik dalam negeri Belanda, khususnya di dalam parlemennya yang dikuasai partai Katolik yang tidak memiliki kemampuan cukup besar untuk memenangkan kepentingan politiknya guna menjajah Indonesia kembali. Sementara itu kekuatan politik dalam negeri Indonesia dapat dikuasai oleh tokoh-tokoh penting seperti Soekarno-Hatta dan Sjahrir sehingga baik di dalam parlemen Indonesia (KNIP) maupun rakyat luas bisa dipengaruhi agar mendukung perjuangan diplomasi melawan Belanda. Kesuksesan politik ini mampu mengangkat popularitas pemerintah Republik Indonesia di dunia Internasional dan meniadakan konflik besar militer Indonesia-Belanda hampir 9 bulan lamanya sehingga ada jeda waktu bagi Republik Indonesia guna menangani masalah pembangunan lain di dalam negeri.

Persetujuan Indonesia-Belanda yang dikenal sebagai persetujuan Linggajati itu, tidak bisa ditarik manfaatnya lebih jauh karena pihak Belanda bersikeras pada pendapatnya soal kepentingan kolonialnya yang tidak bisa diterima pihak Indonesia. Semua ini diakhiri dengan keputusan sepihak pemerintah Belanda untuk menyatakan tidak berlakunya lagi gencatan senjata yang telah disepakati. Sejak tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan Aksi Polisionilnya yang pertama . Bangsa Indonesia menyebutnya sebagai Agresi.

## **1.6 Metode dan Sumber Penelitian**

Metode penelitian sejarah sebagaimana lazimnya didahului dengan pengumpulan sumber data. Sumber data dalam hal ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber primer dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap arsip-arsip baik berupa notulen sidang, surat keputusan dan berita koran sezaman yang tersimpan di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Selain itu juga dari sumber-sumber yang tersimpan di perpustakaan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, *Erasmus Huis*. Bahan tersebut banyak membantu dalam mencari data-data penelitian yang akurat dan penelusuran data-data dari arsip-arsip lain. Sumber sekunder berupa buku-buku literatur digunakan untuk mencari data tambahan dan melakukan perbandingan satu buku dengan buku lainnya sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap sejarah perundingan Indonesia-Belanda khususnya yang berlangsung sejak 22 Oktober 1946 sampai dengan 15 November 1946, yang dikenal sebagai perundingan Linggajati.

Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut maka dilakukan seleksi data yang meliputi kritik ekstern dan kritik intern untuk mengkaji isi sumber yang diperoleh. Berdasarkan sumber-sumber data yang ada, agar dapat disusun sebuah historiografi, maka diadakan analisis dengan menggunakan pendekatan dari ilmu-ilmu lain seperti kajian diplomasi dan politik. Dengan tahapan ini diharapkan dapat dihasilkan penulisan sejarah diplomasi yang cukup ilmiah.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

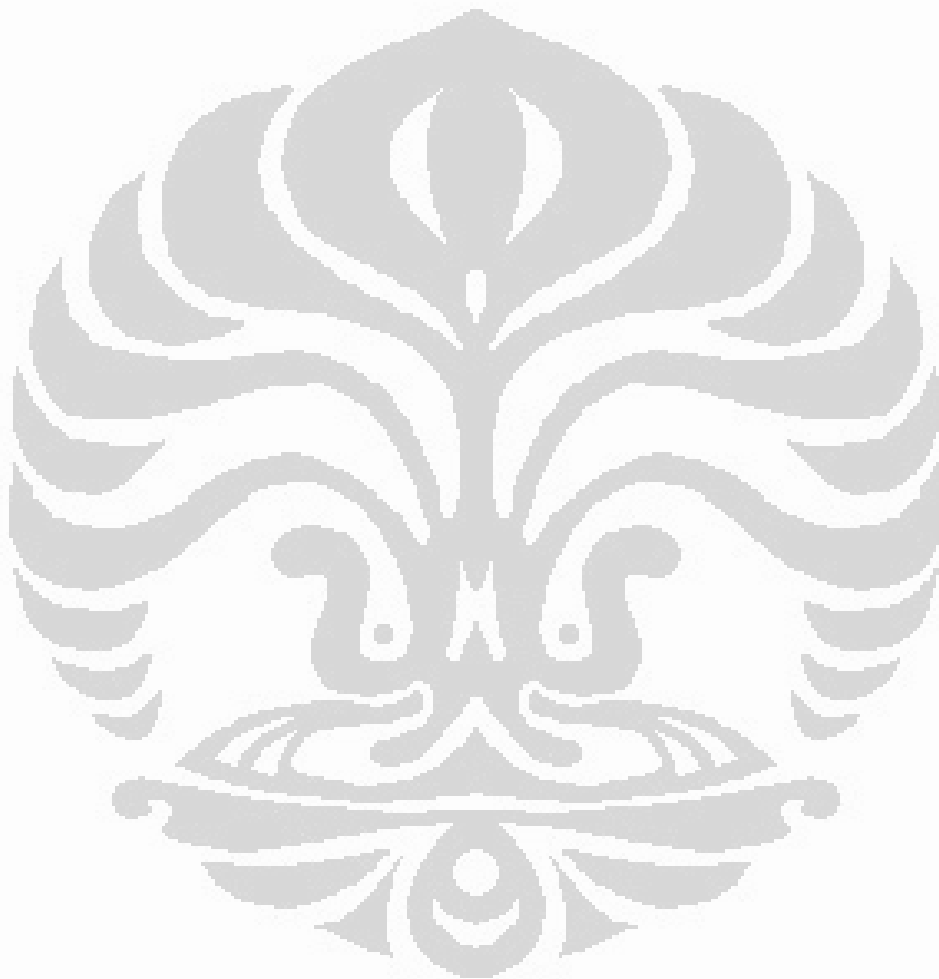
Pada Bab I, diuraikan soal “pendahuluan” yang merupakan usulan proposal yang telah disetujui para penguji sehingga kepada yang diuji diizinkan untuk menulis Disertasi ini.

Pada Bab II diuraikan hal-hal yang terkait sebelum perundingan Indonesia Belanda. Isinya menyangkut pendudukan Jepang, sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kabinet Sjahrir, kedatangan Sekutu, dan usaha Belanda untuk berkuasa kembali sebagai kolonial pada tahun 1945-1946.

Pada Bab III, diuraikan perundingan Indonesia-Belanda sebelum perundingan Linggajati, seperti perundingan-perundingan di Jakarta dan Hoge Veluwe. Diuraikan pula keterlibatan Inggris mendorong Indonesia-Belanda berunding. Masalah yang dihadapi Belanda dan Indonesia didalam negeri masing-masing

Pada Bab IV, diuraikan hal-hal yang terkait perundingan Linggajati, dimulai kedatangan Komisi Jenderal, perundingan gencatan senjata, perundingan politik

di Jakarta, di Linggajati, kembali di Jakarta lagi guna pamarafannya. Juga diuraikan perundingan pasca Linggajati sampai penanda tangan Persetujuan Linggajati 25 Maret 1947. Juga diuraikan masalah yang dihadapi ketika naskah Linggajati yang disetujui akan diratifikasi dalam parlemen di negara masing-masing. Sebagai epilog, diuraikan proses terjadinya Agresi Militer Belanda pertama.



## BAB 2

### ANTARA KEMERDEKAAN DAN DEKOLONISASI

#### 2.1 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia erat hubungannya dengan perang dunia ke II khususnya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1945-1942). Perang Pasifik yang juga dikenal sebagai “Perang Asia Timur Raya” diawali dengan serangan Jepang ke pelabuhan angkatan laut Amerika di Hawaii, Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Amerika dengan segera menyatakan perang terhadap Jepang. Serangan Jepang keselatan seperti ke Malaya, Filipina dan Hongkong pada hari yang sama dan keesokan harinya, yaitu 8 Desember 1941, memicu pernyataan perang dari berbagai pihak termasuk pemerintah Hindia Belanda dibawah Gubernur Jenderal Tjarda Starckenborg<sup>1</sup>. Perang Pasifik, sebenarnya merupakan kelanjutan perang dunia ke II di Eropah yang melebar ke Asia dan Pasifik.

Invasi Jepang keselatan ini menyebabkan jatuhnya berturut-turut kekuasaan kolonial bangsa barat di Filipina, Malaya, Singapura, Indochina, Birma dan terakhir Hindia Belanda. Berkaitan pada perkembangan permusuhan antara kelompok Sekutu dan Axis dimana Belanda merupakan bagian dari sekutu, Pemerintah Hindia Belanda termasuk yang pertama yang menyatakan perang terhadap Jepang sehingga terlibat Perang Pasifik pada tahun 1942.

Kampanye Jepang dalam apa yang dinamakannya Perang Asia Timur Raya ini adalah untuk membebaskan bangsa Asia dari penjajahan barat, tapi kenyataannya kedatangan Jepang adalah untuk menjadi penguasa baru.

Invasi Jepang ke Hindia, dapat dianggap bahwa minyaklah yang menjadi faktor utama yang menentukan tujuan untuk menjajah Indonesia. Namun selain itu, alasan ideologis juga merupakan hal penting dimana dengan mempropagandakan pelaksanaan perdamaian dunia sesuai cita-cita *Hakko Ichi-u*, Jepang merupakan kolonialis baru yang menggantikan Belanda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>. Hans Jacobs/Jan Roeland, *Indisch ABC* ; Amsterdam: Uitgeverspers, 1970, hal 137

<sup>2</sup>. Nugroho Notokusanto, *Tentara Peta pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia* ; Jakarta: Gramedia hal 17. *Hakko Ichi-u* adalah persemakmuran Asia Timur Raya.



Dalam invasinya, Jepang mendarat di pulau Jawa pada tiga tempat, yaitu di Bojanegara Banten, di pantai Eretan di Jawa Barat, dan di Kragan Jawa Timur.<sup>3</sup> Di Sumatera mereka menyeberang dari Malaka, melakukan penerjunan payung di Palembang. Di Indonesia Timur dilakukan penerjunan payung di kota Manado, pendaratan *amfibi* di Tarakan dan Balikpapan. Tanggal 27-28 Februari 1942 terjadi pertempuran laut Jawa. Armada gabungan sekutu ABDA (*American, British, Dutch, Australia*) dihancurkan.

Kebijakan pemerintah Belanda yang diumumkan dari London pada tanggal 20 Februari 1942 antara lain menyebutkan bahwa jika pulau Jawa berhasil diduduki Jepang, maka pemerintah dan aparaturnya dilarang meninggalkan Hindia. Kemudian juga bila hal itu benar terjadi dan sukar dihindarkan, maka beberapa kelompok aparat pemerintah Hindia Belanda disingkirkan keluar negeri.<sup>4</sup> Oleh karena itu setelah Jepang mendarat di Jawa tanggal 1 Maret 1942, tanggal 7 Maret 1942 pagi hari, pejabat Hindia seperti van Mook, van der Plas, Jendral Mayor van Oyen dan sejumlah petinggi Hindia Belanda lainnya atas perintah Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborg berangkat dengan pesawat Dakota terakhir dari jalan Batoe Doewa di Bandung menuju Australia.<sup>5</sup> Mereka membentuk pemerintahan Hindia Belanda di pengasingan. Markas besarnya segera berdiri di kota Brisbane, Australia.

Tanggal 8 dan 9 Maret 1942, terjadilah kapitulasi dari tentara Belanda kepada tentara pendudukan ke 16 Jepang. Sejak hari itu, Indonesia resmi dijajah oleh pemerintah *fasis* Jepang.

Zaman penjajahan Jepang di Indonesia resminya dimulai tanggal 8-9 Maret 1942 ketika Let.Jen Hein Ter Porten selaku panglima ABDA *Command* di Hindia, sebagai kekuatan militer sekutu di Hindia, menyerah kepada Let. Jen Hitoshi Imamura selaku Panglima tentara ke 16 Jepang, bertempat bertempat di perumahan perwira KNIL di lapangan terbang Kalijati.<sup>6</sup>

Pembagian wewenang terhadap wilayah-wilayah Indonesia yang diduduki tentara Jepang, Sumatera dan Jawa berada di bawah kekuasaan pihak Angkatan Darat Jepang, yang dilaksanakan masing-masing oleh tentara ke 25 dan tentara ke

<sup>3</sup> *Ibid* hal 22

<sup>4</sup> Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*; Jakarta: Sinar Harapan 1967, hal 102-103

<sup>5</sup> H.J van Mook, *Indonesia, Nederland en de wereld*; Batavia: De Brug-Opbouw, 1949, hal 30.

<sup>6</sup> Panglima tentara ke 16, dalam bahasa Jepang disebut sebagai *Saiko sikiikan*.

16. Sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Irian berada dibawah kekuasaan Angkatan Lautnya.<sup>7</sup>

Kebijakan pemerintah pendudukan militer terhadap rakyat Indonesia, bersifat mobilisasi dan kontrol bagi kepentingan perang. Salah satu kebijakannya di Jawa adalah gerakan Tiga A yang oleh lembaga propaganda Jepang (*Sendenbu*) di bawah Hitoshi Shimizu diperuntukkan agar bangsa Indonesia berpartisipasi mendukung Perang Pasifik.<sup>8</sup> Panglima tentara Jepang (*Gunshireikan* atau *Saiko Shikikan*) adalah kepala pemerintahan militer pendudukan Jepang. Pemerintahan sipil sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Staf (*Gunseikan*) tentara ke 16 selaku pimpinan dari *Gunseikanbu*.<sup>9</sup>

Usaha kebangsaan di Hindia amat dibatasi. Mendirikan partai politik dilarang. Bahkan pada tanggal 20 Maret 1942 diterbitkan *Osamu Seirei* No.3 (istilah Jepang untuk Undang-Undang No.3) yang melarang segala perbincangan, pergerakan dan anjuran atau propaganda perihal kebangsaan dalam bentuk peraturan dan susunan pemerintahan dalam negeri.<sup>10</sup> Undang-Undang lain yang muncul kemudian adalah *Osamu Serei* No. 4 yang menetapkan hanya bendera Jepang (*Hino Maru*) yang hanya boleh di pasang pada hari besar. Merah Putih dilarang dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilarang pula dinyanyikan.

Soekarno dan Hatta dimanfaatkan Jepang dalam pemerintahan pendudukan militer. Mula-mula Hatta yang mulai bekerja untuk Jepang sejak April 1942. Soekarno mulai bekerja setelah kembali ke Jakarta dari Sumatera tanggal 9 Juli 1942. Setelah itu Hatta dan Soekarno segera bersatu bekerja sama meskipun sebelum perang mereka bersaing. Sejak itulah dimunculkan lembaga “Dwi Tunggal”, sebagai citra persatuan nasional.

Pada suatu hari, dalam kesibukannya di Jakarta, Soekarno pernah bertemu *Saiko Shikikan*, Jenderal Imamura.<sup>11</sup> Mereka berbicara soal kemerdekaan bagi Indonesia. Imamura menjelaskan secara diplomatis bahwa izin kemerdekaan bagi Indonesia bisa saja muncul, tapi ini tergantung pada situasi.

---

<sup>7</sup> Nugroho Notokusanto, *Op.,cit.* hal 25

<sup>8</sup> Gerakan Tiga A: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia

<sup>9</sup> Nugroho Notokusanto, *Op.,cit.* hal 28. *Gunseikan* : Kepala pemerintahan militer,

<sup>10</sup> Lambert Giebels, *Soekarno*; Jakarta : Grasindo, 2001, hal 184.

<sup>11</sup> Pada November 1942 Imamura digantikan Harada dan Mei 1943 Imamura diangkat sebagai Panglima Rabaul.

Untuk mengajak tokoh-tokoh nasionalis lainnya bersatu serta berpartisipasi, tanggal 9 Maret 1943 Soekarno dan Hatta mendeklarasikan organisasi bernama “Putera”, singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Secara terselubung organisasi ini berisi cita-cita nasional, yaitu kemerdekaan. Tokoh-tokoh Putera adalah empat serangkai Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan K.H Mas Mansur.<sup>12</sup>

Tanggal 28 Januari 1943 Jepang menyatakan memberikan kemerdekaan bagi Birma dan Filipina di masa datang.<sup>13</sup> Tapi Indonesia tidak disebut-sebut akan mendapat kemerdekaannya juga. Pada bulan Maret 1943 datang berkunjung Menteri Urusan Asia Timur Raya, Aoki ke Indonesia.<sup>14</sup> Saat itu para pimpinan Putera menuntut kemerdekaan seperti diberikan kepada Birma dan Filipina, tapi menteri Aoki hanya sanggup menjanjikan akan menyampaikan tuntutan itu kepada pemerintah Tokyo.

Pada tanggal 17 Juni 1943 Perdana menteri Tojo dimuka *Diet* (parlemen Jepang) menyebutkan bahwa di masa datang akan diberikan kesempatan kepada rakyat tertentu di daerah selatan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan. Banyak orang Indonesia yang menyimak pidato ini dengan harapan bahwa rakyat di selatan yang dimaksud adalah Indonesia, dan Indonesia akan diberikan kemerdekaan.<sup>15</sup>

Tanggal 7 Juli 1943, Perdana Menteri Tojo berkunjung ke Jawa. Rombongan tamu agung disambut rakyat Jakarta yang mengelu-ngelukannya sambil mengibarkan bendera Jepang kecil terbuat dari kertas minyak.<sup>16</sup> Dalam film propaganda Jepang, tampak empat serangkai Putera ikut menyambut di lapangan terbang Kemayoran Jakarta. Dalam pidatonya Tojo menjelaskan bahwa kedatangannya ke selatan adalah untuk bertemu dengan penduduk pribumi pulau Jawa, maksudnya untuk menyampaikan tujuan Jepang yang sebenarnya, yaitu pengerahan tenaga rakyat guna mendukung tentara Jepang. Hal ini akan diusahakan melalui *subordinasi* pemerintahan menyangkut ekonomi dan kebudayaan. Juga dimaksudkan untuk memunculkan daya upaya pemerintah

<sup>12</sup>. M.C.Riclefs, *op., cit*, hal 415.

<sup>13</sup>. Bernhard Dahm, *Soekarno en de Strijd om Indonesie's Onafhankelijkheid* ; Uitgevers te Mempel: J.A Boom en Zoon, 1964, hal 217.

<sup>14</sup>. *Ibid*, hal 220.

<sup>15</sup>. *Ibid*.

<sup>16</sup>. Film Nampo Hodo EXTRA no 7. *Bezoek van Japanse minister president Tojo aan Java* ; Juli 1943

guna membantu mewujudkan Jawa baru.<sup>17</sup> Saat itu Tojo tidak menyebutkan soal kemerdekaan bagi Indonesia.

Menjelang akhir tahun 1942, Jenderal Harada Kumakichi diangkat sebagai *Saiko Shikikan*.<sup>18</sup> Dan sejak tahun 1943 Jenderal Moichiro Yamamoto diangkat sebagai *Gunseikan*. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, mulai saat itu pemerintah militer Jepang memberlakukan tangan besi terhadap gerakan kemerdekaan. Padahal, sejak awal tahun 1943 Jepang mulai mengalami kekalahan, terutama dengan gencarnya pihak sekutu melancarkan serangan-serangan ke Pasifik Selatan.<sup>19</sup> Pada bulan Juni 1942, dalam pertempuran *Midway*, sebenarnya sudah tampak tanda-tanda awal kekalahan Jepang.<sup>20</sup> Pada bulan November tahun 1943 sejumlah pulau di Pasifik seperti Bougainville, Solomon, Tarawa, Makin dan Gilbert praktis berhasil dikuasai Sekutu. Pada bulan yang sama pasukan Inggris di Birma berhasil melakukan pukulan ofensif terhadap Jepang. Pada ahir April 1944, pasukan sekutu berhasil mendarat di Hollandia (sekarang Jaya Pura) dan pada awal Juni 1944 mereka berhasil mendarat di Biak, Saipan dan kepulauan Mariana.<sup>21</sup>

Sejak September 1943 diterbitkan *Osamu Seirei* No. 36 dan 37 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (*Chuo Sangi In*) di Jakarta dan Dewan Pertimbangan Daerah (*Shu Sangi Kai*) yang meliputi 17 daerah kresidenan. Selain itu juga untuk tiga kota besar yaitu *Tokubetsu* Jakarta, *Koci* Yogyakarta dan *Koci* Surakarta.

Anggota *Chuo Sangi In* sebagian besar berasal dari anggota Putera. Sebagai ketua (*Gicho*) secara aklamasi, terpilih Soekarno. Wakilnya RMTA Kusumo Utoyo dan Dr Buntaran Martoatmodjo. Dewan ini menggambarkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan militer Jepang di Jawa, namun fungsinya tidak banyak, hanya sekedar sebagai lembaga penasihat pemerintah.

Tanggal 5 September 1944 anggota *Chuo Sangi In* telah ditambah jumlahnya dari 43 orang menjadi 48 orang dan organisasinya dikembangkan. Pada tanggal 7 November 1944 anggota bertambah lagi menjadi 60 orang. Masalah yang

---

<sup>17</sup>. Bernard Dahm, *op., cit*, hal 227.

<sup>18</sup>. Memerintah dari November 1942 sampai dengan April 1944

<sup>19</sup>. *The Reader's Digest, Illustrated History of WW I*, hal 460. Wilayah Irian Timur (Buna) yang sempat dikuasai Jepang direbut kembali pasukan Australia.

<sup>20</sup>. *Ibid*, hal 461

<sup>21</sup>. *Ibid*, hal. 462-463

dibicarakan dalam *Chuo Sangi In* menyangkut kesejahteraan rakyat, militer, ekonomi-industri dan sosial. Masalah politik tidak pernah disinggung secara jelas dan pembicaraan hanya terbatas pada hal yang wajar dan sopan saja.

Berdasarkan *Osamu Seirei* No. 44 tanggal 3 Oktober 1943, didirikanlah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA).<sup>22</sup> Kekuatan militer profesional ini berkembang pesat pada tahun 1945, di mana dapat dihimpun kekuatan infantri sebesar 37.000 personil, sehingga dapat dibentuk 66 batalyon kesatuan militer (*daidan*) PETA di Jawa dan 3 batalyon di Bali. Di Sumatera organisasinya bernama *Gyugun*. Di sana sempat dihimpun sejumlah 20.000 personil<sup>23</sup>. Personil PETA besar perannya dalam pembentukan BKR dan TKR di kemudian hari, saat Indonesia merdeka.

Pada bulan November 1943, tiga orang penting dari Jawa diundang ke Jepang untuk menerima bintang Ratna Suci. Ketiganya adalah Soekarno yang mendapat bintang kelas II, Hatta dan Ki Bagus Hadikoesoemo, bintang kelas III.<sup>24</sup> Dalam kunjungan ini ada harapan Soekarno, Jepang akan menjanjikan kemerdekaan. Tapi rupanya hal itu tidak terjadi. Pengibaran Bendera Merah Putih atau menyanyikan Indonesia Raya rupanya juga tetap tidak diizinkan.<sup>25</sup>

Pada tanggal 9 Januari 1944 atas inisiatif pihak Jepang, didirikanlah organisasi "*Jawa Hokokai*" (Persatuan kebaktian Jawa) sebagai pengganti Putera. Tujuan dibentuknya *Hokokai* semata-mata hanya untuk mendukung kepentingan Jepang. Organisasi ini dipimpin *Gunseikan* sendiri. Soekarno dan Hasjim Ashari hanya sebagai penasihat. Hatta dan KH. Mas Mansur sebagai pengelola.

Pada bulan Mei 1944 dalam sidang *Chuo Sangi In* ke-V para anggotanya mendesak dibentuknya organisasi pemuda yang bersifat nasionalis dibawah *Jawa Hokokai*. Empat bulan kemudian, hal ini disetujui pemerintah yang pada bulan September 1944 apa yang dinamakan kemudian barisan "Pelopor", didirikan. Barisan ini merupakan kesatuan kebangsaan yang bukan hanya bersifat politik, tapi juga militer. Kepemimpinan Soekarno amat melekat pada barisan Pelopor ini.

---

<sup>22</sup>. Nugroho Notokusanto, *op.,cit.* hal 73

<sup>23</sup>. Wawancara dengan Mayor Alwin Nurdin Oktober 1998.

<sup>24</sup>. Saat itu beliau pimpinan Muhammadiyah.

<sup>25</sup>. Ki Bagus Hadikoesoemo adalah pimpinan Muhammadiyah. Lihat K.Maeda. *On The Eva of Independence of Indonesia*, hal 1 (dokumen yang tidak dipublikasi)

Berkaitan dengan pengangkatan tokoh-tokohnya yang dipercaya, Soekarnolah yang menentukan dan yang memilih sendiri.<sup>26</sup>

Selama zaman Jepang juga ada organisasi lain seperti organisasi kegiatan rakyat (*Tonari Gumi*), yang dibentuk meniru model organisasi rakyat di desa-desa di Jepang. Selain itu, dibentuk pula organisasi kegiatan wanita (*Fujinkai*) dan organisasi koperasi masyarakat (*Kumiai*). Kepemudaan (*Seinendan*), pertahanan rakyat (*Kibodan*), organisasi pelajar (*Gakukotai*). Bidang olah raga, dan kebudayaan dianggap juga tidak kalah pentingnya.

Tanggal 7 September 1944, tiba-tiba datang berita bahwa Perdana Menteri Koiso Kuniaki (pengganti Tojo) menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di kelak kemudian hari<sup>27</sup>. Sejak saat itu di Indonesia diperkenankan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya. Perkembangan ini merupakan perubahan sangat berarti bagi cita-cita kemerdekaan Indonesia dibandingkan situasi tahun 1943. Rupanya pihak Jepang melihat keadaan perang yang bertambah buruk bagi mereka, sehingga perlu berbaik hati kepada bangsa Indonesia, padahal Indonesia merupakan pulau penghasil logistik yang menunjang pertahanan Jepang.<sup>28</sup>

Sesuai dengan kesepakatan saat itu di antara para tokoh ada semacam pembagian tugas. Soekarno dan Hatta secara terbuka bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Sjahrir bekerja di bawah tanah. Sjahrir dan Amir Sjarifudinlah yang banyak melakukan pembinaan generasi muda. Karena menjelang zaman Jepang Amir Sjarifudin terbukti menerima dana besar dalam U.S dollar untuk pembiayaan perlawanan fasisme, tahun 1943 dia ditangkap dan di penjara Jepang di Malang. Sejak itu pembinaan para pemuda-mahasiswa hanya dilaksanakan Sjahrir, sehingga dirinya dirasakan amat dekat dengan kelompok pemuda-mahasiswa.

Secara garis besar, gerakan pemuda pada masa Jepang dapat dibagi dua, yaitu kelompok mahasiswa dan pemuda. Di Jakarta, yang menonjol adalah mahasiswa kedokteran yang dikenal sebagai *Ika Dai Gaku*. Tokohnya antara lain, Sudjatmoko, Soedarpo, Soebadio, O. Engelen, Daan Yahya, Eri Sudewo, Suyono,

<sup>26</sup>. Benda. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*; Jakarta: Pustaka Jaya, hal 215

<sup>27</sup>. Koiso adalah pensiunan laksamana Angkatan Laut yang menggantikan Tojo sebagai Perdana Menteri.

<sup>28</sup>. K.Maeda. *op.,cit.* hal 2 (dokumen yang tidak dipublikasi)

Taswin dan lain-lain. Pusat kegiatan mereka di asrama mahasiswa kedokteran jalan Prapatan no. 10 Jakarta.<sup>29</sup>

Di antara para pemuda yang terkenal di zaman Jepang antara lain Soekarni, Adam Malik, Sidik Kertapati, A.M Hanafi, Pandu Kartawiguna dan Maruto Nitimihardjo. Sejumlah mahasiswa ada juga yang bergabung dengan kelompok pemuda, misalnya Chaerul Saleh, Johar Nur, Bahar Razak, Kusnandar dan Darwis.<sup>30</sup> Tempat berkumpul para pemuda, di gedung Menteng 31. Gedung ini juga difungsikan saat itu sebagai tempat pendidikan kader atas dukungan kantor propaganda Jepang (*Sendenbu*). Saat itu Menteng 31 lebih dikenal sebagai Asrama Angkatan Muda.<sup>31</sup> Banyak pemuka bangsa mengajar di sini seperti Soekarno dan Hatta.

Pada bulan Oktober 1944 didirikan pula sebuah pusat pendidikan kader pemuda lainnya yang dinamakan Asrama Indonesia Merdeka di jalan *Defensie Lyn van den Bosch* nomor 59 (sekarang jalan Bungur). Pendiri pusat pendidikan ini adalah Laksamana Maeda dari Angkatan Laut Jepang yang ketika itu menjabat pimpinan kantor penghubung Angkatan Laut (*Kaigun Bukanfu*). Para pemuka Nasionalis yang mengajar di sini condong beraliran sosialis seperti Soebardjo, Muhamad Yamin, Iwa Kusumasumatri dan Sjahrir. Bertindak sebagai pemimpin asrama, seorang pemuda bernama Wikana.<sup>32</sup> Asrama Indonesia merdeka dilindungi angkatan laut Jepang yang condong ke kiri.<sup>33</sup>

Hubungan kaum muda dan kaum tua pada zaman Jepang tidak terlalu baik. Kaum tua diwakili Soekarno-Hatta dan kawan-kawan, sedangkan kaum muda adalah pemuda-mahasiswa. Pertentangan mencapai klimaks setelah pernyataan janji kesetiaan "Panca Dharma" yang dimunculkan Soekarno pada sidang *Cuo Sangi In* ke VI, tanggal 12 November 1944. Panca Dharma berisi ikrar untuk sehidup semati dengan Jepang dalam menuju kemerdekaan yang dicapai dengan menghargai budi jasa Dai Nippon, serta hidup dalam lingkungan keluarga Asia

<sup>29</sup>. O.E Engelen dkk, *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara* ; Jakarta: UI Press, 1997, hal V - VI

<sup>30</sup>. Soekarni lahir 14 Juli 1916. Pendidikannya sekolah Taman Siswa. Aktif dalam organisasi Indonesia Muda, SPI dan PERPI. Karena aktif dalam Partindo di Blitar, dia terpilih mengikuti pendidikan kader di Bandung di bawah Soekarno. Dirinya pengikut Tan Malaka secara aktif.

<sup>31</sup>. Sumona Mustofa, *Sukarni* ; Jakart: Sinar Harapan, 1986, hal 47.

<sup>32</sup>. Aboebakar Loebis, *Kilas balik Revolusi* ; Jakarta : UI Press, 1992, hal 78..

<sup>33</sup>. Wawancara dengan Kolonel. Islam Salim di Jakarta 18 Agustus 2000

Timur Raya. Kaum muda yang dipengaruhi Sjahrir amat menentang kampanye Panca Dharma Soekarno ini.<sup>34</sup>

Sementara itu Sjahrir aktif mendengarkan radio gelap siaran luar negeri sehingga mengetahui perkembangan dunia, khususnya jalannya peperangan di Pasifik. Dia mengetahui soal Jepang yang mengalami banyak kekalahan. Adam Malik dan Mochtar Lubis dua sahabat yang dikategorikan sebagai anggota kelompok Sjahrir saat itu, bekerja di kantor berita Domei. Sebelum berita disensor, merekalah yang paling tahu berita aslinya. Semua berita dianalisis bersama dengan teman-teman seperjuangan kelompok Sjahrir seperti dr. Halim dan Charles Tambu, kemudian mereka menyalurkannya informasi tersebut kepada pemuda-mahasiswa. Dengan demikian pemuda-mahasiswa tahu banyak apa yang sebenarnya terjadi di dunia internasional. Sementara golongan tua hanya tahu dari sumber berita Jepang saja.<sup>35</sup>

Sebagai penguasa, Jepang berusaha mempengaruhi pemuda. Misalnya pada bulan Mei 1945, diadakan pertemuan Angkatan Muda di *Villa Isola* Bandung yang maksudnya untuk mempersatukan dan mengambil manfaat agar pemuda mudah di mobilisasi Jepang. Pertemuan ini diprakarsai dan disponsori pihak Jepang yaitu Shimizu dan Kaneko (keduanya dari *Sendenbu*). Tapi kegiatan ini tidak berhasil mempersatukan pemuda, sebaliknya setelah mengadakan ikrar bersama tanggal 15 Juni 1945 di Jakarta para pemuda Indonesia mendirikan "Gerakan Angkatan Baru Indonesia". Sebuah organisasi tidak berbau Jepang. Sesuai anggaran dasarnya, tujuan gerakan adalah untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Para pemrakarsanya, 10 orang pemuda, antara lain seperti Soekarni, Chaerul Saleh, Soediro, Wikana, Soepeno dan B.M Diah. B.M Diah kemudian terpilih sebagai ketua.<sup>36</sup>

Soekarno melihat adanya semangat para pemuda ini dan ikut mencoba mempengaruhi dengan mendirikan "Gerakan Rakyat Baru" yang bertujuan merangkul para pemuda. Sebagai langkah pertama direncanakan pertemuan besar

---

<sup>34</sup>. Lihat pamflet Panca Dharma.

<sup>35</sup>. Arsip Nasional, *Di Antara Hempasan dan Benturan, Kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950*; Jakarta: ANRI, 1981, hal 5-8

<sup>36</sup>. B.M. Diah, *Angkatan baru*; Jakarta: Masa Merdeka, 1983, hal 86-89.



organisasi pemuda pada pertengahan Agustus 1945. Namun usaha ini terlambat untuk diwujudkan. Para pemuda telah kecewa dan meninggalkan golongan tua.<sup>37</sup>

Pada tanggal 21 Februari 1945, pada sidang *Chuo Sangi In* ke-VII, dikeluarkan instruksi “Gerakan Hidup Baru” 30 pasal gerakan ini dimaksudkan antara lain untuk kesadaran kemerdekaan, yang sejak janji Koiso September 1944 terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Soekarno amat berperan dan sangat memungkinkan rakyat selalu mendengarkan pidato-pidatonya. Dalam waktu beberapa minggu saja menjelang munculnya peristiwa-peristiwa yang lebih penting, “Gerakan Hidup Baru” telah menjadi alat propaganda yang paling luas dipublikasikan di tangan *Jawa Hokokai*.<sup>38</sup>

Tanggal 30 April 1945 May.Jen. Otoshi Nishimura selaku *Somubucho* mewakili tentara ke 16, berangkat ke Singapura untuk ikut dalam perundingan wilayah. Dalam rapat di Singapura ini, dia menyatakan tidak ada jalan lain untuk memperoleh kepercayaan dari rakyat Indonesia kecuali menepati janji kemerdekaan.<sup>39</sup>

Tanggal 27 April 1945 *Saiko Sikikan* Let.Jen ,Harada Kumakichi digantikan oleh Let.Jen. Nagano Yuichiro. Dimasa pemerintahan Nagano, pada tanggal 29 April 1945 berdirilah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat, BPUPKI (*Dokuritsu Junbi Chosakai*). Sidangnya berlangsung dua kali, 29 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 Juli – 17 Juli 1945. Tempat bersidang pada gedung *Chuo Sangi-in* (sekarang gedung Pancasila) di Pejambon Jakarta.<sup>40</sup>

Tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang pertama BPUPKI Soekarno berpidato tentang Pancasila yaitu *Weltanchauung* yang kelak menjadi dasar negara yang dicita-citakannya. Tanggal 22 Juni 1945 ditetapkanlah rancangan Undang-undang Dasar Republik dengan batas wilayah bekas Hindia Belanda. Melanjutkan BPUPKI, tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI (*Dokuritsu Junbi Iinkai*). Anggota P.P.K.I yang berjumlah 20 orang, kebanyakan diambil dari BPUPKI juga. Sebagai ketua diangkat Soekarno dan sebagai wakil ketua Hatta.

---

<sup>37</sup>. *Ibid*

<sup>38</sup>. H.J. Benda. *Op.,cit.* hal 220.

<sup>39</sup>. Bernhard Dahm, *op.,cit.* hal 264

<sup>40</sup>. Set.Neg RI, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*; Jakarta: 1992, hal 1

Malam harinya dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada Dai Nippon setulus-tulusnya, Soekarno berpidato jagungnya yang pertama. Dikatakannya: “Sebelum jagung berbuah Indonesia harus merdeka”. Ditambahkannya juga bahwa: “Dai Nippon sudah mulai mengakui kemerdekaan kita”. Berarti secara tersirat tanda-tanda akan berakhirnya masa penjajahan Jepang.<sup>41</sup> Menurut Soekarno: “Tidak ada alasan melancarkan perlawanan terhadap Jepang karena rintangan utama yang dapat menggagalkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sekarang justru datangnya dari pihak sekutu”. Selanjutnya Soekarno berjanji sehidup semati dengan Jepang guna mencapai tujuan kemenangan akhir Perang Asia Timur Raya.

Pada tanggal 3 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan dr.Radjiman Wedjodiningrat mendapat undangan dari Marsekal Hisaichi Terauchi untuk datang ke Dalat.<sup>42</sup> Tanggal 10 Agustus 1945 dengan menggunakan pesawat pembom rombongan berangkat. Rombongan terdiri dari Soekarno, Hatta, Radjiman dan dr.Soeharto. Mereka terbang melalui Singapura dan Saigon. Rombongan ini diantar secara resmi oleh Letnan Kolonel Nomura dari *Gunsekanbu*. Tujuan ke Dalat, untuk bertemu Terauchi, dalam rangka mempercepat pelaksanaan kemerdekaan Indonesia yang dipersiapkan dengan bantuan Jepang.

Sebelum ketiganya berangkat ke Dalat, Sjahrir menyempatkan diri untuk bertemu Hatta. Hatta dan Sjahrir berbicara panjang lebar soal masa depan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir berpendapat riwayat penjajahan Jepang sudah akan berakhir. Dianjurkannya kepada Hatta agar menarik garis tegas antara Jepang dan Indonesia. Pendirian Sjahrir, perjuangan revolusioner dan persatuan kebangsaan yang perlu diusahakan agar tidak ada pemisahan antara barisan kebangsaan yang bekerja di bawah tanah maupun mereka yang bekerja sama dengan Jepang. Hatta setuju pendirian Sjahrir ini. Lalu Sjahrir menghubungi kelompoknya di seluruh Jawa. Diinformasikannya saat yang ditunggu akan tiba dalam waktu tidak lama lagi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>. *Ibid*, hal 276. Tulisan yang diambil dari Bernard Dahm ini agak terbantahkan karena pada tanggal 14 Agustus 1945 saat baru kembali dari Dalat di lapangan terbang Kemayoran, Soekarno mengaku itu diucapkannya dalam pidato radio. Lihat juga “Sebelum Jagung Berbunga Indonesia Pasti Merdeka”, *Asia Raya*; 14 Agustus 1945 pagina 1,

<sup>42</sup>. Terauchi, Panglima Tentara Jepang di selatan. Dalat sebuah kota kecil 200 km utara Saigon..

<sup>43</sup>. Sutan Sjahrir, *Renungan dan perjuangan* ; Jakarta: Dian Rakyat, 1990, hal 270.

Meskipun telah terselenggara konferensi Potsdam dan ada tanda-tanda Jepang bisa menerima keputusan internasional yang menyatakan antara lain penyerahan mereka kepada sekutu tanpa syarat, anehnya saat bertemu Soekarno-Hatta Terauchi tetap menerima rombongan sesuai rencana.<sup>44</sup> Bahkan oleh Terauchi disampaikan berita pasti bahwa Jepang mengizinkan Indonesia merdeka.<sup>45</sup> Mengenai pelaksanaannya tergantung kepada Soekarno dan Hatta yang bertindak selaku ketua dan wakil ketua PPKI.<sup>46</sup>

Ketika rombongan kembali ke Saigon dari Dalat, tanggal 12 Agustus 1945, Let.Kol Nomura menyampaikan berita kepada Soekarno bahwa Rusia telah menyatakan perang dengan Jepang.<sup>47</sup> Esok harinya 13 Agustus 1945, jam 8.00 pagi dengan pesawat mereka meninggalkan Saigon menuju Singapura, dengan mampir sebentar di Taiping (sekarang kota di Malaysia). Di Singapura terjadi pertemuan rombongan dari Dalat ini dengan anggota rombongan PPKI Sumatera, yaitu Mr, Teuku Mohamad Hasan, Mr, Abas dan dr. Amir.<sup>48</sup>

Tanggal 14 Agustus rombongan tiba di lapangan terbang Kemayoran, Jakarta. Ketika turun dari pesawat, Soekarno disambut *Gunseikan* Jenderal Yamamoto. Ternyata di Kemayoran ada rombongan penyambutan. Dalam kesempatan ini Soekarno mengucapkan pidato jagungnya yang kedua. Dia berkata: "Berhubung dengan itu maka kini kami sekalian anggota dari Panitia Persiapan akan bekerja keras dan cepat, agar supaya kemerdekaan Indonesia yang menjadi idam-idaman kita itu lebih lekas pula tercapai. Tempo hari dalam pidato radio saya mengatakan, bahwa sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, tetapi kini saya menegaskan bahwa sebelum jagung berbunga, Indonesia telah merdeka". Ucapan disambut hadirin dengan tepuk tangan dan bersorak.<sup>49</sup> Berita koran Tjahaja keesokan hari menyebutkan: "Soekarno berjanji berjuang melaksanakan kewajibannya terhadap *Nanpo Gun Saikoo Sikikan*".<sup>50</sup>

Saat Soekarno-Hatta sudah kembali ke Jakarta ini, Sjahrir sudah menunggu dan ingin segera mengusahakan kemerdekaan Indonesia dengan caranya. Dasar

<sup>44</sup>. Konferensi Potsdam berlangsung dari tanggal 16 Juli 1945 sampai dengan 2 Agustus 1945.

<sup>45</sup>. Deklarasi Potsdam bersangkutan dengan syarat yang ditentukan Sekutu tentang penyerahan Jepang.

<sup>46</sup>. Mohamad Hatta. *Memoir*; Jakarta: Tinta Mas, 1982, hal 437.

<sup>47</sup>. Rusia menyatakan perang kepada Jepang tanggal 8 Agustus 1945. Sebagaimana diketahui, sampai awal Agustus 1945, Rusia memiliki ikatan tidak saling memerangi dengan Jepang.

<sup>48</sup>. Mohammad Hatta. *op.,cit*, hal 438.

<sup>49</sup>. S.K Asia Raya tanggal 14 Agustus 1945.

<sup>50</sup>. S.K Tjahaja 15 Agustus 1945

pemikiran Sjahrir sejak semula adalah melaksanakan Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta tanpa perlu melibatkan PPKI. Badan ini dianggap Sjahrir semata-mata hanya alat Jepang. Oleh karena itu, sore tanggal 14 Agustus 1945 Sjahrir mendatangi Hatta, dengan maksud melanjutkan pembicaraan sebelum rombongan berangkat ke Dalat. Rencana Sjahrir selanjutnya, adalah pengumpulan massa untuk demonstrasi, kalau perlu perebutan kekuasaan secara *Revolusioner*. Pemerintahan akan diambil alih secara mulus namun administrasi pemerintahan tidak boleh terganggu. Pegawai Jepang orang Indonesia harus diajak berpihak dan mampu meneruskan menjalankan pemerintahan.<sup>51</sup>

Ternyata Hatta tidak sependapat lagi dengan Sjahrir dan ingin lebih dahulu membicarakan semuanya dengan Soekarno. Maka Hatta dan Sjahrir berangkat menuju rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur no.56. Ketika ketiganya bertemu, dibicarakanlah buah pemikiran Sjahrir itu. Ternyata Soekarno juga tidak setuju pelaksanaan Proklamasi seperti pemikiran Sjahrir, apalagi dengan demonstrasi. Dirinya menolak hal tersebut karena rencana ini akan menimbulkan bahaya di mana Jepang bisa bertindak tegas. Di samping itu Soekarno juga belum pasti kalau Jepang sudah minta damai pada sekutu seperti informasi yang disampaikan Sjahrir. Namun Soekarno berjanji esok hari akan mencari tahu mengenai soal hal tersebut ke pihak Jepang.

Tanggal 15 Agustus 1945 pagi, Soekarno-Hatta, mencari informasi ke kantor pemerintahan Jepang (*Gunsekanbu*). Karena tidak membawa hasil, akhirnya Soekarno-Hatta yang saat itu ditemani Ahmad Soebardjo menemui Laksamana Maeda di kantornya. Di sana ada informasi sedikit, bahwa di Jepang memang ada perubahan situasi yang mendadak. Tapi Maeda menyangkal menerima berita resmi dari pemerintahnya. Artinya tanpa keterangan pasti dan rinci kalau Jepang memang sudah benar-benar menyerah kepada pihak sekutu. Maeda berjanji kepada ketiganya akan memberi tahu kalau ada informasi baru.<sup>52</sup>

Ketika Soekarno-Hatta kembali kerumahnya, Sjahrir tampak sudah menunggu untuk menemuinya kembali guna menyambung pembicaraan kemarin malam. Rupanya Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menolak pelaksanaan Proklamasi seperti keinginan Sjahrir. Kali ini pertimbangannya, karena semua rencana berkaitan persiapan Proklamasi, harus lebih dahulu dibicarakan dalam

<sup>51</sup>. Sutan Sjahrir, *op.,cit*, hal 270.

<sup>52</sup>. K.Maeda. *op.,cit*. Hal 8

sidang PPKI sebagai representasi daerah. Dan karena semua anggota PPKI sudah berada di Jakarta, direncanakan sidang secepatnya untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945.<sup>53</sup> Reaksi Sjahrir adalah kekecewaan amat sangat dan sejak itu menolak terlibat lebih jauh pada usaha kemerdekaan bersama Soekarno-Hatta.

Dilain pihak, para pemuda-mahasiswa yang telah menggalang persatuan sendiri yang terdiri dari beberapa aliran politik, menganggap kemerdekaan tidak mungkin ditunda lagi. Dalam rapat mereka tanggal 15 Agustus 1945 malam dibelakang laboratorium bakteriologi Pegangsaan Jakarta yang sering dinamakan sebagai "Kebon Jarak", diputuskan untuk memaksa Soekarno agar mau memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Beberapa orang sebagai utusan mendatangi Soekarno.<sup>54</sup> Utusan mereka akhirnya bersitegang dengan Soekarno yang berakhir dengan jawaban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, "Soekarno tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan atas desakan pemuda". Akhirnya para pemuda memilih jalan lain. Dengan dukungan sejumlah anggota militer dari Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), pada subuh tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno-Hatta yang dibawa ke Rengasdengklok, sebuah kota kecil 85 km sebelah timur Jakarta.<sup>55</sup>

Sjahrir mendengar semua itu dari kadernya, Soebadio Sastrosatomo. Dia lebih kecewa lagi dan menyayangkan perbuatan para pemuda yang dianggapnya bukan tindakan tepat untuk mewujudkan Revolusi kalau disertai culik menculik dan untuk berpecah belah. Sejak itu Sjahrir benar-benar menolak terlibat lebih jauh lagi. Dianggapnya sudah muncul pihak ketiga yang ikut bermain.<sup>56</sup>

Pagi hari sekitar jam 8.00 pagi tanggal 16 Agustus 1945 rombongan penculikan Soekarno-Hatta tiba di markas *Chudan* (setingkat kompi) PETA Rengasdengklok.<sup>57</sup> Pimpinan penculikan, seorang perwira PETA, *Shodancho* Singgih.<sup>58</sup> Tugasnya saat itu adalah mempertemukan Soekarno-Hatta dengan pimpinan kompi PETA Rengasdengklok, *Chudancho* Soebeno. Disamping

<sup>53</sup>. Mohamad Hatta, *op.,cit.* Hal 443

<sup>54</sup>. Lihat A.M Hanafi, *Menteng 31. Membangun jembatan dua angkatan* ; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal 20-23. O.E Engelen dkk, *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara* ; Jakarta : UI Press, 1997, hal 61-62.

<sup>55</sup>. Nugroho Notokusanto, *op.,cit.* Hal 132-133

<sup>56</sup>. Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi* ; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal 20

<sup>57</sup>. Markas PETA di Rengasdengklok setingkat kompi yang disebut sebagai Cudan.

<sup>58</sup>. Perwira PETA dari Daidan I Jakarta yang memimpin penculikan ini menuju Rengasdengklok

Singgih, ikut berperan pula tokoh-tokoh pemuda Soekarni dan Joesoef Koento, serta dokter PETA, *Esei Chudancho* dr Soetjipto<sup>59</sup>.

Mestinya suasana penculikan ini terkesan kalau orang-orang yang di culik adalah tawanan. Anehnya ketika rombongan tiba, mereka disambut para prajurit dan rakyat yang mengelu-elukan Soekarno-Hatta. Para prajurit PETA berteriak: "Hidup Bung Karno, Hidup Bung Hata. Indonesia sudah merdeka. Jepang sudah modar (mati)", dan sebagainya. Karena alasan keamanan rombongan selanjutnya dibawa kerumah seorang warga China, bernama Jiau Ki Siong. Setelah tugasnya selesai Singgih dan Joesoef Koento kembali ke Jakarta.<sup>60</sup>

Rupanya saat itu di wilayah Rengasdengklok sudah terjadi perebutan kekuasaan oleh rakyat Indonesia dan diadakan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Ini terbukti dengan sudah ditawannya pejabat Jepang Mitsui bersama stafnya dan sejumlah Jepang sipil lainnya sejak jam 9.00 pagi. Dan bendera merah putih sudah berkibar di sekitar kecamatan. Rakyat pun sudah berkumpul, khususnya di muka markas tentara PETA Gerakan ini tentu saja punya hubungan dengan tokoh PETA di wilayah itu.<sup>61</sup>

Sebagai pimpinan pemerintahan setempat, diangkat Camat Sujono Hadipranoto<sup>62</sup>. Untuk menyambut kemerdekaan tingkat lokal ini, *Seinendan* dan *Kibodan* serta rakyat berkumpul di lapangan kecamatan dan melakukan upacara bendera. Hadipranoto bertindak selaku inpektur. Mula-mula mereka melakukan penurunan bendera Jepang (*Hinomaru*) dan menaikan sang Merah Putih, dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya. Peristiwanya cukup mengharukan di mana banyak yang mengeluarkan air mata.<sup>63</sup>

Secara kebetulan Soetardjo Kartohadikoesoemo yang pada zaman Jepang diangkat sebagai *Syucokan* (di zaman Belanda *resident*) sedang melakukan pemeriksaan hasil panen di daerah Rengasdengklok. Dia terkejut atas kejadian-kejadian ini dan akhirnya sempat ditangkap juga oleh para perebut kekuasaan

---

<sup>59</sup>. Joesoef Koento adalah seorang pemuda bekas anggota Heiho. Kakinya pincang saat kecelakaan terjun payung. Kemudian dirinya menikah dengan Murti Koento adik dari Soeroto Koento.

<sup>60</sup>. Lihat Oemar Bahsan, *PETA dan Peristiwa RengasDengklok*; Bandung: NV Melati, 1955, hal 42.

<sup>61</sup>. Wawancara dengan Kapten Soeharjana mantan komandan pleton Cudan tahun 1995. Lihat liputan 17 Agustus 1995 oleh SCTV,

<sup>62</sup>. Pernah sebagai mahasiswa sekolah tinggi hukum bersama Soebeno dizaman Belanda.

<sup>63</sup>. Oemar Bahsan, *op.,cit*, hal 45.

tersebut. Mula-mula dibawa kemarkas PETA lalu terakhir dikumpulkan satu rumah dengan Soekarno-Hatta.<sup>64</sup>

Pada jam 17.00 tiba di Rengasdengklok Mr A. Soebardjo diantar Joesoef Koento dan *Shodancho* Sulaiman. Maksudnya mau menjemput Soekarno-Hatta dan memberi tahu bahwa Jepang memang sudah benar-benar menyerah tanpa syarat pada sekutu. Para anggota PETA meminta penjelasan resmi kepada Soebardjo soal ini. Pada jam 18.00 perundingan dimulai antara Soekarno-Hatta-Soebardjo dan pihak PETA serta para penculik (khususnya Soekarni). Hasil perundingan, Soekarno-Hatta-Soebardjo setuju Proklamasi segera diadakan setelah kembali ke Jakarta. Jam 19.30 rombongan kembali ke Jakarta.<sup>65</sup>

Dalam memoirnya, Bung Hatta bercerita:

“Waktu sore datang Mr Soebardjo sebagai utusan Gunsekanbu menjemput kami. Soekarni tidak menentang. Demikianlah malam itu kami pulang ke Jakarta disertai pula oleh Soetardjo dan Soekarni sendiri. Satu-satunya soal *yuridis* yang timbul adalah pertanyaan pasukan PETA disana, apa yang akan diperbuat dengan pejabat Jepang yang ditawan ? Kami menjawab, lepaskan saja ia”.<sup>66</sup>

Selanjutnya atas kesediaan Laksamana Maeda untuk meminjamkan rumahnya di jalan *Myako Dori* no.1 (kini Imam Bonjol), diselenggarakanlah pertemuan para pemimpin bangsa Indonesia khususnya anggota PPKI.

Lewat tengah malam Soekarno-Hatta mengadakan perundingan dengan *Somubucho* May.Jen Nishimura, maksudnya membicarakan soal janji Terauchi di Dalat. Ternyata Jepang telah bersikap lain yaitu sebagai alat sekutu. Pola Dalat untuk menyelenggarakan Kemerdekaan Indonesia dianggap tidak berlaku lagi. Karena menganggap kemerdekaan harus terus diperjuangkan bangsa Indonesia sendiri, Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Nampaknya kini tekad mereka sudah bulat, Indonesia Merdeka sekarang juga.<sup>67</sup>

Pertemuan yang dihadiri oleh anggota PPKI, wakil pemuda dan wakil-wakil beberapa golongan dalam masyarakat dilanjutkan di rumah Maeda. Dalam pembuatan naskah, Hatta membacakan, Soekarno menulis. Di sana-sini konsep

<sup>64</sup>. Bung Hatta "*Legenda dan Realitet*". Mimbar Indonesia tanggal 17 Agustus '51 (no 32/33),

<sup>65</sup>. Omar Bahsan, *op.,cit*, hal 52-53

<sup>66</sup>. *Ibid.*

<sup>67</sup>. Lihat Mohamad Hatta. *Op.,cit*, hal 451-453

dicoret dan diperbaiki. Konsep tulisan Soekarno ini lalu diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan kembali dimuka hadirin. Selesai membacakan Proklamasi, hadirin bertepuk tangan gembira. Dalam sidang ini atas anjuran golongan pemuda, naskah diterima dengan suara bulat dimana disetujui naskah Proklamasi Indonesia Merdeka hanya ditanda tangani oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.<sup>68</sup>

Pada perundingan dirumah Maeda direncanakan penyelenggaraan upacara Proklamasi di lapangan Ikada. Tapi ternyata dibatalkan. Pada jam 10.30 pagi (waktu Jawa), hari Juamat tanggal 17 Agustus 1945, upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan dimuka rumah Soekarno dijalan Pegangsaan Timur no 56.

Acara proklamasi adalah, pembacaan Proklamasi oleh Soekarno disambung pidato singkat Soewirjo dan dr.Muwardi dilanjutkan upacara pengerekan bendera Merah Putih. Kepada *Shodancho* Latif Hendraningrat diminta sebagai petugas pengerek bendera. Saat itu dirinya masih dengan seragam lengkap tentara sukarela PETA. Latif segera maju kedepan didampingi Soehoed seorang pemuda anggota pelopor yang saat itu bercelana pendek.<sup>69</sup> Setelah beberapa saat dikerek, spontan hadirin menyanyikan Indonesia Raya.

Selesai Proklamasi, dr.Muwardi dan Soediro memilih 6 anggota pelopor istimewa dipimpin Soemartojo untuk tugas pengawalan presiden. Sampai selesai proklamasi rupanya pihak Jepang tidak tahu menahu. Mereka baru datang setelah para hadirin pulang ke rumahnya masing-masing. Tiga orang perwira Jepang yang datang ini mengaku diutus *Gunseikan* untuk melarang Proklamasi. Soekarno yang menghadapinya dengan tenang, menjawab bahwa Proklamasi sudah dilaksanakan.<sup>70</sup>

Keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, di bekas gedung Dewan Hindia di Pejambon (kini gedung B.P 7) diselenggarakan dua acara pokok yaitu, pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden-wakil Presiden. Secara aklamasi Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Penetapan Undang Undang Dasar (UUD 45) atas rancangan yang dibuat oleh BPUPKI, berjalan cukup lancar meskipun ada perubahan disana-sini. Pada

<sup>68</sup>. *Ibid*, hal 455-456. Wakil pemuda yang hadir adalah Chairul Saleh dan Soekarni

<sup>69</sup>. Lihat foto Proklamasi. Bendera pusaka ini baru dijahit Fatmawati beberapa hari sebelumnya

<sup>70</sup>. Sudiro, *Pengalaman saya Sekitar 17 Agustus 1945* ; Jakarta: Yayasan Idayu, 1972, hal 25.



pembukaan, 7 kata dalam “Piagam Jakarta”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” atas usaha Hatta dihapuskan.<sup>71</sup> Pada hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 diadakan pembentukan panitia kecil untuk menetapkan kementerian-kementerian. Anggota panitia kecil yang terdiri dari Soebardjo, Soetardjo dan Kasman, berhasil merampungkan tugasnya dan segera mereka menjelaskan kepada sidang tentang jumlah dan jenis Kementerian. Sidang PPKI kemudian juga mendengarkan hasil panitia yang telah dibentuk sehari sebelumnya yang membahas urusan rakyat, pemerintahan daerah, kepolisian dan pertahanan Negara. Panitia ini diketuai Oto Iskandar Dinata.<sup>72</sup>

Pada hari yang sama, untuk lebih melengkapi susunan anggota PPKI, telah ditambah sembilan nama termasuk dari golongan pemuda. Ini menimbulkan masalah karena para pemuda yang dipelopori Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni yang masih berusaha melobi golongan tua untuk menetapkan Republik Indonesia tanpa unsur Jepang. Mereka tidak berhasil, oleh karena itu mereka menolak masuk menjadi anggota PPKI, dan segera meninggalkan sidang.<sup>73</sup>

Pada tanggal 22 Agustus 1945, diberitakan bahwa PPKI dengan semangat baru namanya diganti menjadi Panitia Kemerdekaan.<sup>74</sup>

Sebagaimana tertulis dalam UUD 1945, KNIP ditetapkan sebagai lembaga pembantu presiden. Lembaga ini terbentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, tapi anggotanya baru dapat dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945, di gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Terpilih sebagai Ketua Mr. Kasman Singodimedjo, wakil ketua I, Soetardjo Kartohadikoesoemo, wakil ketua II J. Latuharhary, wakil ketua III Adam Malik. Dua hari kemudian tanggal 31 Agustus 1945, rakyat berkumpul di Ikada untuk menyelenggarakan rapat mendukung berdirinya KNIP. Kemudian mereka mengadakan pawai keliling kota Jakarta.<sup>75</sup> Selain KNIP juga ditetapkan soal Partai Nasional Indonesia (partai negara) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).<sup>76</sup>

Kabinet pertama Republik Indonesia baru dibentuk tanggal 4 September 1945 bertempat di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Sejumlah nama

<sup>71</sup> Mohamad Hatta, *op.,cit.* Hal 458-459.

<sup>72</sup> S.K Tjahaja 21 Agustus 1945.

<sup>73</sup> Mohamad Hatta, *op.,cit.* Hal 461. Osman Raliby, *Documenta Historica*, hal 15

<sup>74</sup> Osman Raliby, *op.,cit.*, hal 15

<sup>75</sup> Berita Film Indonesia No.2, tahun 1945

<sup>76</sup> Yang dimaksud PNI adalah PNI Staats partij (partai Negara). Lembaga ini akhirnya ditunda. BKR berada dibawah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP)

telah diangkat sebagai menteri. Namun terkesan kalau urutan nama-nama tersebut tidak lebih adalah teman dekat Soekarno-Hatta dan merupakan orang-orang yang telah bekerja sama dengan Jepang. Sebagai Menteri Dalam Negeri R.A.A.Wiranata Kusuma. Menteri Luar Negeri Mr. A. Soebardjo. Menteri Keuangan Mr. A.A.Maramis. Menteri Kehakiman. Prof. Dr.Supomo. Menteri Kemakmuran Ir.Surachman Tjokroadisurjo. Kesehatan dr.Buntaran Martoatmodjo. Menteri Pengajaran Ki Hadjar Dewantoro. Menteri Penerangan Mr.Amir Sjarifuddin. Menteri Sosial Mr.Iwa Kusuma Sumantri. Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Tjokrosujoso. Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso. Menteri Negara Wachid Hasjim. Menteri Negara dr. M.Amir. Menteri Negara Mr. R. M. Sartono. Menteri Negara R. Oto Iskandar Dinata. Kabinet pertama ini dengan segera memfungsikan unit-unit pelaksana pemerintahan. Tapi muncul ketidak mampuan mereka lebih jauh karena Jepang telah menjadi alat sekutu dan memberlakukan keadaan “*Status Quo*”. Selain itu Jepang juga memberlakukan berbagai peraturan yang amat ketat.<sup>77</sup>

Para pemuda-mahasiswa segera bertindak, mendesak pemerintah RI untuk melaksanakan pengambil alihan alat pemerintahan dan kenegaraan dari Jepang, seperti kantor pemerintah, kereta api, trem, listrik, air minum dan gas. Karena tidak ada reaksi pemerintah secara memuaskan, pemuda-mahasiswa melaksanakannya sendiri pengambil alihan tersebut. Hal keragu-raguan ini memang terggambarkan dalam kebijakan pemerintah sendiri. Dalam pidatonya Soekarno dihadapan para pegawai negeri tanggal 2 September 1945 dikatakan: “Dalam hal pemindahan kekuasaan, kita menghadapi hal yang sulit karena kita tidaklah berhadapan lagi dengan Dai Nippon, akan tetapi Status Quo Internasional”.<sup>78</sup>

Tanggal 19 September 1945, atas prakarsa pemuda-mahasiswa diselenggarakan Rapat Raksasa Ikada.<sup>79</sup> Rencananya acara ini diselenggarakan pada tanggal 17 September 1945 untuk memperingati satu bulan Proklamasi. Peristiwa ini penting karena merupakan manifestasi nyata rakyat Indonesia yang sadar bahwa Indonesia telah Merdeka sehingga pemerintahan Republik Indonesia

<sup>77</sup>. Jenderal Nishimura dalam Wawancara pada film: *Ons Indie voor de Indonesiers*, tahun 1978.

<sup>78</sup>. S.K Tjahaja 4 September 1945. *Pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan kepala-kepala daerah*.

<sup>79</sup>. Film. *Berita Film Indonesia no.3*, September 1945.

yang berdaulat harus didukung. Padahal pihak Jepang yang berusaha mencegah terjadinya keributan yang bisa memunculkan pemberontakan, mengerahkan pasukan tentara yang dilengkapi kendaraan lapis baja. Diperkirakan rakyat yang berkumpul di lapangan Ikada saat itu sekitar 200.000 orang yang berasal dari Jakarta dan daerah sekitar. Awalnya pemerintah RI tidak setuju pada penyelenggaraan acara di atas. Tetapi karena didesak terus, Presiden dan para anggota kabinet yang sedang berapat di gedung Jawa Hokokai, setelah jam 16.00 sore, akhirnya mau datang juga. Dalam kesempatan ini Soekarno berpidato: "Percayakah rakyat pada pemerintah R.I ? Kalau-kalau saudara-saudara memang percaya kepada pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan di robek-robek, kami tetap akan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin !".<sup>80</sup> Akhirnya, rakyat bersedia mau bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Nasional Indonesia dengan nama TKR singkatan dari Tentara Keamanan Rakyat dibentuk. Tentu saja hal ini punya kaitan dengan BKR, di mana sering dikatakan BKR ditransformasikan menjadi TKR. Dalam maklumat pemerintah no. 2 - X, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, dikatakan: "Tentara keamanan rakyat dibentuk. Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat".<sup>81</sup>

Masalah Tentara Nasional Indonesia yang berawal pada organisasi TKR ini baru lebih sempurna dalam pengorganisasiannya pada pertengahan tahun 1947.<sup>82</sup> Ketika berdiri badan militer pemerintah ini belum memiliki Panglima. Tapi telah diangkat sebagai Kepala Staf eks Mayor KNIL (purnawirawan), Oerip Soemohardjo. Selanjutnya Kasman selaku ketua KNIP mengumumkan pada tanggal 9 Oktober 1945: "Pemuda-pemuda yang tegap sentausa badan dan jiwanya, bekas prajurit PETA, prajurit Hindia Belanda almarhum, Heiho, Kaigun Heiho, Seinendan, Hisbullah, Pelopor d.l.l, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer supaya selekas-lekasnya mendaftarkan nama pada

---

<sup>80</sup>. Osman Raliby. *Op.,cit.* Hal 35

<sup>81</sup>. S.K Soera Merdeka 6 Oktober 1945. *Makloemat pemerintah Repoeblik Indonesia no. 2 X*

<sup>82</sup>. Dengan terjadinya pembentukan organisasi TNI. Mei 1947.

kantor-kantor BKR di Ibu kota kabupaten masing-masing atau pada badan-badan lainnya yang ditunjuk oleh Residen (kepala daerah) atau wakilnya.<sup>83</sup>

Pembentukan TKR ini bukan tidak menimbulkan masalah, mengingat sebelum tanggal 5 Oktober 1945 maupun dalam waktu yang bersamaan telah terbentuk kesatuan badan-badan perjuangan bersenjata yang berafiliasi dengan badan-badan politik. Misalnya API (Angkatan Pemuda Indonesia) telah terbentuk pada tanggal 1 September 1945. Demikian pula Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Surabaya tanggal 23 September 1945.<sup>84</sup> Kemudian badan-badan perjuangan ini berfusi yang memunculkan kelaskaran, seperti Laskar Rakyat, Hisbulah, KRIS dan Pesindo. Akibatnya memunculkan perbedaan mendasar pada tujuan perlawanan militer terhadap musuh, serta bibit pertentangan dalam tubuh tentara yang kurang menguntungkan. Padahal untuk menghadapi Inggris dan Belanda, dibutuhkan persatuan dan kerja sama dalam wadah militer Indonesia.

Tanggal 6 Oktober 1945, dengan maklumat pemerintah, Suprijadi ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat, namun berhubung sampai waktu cukup lama Suprijadi tidak pernah muncul, maka diterbitkanlah maklumat tanggal 20 Oktober 1945 diangkat menteri adinterim Keamanan Rakyat, Mohamad Soeljordikoesoemo, pemimpin tertinggi Suprijadi dan Chef Staf Umum, Major Oerip Soemohardjo.

## **2.2 Kebijakan Sekutu termasuk Belanda, Sesudah Perang Dunia II di Indonesia**

Berkecamuknya perang Eropah yang dimulai pada tanggal 1 September 1939, merupakan bagian dari perang dunia kedua. Perang ini yang dimulai dengan serangan Nazi Jerman yang dipimpin Adolf Hitler ke Polandia ini, telah menguras sebagian besar kemakmuran negara-negara Eropah yang sedang maju-majunya.

Inggris sebagai negara yang mampu bertahan, berada diujung barat dan hanya dipisahkan oleh selat bernama *English Channel* dengan daratan Eropah. Kemampuan bertahan Inggris bersama koloninya dan sejumlah negara Eropah lainnya, pada akhirnya berhasil menyelamatkan sebagian Eropah dari serbuan Nazi Jerman sampai tahun 1944. Bahkan mengalahkan Jerman yang berhasil ditaklukkan pada tanggal 7 Mei 1945.

---

<sup>83</sup>. S.K Soera Rakajat 10 Oktober 1945 . *Mobilisasi Tentara Keamanan Rakyat*.

<sup>84</sup>. Benedict R.Og Adderson, *Java in a Time of Revolution* ; Ithaka-London: Cornell Univercity Press, hal 129.

Sejumlah imperium kolonial Eropah termasuk Belanda di Asia mengalami peperangan dengan Jepang. Perang Pasifik adalah bagian dari perang dunia ke II yang dilakukan Jepang di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Jepang merupakan bagian kekuatan Axis bersama Jerman dan Itali. Kekuatan sekutu yang dilawannya adalah Amerika di Manila, Perancis di Indochina, Inggris di Malaya dan Belanda di Indonesia. Setelah melakukan perang laut Jawa pada tanggal 27 dan 28 Februari 1942, akhirnya Jepang sampai di pulau Jawa. Hanya dalam waktu 8 hari setelah pendaratan di Merak, Eretan dan Kranggan, pada tanggal 8 dan 9 Maret 1942 pemerintahan Hindia Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat bertempat di lapangan terbang Kalijati Jawa Barat.<sup>85</sup> Sejak itu dapat dianggap berakhir kolonialisme Belanda yang telah lama berkuasa itu.

Setelah Jerman berhasil menduduki negeri Belanda, Belgia, Luxemburg dan Perancis pada awal Mei 1940, Perdana Menteri Neville Chamberlain mengundurkan diri dan Winston Spencer Churchill ditunjuk sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru.<sup>86</sup> Nyaris kehancuran Inggris tersebut, amat terbantu dengan terlibatnya Amerika Serikat dalam perang dunia ini. Amerika yang sebenarnya awalnya menganut faham *isolasionis*, akhirnya terlibat juga.

Peristiwa yang menggambarkan awal kerja sama dua kekuatan besar Industri dunia yaitu Inggris dan Amerika untuk melawan Hitler ini adalah *Atlantic Charter*. Kerjasama ini ditanda tangani Perdana menteri Churchill dan Presiden Roosevelt di teluk Placentia Argentina, pada tanggal 9 – 12 Agustus 1941. Maksud *Atlantic Charter* adalah menetapkan prinsip-prinsip dalam kebijakan negara masing-masing (Inggris dan Amerika) dengan dasar harapan masa depan dunia yang lebih baik. Hasil pertemuan ini yaitu berhasilnya ditetapkan Piagam Atlantik atau *Atlantic Charter* tepatnya tanggal 12 Agustus 1941 sebanyak 8 pasal. Mungkin yang terpenting adalah pasal ketiga di mana disebutkan, bahwa “setiap negara berhak menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri di mana mereka hidup dan berkehendak guna memiliki hak kedaulatannya dalam pemerintahan sendiri yang pernah diambil secara paksa oleh pihak lain”.<sup>87</sup> Setelah berlangsungnya

---

<sup>85</sup>. Banyak tulisan yang bersumber pada pihak Belanda, menyatakan yang menyerah adalah pihak militer. Lihat P.M.H. Groen. *Marsroutes en dwaalsporen*; The Hague: Historical Section of the Royal Netherlands Army 1991

<sup>86</sup>. Reader Digest. *Illustrated History of WW II*. hal 33

<sup>87</sup>. *Atlantic Charter* dari dokumen asli. 3-14 Agustus, tahun 1941. Lihat, Alice magenis and John Conrad Appel. *A*

Perang Pasifik, hubungan kerjasama Inggris-Amerika Serikat ini kemudian berlanjut dengan konferensi Quebec pada bulan Agustus 1943 di mana ditetapkan untuk wilayah Asia Tenggara dibentuk badan bernama SEAC (*Sout East Asia Commad*) yaitu komando untuk wilayah itu dimana penanggung jawabnya, Inggris. Amerika bertanggung jawab di sebelah timur dalam badan lain bernama SWPA (*South West Pacific Area*). Wilayah SEAC dan SWPA seolah membelah wilayah kepulauan Indonesia. SWPA berkuasa dari wilayah Pasifik di timur, sampai dengan Jawa Madura, sedangkan SEAC Sumatera ke barat. Tapi keadaan ini berubah setelah konferensi Potsdam (17 Juli sampai 2 Agustus 1945) yang akhirnya seluruh Indonesia menjadi tanggung jawab SEAC di bawah Inggris.<sup>88</sup>

Setelah perang berakhir, Presiden Amerika Serikat Roosevelt dan Perdana Menteri Churchill kembali bertemu untuk membicarakan strategi pasca perang selanjutnya yang dilakukan Sekutu. Adalah sebuah hal yang wajar kalau pembicaraan berkisar pada perdamaian dunia pasca perang. Para wakil dari Amerika Serikat, Uni Sovjet, Cina, Inggris, bertemu di Dumbarton Oaks Washington DC pada bulan Oktober 1944. Mereka setuju pada prinsip-prinsip umum organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa. Semua ini kemudian dilanjutkan pada konferensi San Fransisco pada bulan April 1945. Maka muncullah "*Charter of the United Nation*". Setelah bekerja keras selama 2 bulan penuh, pada bulan Juni 1945, *Charter* ini rampung, dan pada tanggal 24 Oktober 1945, lahirlah organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa.<sup>89</sup>

Dengan takluknya pemerintahan Hindia Belanda dan ditawannya sejumlah besar pejabat termasuk Gubernur Jenderal Tjarda Starckenborg, pemerintah pengasingan Hindia Belanda (*Government in Exile*) dibentuk di Brisbane Australia. Seperti diketahui, van Mook adalah salah seorang pejabat Hindia Belanda yang berhasil lolos ke Australia beberapa saat ketika Jepang hampir lengkap menduduki Hindia. Dirinya segera diangkat sebagai pimpinan Hindia Belanda dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal.

Saat itu secara berani direncanakannya garis besar kebijakan Belanda pasca perang. Diekspresikannya, Hindia Belanda setelah bebas dari pendudukan Jepang

---

*History of The World*. Newyork: American Book Company, 1961, hal 573-574.

<sup>88</sup>. Van der Wal, *opcit jilid II*, Hal 137-138 (catatan kaki) Sebagai pimpinan S.E.A.C kemudian ditunjuk Laksamana Lord Louis Mountbatten.

<sup>89</sup>. Alice Magenis and John Conrad Appel, *op.,cit*, hal574-575.

tidak boleh lagi diberlakukan sebagai bawahan terhadap Nederland.<sup>90</sup> Namun peran dan cita-citanya setengah kandas karena di panggil pulang untuk memangku jabatan sebagai Menteri Koloni dalam kabinet Belanda di pengasingan di kota London. Sesuai perkembangan perang, belakangan pada akhir tahun 1944, van Mook kembali lagi ke posnya di Australia.<sup>91</sup>

Van Mook adalah Doktor Hukum lulusan *Universiteit Leiden* yang kemudian menjadi pimpinan Departemen Ekonomi (*Departement van Economie Zaken*) pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya memangku jabatan sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dia menjadi petinggi paling atas Belanda di Indonesia, khususnya setelah pendudukan Jepang (1945 – 1948). Dalam riwayat hidupnya, Van Mook lahir di Indonesia sehingga cenderung mencintai Hindia Belanda.<sup>92</sup>

Sebagaimana lulusan *Universiteit Leiden* lainnya, pada awal tahun 1930-an van Mook aktif dalam organisasi bernama "*De Stuw*", sebuah gerakan kemasyarakatan untuk memperjuangkan lahirnya negara Hindia Belanda, yang merdeka dan berdaulat yang lepas dari kerajaan Nederland meskipun masih ada hubungan ketatanegaraan. Dalam konsep ideologis para anggota *De Stuw*, kemerdekaan Hindia Belanda yang dimaksudnya, memiliki ciri kebangsaan yang melindungi semua suku bangsa di Hindia, yaitu orang Belanda totok, kaum Indo, orang-orang timur asing (Cina, Arab, India, dan lain-lain) serta terakhir kaum pribumi. Kelompok *De Stuw* banyak dianggap berjasa karena menjunjung tinggi cita-cita mulia yang berlawanan dengan kenyataan kolonial saat itu. Selain itu karena mereka berani menjadi saksi yang ada manfaatnya guna kepentingan golongan Eropah yang semakin terdesak<sup>93</sup>.

Karena gerakan *De Stuw* memperjuangkan lepasnya Hindia dari Belanda maka gerak-geriknya van Mook selalu dipantau oleh Gubernur Jenderal saat itu B.C.De Jonge, seorang lulusan *Universiteit Utrecht* yang sangat berjiwa kolonial. De Jonge amat anti gerakan *De Stuw* ini, sehingga Van Mook bersama kawan-

---

<sup>90</sup>. Yong Mun Cheong, *op.cit*, hal 26.

<sup>91</sup>. Kepergian van Mook tahun 1942 ke Australia berkenaan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda dibawah Gubernur Jenderal Starkenborg dalam menghadapi invasi Jepang.

<sup>92</sup>. Dia lahir di *Semarang* pada tanggal 30 Mei 1894. Kedua orang tuanya Belanda totok, bekerja sebagai guru. Bapak dan ibunya meninggal dunia di Indonesia, dikuburkan di Semarang. Pada tahun 1918 van Mook menikah dengan gadis Belanda kelahiran Yogyakarta. Kedua mertuanya yang orang Belanda juga mati di Hindia dan dikubur disini.

<sup>93</sup>. Yong Mun Cheong, *op.cit*, hal 189.

kawannya seperti Jonkman, Van Asbeck, Logemann, van der Plas, Idema, Koets dan lain-lain menjadi sangat dibatasi gerakannya. Rencana van Mook untuk menggantikan Prof Logemann sebagai pimpinan Sekolah Tinggi Hukum (*Recht hogeschool*) di Batavia misalnya, ditolak De Jonge dengan alasan agar Van Mook tetap mengabdikan diri di pemerintahan dan bekerja pada Departemen Ekonomi. Akibatnya van Mook harus bekerja dengan keras dan menyediakan waktunya selama 24 Jam untuk urusan birokrasi pemerintah, sehingga tidak punya lagi waktu aktif lagi dalam *De Stuw*.<sup>94</sup>

Waktu mahasiswa, Van Mook pernah menjadi ketua Perkumpulan *Indologi* di Leiden dan pernah mengorganisir Kongres Pertama Mahasiswa Hindia pada bulan November 1917. Selain van Mook, dalam kongres ini juga berbicara seorang Indonesia dari Perhimpunan Indonesia bernama Dahlan Abdoellah dan seorang keturunan Cina bernama Han Tiau Tjong. Adapun tujuan utama kongres adalah sebuah pemikiran cita-cita masa depan Hindia, dengan citra simbolis bentuk perencanaan pembangunan gedung di Hindia dengan bahan batu dari Belanda, marmer dari Hindia dan granit dari Cina. Padahal, amat disadari bahwa tidak tersedia semen untuk merekatkannya.<sup>95</sup> Van Mook yang berbicara dalam kongres ini guna mewakili pihak Belanda, saat itu memunculkan tiga *proposisi*:

1. Bahwa Kolonial Belanda menghasilkan berbagai keuntungan bagi Hindia. Ketertiban dan ketenangan (*orde en rust*) yang telah dicapai sehingga bisa menjadi dasar dimulainya pembangunan.
2. Kemerdekaan Hindia telah menjadi tujuan Belanda jauh sebelum munculnya politik etis.
3. Dia berpendapat bahwa masyarakat Hindia tidak pernah terkonstitusi sebagai bangsa. Kesadaran kebangsaan sangat terbatas dalam organisasi yang ada. Misalnya organisasi Budi Utomo terbentuk oleh anggotanya yang orang Jawa. Partai Sarikat Islam berdasarkan keagamaan. Selama beberapa abad orang Jawa dan Madura bertetangga tetapi selalu terdapat banyak desa yang murni suku Jawa atau suku Madura.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>. Elisabeth .Locher .Scholten, *op.,cit*, 1996, hal 187.

<sup>95</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit*, hal 10.

<sup>96</sup>. *Ibid*, hal 19



Van Mook tidak seorang diri berpandangan demikian, karena pada tahun 1819, G.K. van Hogendorp (ujung tombak kaum liberal Belanda pada tahun 1813) telah menyatakan dengan jelas di muka parlemen Belanda (*Staten General*) mengenai pandangan yang sama dengan van Mook tersebut. Para pengajar utama *Universiteit Leiden* awal abad ke 20 seperti Van Vollenhoven, Hazeu, Carpentier Alting, mungkin juga Snouck Hurgronje telah membentuk "*The Leiden School of Thought*" di kampus mereka. Hal ini rupanya yang mewarnai jalan pikiran van Mook di atas. Disamping itu dia banyak belajar dari perkembangan sejarah bangsanya sendiri, khususnya yang terkait pada soal Hindia Belanda.<sup>97</sup>

Pada bulan Desember 1942 di *Mont Tremblant* Amerika Serikat, atas prakarsa Institut Kerja Sama Pasifik, diadakanlah konferensi "Hubungan Kolonial Dimasa Datang". Belanda termasuk negara yang diundang. Ratu Wilhelmina berpidato amat dramatis pada konferensi tersebut. Van Mook mengaku bahwa dirinya punya andil besar dalam mengkonsep pidato ini.<sup>98</sup> Pidato tersebut dibuat pada tanggal 7 Desember 1942, yang juga dipancarkan melalui radio dalam bahasa Inggris untuk konsumsi bangsa Amerika. Namun, sejumlah orang Indonesia secara sembunyi dapat mendengarnya. Tanggal 15 September 1945, pemerintah Belanda menyiarkan ulang pidato ini. Inilah yang dianggap salah satu dari kebijakan Belanda soal Hindia pasca perang.

Pada dasarnya pidato ini berisi, rencana undangan untuk melangsungkan konferensi kerajaan sesegera mungkin setelah perang berakhir. Konferensi bertujuan untuk melangsungkan reorganisasi *imperium* Belanda dengan maksud akan membentuk perkesemakmuran bersama. Perkesemakmuran ini akan terdiri dari Belanda, Indonesia, Suriname dan Curacao. Rencananya niat ini akan dilaksanakan berdasarkan atas dua prinsip, yang pertama terbentuknya pondasi utuh di antara anggota perkesemakmuran secara lengkap, dan yang kedua guna terbentuknya kedaulatan penuh serta kemerdekaan untuk membuat kibijaksanaan dalam negeri masing-masing, tetapi dengan kesiapan untuk menyumbangkan bantuannya yang berguna.<sup>99</sup>

Sementara itu pasca perang, pemerintah Belanda telah membuat perjanjian bilateral dengan pemerintah Inggris tentang bekas jajahannya di Hindia Belanda.

---

<sup>97</sup>. *Ibid.*

<sup>98</sup>. *Ibid.*, hal 29

<sup>99</sup>. *Ibid.*, hal 30

Perjanjian itu dikenal sebagai *Civil Affairs Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1945. Perjanjian ini menyebutkan pengakuan kedaulatan Kerajaan Belanda di Indonesia yang tidak boleh disentuh oleh tentara pendudukan (Sekutu), dan akan ada badan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang akan melaksanakan urusan administrasi pemerintahan sipil Belanda di Indonesia. Semua hal ini seluruhnya akan diawasi oleh Panglima Besar Sekutu.<sup>100</sup>

Persetujuan *Civil Affairs Agreement* tingkat regional juga diadakan di Ceylon antara van Mook dan Mountbatten selaku pimpinan SEAC. Di sini juga menggambarkan di mana NICA yang mendapat otoritas dari SEAC.<sup>101</sup> Untuk inilah sebelum kedatangannya ke Jakarta, tanggal 29 September 1945 van Mook berangkat dari Australia menuju Kandy Ceylon lebih dahulu untuk pendatangan persetujuan. Persetujuan dimaksud ditanda tangani bersama tanggal 1 Oktober 1945 dan berisi hal-hal yang penting sehubungan urusan Hindia Belanda pasca pendudukan Jepang. Bukan hal yang berlebihan, kalau Inggris memfasilitasi Belanda untuk kembali ke Indonesia guna berfungsi lagi sebagai penjajah. Perjanjian Inggris-Belanda di Ceylon ini juga dimaksudkan akan mempermudah pengiriman pasukan Inggris dan Belanda dalam penyalurannya ke wilayah Hindia Belanda.<sup>102</sup> Otoritas NICA cukup jelas di mana secara khusus disebutkan bahwa unit-unit NICA akan menjadi inti dari rekonstruksi kekuasaan kolonial yang lama. Dengan perkataan lain NICA akan menjalankan pemerintahan untuk menangani soal-soal penting antara lain pada bidang ekonomi dan hukum. Disebutkan juga setelah sekutu berhasil mendarat di Indonesia, seluruh bekas Hindia Belanda akan berada dibawah SEAC.

Unsur Sekutu lainnya yaitu Australia akan menduduki wilayah sebelah timur Indonesia dengan batas selat Makasar. Mengenai Tarakan serta Balikpapan yang lebih dahulu diduduki Australia dalam operasi sekutu untuk memerangi Jepang, dalam waktu dekat juga akan berada dibawah SEAC.<sup>103</sup>

Dari perjanjian diatas terlihat kalau van Mook memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pimpinan NICA untuk seluruh Hindia Belanda yang bertanggung jawab

<sup>100</sup>. A.H Nasution, *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia jilid ke 2* ; Jakarta : DinasSejarah TNI AD, 1976, hal 6. Van Der Wal, *op.,cit Jilid I*, hal 3 (catatan kaki)

<sup>101</sup>. Van der Wal, *op.,cit jilid I*. hal 78-79. Sebelumnya van Mook telah membuat pula *civil affairs agreement* dengan SWPA dibawah MacArthur tanggal 10 Desember 1944 bertempat di Tacloban Leyte. Van der Wal, *op.,cit. Jilid I*. hal 3

<sup>102</sup>. Van der Wal, *op.,cit jilid I*. hal 79

<sup>103</sup>. *Ibid*

kepada pipinan Sekutu di Asia Tenggara yang dipimpin oleh Mountbatten. Yang kedua sebagai kepala pemerintahan Hindia Belanda dan bertanggung jawab pada pemerintahan Belanda di Nederland. Kedua fungsi tersebut cukup jelas tertera dalam perjanjian *Civil Affairs* di atas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>104</sup> Yang menarik dalam perjanjian ini juga dibicarakan dan diuraikan soal masalah politik khususnya menyangkut lahirnya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Diuraikan secara rinci, sikap pendirian Soekarno pada masa lalu khususnya pada masa pendudukan Jepang yang sangat aktif sebagai orang politik yang memihak Jepang. Sebagai kesimpulannya, dianggap bahwa pemerintahan Soekarno semata-mata buatan Jepang. Dan kalau ini berlangsung terus akan menjadi inti dari Propaganda *Pan-Asiatik* Jepang<sup>105</sup>.

Meskipun memiliki keterbatasan logistik dan sumber daya manusia yang memadai, berdasarkan kesiapan-kesiapan yang ada sekutu segera menuju bekas wilayah kekuasaan Jepang di Asia Tenggara khususnya untuk mendarat di Indonesia. Walaupun hal ini terpaksa tertunda selama 6 minggu, sesuai instruksi Mac Arthur agar menunggu selesainya proses kapitulasi Jepang kepada Sekutu di teluk Tokyo 2 September 1945.<sup>106</sup>

Mendahului kedatangan Sekutu ke Indonesia, pada tanggal 8 September 1945 mendarat dengan payung 7 opsir Sekutu di lapangan terbang Kemayoran Jakarta. Rombongan ini berinisial RAPWI dipimpin oleh Mayor AG.Greenhalgh yang pada hari yang sama mereka segera berhubungan dengan pimpinan Jepang yang ditunjuk, yaitu Jenderal Mayor Yamaguchi.<sup>107</sup>

Seperti telah disebutkan, komando militer Sekutu di Asia Tenggara bernama SEAC<sup>108</sup>. Pimpinan SEAC adalah Laksamana Mountbatten, seorang pimpinan angkatan laut Inggris senior yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menangani semua kepentingan sekutu khususnya kepentingan Inggris. Untuk ini pada tanggal 16 September 1945, diutuslah anak buahnya yaitu Laksamana WR. Patterson ke Indonesia. Patterson mendarat di Tanjung Priuk dengan

---

<sup>104</sup>. *Ibid* hal 80-81

<sup>105</sup>. *Ibid*, Hal 82-86

<sup>106</sup>. Richard McMilands, *The British occupation of Indonesia* ; London : Routletge, 2005, hal 3. Christison menyayangkan hal ini karena menyebabkan keterlambatannya selama 6 minggu. Dalam Film *Ons Indie voor de Indonesiers jilid 4*. Amsterdam: NOS, 1978.

<sup>107</sup>. RAPWI, *Rehabilitation Allied Prisoner of War and internis*. Osman Raliby. *op.,cit*. Hal 34.

<sup>108</sup>. Sebagaimana keputusan konferensi Potsdam, rencana semula Jawa akan menjadi tanggung jawab *South West Pacific Command* (SWPC) dibawah Jenderal McArthur tapi kemudian dialihkan kepada *South East Asia Command* (SEAC) dibawah Laksamana Mountbatten.

menggunakan kapal perang bernama *Cumberland*. Bersama tentara Inggris ini ikut pula sejumlah pegawai militer dan sipil Belanda, seperti Jenderal van Oyen dan Ch.O van der Plas. Mereka menggunakan kapal perang Belanda.<sup>109</sup>

Berbeda dengan NICA yang melakukan provokasi dan merehabilitasi ex KNIL, pada awal kedatangan sekutu, pasukan Inggris ini sangat berhati-hati dan berusaha menghindari konflik terbuka dengan Republik Indonesia. Namun sebagai pimpinan SEAC, Mountbatten tidak menjanjikan apa-apa dan untuk sementara melakukan kebijakan regional yang *fleksibel*. Dalam hal ini dirinya sebagai SACSEA, tidak percaya begitu saja pada laporan pejabat Belanda, termasuk bahan-bahan yang disampaikan oleh Mr Ch.O.van der Plas yang telah diangkat sebagai penasihat politiknya.<sup>110</sup> Rupanya Van der Plas yang merupakan pemberi informasi utama kepada SEAC, pengetahuannya atau apa yang diketahuinya amat tidak sempurna. Misalnya dilaporkannya kepada Mountbatten, tentang sejumlah berita yang tidak benar. Antara lain misalnya, “Proklamasi bukan tanggal 17 Agustus, tapi tanggal 19 Agustus 1945”. Dan pembacaan Proklamasi dikatakannya dilakukan oleh Kepala Staf tentara Jepang (maksudnya *Gunseikan* tentara ke 16 Jepang yaitu Jenderal Yamamoto).<sup>111</sup> Ternyata selain Ch.O van der Plas, Mountbatten telah banyak menerima informasi lain seperti yang dilaporkan secara objektif oleh Let.Kol Laurens van der Post.<sup>112</sup> Dan dari sumber lainnya juga sejak markas besar SEAC masih di Kindy Ceylon. Para pelapor ini adalah Let.Kol Maisy dan Wing Commander Davis.<sup>113</sup> Akibatnya Mountbatten bertambah besar ketidakpercayaan kepada van der Ch.O van der Plas itu.

Saat Patterson tiba di Indonesia, van Mook selaku pimpinan NICA masih menempati kantornya di Brisbane, Australia. Tapi setelah Batavia (Jakarta) diduduki sekutu secara lengkap, dan sudah berhasil dilakukan komunikasi dengan Den Haag, London, Washington dan Australia, maka pemerintahan Hindia Belanda harus pindah ke Batavia. Sementara sepanjang belum ada kepastian mengenai kembali dan berkuasanya Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborg

<sup>109</sup>. Osman Raliby. *op., cit.* Hal 34

<sup>110</sup>. Van der Wal, *op., cit.*, jilid I, hal 80

<sup>111</sup>. *Ibid*, hal 84

<sup>112</sup>. Van der Post, bertindak sebagai perwira penghubung. Dirinya adalah mantan tawanan Jepang yang pernah menjadi atase militer di Tokio sebelum perang.

<sup>113</sup>. Maisy adalah dokter yang bisa keluar masuk kamp interniran disekitar Jakarta. Davis adalah komandan beberapa kamp APWI (*Allied Prisoner of War and Internees*) disekitar Pekanbaru.

Stachouwer, maka pemerintahan Hindia Belanda dipegang langsung oleh Letnan Gubernur Jenderal van Mook.<sup>114</sup> Dalam hal ini, dirinya bertindak menangani dan bertanggung jawab soal hukum, keuangan, dalam negeri, pendidikan, ekonomi, pekerjaan umum dan komunikasi, serta soal perang di Hindia Belanda.<sup>115</sup>

Sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara Inggris, tiba resmi pada tanggal 29 September 1945, pada jam 10.00 pagi. Mereka mendarat di Tanjung Priuk dengan menggunakan sejumlah kapal perang maupun pengangkut. Pasukan ini bernama AFNEI (*Allied Force Netherland East Indies*) dan dipimpin oleh Let.Jen Sir Philip Christison. Sebagian besar anggota pasukan terdiri dari Divisi India. Christison sendiri tidak datang dengan kapal laut bersama pasukannya, tapi dengan pesawat pembom Mitchel B.25.<sup>116</sup>

Di bawah Christison terdapat tiga divisi angkatan darat, yaitu Divisi India ke 23 bertugas untuk daerah kota Jakarta dan sekitar di bawah pimpinan May.Jen Hawthorn, Divisi India ke 5 bertugas untuk daerah kota Surabaya dan sekitar dibawah pimpinan May.Jen EC Mansergh dan Divisi India ke 26 bertugas untuk daerah kota Medan dan Padang, di bawah pimpinan May.Jen H.M. Chambers.

Sebagaimana instruksi yang diterima, tujuan Sekutu ke Indonesia adalah, melucuti tentara Jepang, menyelamatkan ex tawanan Sekutu yang ditawan oleh Jepang dan menyelamatkan kaum interniran tanpa perlu melakukan penegakan hukum dan pemerintahan di Indonesia.<sup>117</sup>

Sebelum mendarat di Jakarta, memang telah muncul berita dari radio Singapura bahwa tujuan pasukan Sekutu adalah:

1. Untuk melindungi dan mengevakuasi tawanan perang (P.O.W) dan tawanan biasa,
2. Melucuti senjata dan mengembalikan serdadu Jepang dan
3. Menjaga keamanan dan ketentraman agar kedua maksud di atas dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.<sup>118</sup>

<sup>114</sup> Tjarda dibebaskan di Mukden Manchuria oleh tentara Rusia pada tanggal 17 Agustus 1945

<sup>115</sup> Van der Wal, *op.cit*, jilid I, hal 80.

<sup>116</sup> Christison memulai karirnya sebagai dokter tentara dalam perang dunia pertama 1914-1918. Karir militer dicapainya terutama dalam perang dunia ke II yaitu di medan tempur di Birma.

<sup>117</sup> Van der Wal, *op.cit* jilid I. Hal 300. AFNEI tiba dengan kapal laut 29 September 1945..

<sup>118</sup> Osman Raliby, *op.cit*, hal 36

Setibanya di Jakarta, Christison segera melakukan konferensi pers. Konferensi ini menimbulkan banyak kesalahfahaman. Misalnya pertanyaan wartawan apakah tentara Sekutu akan mengontrol dan mengatur seluruh wilayah Republik Indonesia ? Apakah di luar daerah konci (maksudnya *key area*, seperti kota Medan, Padang, Batavia, Semarang dan Surabaya) akan di serahkan pada RI. Jawaban Christison yang ditulis wartawan adalah: "RI dapat terus melakukan penyelenggaraan pemerintahan sipil mereka di luar daerah yang dikuasai Sekutu". Belakangan, ternyata Christison menyangkal berita wartawan itu. Penjelasan di mana dia mengaku menjawab: "bukan hanya daerah konci saja yang dikuasai sekutu, tapi juga memerintahkan agar tentara Jepang tetap mengontrol di luar daerah konci tersebut sampai tentara Jepang menyerah kepada Sekutu secara lengkap". Sayangnya berita yang ditulis wartawan ini sudah sempat menyebar ke mana-mana dan menggembirakan rakyat Indonesia. Andaikata koreksi jawaban Christison benar, buat RI laporan ini amat mengecewakan, karena tidak mengakui Proklamasi yang diselenggarakan pada tgl 17 Agustus 1945. Van Mook percaya bahwa para wartawan tidak merekayasanya karena jawaban Christison yang ditulis wartawan tidak banyak berbeda dengan penjelasan Mounbatten di Singapura tanggal 27 September 1945.<sup>119</sup>

Permasalahan yang dihadapi Christison rupanya amat berat. Pertama pasukannya tidak terlalu banyak, yang kedua dia terlambat selama enam minggu, padahal RI telah berdiri lengkap dengan Presiden, Wakil Presiden, Perangkat Undang-Undang, KNIP dan Kesatuan Bersenjata bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di samping itu sistim Administrasi Pemerintahan telah berjalan baik. Alat transportasi umum lancar. Demikian pula prasarana umum seperti listrik, air, gas, komunikasi radio telepon, dan telegraf.

Kedatangan Sekutu bagi Soekarno tentu saja memunculkan kegamangan tersendiri, terlebih-lebih atas adanya tentara Belanda yang ikut membonceng dan usaha para perwira Belanda untuk memobilisir bekas-bekas tentara KNIL ex tawanan Jepang. Oleh karena itu pada tanggal 9 Oktober 1945 dia menulis surat kepada Christison yang isinya berbentuk kekhawatirannya atas kedatangan tentara Belanda dengan segera, yang kabarnya ribuan orang kini berada di Singapura sehingga bisa memicu peledakan konflik fisik. Ini belum termasuk ulah badan

---

<sup>119</sup>. Yong Mun Cheong, *op. cit.*, hal 36.

NICA yang telah terbentuk.<sup>120</sup> Soekarno sebagai Presiden dan Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri telah bertindak cepat menghadapi situasi yang berubah ini. Misalnya dalam wawancara pemerintah RI dengan wartawan Australia, Fairhall dan Enger, dikatakan Soekarno bahwa: "R.I sanggup bekerja sama dengan sekutu, tapi menolak pendaratan tentara Belanda".<sup>121</sup> Bahkan secara resmi pula Kementerian Luar Negeri R.I telah mengeluarkan pemberitaan dalam 2 bahasa (Inggris dan Indonesia) berjudul "Kewajiban bangsa Indonesia terhadap dunia Internasional". Isinya adalah sikap R.I terhadap kedatangan sekutu itu. Pemberitaan resmi ini ditandatangani oleh Menteri Luar negeri Ahmad Soebardjo.<sup>122</sup>

Berkaitan dengan maksud hubungan baik Inggris-Belanda, dari pihak Republik Indonesia sering muncul anggapan bahwa kebijakan sekutu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda semata. Misalnya pada suatu hari diawal November 1945 ketika terjadi tindakan sewenang-wenang petugas NICA terhadap orang Indonesia, sedangkan Inggris tidak melakukan tindakan apa-apa. Hatta selaku Wakil Presiden memprotes kejadian-kejadian tersebut dan menganggap Inggris yang diakui Republik Indonesia sebagai badan sekutu yang berkuasa dan netral, tidak segera tanggap pada pelanggaran yang terjadi.<sup>123</sup> Selain itu ulah tentara Inggris di Surabaya yang kemudian memunculkan "Pertempuran 10 November 1945" oleh R.I dianggap berlebihan. Ini memunculkan tuduhan pihak R.I bahwa Inggris bertindak sewenang-wenang. Untuk ini Hatta pada tanggal 9 November 1945 mengirim surat protes keras kepada pimpinan tentara Inggris di Indonesia, Jenderal Christison<sup>124</sup>. Hal ini memang sempat menjadi polemik pers. Surat Hatta ini oleh Inggris disebarkan kepada para wartawan dengan keterangan: "*Mohammad Hatta has written a somewhat abusive letter to Gen.Christison, of which no doubtet copies have been made available to the press by the Indonesians*".<sup>125</sup> Padahal usaha pihak Republik untuk membantu pihak Sekutu cukup besar. Misalnya dalam mengatasi konflik bersenjata di Surabaya bulan November 1945, sampai-sampai Soekarno menerbitkan "Perintah Presiden

<sup>120</sup>. Van der Wal, *op.cit* jilid I. Hal 285-290.

<sup>121</sup>. Berita Repoeblik Indonesia 20 September 1945. Lihat juga Kusnodiprodo, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2 pemerintah RI 1945*; Jakarta: SK.Seno, 1951, hal 260-282.

<sup>122</sup>. *Ibid*

<sup>123</sup>. Van der Wal *op.cit* jilid II. hal 11-14.

<sup>124</sup>. *Ibid*

<sup>125</sup>. *Ibid*. hal 14

kepada seluruh rakyat Indonesia”. Isinya, “Perjuangan kita untuk menegakkan Republik Indonesia bersifat dua”:

1. Perjuangan untuk menindas segala aliran untuk menjajah kita kembali.
2. Perjuangan di dalam percaturan diplomasi internasional untuk memperoleh pengakuan negri-negri lainnya.

Kedua macam perjuangan ini harus berjalan bersama, teratur dan bersifat harmonis. Perjuangan dalam negeri menghendaki pemerintah yang kokoh dan teratur, sanggup mengumpulkan semua tenaga, menambah kekuatan kita sambil bersiap sedia. Adapun perintah Soekarno selanjutnya adalah: “Segala pertempuran dengan Sekutu supaya dihentikan. Tidak hanya di Surabaya, tapi juga di Magelang”.<sup>126</sup>

### 2.3 Kabinet Sjahrir Terbentuk

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sjahrir dan kelompoknya tidak ikut dalam gerakan politik yang dilakukan kelompok Soekarno-Hatta, melainkan melakukan kegiatannya sendiri. Ternyata Sjahrir menghilang dari panggung politik untuk beberapa lama. Saat itu, dirinya mencoba mempelajari peta politik Indonesia pasca penjajahan Jepang agar situasinya dapat dipahami sejelas mungkin. Kahin menulis dalam bukunya: “Pernyataan Proklamasi oleh Soekarno-Hatta dianggap Sjahrir terlalu lemah, keduanya ketakutan, dan untuk membangkitkan semangat rakyat guna mengadakan Revolusi melawan Jepang, ini merupakan hal amat penting. Selain itu dianggapnya bahwa dukungan kaum sekutu pada kemerdekaan Indonesia akan lebih nyata apabila ada kekuatan dari para pemimpin yang secara terbuka anti Jepang.”<sup>127</sup> Tapi keadaan ini rupanya tidak berlangsung lama, karena beberapa kenyataan telah membuka mata Sjahrir sendiri. Bersama beberapa orang temannya, Sjahrir menyempatkan diri selama 2 minggu berkeliling Jawa guna melihat sikap masyarakat dalam menanggapi Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ditemukannya bukti-bukti bahwa rakyat amat menyambut dan mendukung dengan sangat antusias kemerdekaan Indonesia itu. Melihat ini, sekembalinya ke Jakarta dia menerima dan mau bekerja sama

---

<sup>126</sup>. S.K. Warta Indonesia 1 November 1945, *Hentikan Segala Pertempuran dengan sekutu*.

<sup>127</sup>. Kahin *op.,cit.* Hal 147



dengan Soekarno-Hatta. Dan sejak itu dia kerap berlawanan dengan rencananya yang semula dan secara tegas mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta.<sup>128</sup>

Sjahrir lahir di kota Padang Panjang pada tanggal 5 Maret 1909. Ayahnya seorang Jaksa. Sebagai seorang pemuda dari keluarga berkecukupan, sekolah pertamanya adalah *Europeesche Lagere School* (ELS) dilanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Tahun 1926 dia merantau ke Jawa dan sekolah di *Algemene Middelbare School* (AMS) di Bandung. Tahun 1929 dirinya berada di Belanda. Mula-mula sekolah di fakultas hukum di Amsterdam lalu di Leiden. Tapi Sjahrir tidak pernah menamatkan sekolahnya sampai dia berangkat kembali ke Hindia pada akhir tahun 1931. Kegiatannya di Belanda antara lain berkumpul dengan para pemuda Sosialis, serta memahirkan diri di dunia politik.<sup>129</sup>

Atas saran Hatta, Sjahrir kembali ke Hindia lebih dahulu guna memimpin Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (yang dikenal sebagai PNI Baru). Organisasi ini dipimpinya sampai tahun 1934, setelah itu dirinya berniat kembali ke Belanda untuk melanjutkan sekolah. Tapi hal itu gagal sama sekali karena keburu ditangkap pemerintah kolonial dan di buang ke Digul.

Setelah para anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dilantik tanggal 29 Agustus 1945 di gedung kesenian Jakarta. Pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, sidang KNIP pertama diadakan bertempat di Balai Muslimin jalan Kramat Raya Jakarta. Sidang dipimpin Kasman Singodimedjo. Soekarno tidak hadir, tapi Hatta hadir. Demikian pula sebagian besar menteri hadir. Sidang hari pertama ini sangat gaduh tidak menentu. Nampaknya para pemuda-mahasiswa yang sudah tidak puas pada golongan tua yang membuat gaduh. Meskipun demikian sidang bisa mengambil keputusan guna meminta hak legislatif kepada presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk.<sup>130</sup> Rapat berkali-kali ditunda guna merumuskan apa yang diinginkan para hadirin. Karena keadaan masih tetap kacau, Kasman yang tidak dapat menguasai keadaan menyerahkan pimpinan sidang kepada Adam Malik sebagai wakil ketua III.

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Lihat Rudolf Mrazek, *Sjahrir Politics and Exile in Indonesia*; Ithaca-NewYork: Cornell University Press, 1994, hal 5-82

<sup>130</sup> Lihat S.K Soeara Ra'jat 19 Oktober 1945. Hal ini sebenarnya berawal dari pembicaraan tidak resmi para pemuda di Menteng 31 tanggal 7 Oktober 1945. Saat itu sebanyak 50 orang anggota KNIP dipimpin Soekarno membuat petisi dan meminta status KNIP dirubah.

Menanggapi semua kejadian diatas, akhirnya pada hari itu juga selaku pimpinan pemerintah, Wakil Presiden Mohammad Hatta menerbitkan maklumat no X. Isinya antara lain, kepada KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahkan kekuasaan legislatif, ikut menetapkan Haluan Negara, serta untuk kegiatan sehari-hari ditunjuk sebuah Badan Pekerja (BP) yang bertanggung jawab kepada KNIP.<sup>131</sup> Keesokannya, tanggal 17 Oktober 1945 sidang dilanjutkan, dipimpin Latuharhary. Acaranya, mendengarkan pidato Soekarni. Soekarni mengusulkan agar perjuangan RI menjadi lebih *Revolusioner*. Katanya: “KNIP harus mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab dan birokrasi bertele-tele harus dihapuskan dari sistim kerja KNIP”. Sekalipun ada usaha dari Sartono dan Latuharhary untuk membela pimpinan KNIP lama dan membela pemerintah, namun sebagian besar anggota sidang setuju agar pimpinan KNIP lama mengundurkan diri dan diganti oleh orang baru. Saat itulah nama Sjahrir dan Amir Sjarifudin disebut-sebut untuk menjadi pimpinan baru.<sup>132</sup> Mereka dicari utusan KNIP dan diundang datang ke Balai Muslimin serta ditunjuk selaku formatir pada pembentukan Badan Pekerja (BP) KNIP.<sup>133</sup>

Keputusan pemerintah membentuk Badan Pekerja menimbulkan polemik hebat di masyarakat, sehingga pemerintah perlu memunculkan penjelasan berbentuk keputusan pemerintah no. 10 tanggal 16 Oktober 1945, yang antara lain berisi hal sebagai berikut,

Badan Pekerja berkewajiban dan berhak:

- a. Turut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Ini berarti bahwa Badan Pekerja bersama sama dengan Presiden menetapkan GBHN. Badan Pekerja tidak berhak campur dalam kebijakan (*dagelijke beleid*). Pemerintahan sehari-hari tetap ditangan Presiden.
- b. Menetapkan bersama dengan Presiden undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintah. Yang menjalankan undang-undang ini ialah pemerintah, artinya: Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang di bawahnya.<sup>134</sup>

<sup>131</sup>. Osman Raliby, *op.,cit*, hal 511

<sup>132</sup>. Soebadio Sastrosatomo, *op.,cit*, hal 62.

<sup>133</sup>. Badan ini dibentuk untuk memudahkan bekerjanya KNIP sebab untuk mengadakan sidang nampaknya sulit karena suasana dalam negeri yang masih kacau.

<sup>134</sup>. Berita Republik Indonesia 17 November 1945 hal 3 . *Penjelasan kedoedoekan Badan Pekerja Komite Nasional Poesat*.

Sebagai formatir Sjahrir bersama Amir Sjarifudin, bekerja sigap dan dengan cepat menyusun anggota BP KNIP. BP KNIP mengangkat sebanyak 15 orang anggota BP. KNIP. yang terdiri dari Sjahrir sebagai ketua, Amir Sjarifudin sebagai wakil, Mr Soewandi sebagai sekretaris. 12 orang anggota lainnya, yaitu Sjafrudin Prawiranegara, Wahid Hasjim, Hindromartono, Soenario Kolopaking, Dr Halim, Soebadio, Tan Liang Djie, Soepeno, Sarmidi Mangunsarkoro, Adam Malik, Tadjoeloedin dan Dr Soedarsono.<sup>135</sup> Salah satu hasil kerja BP KNIP pada tanggal 1 November 1945 adalah Manifesto Politik Pemerintah.<sup>136</sup>

Kemudian tanggal 3 November 1945 muncul maklumat lain pemerintah yang isinya:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.<sup>137</sup>

Maklumat yang merupakan usulan BP KNIP kepada pemerintah ini dimaksudkan untuk realisasi politik yang bertumpu pada kedaulatan rakyat atau asas demokrasi.

Mendahului maklumat tanggal 3 November 1945 tersebut, telah berdiri lebih dahulu Partai Komunis Indonesia (PKI). Tanggal 21 Oktober 1945, menyusul berdiri partai Masjumi, Partai Buruh Indonesia dan Partai Katolik. Setelah berkongres di Yogyakarta tanggal 12 November 1945, Partai Sosialis Indonesia resmi berdiri di Jakarta, dan tanggal 20 November 1945. partai Sjahrir, Partai Rakyat Sosialis (PARAS) didirikan di Cirebon. Pada tanggal 17 Desember 1945 setelah melalui tawar-menawar yang rumit akhirnya kedua partai ini berfusi dan memakai nama Partai Sosialis. Tanggal 26 Januari 1946 terjadi fusi dari sejumlah partai lain, yaitu partai Kedaulatan Rakyat, partai Republik Indonesia, PNI

<sup>135</sup>. Soebadio Sastrosatomo, *op. cit*, hal 65-66.

<sup>136</sup>. Dikenal Haluan Politik Pemerintah yang dibuat oleh Hatta tapi disetujui Soekarno. Berita Republik Indonesia 17 November 1945 hal 2. *Makloemat Pemerintah Republik Indonesia*.

<sup>137</sup>. Osman Raliby, *op. cit*. Hal 525-529. Berita Republik Indonesia 17 November 1945. *Makloemat pemerintah 3 November 1945*.

Madiun, PNI Pati, PNI Palembang, dan PNI Sulawesi. Fusi ini memunculkan Partai Nasionalis Indonesia (PNI)<sup>138</sup>.

Jalan menuju Perdana Menteri segera dirintis Sjahrir sejak menjabat ketua BP. KNIP Ini amat berkaitan dengan diterbitkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Susunan Kabinet Baru Pemerintah Republik Indonesia<sup>139</sup>. Hal ini terkait pula pada usul BP KNIP no. 5 tanggal 11 November 1945, tentang usul "Pertanggungjawaban Para Menteri"<sup>140</sup>. Usul tersebut adalah, "Pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 5". Isinya:

Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan Pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar yang dirubah, Badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat (menurut susunan sementara kepada Komite Nasional Pusat). Seperti diketahui, maka dalam Undang-undang Dasar kita tidak terdapat pasal, baik yang mewajibkan maupun yang melarang para Menteri bertanggung jawab. Pada lain pihak pertanggungjawaban menteri kepada badan perwakilan rakyat itu, adalah sesuatu jalan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat. Maka berdasarkan alasan tersebut, Badan Pekerja mengusulkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanya pertanggungjawaban itu dalam susunan Pemerintahan. Dokumen ini diusulkan di Jakarta, 11 November 1945 oleh Badan Pekerja Komite Nasional, ketua St Sjahrir. Penulis Mr. Suwandi.<sup>141</sup>

Ternyata Presiden menerima baik usul Badan Pekerja, hingga dengan persetujuan tadi dimulai adanya pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dokumen-dokumen ini amat penting karena tanpa disadari merupakan rancangan perubahan konstitusi Republik Indonesia yang amat mendasar. Konsekwensinya terjadi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem ministerial. Soekarno setuju usulan BP.KNIP ini. Kemudian Sjahrir dan Amir Sjarifudin ditunjuk guna bertindak sebagai formatir.<sup>142</sup>

<sup>138</sup>. Sebenarnya Partai Nasional Indonesia (P.N.I) merupakan pengembangan dari SERINDO.

<sup>139</sup>. Berita Republik Indonesia tanggal 1 Desember 1945, hal 1

<sup>140</sup>. Berita Republik Indonesia tanggal 17 November 1945, hal 6

<sup>141</sup>. Berita Indonesia tanggal 12 November 1945 hal 1, *Pengoemoeman Badan Pekerja Komite Nasional Pusat no. 5*

<sup>142</sup>. *Ibid.*,

Dalam berita surat kabar Nasional, sejak tanggal 12 November 1945 segera banyak muncul spekulasi bagaimanakah bentuknya kabinet ministerial tersebut. Tanggal 14 November 1945 segera terjawab, yaitu dalam *head line* media cetak muncul tulisan “Kabinet Sjahrir Berdiri”. Sjahrir selain sebagai Perdana Menteri juga menjabat Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Amir Sjarifudin terpilih sebagai Menteri Keamanan Rakyat merangkap Menteri Penerangan.<sup>143</sup> Menteri Keuangan dijabat Prof Mr. Soenarjo Kolopaking, Menteri Pengajaran Mr T.S.G. Mulia, Menteri Kehakiman Mr. Suwandi, Menteri Sosial Dr. Adjidarmo, Menteri Kesehatan Dr. Darmasetiawan, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Putuhena, Menteri Perhubungan Ir. Abdul Karim dan Menteri Negara H.Rasjidi.<sup>144</sup>

Serah terima jabatan dari kabinet pertama RI (Kabinet Presidensial) kepada kabinet kedua RI berlangsung hari Jumat tanggal 23 November 1945 di rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Saat itu ditetapkan Soekarno sebagai Presiden atau Kepala Negara, Hatta wakil Presiden dan Sjahrir sebagai Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan<sup>145</sup>. Sebagian besar para menteri adalah teman dekat Sjahrir yang pada umumnya tidak pernah bekerja sama dengan Jepang.

Tanggal 17 November 1945 untuk pertama kali kabinet Sjahrir pertama ini menerbitkan maklumatnya yang merupakan bentuk kebijakan pemerintahannya. Isinya, yang sifatnya keluar:

1. Menuntut kemerdekaan Indonesia sepenuhnya dengan mengindahkan kewajiban negara merdeka dalam perhubungan Internasional serta berkewajiban dalam usaha bersama-sama membangun susunan dunia baru berdasarkan cita-cita dalam piagam perdamaian.
2. Didalam menyempurnakan susunan negara Indonesia, maka akan diperhatikan dengan sepenuh-penuhnya kepentingan asing dan kedudukan penduduk asing didalam negara Indonesia. Didalam usaha demikian maka tidak dapat ditempuh satu macam jalan saja, melainkan segala usaha mesti dicoba. Pun

---

<sup>143</sup>. Soebadio Sastrosatomo, *opcit.* Hal 98-99. Belakangan jabatan Menteri Penerangan diserahkan pada M.Natsir. Lihat juga Berita Republik Indonesia 1 Desember 1945.

<sup>144</sup>. Berita Indonesia 14 November 1945 hal 1, *Pembentoean Kabinet Baroe telah selesai*

<sup>145</sup>. Pramodya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia I*; Jakarta : KPG, 1999, hal 180

dengan jalan melangsungkan perundingan-perundingan dengan yang berkepentingan tanpa sekali-kali mengurangi kedaulatan negara.<sup>146</sup>

Selanjutnya dalam usaha ke dalam negeri akan diperhatikan soal-soal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat dalam usaha menegakkan negara Republik Indonesia.
3. Pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan peri kemanusiaan.
4. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat di antaranya dengan jalan pembagian makanan.
5. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal Oeang Republik Indonesia (ORI).<sup>147</sup>

Tanggal 25 sampai 27 November 1945 bertempat di Sekolah Tinggi Obat-obatan di Jakarta, berlangsung sidang KNIP kedua<sup>148</sup>. Keputusan sidang antara lain, penegasan kembali menyangkut penetapan kebijakan politik RI keluar dan kedalam seperti telah disebut di atas, kedudukan KNI didaerah-daerah, pembentukan partai politik dalam negara RI, perubahan susunan pemerintah lama, dan sekali lagi dipertegas ditetapkannya KNIP untuk menjalankan kewajiban MPR dan DPR sebelum kedua badan tersebut berdiri.

Berkaitan soal kebijakan pemerintah untuk menjalankan perundingan-perundingan, sejak itu pemerintah RI dan Belanda mulai melangkah pada kegiatan diplomasi.<sup>149</sup> Di samping itu telah pula dimunculkan protes-protes keras kepada pihak Inggris yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran kedaulatan RI seperti di Surabaya, Semarang dan Magelang.<sup>150</sup>

Perlu diketahui sebelum kabinet Sjahrir muncul, telah ada perundingan awal antara Presiden Soekarno dan van Mook selaku wakil Belanda. Dalam kabinet RI kedua ini nampaknya Belanda masih yakin akan adanya kemajuan perundingan dan menganggap dwitunggal Soekarno-Hatta merupakan kekuatan yang akan

<sup>146</sup>. Osman Raliby, *op.cit.* Hal 103

<sup>147</sup>. *Ibid* Hal 104. Berita Republik Indonesia th I no. 2 tanggal 1 Desember 1945 hal 1. *Makloemat pemerintah.*

<sup>148</sup>. Gedung ini sekarang merupakan bagian dari Sekolah Menengah PSKD jalan Diponegoro Jakarta.

<sup>149</sup>. Osman Raliby, *op.cit.* Hal 117-118. Berita Republik Indonesia th I no. 2. 1 Desember 1945 hal 3. *Resolisi KNIP III*

<sup>150</sup>. Berita Republik Indonesia th I no. 2 tanggal 1 Desember 1945 hal 3. *Resolisi KNIP III*

mendukung dan melindungi Sjahrir. Kemudian tekanan terhadap pemerintah RI berkaitan dengan terjadinya konflik bersenjata oleh Inggris dan Belanda, akhirnya memunculkan diterbitkannya maklumat tanggal 19 November 1945 yang isinya:

1. Memusatkan Tentara Keamanan Rakyat di sekeliling Kota Jakarta Raya.
2. Menyerukan kepada rakyat untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya-penuhnya terhadap tindakan yang harus diambil kepada Tentara Keamanan Rakyat dan hendaknya jangan bertindak sendiri-sendiri supaya tidak merugikan perjuangan kita.<sup>151</sup>

Sungguh suatu situasi yang amat berat dirasakan oleh Tentara Keamanan Rakyat. Sejak TKR didirikan tanggal 5 Oktober 1945. Inilah keadaan yang dilematis dirasakan pihak militer terutama bagi Komandemen 1 Jawa Barat dibawah pimpinan Jenderal Mayor Didi Kartasasmita. Pasukan TKR Resimen 5 yang kemudian menjadi Resimen 6 dibawah pimpinan Let.Kol Mufraini Mukmin yang berdomisili di kota Jakarta, akhirnya dipindahkan ke Cikampek. Sedangkan badan-badan perjuangan seperti halnya Laskar Rakyat Jakarta Raya dipindahkan ke Kerawang. Namun demikian dalam pembinaan tentara upaya pemerintah terus ditingkatkan. Misalnya telah diadakan reorganisasi tentara nasional Indonesia di mana TKR pada tahun 1946 dirubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia).

Dalam masa pemerintahan kabinet Sjahrir sejumlah penataan dalam sistim pemerintahan berhasil diselenggarakan. Misalnya pembangunan dan pengembangan Kepolisian Negara. sesuai dengan ketetapan pemerintah no.11/SD tanggal 25 Juni 1946 dimana polisi langsung berada dibawah Perdana Menteri. Untuk mengatasi masalah di kepolisian tersebut, Sjahrir melakukan pembenahan seperti menambah jumlah tenaga kepolisian, memindahkan sekolah polisi dari Sukabumi ke Martoyudan Yogyakarta dan memunculkan falsafah *Tribrata* yang antara lain berisi bahwa polisi abdi utama bangsa dan negara. Selain itu, juga dibentuk Brigade Mobil (Mobrig) sebagai unit pemukul yang praktis dan efisien. Badan ini dibentuk juga dalam rangka memperkuat dan membantu TRI melawan pasukan Belanda.

Di bidang peradilan perhatian Sjahrir juga besar. Pada tanggal 15 Januari 1946, telah dikeluarkan makloemat no.3 yang ditujukan kepada para gubernur,

---

<sup>151</sup>. Berita Republik Indonesia th I no. 2, 1 Desember 1945 hal 3. *Maklumat 19 November 1945*.

residen, jaksa dan para kepala polisi. Isinya adalah untuk pembuktian bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka lembaga pengadilan harus diselenggarakan secara cepat dan tepat. Hal ini berkaitan dengan masih banyak tertundanya perkara kriminal sehingga masih banyak terdakwa yang ditahan.<sup>152</sup> Sebelumnya yaitu tanggal 14 Januari 1945, kementerian kehakiman telah mengeluarkan seruan yang sama.<sup>153</sup>

Kebijaksanaan di bidang ekonomi sudah dimulai pada kabinet pertama yaitu untuk memperbaiki kemakmuran rakyat misalnya pengawasan bahan makanan dan pakaian didaerah yang tidak aman yang dikuasai Belanda atau waktu terjadi serangan musuh. Kabinet Sjahrir juga membantu membangun pengairan di daerah Surabaya<sup>154</sup>. Kebijakan di bidang ekonomi juga terkait soal ORI (Oeang Repoeblick Indonesia). Rencana pembuatan ORI sudah muncul sekitar awal bulan Oktober 1945 berkaitan rencana mengganti uang Jepang sebagai alat pembayar yang sah. Dalam kabinet Sjahrir dilanjutkan dengan perluasan pencetakannya. Kebijakan ini penting agar RI memiliki uang sendiri. karena ORI merupakan atribut negara RI merdeka yang berdaulat. Uang yang awalnya ditandatangani oleh menteri keuangan AA.Maramis, dicetak di Jakarta. Pada akhir bulan Desember 1945, kegiatan pencetakan ORI dihentikan sama sekali dan baru dimulai lagi pada Januari 1946 bertempat dipercetakan NIMEF di Kedalpayak Malang. Pencetakan dilakukan pula di Solo dan Yogya.<sup>155</sup>

Pertengahan Februari 1946 kabinet Sjahrir pertama nampaknya sukar dipertahankan lagi, antara lain karena desakan berbagai pihak terutama dari partai-partai politik di luar kabinet yang tidak setuju pada kebijakan pemerintah khususnya soal perjuangan diplomasinya. Kalau mau dipaksakan, kebijakan kabinet ini amat lemah karena didukung hanya oleh satu partai politik yaitu partai Sosialis. Yang merupakan faktor yang langsung menyebabkan jatuhnya kabinet Sjahrir pertama, adalah kebijakan luar negerinya untuk melakukan hubungan baik dengan Inggris dan Belanda.<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup>. ANRI Jakarta, Kem.pen 45-49, no.17

<sup>153</sup>. ANRI Jakarta, Kem.pen 45-49, no. 23

<sup>154</sup>. ANRI Jakarta, Kem.pen 45-49, no. 85.

<sup>155</sup>. Oey Beng To, *Sejarah kebijakan moneter Indonesia*, 1991, hal 72-76.

<sup>156</sup>. Padahal Indonesia-Belanda belum melakukan perundingan formal. Soebadio Sastrosatomo, *op.,cit.* hal 228-230.



Pada tanggal 28 Februari 1946 sampai tanggal 28 Februari 1946, berlangsung sidang pleno KNIP ketiga di kota Solo. Saat itu Persatuan Perjuangan (PP) yaitu kelompok politik oposisi pemerintah, amat gencar mengkritik pemerintah. Tapi kekuatan politik ini tidak terlalu kuat untuk menggantikan pemerintahan yang sedang berlaku.

Anggapan bahwa Soekarno-Hatta masih mendukung Sjahrir, dapat diperkirakan benar. Misalnya tanggal 2 Maret 1946 dalam situasi pemerintahan yang lemah, Hatta mengumumkan, Sjahrir terpilih kembali sebagai formatir kabinet. Dalam kabinet Sjahrir kedua ini (kabinet RI ketiga), disetujui diberlakukan 5 pokok kebijakan kabinet baru. Melihat pokok pertama, jelas apa yang jadi keinginan pihak oposisi bisa diterima Sjahrir.

Pada tanggal 5 Maret 1946 Sjahrir mengumumkan isi program pemerintahnya tersebut sebagai kebijakan pemerintahnya yaitu:

1. Berunding dengan Belanda atas dasar kemerdekaan RI 100 %.
2. Menyiapkan persatuan dari segala lapisan masyarakat dalam negara, baik dalam ketentaraan, sosial dan perekonomian.
3. Mencapai susunan daerah yang sedemokratis-demokratisnya.
4. Mengusahakan agar pemerintah mengambil tindakan sepenuhnya supaya segala kegiatan perkebunan diselenggarakan, agar tercapai yang dimaksud dalam U.U.D pasal 33 yaitu kesejahteraan sosial.
5. Politik luar dan dalam negeri akan diselenggarakan sepenuh-penuhnya menurut amanat Presiden.<sup>157</sup>

Tanggal 10 Maret 1946, presiden menyetujui konsep Sjahrir tentang kabinetnya. Soekarno juga menyetujui perundingan dengan Belanda segera dimulai.<sup>158</sup>

Pada bulan Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir bersama rombongannya mengadakan kunjungan ke Jawa Timur melalui Solo (Surakarta) untuk peninjauan pengumpulan beras yang akan dikirim guna membantu India. Tanggal 27 Juni 1946, rombongan mestinya sudah kembali lagi ke Solo. Tapi tiba-tiba muncul berita di Yogya bahwa Perdana Menteri bersama beberapa orang anggota rombongannya diculik.<sup>159</sup> Usaha penculikan rupanya berawal dari pidato

<sup>157</sup>. Osman Raliby, *op.,cit.* Hal 267

<sup>158</sup>. *Ibid.* Hal 272. S.K Penyuluh 15 Maret 1946. *Apakah nasib Indonesia ?*

<sup>159</sup>. Majalah Mingguan Merdeka 13 Juli 1946. *Dibelakang layar penculikan Sjahrir.*

Bung Hatta dalam acara Isra Mi'raj di Yogya yaitu yang menyangkut soal perundingan dengan Belanda. Pidatonya antara lain berisi Republik Indonesia akan menyerahkan wilayah di luar Jawa dan Sumatera kepada Belanda. Siangnya, Persatuan Perjuangan (PP) bereaksi keras yang menganggap pidato Hatta merupakan suara resmi pemerintah.<sup>160</sup> Mereka tidak puas dan di antara anggota PP ada seorang anggota tentara bernama Mayor Abdul.Kadir Jusuf. Saat P.P berapat itu AK Jusuf berkomentar: "Biang keladi semua ini adalah Sjahrir". Mayor Jenderal Raden Panji Soedarsono selaku komandan Divisi III Jawa Tengah merasa bertanggung jawab atas ketentraman Yogyakarta. Karena itulah dia segera memberikan perintah kepada Mayor A.K Jusuf, untuk menangkap dan menahan Sutan Sjahrir.<sup>161</sup> Demikianlah maka Perdana Menteri Sutan Sjahrir ditangkap.

Presiden Soekarno segera bereaksi. Dia segera membentuk Dewan Militer.<sup>162</sup> Kemudian mengumumkan bahwa seluruh Indonesia dalam keadaan bahaya. Pada tanggal yang sama dikeluarkan Maklumat Presiden no.1 tahun 1946, isinya menyebutkan: "Berhubung kejadian-kejadian dalam negeri yang membahayakan keselamatan negara dan perjuangan kemerdekaan, maka presiden dengan persetujuan kabinet dalam sidangnya tanggal 28 Juni 1946, mengambil kekuasaan pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu sampai kembalinya keadaan biasa yang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya".<sup>163</sup>

Meskipun Sjahrir akhirnya dilepaskan pihak penculik tapi Sjahrir bukan Perdana Menteri lagi atau hanya sebagai Menteri Luar Negeri saja. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1946 Mayor Jenderal Soedarsono pimpinan Divisi III yang pro P.P, mengambil inisiatif memimpin delegasi kepada presiden Soekarno di Istana Negara Yogyakarta. Kepada presiden dimintakannya memberhentikan Sjahrir dan membubarkan kabinetnya serta mendesak agar menyetujui daftar menteri yang disusunnya. Ternyata Presiden Soekarno tidak bisa digertak maupun diatur, bahkan Soedarsono sendiri dilucuti. Lalu bersama pengikut-pengikutnya ditahan.<sup>164</sup> Kejadian ini menggambarkan bahwa Soedarsono telah melawan

---

<sup>160</sup>. PP adalah golongan oposisi pemerintah yang dipimpin Tan Malaka.

<sup>161</sup>. Iwa Kusuma Sumanteri, *Sang pejuang dalam gejolak sejarah* ; Bandung: Satya Historica, 2002, hal 253.

<sup>162</sup>. Disebut sebagai Dewan Pertahanan Nasional dengan Presiden sebagai ketuanya

<sup>163</sup>. Osman Raliby, *op.,cit.* Hal 326

<sup>164</sup>. Wawancara dengan Pamoe Rahardjo, mantan Ajudan Presiden Soekarno th 1946, 20 Agustus

kebijakan pemerintah di bawah Presiden Soekarno, padahal Sjahrir sudah bukan Perdana Menteri lagi.

Setelah beberapa lama kepala pemerintah dipegang langsung Presiden Soekarno, pada bulan Oktober 1946 jabatan Perdana Menteri diserahkan kembali kepada Sjahrir, dan kabinet Sjahrir ketigapun terbentuk.

Dalam kedudukannya hanya sebagai Menteri Luar Negeri, saat belum membentuk kabinetnya yang ke III, Sjahrir tidak tinggal diam, dirasakan juga bahwa strategi diplomasi lain perlu dilakukan, misalnya untuk melakukan lobi internasional agar memunculkan dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia. Dua proyek besar pemerintah yang sudah dimulai sejak awal tahun 1946 dilanjutkan bahkan ditingkatkan dan dikembangkannya. Proyek-proyek tersebut adalah apa yang dikenal sebagai operasi POPDA (Panitia Oeroesan Pemulangan Djepang dan APWI) dan “bantuan beras bagi India”.

Operasi POPDA amat penting karena peranan Indonesia amat dibutuhkan, disebabkan keterbatasan Sekutu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat kamp-kamp Jepang dan kaum interniran berada di daerah pedalaman wilayah RI. Operasi ini dapat dikategorikan misi kemanusiaan oleh Indonesia yang mendapat simpati Internasional. Melalui organisasi POPDA, di mana TRI telah bekerja sama dengan tentara Inggris, telah berhasil dilakukan pemulangan tentara Jepang dan evakuasi APWI secara besar-besaran. Sebenarnya pelaksanaannya telah berlangsung mulai tanggal 9 Januari 1946, namun atas perjanjian Sekutu dan RI, proyek ini resminya baru berlangsung dari tanggal 29 April 1946 dan berakhir tanggal 30 Mei 1947.<sup>165</sup> Jumlah tentara Jepang yang berhasil diangkut dari pedalaman daerah Republik melalui beberapa pelabuhan seperti Tegal dan Probolinggo, jumlahnya mencapai 35.545 orang. Sedangkan jumlah APWI yang berhasil dievakuasi pada periode yang sama, diperkirakan mencapai 36.000 orang.<sup>166</sup>

Kebijakan kedua adalah “bantuan beras bagi India”. Pasca perang, India mengalami kekurangan pangan, dan Indonesia dengan kesanggupan yang ada, berminat melakukan bantuan. Untuk ini secara simbolis pada undangan makan malam tanggal 19 Mei 1946 yang dihadiri juga para pembesar RI, Perdana

---

2000. Lihat juga S.K Pelita Rakyat 6 April 1948. Pamoerhardjo menjelaskan.

<sup>165</sup> S.K Soelech Ra'jat 31 Mei 1947.

<sup>166</sup> *Ibid.*

Menteri Sjahrir menyerahkan keranjang penuh berisi padi ditutupi bendera merah putih kepada perwakilan India H.L Punjabi, pertanda Indonesia telah memulai bantuan tersebut. Pada tanggal 1 Agustus 1946 tersebar kabar pada media internasional secara resmi kalau Sjahrir telah mengadakan perjanjian bilateral soal bantuan beras kepada India yang mengalami kelaparan itu. Menghadapi ini Belanda menunjukkan kekurangsenangannya, di mana penimbunan beras di pelabuhan Banyuwangi telah dibakar Belanda dengan dalih memerangi kaum ekstrimis.

Jelas proyek pemulangan Jepang, evakuasi APWI dan proyek bantuan beras untuk India merupakan strategi diplomasi pemerintah saat itu yang jitu. Seorang wartawan *United Press* di Jakarta bernama Robert Clurman mengomentari dalam tulisannya bahwa perjanjian Sjahrir dan Punjabi mengenai bantuan beras kepada India dapat diartikan pengakuan internasional yang pertama terhadap Republik Indonesia.<sup>167</sup>

Dalam rangka memulai perundingannya dengan Belanda pada tanggal 14 Oktober 1946 kabinet Sjahrir ketiga telah dibentuk. Anggota kabinet Sjahrir segera diumumkan. Susunan kabinet Sjahrir ketiga (Kabinet RI keempat) ini lebih baik karena didukung koalisi partai yang sedang berkuasa saat itu seperti PNI dan Masyumi. Beberapa wajah baru muncul dalam formasi ini, antara lain Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem (Masyumi), Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprodjo (PNI), Menteri Keuangan Sjafrudin Prawiranegara (Masyumi), Menteri Kemakmuran dr AK Gani (PNI), Menteri Perhubungan Ir. Djuanda, Menteri Pengajaran Suwandi, dan sebagai Menteri Pertahanan tetap dipegang Amir Sjarifudin (Partai Sosialis).<sup>168</sup>

Sjahrir dan kabinet barunya kini sudah siap menghadapi perundingan dengan Belanda. Dalam periode inilah terjadi perundingan Indonesia-Belanda di Jakarta dan Linggajati. Pada sidang paripurna KNIP ke empat di Malang yang berlangsung dari tanggal 25 Februari 1947 sampai awal Maret 1947, persetujuan Linggajati berhasil diratifikasi pihak parlemen dan pada tanggal 25 Maret 1947, Linggajati ditandatangani kedua delegasi, Indonesia-Belanda.

Kabinet Sjahrir ketigapun tidak bertahan lama karena pergolakan politik di dalam negeri yang memanas. Maka Sjahrir tidak dapat berbuat lain, sesuai dengan

<sup>167</sup>. Osman Raliby, *op., cit.* hal 367

<sup>168</sup>. Osman raliby, *op.,cit.* Hal 419

asas demokrasi, tanggal 27 Juni 1947 dia meletakkan jabatan dan mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno.

Penyebab jatuhnya kabinet Sjahrir kali ini adalah pertama, kekuatan di dalam sayap kiri sendiri, yaitu teman-teman dekat Sjahrir sesama partai Sosialis. Keadaan tambah buruk ketika diantara anggota partai terjadi perbedaan faham dan ideologi partai. Perbedaan faham tampaknya terkait pada soal pemerintahan interim yang diusulkan Belanda dan soal *gendarmerie*.<sup>169</sup> Faktor kedua yang menyebabkan Sjahrir mundur sebagai Perdana Menteri, adalah tidak menentukannya perundingan Indonesia Belanda pasca persetujuan Linggajati. Perundingan Indonesia-Belanda pasca penandatanganan Linggajati tidak semulus pra Linggajati. Dalam sidang-sidang terjadi kealotan perundingan dan salah interpretasi maksud dari pasal-pasal perundingan oleh masing-masing delegasi. Di dalam pemerintahan Belanda, khususnya dalam parlemen, terjadi diskusi yang keras antara Partai Katolik yang anti persetujuan Linggajati dengan Partai Buruh yang pro Linggajati. Akibatnya kedua delegasi selalu bolak-balik berkonsultasi pada pemerintah masing-masing dan saling mengirim nota. Perundingan menjadi memakan waktu lama dan tidak efisien. Perundingan juga sering tertunda karena berbagai hal. Misalnya Perdana Menteri Sjahrir diundang ke New Delhi India tanggal 23 Maret 1947.<sup>170</sup> Pada tanggal 7 Mei 1947 sampai 24 Mei 1947, telah datang Perdana Menteri Belanda Beel beserta Menteri Urusan Seberang Lautan Jonkman dan beberapa menteri lainnya.<sup>171</sup> Mereka mengunjungi daerah-daerah di luar Jawa dan melakukan perundingan dengan tokoh setempat. Berita yang sampai ketelinga kaum oposisi soal hasil Linggajati selanjutnya amat memberatkan kedudukan pemerintahan Sjahrir.

Pada tanggal 19 Juni 1947 malam hari, Sjahrir melakukan pidato radionya di Jakarta. Antara lain dikatakannya: "Sebenarnya nota balas Republik tidak memuat lain daripada membentangkan perasaan serta pandangannya dari Republik terhadap garis-garis besar yang ditampilkan oleh nota Belanda. Begitulah sebenarnya ada perlu paduan atau penukaran pikiran. Hanya saja semenjak nota balas itu diserahkan kepada Komisi Umum (Komisi Jenderal) sampai akan

---

<sup>169</sup>. Rosihan Anwar, *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*; Jakarta: Grafiti Press, 1995, hal 133-135

<sup>170</sup>. Sjahrir diundang Nehru untuk menghadiri "*Asian Relation Conference*" (23 Maret-2 April 1947).

<sup>171</sup>. Kedatangannya untuk melihat perundingan daerah-daerah federal di Sul.Sel, Kal.Bar, Bangka Belitung.

sekarang tidak ada dibikin penukaran pikiran usul-usul yang ditampilkan, begitu pula tidak dibikin perbandingan atau paduan masing-masing *standpunt*, walaupun rasa curiga meningkat dan suasana tambah buruk sehingga orang belum mengetahui kemungkinan-kemungkinan manakah yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Tentang ini kita tidak usah menyesal apa-apa. Akan tetapi saya merasa berkewajiban untuk mengumumkan kepada ramai bahwa maksud sebenarnya dari pemerintah Republik adalah mencegah sesuatu kemungkinan orang terseret oleh hawa nafsu, yakni hawa nafsu yang merendahkan kita sebagai manusia".<sup>172</sup>

Dengan berakhirnya kabinet Sjahrir ketiga (kabinet RI ke empat), kepala pemerintah dipegang langsung oleh Soekarno sebelum terpilihnya kembali formatir kabinet yang baru. Tanggal 2 Juli 1947 Soekarno menunjuk Amir Sjarifudin, dr AK Gani dan Setiadjit Soegondo sebagai formatir kabinet baru. Kabinet ke lima R.I dilantik tanggal 3 Juli 1947, dipimpin oleh Amir Sjarifudin sebagai Perdana Menteri.

Kabinet yang kemudian dinamakan kabinet Amir Sjarifudin pertama ini tidak membuat kebijakan baru dan hanya melanjutkan perundingan dengan Belanda dengan dasar persetujuan Linggajati. Tapi situasi nasional sudah amat buruk. Ditambah kemunduran Sjahrir, Belanda ragu-ragu melakukan perundingan lanjutan, dan nampaknya kedua pihak lebih condong untuk berperang. Walaupun mulai ada campur tangan internasional untuk mencegah meluasnya konflik Indonesia-Belanda menjadi konflik militer, tgl 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi militernya yang pertama.

Agresi ini tidak lama, tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar kedua pihak menghentikan permusuhan dan kembali berunding.

Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri, Sjahrir diangkat sebagai penasihat pemerintah diperbantukan kepada Presiden. Dan sebagai bagian dari fungsinya yang baru, ia diharapkan akan lebih banyak tinggal di istana kepresidenan di Yogyakarta<sup>173</sup>.

---

<sup>172</sup>. S.K Soeleh Ra'jat 21 Juni 1947. *Keterangan Sutan Sjahrir*.

<sup>173</sup>. Rudolf Mrazek, *op.,cit* ; hal.616

## 2.4 Keadaan Dalam Negeri Belanda Selama Perang dan Pasca Perang Dunia

### II

Jerman melakukan invasi ke Belanda pada musim panas tanggal 10 Mei 1940 yang selesai hanya dalam waktu 5 hari. Hal ini merupakan pengalaman baru dalam negeri Belanda yang paling pahit di mana pertahanan militer dalam negerinya kenyataannya amat lemah. Ternyata bukan hanya kaum tentara, tapi juga tatanan politiknya di bawah pemerintahan sipil ikut ambruk.

Berkaitan dengan daerah koloni Belanda di Indonesia, seolah putus hubungan antara negeri induk dan jajahannya di Hindia Belanda. Menteri koloni, Mr Ch JMI. Welter amat prihatin dan berusaha mencari jalan keluar. Peluang tentu saja ada, antara lain untuk meniru Perancis seperti apa yang dilakukan Jenderal Petain dengan pemerintahan Vichy-nya<sup>174</sup>. Ini bukan hal aneh, mengingat banyak menteri Belanda memang takut perang.

Sebelum Jerman berhasil menduduki seluruh negeri Belanda, pada tanggal 13 Mei 1940 Ratu Belanda Wilhelmina telah sempat melarikan diri ke Inggris dan membentuk pemerintahan di pengasingan di kota London. Jonkheer Dirk Jan de Geer selaku Perdana Menteri ternyata berpikiran pendek untuk menyerah saja kepada Jerman sehingga menimbulkan kegamangan dalam kalangan pemerintahan pengasingan. Karena Ratu Wilhelmina sangat bersemangat melawan fasisme, maka De Geer yang bersimpati pada Jerman itu dipaksa mundur dan digantikan menteri kehakiman dari partai *antirevolutioner*, P.S. Gerbrandy.<sup>175</sup>

Dalam pemerintahan pengasingan itu dan selama perang dunia ke II berlangsung, Belanda ikut berperang bersama sekutu-sekutunya melawan Jerman. Sementara itu di Den Haag, pemerintahan boneka Jerman yang berkuasa di Belanda sejak tanggal 29 Mei 1940 sampai 5 Mei 1945 dipimpin oleh *Reichskommissar* Arthur Seyss Inquart (seorang anggota Nazi Austria). Jelas kebijakan pemerintah boneka ini mengikuti kebijakan Nazi Hitler.

Selanjutnya setelah pasca serangan Jepang ke Pearl Harbour, 7 Desember 1941 Belanda juga menyatakan perang dengan Jepang. Gubernur Jenderal

<sup>174</sup>. Marsekal Henri Philippe Petain pada musim panas 1940 berkompromi sehingga memunculkan pemerintahan Vichy dengan penjajah Jerman.

<sup>175</sup>. Kemudian atas izin pemerintah boneka di Den Haag, de Geer akhirnya diizinkan kembali Kenegeri Belanda. Lihat Hans Jacobs/Jan Roelands. *Op., cit.* hal 135-136

Starckenborg memiliki kebijakan sendiri dalam menghadapi perang dunia ke II khususnya perang Pasifik. Putusnya hubungan dengan negeri induk saat Jerman menduduki Belanda, membuatnya bertambah jauh untuk memikirkan nasib Hindia-Belanda dari kacamata kaum pergerakan kebangsaan. Seperti diketahui, pemerintahan yang dipimpinnya ditahun 1940, tidak berusaha mendekati kaum nasionalis kooperatif. Sebaliknya hendak mempertahankan *Status Quo* sambil menunggu datangnya kesempatan yang lebih baik. Bukan hal aneh kalau dia tetap menyatakan setia kepada ratu Belanda yang kini berada di pengasingan di London.<sup>176</sup>

Pada bulan Maret 1941, jauh sebelum Jepang menyerang Hindia, Menteri Koloni Welter dan Menteri Luar Negeri van Kieffens datang ke Batavia dari London. Meskipun kedatangannya dengan tangan hampa, di mata pemerintah Hindia Belanda mereka adalah wakil pemerintah yang sah saat itu. Dalam pidatonya, Welter berkata: "Saat ini pemerintahan Nederland di Den Haag yang berada di bawah nazi Jerman sebenarnya sebagai penanggung jawab koloni, tapi ternyata terbukti mereka tidak mampu melakukan reformasi baru karena merupakan pemerintahan yang tidak demokratis"<sup>177</sup>. Maksudnya, pemerintah pengasingan London ingin menunjukkan bahwa hegemoni mereka jauh lebih berkuasa ketimbang Den Haag. Disamping itu untuk memberikan jaminan-jaminan pada kaum pergerakan bahwa kebijakan pemerintah dibawah Ratu Wilhelmina tetap eksis dan tidak mendua. Selain itu kedatangan kedua Menteri Wilhelmina ke Batavia ini berkaitan dengan wacana Konferensi Kerajaan pasca perang. Rencana Konferensi Kerajaan itu disampaikan sendiri oleh Welter lewat radio Nirom Batavia pada tanggal 7 Mei 1941. Soal yang sama telah disampaikan pula oleh Ratu Wilhelmina sendiri dalam pidato radio dari London tanggal 10 Mei 1941 (satu tahun setelah penyerbuan Jerman). Pidato ini diucapkan dengan mengandung janji bahwa setelah perang berakhir akan diadakan reorganisasi besar-besaran dalam hubungan antara negeri Belanda dan koloninya di Indonesia. Pidato ini hampir saja menghapuskan kekecewaan yang dialami oleh orang-orang Indonesia.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup>. Hans Jacobs/Jan Roelands. *Op.,cit.*, Hal 135-136

<sup>177</sup>. *Ibid.*

<sup>178</sup>. Mc.Turn Kahin.*op.,cit* , hal 99



Satu tahun kemudian, karena selalu ada semacam keragu-raguan Welter terhadap kebijakannya untuk bersikap keras pada Jepang sebagai penguasa Hindia yang baru, akhirnya atas keputusan Ratu, Welter digantikan oleh Van Mook sebagai Menteri Koloni pada tanggal 25 Mei 1942<sup>179</sup>. Sejak itu pos Van Mook di Australia selaku Letnan Gubernur Jenderal di tinggalkan.

Soal penunjukan Van Mook sebagai Menteri Koloni, sebenarnya lebih sebagai penurunan pangkat dari pada sebuah promosi jabatan sebelumnya yaitu Letnan Gubernur Jenderal,<sup>180</sup> Namun dalam jabatan yang disandangnya kemudian ini, van Mook banyak berhubungan dengan Sri Ratu dan dengan pemerintah asing, misalnya Amerika Serikat yang mulai menguasai medan Perang Pasifik. Dalam tugasnya tersebut Van Mook beberapa kali pulang balik Washington-London. Bukan rahasia umum, rupanya Ratu Wilhelmina amat senang pada menterinya yang pandai membaca zaman itu. Banyak pidatonya selama perang, konseptornya adalah Van Mook. Pidato-pidato ini rupanya secara tidak langsung berhasil memunculkan simpati Inggris dan Amerika Serikat kepada Belanda.<sup>181</sup>

Pada akhir tahun 1944, Belanda diusahakan dibebaskan Sekutu dari kekuasaan Jerman. Pada bulan Februari 1945, kabinet Gerbrandy pertama bubar digantikan kabinet Gerbrandy kedua. Melihat perkembangan yang terjadi pasca perang, pemerintah Belanda segera menyesuaikan diri dalam membuat kebijakan-kebijakannya yang baru. Kabinet Gerbrandy ketiga terbentuk saat pemerintah masih di London namun sudah siap akan kembali ke tanah air. Salah satu peristiwa penting dalam periode ini adalah ditunjuknya Schmutzer menggantikan Van Mook sebagai Menteri Koloni atau Menteri Jajahan yang pada masa Schmutzer memangku jabatan tersebut, kementerian jajahan atau koloni berubah nama menjadi "kementerian daerah seberang lautan".<sup>182</sup> Setelah kapitulasi Jerman kepada Belanda tanggal 5 Mei 1945, kabinet Gerbrandy ketiga menyatakan mengundurkan diri. Kabinet Schermerhorn terbentuk pada tanggal 24 Juni 1945 .

---

<sup>179</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit*, hal 27

<sup>180</sup>. *Ibid*. hal. 25.

<sup>181</sup>. *Ibid*

<sup>182</sup>. *Ibid*, hal 29

## 2.5 Kebijakan Pemerintahan Kabinet Schermerhorn

Kabinet pasca perang Belanda yang memerintah di tanah airnya kembali adalah kabinet Schermerhorn. Kabinet ini merupakan koalisi dari berbagai partai. Sebagaimana diketahui RKSP (*Rooms Katholieke Staats Partij*) atau partai Katolik sebelum perang telah berubah nama menjadi KVP (*Katholieke Volks Partij*) dan sejumlah partai lain seperti *Vrijzinnig Democratische Bond*, *Christen Democratische Unie* dan termasuk SDAP (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij*), telah berfusi dan membentuk PvdA (*Partij van de Arbeid*)<sup>183</sup>. PvdA dapat dianggap merupakan partai buruh Belanda satu-satunya saat itu.

Baik KVP maupun PvdA adalah organisasi politik berpengaruh dan terkenal saat pasca perang, mengingat selama wilayah Belanda diduduki oleh Jerman banyak tokohnya yang bergerak di bawah tanah dan anti fasis. Di antaranya terdapat nama Beel, Schermerhorn, Drees, Romme dan lain-lain.<sup>184</sup>

Perdana Menteri Profesor Ir. Willem Schermerhorn lahir di Akersloot Schermerpolder Noord Holland pada tahun 1894. Dia bersekolah di H.B.S di Alkmar, kemudian di fakultas teknik Delft. Dirinya sempat diangkat sebagai guru besar sebelum perang. Karimnya sebagai ilmuwan diawali sebagai sarjana teknik sipil yang berprofesi sebagai ahli *Kartografi*. Untuk ini pada tahun 1939, dia sempat bertugas di Hindia terkait pembuatan peta dengan pesawat terbang untuk pulau Irian. Kemudian setelah itu dirinya terjun penuh di bidang politik, sampai kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri Belanda pasca perang mewakili partai buruh dari Pvd.A.<sup>185</sup> Sebelum perang, Schermerhorn mula-mula bergerak dalam kegiatan anti fasis yang akhirnya bergabung dalam partai sosialis Belanda. Dia pernah menjadi ketua dari "*Nederlandse Beweging voor Eenheid en Democratie*" yang dalam perannya itu, membuat namanya terkenal sebagai negarawan yang piawai. Karena sempat berjuang di bawah tanah selama perang dunia kedua dalam periode pendudukan Belanda oleh Jerman, akibat kegiatannya tersebut dia ditahan dalam biara *St Michielsgestel* bersama dengan sejumlah tokoh anti fasis lainnya.<sup>186</sup>

<sup>183</sup>. *Ibid* hal 80. Lihat Jan bank, *Katolik di Masa Revolusi Indonesia (terjemahan)*; Jakarta: Grasindo, 1999 hal 192

<sup>184</sup>. Hans Jacobs/Jan Roelands. *Op.,cit.*, hal 178

<sup>185</sup>. *Ibid*, hal 166-168

<sup>186</sup>. *Ibid*, hal 178

Setelah menjabat Perdana Menteri, Schermerhorn segera memunculkan kebijakannya. Antara lain untuk melakukan perbaikan dalam negeri dan menata kembali koloni di Hindia Belanda. Sedikit berbeda dengan kabinet sebelum perang, kabinet Schermerhorn dibentuk dengan tugas khusus yaitu untuk “pemulihan dan pembaharuan” dalam negeri. Tugas ini merupakan perintah langsung Ratu Wilhelmina yang dikembangkan menjadi program utamanya yang antara lain berbentuk gagasan-gagasan pemulihan ekonomi dan pembaharuan kemasyarakatan.

Sementara Parlemen Belanda yang terdiri dari Majelis Rendah dan Tinggi saat ditinggalkan pemerintah pelarian pada tahun 1940 amat kacau, oleh karena itu harus direhabilitasi dalam periode kabinet Schermerhorn. Ternyata selama pendudukan Jerman, sejumlah anggotanya banyak hilang karena meninggal dunia dan ketika pemerintah kembali ke tanah air, banyak anggota parlemen yang di pecat dengan alasan memihak fasis Jerman.<sup>187</sup> Akibat keadaan kedaruratan di atas, maka nampaknya kabinet Schermerhorn berjalan sendiri dan menjadi terpisah dari parlemennya. Kebijakan pemerintah banyak memotong kekuasaan parlemen itu, sehingga mengakibatkan kekuatan oposisi terbesar yaitu KVP dapat berbicara amat vokal dan selalu menyerang kebijakan pemerintah. Salah satu yang sering dipermasalahkan golongan oposisi adalah tugas khusus kabinet dalam menangani soal Hindia Belanda, terutama karena sudah banyak yang tahu di Belanda, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Semua ini menjadi tugas utama yang amat berat bagi Menteri Seberang Lautan yang baru, Prof. Dr Logemann. Namun demikian sebagai politikus senior, Schermerhorn tetap optimistis.<sup>188</sup>

Saat memperkenalkan diri sebagai Perdana Menteri yang disiarkan melalui radio tanggal 27 Juni 1945, Schermerhorn berbicara meyakinkan atas kebijakan politiknya, khususnya soal Indonesia. Kenyataanya kebijakan ini berhasil didukung rakyat secara luas. Ada dua tugas penting yang diembannya yang sesungguhnya merupakan warisan dari kabinet lama yaitu pertama “pembebasan Hindia-Belanda sehingga bisa kembali sebagai koloni yang mendatangkan keuntungan besar bagi negeri Belanda dan yang kedua menyelenggarakan

---

<sup>187</sup>. *Ibid*, hal 166-168

<sup>188</sup>. *Ibid*.

Konferensi Kerajaan”.<sup>189</sup> Konferensi Kerajaan yang sudah lama dibicarakan itu adalah “sebuah upaya untuk membentuk tatanan baru atas hubungan pemerintahan induk di Belanda dan koloninya, termasuk Hindia Belanda”.

Setelah Van Mook selaku Letnan Gubernur Jenderal di Hindia melaporkan bahwa dia telah siap mengelola Hindia selaku pimpinan NICA, Perdana Menteri Schermerhorn segera memberikan instruksi-instruksinya melalui Menteri Seberang Lautan, Logemann.<sup>190</sup>

Berbicara mengenai NICA yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda, tidak lepas kaitannya dengan rehabilitasi van Mook untuk kembali ke Australia setelah menjabat sebagai Menteri Koloni. Adalah Perdana Menteri Gerbrandy yang menunjuk kembali Van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal pada tanggal 14 Desember 1944. Padahal baru tanggal 3 Maret 1945 dirinya berhasil tiba di Australia sehingga bisa membangun kembali Pemerintahan Hindia Belanda pasca perang (bukan lagi pemerintahan dalam pengasingan).<sup>191</sup>

Usaha Belanda untuk menangani Hindia Belanda secara sepihak amat tidak mudah. Karena, sejak tanggal 15 Agustus 1945 masalah Belanda berpindah jadi urusan SEAC. Meskipun dalam badan ini ada bagian *Civil Affairs*, dalam perkembangannya NICA masih tetap ada. Kurang lebih dalam periode inilah Van Mook menuju Batavia dimana dia baru tiba resmi pada awal Oktober 1945 dengan pesawat militer di Kemayoran.

Pada awal kedatangannya di Indonesia, ada kesan kalau Van Mook sedikit melawan arus kebijakan pemerintah Schermerhorn. Misalnya melakukan pertemuan dengan Soekarno pada tanggal 10 Oktober 1945.<sup>192</sup> Meskipun pada dasarnya pertemuan ini atas kehendak Inggris, hal ini menimbulkan ketidak senangan bahkan menunculkan keberangan Perdana Menteri Belanda. Dari Den Haag ada berita: ”Permusyawaratan antara pemimpin Indonesia dengan Dr.Van Mook mungkin tidak diteruskan karena adanya keterangan dari pemerintah Belanda bahwa permusyawaratan antara Ir Soekarno dan Dr.Van Mook, melanggar instruksi resmi dari pemerintah Belanda”.<sup>193</sup> Namun demikian Perdana Menteri Schermerhorn juga menyadari bahwa Inggris yang sudah melakukan

---

<sup>189</sup>. *Ibid.*

<sup>190</sup>. *Ibid*

<sup>191</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit*, hal 43

<sup>192</sup>. *Ibid.*

<sup>193</sup>. *Ibid*, Lihat juga S.K Warta Indonesia 6 November 1945

perjanjian bilateral dengan Belanda soal koloni Hindia Belanda, adalah kekuatan pendukung penting yang bisa menjembatani penyelesaian masalah Indonesia-Belanda. Kekuatan pendukung ini dalam kabinet Inggris pasca perang dikuasai partai buruh di bawah Perdana Menteri CR. Attlee. Tidak lepas dari itu yang cukup penting juga adalah peran Menteri Luar Negeri E. Bevin yang senantiasa memberikan bantuan kepada rekannya Menteri Luar Negeri van Kleffens dalam kabinet Schermerhorn.<sup>194</sup>

Selama pemerintahan Perdana Menteri Schermerhorn, hubungan Den Haag-London terkesan resmi tapi juga harmonis. Kesan awal ini bukan tidak mempengaruhi kebijakan SACSEA, yaitu Mounbatten yang sejak awal juga telah bertemu Van Mook di Kandy. Sudah jelas Mountbatten menginginkan hubungan Indonesia-Belanda, baik pula.

Sementara kabinet Schermerhorn yang berlangsung singkat ini, memerintah negeri Belanda sampai awal Mei 1946. Selanjutnya tanggal 17 Mei 1946 diadakan pemilu parlemen (*Staten Generaal*) pertama sesudah perang. Pemilu berlangsung sepanjang hari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17.00 sore. Hasilnya, Partai Buruh atau PvdA mendapatkan 29 kursi, Partai Katolik atau KVP mendapat 32 kursi, Partai Anti Revolusioner 13 kursi, Partai Kristen 8 kursi, Partai Kemerdekaan 6 kursi, Partai Komunis 10 kursi dan Staatkundige Gereformeerde Partij mendapat 2 kursi.<sup>195</sup>

Dengan demikian terjadi kekuatan berimbang di antara anggota parlemen terutama antara partai besar, seperti Partai Buruh (PvdA) dan Partai Rakyat Katolik (KVP). Sesuai tatakrama pemilu demokratis, pada tanggal 18 Mei 1946 kabinet Schermerhorn berhenti. Pembentukan kabinet baru di Belanda memakan waktu lama, apalagi pada waktu itu kabinet harus menghadapi persoalan pertikaian dengan Indonesia. Namun karena partai Katolik unggul sedikit, sudah bisa diperkirakan kabinet koalisi yang muncul. Schermerhorn sebagai Perdana Menteri dari partai buruh, harus mundur digantikan LJM Beel dari KVP yang sebelumnya menjabat Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Schermerhorn.<sup>196</sup>

Louis Josef Maria Beel lahir di Roermond pada tanggal 12 April 1902. Pendidikannya Bisschoppelijk College (akademi keuskupan) di Roermond.

---

<sup>194</sup>. *Ibid*

<sup>195</sup>. Lambert Giebels, *Beel van vazal tot onderkoning*; Den Haag: Sdu Uitgevers, 1996, hal 10.

<sup>196</sup>. *Ibid*, hal 83

Berhubung ayahnya meninggal dunia, seorang pastur bernama PJM van Gils memberikan bantuan keuangan sehingga Beel dapat melanjutkan studinya ke *Katholieke Universiteit* di Nijmegen. Minatnya amat besar pada bidang pemerintahan, oleh karena itu disertasinya berjudul "*Zelfbestuur afhankelijke decentralisatie*".<sup>197</sup> Masa depan Beel ternyata berlanjut dalam dunia birokrasi pemerintahan. Setelah lulus sarjana, dia bekerja pada sekretariat kotapraja Roermond, kantor pemerintah daerah Zwolle dan pada kantor kota praja Eindhoven. Di tempat terakhir ini, pada tahun 1934 dia diangkat sebagai sekretaris kotapraja. Sifat-sifatnya yang tekun, efisien dan kebiasaannya untuk menyimpan rahasia membuatnya menjadi pejabat yang terpuji baik. Selama pendudukan Jerman, karena aktifitas politiknya dan berjuang di bawah tanah, bersama Schermerhorn dan tokoh Belanda lainnya dia ditahan di biara St Michielsgestel.

Pada tanggal 3 Juli 1946, oleh pemerintah secara resmi diumumkan nama-nama menteri kabinet Beel. Yaitu, Beel sebagai Perdana Menteri, merangkap Menteri Dalam Negeri. Baron van Boetselaer sebagai Menteri Luar Negeri, Jonkman Menteri Seberang Lautan, Fievez sebagai Menteri Penerangan, Gieben sebagai Menteri Pendidikan, Drees sebagai Menteri Sosial, Mansvelt sebagai Menteri Pertanian dan Perikanan, van Maarsseveen sebagai Menteri Kehakiman, Liefinck Menteri Keuangan, Vos Menteri P.U, Ringers Menteri Pembinaan dan van Klefens sebagai Menteri Negara. Karena ada perbedaan yang amat mendasar dalam konsep pemikiran penyelesaian dekolonisasi Indonesia, misalnya antara partai Katolik dan partai buruh, masalah yang akan dihadapi pemerintah menjadi rumit. Kedua bangsa dan negara yaitu Belanda dan Indonesia yang sedang melangkah untuk berunding, harus berdasarkan antara lain pada kerumitan di atas.

Disadari bahwa terpilihnya Beel akan menimbulkan politik Belanda yang amat kaku, yang tentunya mendatangkan kesukaran baru bagi kiat maupun langkah-langkah yang harus diambil Letnan Gubernur Jenderal Van Mook pada hari-hari mendatang ditahun 1946 dan awal 1947. Namun demikian karena kabinet Beel merupakan kabinet koalisi, dimana tetap selalu terjadi kompromi antara kedua partai besar penguasanya yaitu KVP dan PvdA untuk mencari jalan keluar menangani masalah Indonesia.

---

<sup>197</sup>. *Ibid.*

Untuk menangani dekolonisasi, sejak awal timbul ide untuk memunculkan lembaga baru yang diberi tugas melanjutkan perundingan Indonesia-Belanda. Lembaga ini direncanakan dinamakan "Komisi Jenderal". Ide munculnya Komisi Jenderal datang dari direktur politik Kementerian Luar Negeri Belanda Jhr HFLK van Vredenburg. Dirinya pada bulan April dan Mei 1946 berkunjung ke Indonesia dan telah membuat sebuah laporan khusus. Pada kesempatan ini dia teringat pada peristiwa pada abad ke 19 soal peranan *Commissie Generaal* (Komisi Jenderal), yang bertugas memberikan bantuan kepada Gubernur Jenderal berkaitan dengan tugas-tugasnya untuk memerintah Hindia. Saat itu raja Belanda sedang berusaha menutup kebijakan *opperbestuur*.<sup>198</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Yong Mun Cheong: "Pengiriman Komisi Jenderal ke Indonesia bukan hal baru dalam hubungan Indonesia-Belanda. Pada tahun 1815, Komisi Jenderal ditunjuk untuk mengambil oper kontrol administrasi di Jawa dari Inggris. Pada tahun 1825 Komisi Jenderal ditugaskan untuk meningkatkan ekonomi dan finansial dalam rangka rehabilitasi perang Jawa (1825-1830). Kemudian, pada tahun 1832 Komisi Jenderal dikirim kembali untuk mengimplementasi *Cultuur Stelsel*".<sup>199</sup>

Soal Komisi Jenderal abad ke 20 kali ini, pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi keadaan darurat di Hindia sehingga Den Haag secara cepat dapat menormalkan kembali pemerintahan kolonial yang dipimpin Gubernur Jenderal Belanda. Dalam rapat kabinet tanggal 15 Juli 1946, telah dibicarakan untuk menetapkan undang-undang guna pembentukan Komisi Jenderal. Atas usul Ratu Belanda, sebagai calon ketua ditunjuk mantan Perdana Menteri Ir W.Schermerhorn Anggota lainnya yang ditunjuk adalah mantan walikota Amsterdam F De Boer (dari Partai Liberal), dan Van Poll dari KVP.<sup>200</sup> Nampak, meskipun tidak menjabat lagi sebagai tokoh eksekutif, peranan Schermerhorn tetap dibutuhkan agar dunia tetap melihatnya sebagai sosok yang selalu muncul dalam menangani masalah Indonesia-Belanda.<sup>201</sup>

<sup>198</sup>. Dr M.D Bogaarts. *Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945* ; Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1995, hal 231. Komisi Jenderal terdahulu ini terbentuk pada tahun 1815 saat Hindia Belanda baru selesai di jajah Inggris.

<sup>199</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit.* Hal. 83

<sup>200</sup>. DR M.D Bogaarts. *op.,cit.* Hal 231

<sup>201</sup>. Yong Mun Cheong, *op.,cit.* Hal 84

<sup>201</sup>. S.K Merdeka Soeara Rakjat Repoeblik Indonesia, 23 November 1946

Awalnya penunjukan Schermerhorn sebagai ketua Komisi Jenderal menimbulkan perdebatan yang keras dalam parlemen, karena banyak anggotanya dari partai Katolik berkeberatan. Tapi akhirnya bisa selesai karena Ratu Belanda kembali ikut campur tangan. Akibatnya, ketika persetujuan Linggajati telah diparaf dan akan diratifikasi parlemen Belanda, KVP merupakan unsur yang banyak menghambat sehingga memunculkan embel-embel tambahan penjelasan penafsiran baru. Persetujuan Linggajati yang kembali ke Indonesia dikenal sebagai "*Aangeklede Linggajati*" atau Linggajati yang diberi baju, karena atas pengaruh kekuatan politik yang berkuasa (dari KVP) telah ditambah interpretasi sendiri yang tidak disetujui Indonesia.

Kebijakan Komisi Jenderal yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan diparafnya naskah Linggajati tanggal 15 November 1946, menuai umpatan kaum anti Linggajati. Bahkan ada berita di Belanda Komisi Jenderal dibubarkan dan Van Mook yang ketika perundingan merupakan bagian dari delegasi Belanda diusulkan diganti dengan Romme sebagai Letnan Gubernur Jenderal.<sup>202</sup> Senang atau tidak senang, Linggajati akhirnya ditandatangani juga pada tanggal 25 Maret 1947. Selanjutnya karena hubungan yang tidak serasi lagi antara Indonesia-Belanda dan dimotifasi oleh kepentingan politik, ekonomi dan militer pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda menganggap gencatan senjata 14 Oktober 1946 tidak berlaku lagi dan melancarkan Aksi Polisionil pertamanya yang dipihak Indonesia dikenal sebagai Agresi Militer Belanda pertama.

---

<sup>202</sup>. S.K Merdeka Soeara Rakjat Repoeblik Indonesia, 23 November 1946



## BAB 3

### PERUNDINGAN INDONESIA-BELANDA

#### 3.1 Awal Perundingan

Selaku pimpinan SEAC, Mounbatten dalam tugasnya di Indonesia berusaha memunculkan kebijakan regionalnya. Dia menganggap konflik Indonesia-Belanda mirip dengan soal Indochina-Perancis, namun pemerintah Republik Indonesia lebih kokoh dibanding Vietnam. Disamping itu karena adanya pemikiran bahwa Belanda sesungguhnya lebih lemah di banding Perancis di bidang militer maupun politik. Masalah yang dihadapi Belanda di Indonesia memang lebih sulit, rumit dan berlarut-larut.<sup>1</sup> Sudah bias dibaca, Belanda yang menjajah Indonesia sebelum perang, telah berusaha kembali dengan memanfaatkan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia kedua.

Pada awal Oktober 1945, kesatuan kecil sipil Belanda tiba. Langkah pertama mereka adalah membuka kegiatan organisasi *Netherlands Indies Civil Administraton* (NICA) di Jakarta. Pada tanggal 2 Oktober 1945, pimpinan NICA, Letnan Gubernur Jenderal Dr. van Mook tiba dari *Camp Columbia*, Brisbane, Australia.<sup>2</sup>

Seperti sudah diperkirakan, intelijen Belanda amat lemah untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya di Indonesia, sehingga menimbulkan kesulitan pemerintahan Belanda untuk mengatasi munculnya perlawanan dimana-mana saat akan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Justru intelijen Inggris lebih baik, khususnya apa yang dilakukan Greenhalgh dan kawan-kawannya yang tiba di Jakarta dengan menggunakan payung pada tanggal 8 September 1945 di Kemayoran.<sup>3</sup>

Greenhalgh melaporkan bahwa sejumlah orang Indonesia telah terlibat dalam kegiatan politik praktis yang terkait pada usaha kemerdekaan. Informasi yang bisa dipercaya ini ditambah lagi saat istri Mountbatten, Edwina kembali dari sejumlah *camp-camp* tawanan perang di Indonesia, di mana antara lain terjadi pembicaraan dengan Laurens van der Post seorang yang punya pengalaman banyak selama 2

---

<sup>1</sup>. Philip Ziegler, *The Official Biography of Mounbatten* ; London: Collins, 1985, hal 333

<sup>2</sup>. Van Mook diangkat kembali sebagai Letnan Gubernur Jenderal tanggal 14 Desember 1944.

<sup>3</sup>. Mereka adalah team RAPWI. Osman Raliby, *Documenta Historica* ; Jakarta: Bulan Bintang, 1953, hal 34

tahun dalam *camp* tawanan Jepang. Mounbatten akhirnya menjadi sadar bahwa dia harus berunding dengan penguasa gerakan kemerdekaan di Indonesia yang punya kekuatan nyata. Gerakan ini menurut keyakinannya berada di bawah pimpinan seseorang yang dinamis dan pandai, yaitu Ir. Soekarno yang telah berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, salah satu kebijakan awal Mounbatten adalah mendesak Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Desakan itu juga ditujukan antara lain agar Letnan Gubernur Jenderal van Mook mengusahakan dirinya berada di luar konflik, serta mau bertemu dan berbicara dengan pemimpin Indonesia, khususnya dengan Sukarno. Tentu saja ini amat bertentangan dengan kebijakan Belanda sebelumnya yang menganggap Soekarno tidak hanya pemberontak tetapi juga pengkhianat yang berkolaborasi dengan Jepang.<sup>5</sup>

Kebijakan Mounbatten terhadap Van Mook ini tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati antara pemerintah Belanda dan Inggris dalam pembicaraan mereka di London.<sup>6</sup> Inggris di bawah Perdana Menteri Attlee sebenarnya ingin sekali merealisasikan perjanjian *Civil Affairs Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1945 itu, tapi rupanya Mounbatten tidak terlalu mau diatur London. Komentar Mounbatten terhadap pemerintah Inggris di London: "Kesulitannya adalah tidak ada seorang pun di London yang memperhatikan masalah di sini (maksudnya Asia Tenggara) dan sedikit orang di sana yang memahami keadaan yang sebenarnya, termasuk untuk menempatkan masalah di sini sebagai prioritas utama". Sebagai pimpinan militer Inggris di Asia Tenggara Mounbatten selalu berhubungan dan melaporkan perkembangan yang terjadi kepada Alanbrooke.<sup>7</sup>

Seperti telah disebutkan Mounbatten banyak menerima informasi dari Van der Plas, namun dirinya tidak merasa puas atas laporan itu. Bahkan menganggap tindakan Van der Plas di Indonesia banyak melawan kebijakan dirinya selaku

---

<sup>4</sup>. Philip Ziegler. *Op., cit.* hal 334..

<sup>5</sup>. *Ibid.*,

<sup>6</sup>. Van der Wal. *OBBNIB jilid II* ; S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1974, *Memorandum the situation in Java (Bevin)*. hal 188. Hal ini terkait pada perjanjian bilateral *Civil Affairs Agreement* Inggris –Belanda bulan Agustus 1945

<sup>7</sup>. Field Marshal Alanbrooke adalah Kepala Staf Tentara Kerajaan Inggris (CIGS). lihat Philip Ziegler; *Op. cit.* hal 336.

pimpinan SEAC. Dianggapnya yang perlu dilakukan sekutu sekarang di Indonesia adalah penegakan hukum dan menjalankan fungsi pemerintahan (*Law and Order*). Hal ini harus dilakukan yang menjadi tanggung jawab tentara Inggris. Mountbatten berpendapat, memang harus ada perbedaan yang tegas antara tugas dalam penegakan hukum dan urusan pemerintahan. Disamping itu juga upaya untuk mendesak pemerintah Belanda agar menerima kenyataan munculnya Republik Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya itu. Oleh karena itu dalam penugasan Letnan Jenderal Christison selaku panglima AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indie*) ke Indonesia pada awal Oktober 1945, Mountbatten berpesan tegas agar tidak mencampuri urusan politik internal di Indonesia.<sup>8</sup>

Setelah Van Mook dan Christison sama-sama berada di Jakarta (Batavia), keduanya berunding untuk memikirkan hal-hal yang perlu dilakukan. Tidak lupa Van Mook selalu melaporkan semua yang terjadi selama dirinya berhubungan dengan SEAC kepada Menteri Seberang Lautan Belanda, Logemann.<sup>9</sup> Dirinya juga berkepentingan membuat laporan kepada Moutbatten. Misalnya, pada tanggal 7 Oktober 1945, Van Mook membuat laporan tertulis cukup rinci untuk Mountbatten.<sup>10</sup> Isinya antara lain merupakan interpretasi Van Mook semata-mata tentang Indonesia yang nadanya tentu saja negatif. Hal yang secara khusus digaris bawahinya adalah pernyataan bahwa Sekutu terlambat datang ke Jawa.<sup>11</sup>

Untuk menerima kebijakan Inggris lebih jauh, tanggal 10 - 11 Oktober 1945, Van Mook diundang Mountbatten ke Singapura untuk pertama kalinya, guna menghadiri pertemuan Sekutu yang cukup besar.<sup>12</sup> Dalam pertemuan ini selain Mountbatten dan van Mook, hadir juga Christison, Helfrich, Patterson, wakil kepala staf kerajaan Inggris May.Jen BCH Kimmins, Van der Plas, Brigadier JG Nicholson, Kapten MG.Goodenough dan Let.Kol JA.Liddell. Hal-hal yang dibahas cukup banyak, dengan fokus pembicaraan utama soal kebijakan Inggris dalam penanganan Hindia Belanda.

Perdebatan yang terjadi dalam pertemuan ini cukup seru yang masing-masing ingin menonjol dan membela diri. Namun demikian akhirnya berhasil

---

<sup>8</sup>. Philip Ziegler; *Op.,cit.* hal 336.

<sup>9</sup>. Van der Wal, *op.,cit.* hal 253. *Laporan van Mook kepada Logemann;*

<sup>10</sup>. *Ibid*, hal 303, *Laporan van Mook kepada Mountbatten.*

<sup>11</sup>. Van der Wal. *Op.,cit;* hal 304

<sup>12</sup>. *Ibid*, *Policy for AFNEI*, hal 302-317

juga dicapai beberapa kesepakatan bersama yang akan dikonsultasikan pada pemerintahan masing-masing.

Dalam pertemuan ini, Mountbatten menggariskan kebijakannya antara lain:

- I. Segera mengirim laporan kepada Ka.Staf soal diskusi pada pertemuan ini.
- II. Menugaskan SACR (*Supreme Allied Commandere's Representative*) agar memberi tahu kepada Raja Muda India (saat itu adalah Wafell) dan meminta pendapatnya dengan harapan memunculkan keputusan bahwa tentara India hanya ditugaskan untuk pengakhiran peperangan dengan Jepang.
- III. Menugaskan C-in-C (*Commander in Chief/Ka.Staf*) ALFSEA (*Allied Land Force South East Asia*) agar lebih aktif melatih tentara Belanda yang telah berada di Asia Tenggara.
- IV. Memutuskan untuk memberi rekomendasi masuknya tentara Belanda ke daerah Hindia Belanda dengan prioritas pertama Sumatera dan kedua Surabaya.<sup>13</sup>

Dalam suratnya ke London, Mountbatten melaporkan soal pertemuan sekutu ini secara detail kepada Kepala Staf tentara Kerajaan Inggris (Alanbrooke). Dikatakan secara khusus bahwa pemerintah Republik Indonesia di Jawa untuk sementara berada dalam posisi kuat. Ini disebabkan karena:

1. Pihak RI masih menahan 100.000 RAPWI warga Belanda yang terkonsentrasi di pedalaman. Soekarno mengaku hanya bisa menjamin keamanan mereka 4 hari lagi.
2. Administrasi pemerintahan berada di tangan RI sehingga kalau mereka melakukan pemogokan, dapat mendatangkan kelumpuhan keadaan. Mereka tidak sudi bekerja sama dengan NICA dan melakukan pemboikotan. Nampaknya dalam hal ini tidak ada alternatif lain. Di samping itu tentara Indonesia sudah lengkap dipersenjatai sehingga telah berani melakukan penembakan-penembakan terhadap tentara Belanda.<sup>14</sup>

Dalam laporan ini juga tergambar tercapainya kesepakatan antara Inggris-Belanda bahwa Van Mook sedang meminta izin kepada pemerintahnya

---

<sup>13</sup>. *Ibid. Statement by SA.CSEA* hal 313

<sup>14</sup>. *Ibid.*, hal 336

untuk mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh pemerintahan Indonesia<sup>15</sup>. Tidak jelas apakah karena ada tekanan dari Mountbatten atau tidak. Perkembangan selanjutnya, akhirnya meskipun dengan berat hati, hubungan Van Mook dengan Soekarno-Hatta terjadi juga.

Atas jasa panglima AFNEI Jenderal Christison, pertemuan ramah tamah Van Mook dan Sukarno dapat terselenggara pada tanggal 23 Oktober 1945. Pertemuan selanjutnya terjadi tanggal 31 Oktober 1945. Dalam kesempatan kedua ini, selain Christison dan Sukarno, hadir pula Hatta, Van der Plas, PJA Idenburg, Soebardjo, H. Agus Salim dan Amir Sjarifudin. Bertindak sebagai penengah Inggris adalah ME. Dening, kepala politik dan penasihat SEAC.<sup>16</sup> Agenda pembicaraan adalah pertemuan Singapura pada tanggal 10 Oktober 1945 tersebut.

Namun pertemuan Van Mook-Soekarno ini tidak bisa disetujui pemerintah Belanda di Den Haag yang tidak mau menganggap Sukarno, dan masih menuduhnya sebagai penjahat perang serta boneka Jepang.<sup>17</sup> Akibatnya, ulah Van Mook berhubungan dengan Sukarno ini dianggap tanggung jawab soal pribadinya.

Akibat Perang Dunia ke II yang berkepanjangan, keadaan ekonomi Belanda amat menyusahakan rakyatnya. Oleh karena itu lebih cepat koloninya bisa dioperasikan untuk mengelola potensi ekonomi jajahannya kembali sehingga mampu menyumbang devisa kepada Nederland, itu merupakan hal paling baik. Selanjutnya karena Belanda berpendapat tatanan kolonialnya masih utuh padahal Indonesia sudah merdeka, maka permasalahan yang dihadapi Den Haag adalah bagaimana Belanda bisa berkuasa kembali sebagai kolonial, khususnya di bidang ekonomi seperti sebelum perang, apa pun jalannya harus diupayakan, termasuk melakukan perundingan-perundingan.<sup>18</sup>

Pangkal tolak pemikiran Belanda untuk melangkah berunding dengan Indonesia adalah pidato Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942, yang lebih lanjut dikembangkan dan dirumuskan dengan baik pada tanggal 6 Oktober 1945 oleh Menteri Seberang Lautan Logemann. Proses selanjutnya, pada tanggal 6 November 1945 Van Mook mengirim Nota Usulan kepada Logemann untuk

---

<sup>15</sup>. *Ibid*

<sup>16</sup>. Osman Raliby, *Documenta Historica*; Bulan Bintang : Jakarta, 1953, hal 62-63

<sup>17</sup>. *Far Eastern Liaison Office Melbourne*. Memorandum *Allied Land Force Headquarters*. Sep..25.1945

<sup>18</sup>. Pidato 7 Desember 1942, menjanjikan paradigma tatanan baru jajahan Belanda sesudah perang.

minta izin dan membuat penjelasan dengan alasan perlunya mengadakan perundingan dengan Indonesia. Dasar pemikiran Van Mook itu adalah, "Rencana Indonesia di masa depan". Isinya, dimulai dengan mukadimah di mana dinyatakan nama *Nederlands-Indie* tidak akan dipakai lagi, akan diganti dengan Indonesia. Menjanjikan tatanegara demokratis, pembentukan parlemen yang disesuaikan yang jumlah wakil bangsa Indonesia akan jauh lebih besar dari bangsa Belanda. Sementara didalam Dewan Pekerja (*Executive Council*) yang berdiri di samping Gubernur Jenderal sebagai wakil Mahkota Belanda, akan didudukkan lebih banyak anggota bangsa Indonesia lainnya. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi. Akan diadakan perluasan bidang pendidikan, industri, dan ekonomi. Disinggung juga, sebenarnya Konferensi Kerajaan, rencananya akan diadakan pada tanggal 27 Januari 1942, tapi batal karena keburu terjadi pendudukan Jepang. Sementara pada tanggal 7 Desember 1942 Ratu Wilhelmina telah menetapkan kedudukan Indonesia di masa depan. Van Mook selanjutnya menguraikan uraiannya dengan menerangkan, bahwa memang cita-cita Den Haag didasarkan pada *goodwill* tegak sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Indonesia serta agar di masa yang akan datang tidak ada lagi perbedaan tingkat sosial antar bangsa. Pada akhirnya van Mook mengatakan: "Saya meghargai semua pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia termasuk juga Soekarno dan Hatta".<sup>19</sup>

Dalam Nota Usulan ini sama sekali Van Mook tidak menyebut lahirnya Republik Indonesia sebagai suatu kenyataan politik, apalagi sebagai negara yang sudah merdeka. Akibatnya, reaksi Indonesia amat negatif. Presiden Sukarno bahkan berkomentar: "Saya tidak berminat untuk menyetujui rancangan van Mook itu, sesungguhnya ia (Van Mook) menyadari jerih payahnya untuk memikirkan perbaikan nasib bangsa Indonesia". Presiden Soekarno juga menerangkan: "Bangsa Indonesia memegang teguh pendiriannya dan menginginkan Republik Indonesia yang merdeka, hal mana akan diuji kebenarannya dalam pemilihan umum yang akan datang nanti". Kemudian Presiden Soekarno mengatakan lagi: "Di samping penghargaannya atas usaha Van Mook itu saya merasa sayang sekali yang di dalam uraiannya, Van Mook ini

---

<sup>19</sup>. Osman Raliby; *op.,cit*, hal 82. lihat juga Van Mook; *Indonesie Nederland en de wereld*; Batavia: De Brug Opbouw, 1949, hal 107 Dokumen ini dikenal sebagai "Dokumen van Mook". Isinya sebenarnya merupakan sari pidato Ratu tanggal 7 Desember 1942.

masih melekat cara penjajahan kolot yang rupanya tidak hendak dihapuskan oleh pihak Belanda”.<sup>20</sup>

Setelah Sjahrir menjadi Perdana Menteri, tanggal 17 November 1945 diadakan perundingan Indonesia-Belanda yang ditengahi Inggris bertempat di markas besar tentara Sekutu di Jakarta. Bahan yang di bahas, nota usulan 6 November 1945 ini. Dalam perundingan yang ditengahi Inggris itu, pihak Republik Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin, Menteri Perhubungan Abdul Karim, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Putuhena. Dari pihak Belanda hadir Van Mook, Idenburg, Baron van Asbeck dan Van der Plas. Dari pihak Inggris yang hadir adalah, Let. Jen Christison, ME Dening dan Brig.Jen .Wingrave. Pertemuan tiga setengah jam ini tidak melahirkan satu keputusanpun.<sup>21</sup>

Nampaknya pihak Republik Indonesia pada bulan Desember 1945 tidak tinggal diam. Usaha-usaha untuk melakukan komunikasi-informasi dengan dunia luar dilakukan. Ini diadakan dengan maksud melobi dunia Internasional agar mendukung perjuangan RI. Misalnya pada tanggal 4 Desember 1945 Sjahrir melakukan konferensi pers. Dikatakannya bahwa: “Campur tangan PBB adalah jalan terbaik untuk memecahkan soal Indonesia dan kalau Belanda akan menempuh jalan kekerasan niscaya tidak ada persetujuan yang akan dicapai”.<sup>22</sup>

Langkah Sutan Sjahrir selanjutnya adalah mengirim surat dan dokumen-dokumen penting kepada konferensi UNO (*United Nation Organisation*) atau PBB yang sedang berlangsung di Church House Westminster, London Inggris yang dimulai tanggal 10 Januari 1946.<sup>23</sup> Dalam suratnya, Sjahrir menguraikan dan meminta agar masalah Indonesia dibicarakan dalam konferensi. Keputusan yang akan diambil oleh konferensi amat penting, mengingat masalah Indonesia hanya dapat disetujui atau tidak untuk dibicarakan oleh Dewan Keamanan tergantung pada sidang PBB di London ini. Dan kenyataannya pada tanggal 25 Januari 1946 memang terjadi perdebatan sengit antara yang pro dan kontra dalam sidang mengenai soal konflik Indonesia-Belanda.

---

<sup>20</sup>. Osman Raliby; *Op., cit. hal. 83*

<sup>21</sup>. *Ibid.* hal 102-103.

<sup>22</sup>. *Ibid.* hal 132. Pertemuan Internasional yang dibuka Perdana Menteri Attlee ini dipimpin oleh Norman Makin dari Australia dan dihadiri utusan 11 negara termasuk Belanda.

<sup>23</sup>. S.K Penyeloeh 17 Januari 1946. *Negeri serikat berkumpul di London.*

Pertama kali dukungan kepada Indonesia muncul dari utusan Amerika, Stettinus yang disokong utusan Mesir, Abdel Hamid Badaway Pasha. Akhirnya bisa diputuskan bahwa masalah Indonesia akan dibicarakan dalam Dewan Keamanan pada tanggal 28 Januari 1946. Ernest Bevin, Menteri Luar Negeri Inggris dalam perdebatan tersebut mengatakan: "Segala perselisihan hendaknya dibicarakan dengan mendengar lebih dahulu keterangan pihak Belanda". Padahal dalam kesempatan lain, pada tanggal 17 Januari 1946 van Kleffens Menteri Luar Negeri Belanda telah mengomentari surat Sjahrir tersebut dan berbicara kepada wartawan bahwa usul Indonesia bisa dibicarakan, kalau Indonesia disokong salah satu negara anggota PBB. Tanpa direkayasa ternyata telah muncul dukungan kuat dari utusan Ukraina disidang PBB, yaitu dari Dr Dmitri Manuilsky. Dia bahkan menyurati Dewan Keamanan yang juga sedang bersidang di London itu, yang isinya: "Keadaan di Indonesia membahayakan perdamaian dunia".<sup>24</sup> Ini merupakan kemenangan diplomasi awal di dunia internasional bahwa Republik Indonesia atas usaha beberapa anggota utusan termasuk Dr. Manuilsky, akhirnya diusulkan masuk agenda dan bisa dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB.<sup>25</sup>

Meskipun Tanggal 28 Januari 1946 seperti yang direncanakan, masalah Indonesia ternyata tidak jadi dibicarakan, tapi baru pada tanggal 7 Februari 1946 persidangan mengenai Indonesia kenyatannya diadakan. Dalam sidang yang dimulai pada jam 17.00 waktu London ini, dibicarakan soal Indonesia secara serius. Agenda pertamanya adalah mendengarkan pembacaan surat ketua delegasi Sovjet Ukraina tertanggal 21 Januari 1946 tentang Indonesia. Setelah itu ketua delegasi, Dr Manuilsky dipersilahkan untuk berbicara. Dia mengawali pidatonya dalam bahasa Perancis secara panjang lebar soal Indonesia yang sedang berkonflik dengan Belanda. Ketika menyangkut hal-hal penting dilanjutkannya dalam bahasa Rusia. Delegasi Uni Sovjet dan Mesir mendukung apa yang dikatakan Dr Manuilsky tersebut. Sedangkan Bevin melakukan pembelaan kepada utusan Belanda, van Kleffens yang terus menghindar pada tuduhan negatif yang dilancarkan Manuilsky.

---

<sup>24</sup>. Osman Raliby, *op., cit*, hal 586. Surat delegasi Ukraina kepada Dewan Keamanan PBB (*Security Council*)

<sup>25</sup>. *Ibid*



Sidang Dewan Keamanan yang berlangsung selama 6 hari itu, mencoba mengusulkan sebuah resolusi. Namun rancangan usul yang dicoba dibuat sebanyak 3 kali oleh masing-masing delegasi dari Ukraina, Mesir dan Uni Sovjet, semuanya ditolak sidang. Menurut Dr Sumitro hal ini terjadi karena ketidakhadiran sendiri delegasi Indonesia dalam sidang.<sup>26</sup>

Tapi dengan dibicarakannya masalah Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB, Inggris menjadi cemas karena masalah dekolonisasi juga sedang terjadi pada bekas jajahan Inggris seperti India, Pakistan, Birma dan Sri Langka. Berarti hal yang mirip akan dibicarakan juga dalam sidang Dewan Keamanan PBB di London ini. Mungkin karena sebab itulah kemudian pemerintah Inggris mendesak Belanda agar lebih gencar berunding dengan Indonesia.

Perlu diketahui, hadir dalam sidang tanggal 7 Februari 1946 tersebut dua orang Indonesia yaitu Mr. Zairin Zain dan Dr. Sumitro Djohadikoesoemo.<sup>27</sup> Tidak jelas bagaimana mereka bisa hadir di sana yang diingkosi teman-temannya. Tapi Osman Raliby menyebutkan bahwa pada kesempatan tersebut Mr. Zairin Zain dan Dr. Sumitro Djohadikusumo tugasnya mendampingi Dr. Eelco van Kieffens, Menteri Luar Negeri Belanda, dengan fungsi sebagai penasihat. Hal ini memang dibenarkan oleh Sumitro sendiri. Alasan mengapa hal tersebut dilakukannya, karena sulitnya mengontak Sjahrir. Di samping itu Indonesia memang dianggap tidak berhak menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB tersebut. Sesudah sidang, Sumitro langsung terbang dari London ke Jakarta untuk melapor pada pemerintah RI. Laporan resmi baru bisa disampaikan Sumitro kepada Sjahrir pada tanggal 14 Maret 1946.<sup>28</sup>

Karena pada tanggal 17 November 1945, perundingan Indonesia-Belanda tidak membawa hasil, tanggal 4 Desember 1945 terjadi perundingan informal antara Van Mook dan Sjahrir. Van Mook didampingi van Bylandt, Idenburg dan Abdul Kadir Widjoatmodjo. Sjahrir didampingi Soewandi. Dalam perundingan ini terkesan kalau masih ada berbagai kendala perundingan yang muncul pada kedua pemerintahan sehingga persetujuan yang bagaimanapun, sukar diadakan. Terutama ini disebabkan kendala yang terjadi di pihak pemerintah RI. Menurut

---

<sup>26</sup>. *Ibid*, hal 47.

<sup>27</sup>. Sumitro Djohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2000 Hal 38.

<sup>28</sup>. Osman Raliby, *Op., cit*, hal 225. S.K Soeara Merdeka 18 Maret 1946 . Mr Z.Zain dan Dr Soemitro.

Van Mook (dalam laporannya kepada Logemann): “Meskipun besar keinginan pihak Indonesia untuk berunding dengan pihak Belanda, namun ada tekanan politik yang besar di dalam negeri Indonesia kepada Sjahrir, sehingga posisinya lemah. Revolusi Indonesia telah berkembang cepat dan itu terjadi karena ulah kaum nasionalis. Sjahrir mengaku bahwa dirinya tidak punya banyak kekuasaan guna mengatur pihak ekstremis dan kaum militer, kecuali sejumlah kecil pasukan yang terdiri dari para mahasiswa. Politik dalam negerinya terutama di pengaruhi kaum komunis (maksudnya P.P yang idiologinya kiri) dan pemuda ekstrimis”. Secara garis besar perundingan Indonesia-Belanda tidak dapat menghasilkan apa-apa, namun akan tetap dilanjutkan yang kedua dan ketiga pada hari Jumat dan Sabtu yang akan datang. Tapi meskipun tidak membawa hasil, ada sedikit titik terang bahwa kedua pihak (Indonesia-Belanda) serius untuk melanjutkan perundingan.<sup>29</sup>

Karena perundingan-perundingan tidak juga membawa hasil, pada tanggal 6 Desember 1945, untuk kedua kalinya Van Mook diminta datang Mountbatten ke Singapura untuk berunding. Sebenarnya dia diundang untuk menghadiri pertemuan besar guna membicarakan masalah *Commonwealth* Inggris yang dikenal dengan *code 301<sup>st</sup> meeting of SAC*.<sup>30</sup>

Perlu dijelaskan bahwa perbedaan kebijakan antara London dan Singapura menuai hambatan politik yang menyulitkan pekerjaan Mountbatten. Berkaitan dengan ini Mountbatten memerlukan mengutus istrinya Edwina ke London untuk melakukan lobi. Akhirnya pemerintah Inggris memang mengutus *Field Marshal* Alanbrooke sendiri pada bulan Desember 1945 ke Singapura untuk mendukung kebijakan Mountbatten. Setelah Alanbrooke bisa dilibatkan, Mountbatten segera menerbitkan kebijakannya selaku *Supreme Allied Commander*.<sup>31</sup>

Dalam perundingan yang dihadiri para pemimpin Inggris termasuk van Mook dan *Field Marshal* Lord Alanbrooke ini, Mountbatten selaku SACSEA membeberkan pokok kebijakan Sekutu mengenai Hindia Belanda.<sup>32</sup> Hasil perundingan, baik Alanbrooke sebagai wakil pemerintah Inggris dan Mountbatten

---

<sup>29</sup>. Van der Wal . *Op.,cit.*; hal 289

<sup>30</sup>. *Ibid.*, hal 302.

<sup>31</sup>. Philip Ziegler. *Op.,cit.* hal 336

<sup>32</sup>. Van der Wal . *Op.,cit.*, hal 303

sebagai pimpinan SEAC serta van Mook sebagai wakil pemerintahan Belanda, segera melaporkan segala sesuatunya kepada pemerintahannya masing-masing.

Untuk melaporkan secara lengkap hasil perundingannya dengan pihak Inggris di Singapura kepada Pemerintah Belanda di Den Haag, van Mook berangkat ke Belanda pada tanggal 16 Desember 1945. Pertemuan kabinet Belanda terjadi pada tanggal 21 Desember 1945 yang dihadiri Perdana Menteri Schermerhorn, para menteri cabinet Belanda kecuali Kolfshouten (Menteri Kehakiman) dan van Kleffens (Menteri Luar Negeri). Dalam pertemuan ini Piet Sanders telah diangkat sebagai sekretaris.<sup>33</sup>

Sebagai bahan dasar, tanggal 21 Desember 1945 Van Mook membuat konsep atau *draft proposal* yang cukup penting guna menentukan kebijaksanaan Belanda selanjutnya di Indonesia. Dipikirkannya: "Indonesia harus diberikan kesempatan untuk melakukan kerja sama yang penuh dan baik dengan Belanda di masa depan". Di samping itu Belanda juga mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan pelaksanaan ekonomi di Indonesia dengan dunia luar. Juga dipikirkannya bahwa Indonesia akan menjadi anggota PBB dan memiliki tentara sendiri.<sup>34</sup> Draft proposal tersebut ternyata banyak yang menentang, seperti menteri keuangan P Liefstinck dan menteri Angkatan laut dan perkapalan J.M. de Booy. Isi kritik mereka antara lain, bahwa proposal Van Mook seharusnya menggambarkan sebuah kesatuan kerajaan bukan untuk memisahkannya. Yong Mun Cheong menandakan bahwa dalam *draft proposal* inilah untuk pertama kali dimunculkan pemikiran konsep pemerintahan federalis. Pada kesempatan selanjutnya di Indonesia (pada periode 1947-1948), pemerintah federal ini akan terkait pada gagasan untuk mencegah dominasi Jawa kepada non Jawa.<sup>35</sup>

Perdana Menteri Schermerhorn berpikir berbeda, dia menganggap berbicara dengan Inggris amat diperlukan. Untuk ini dibutuhkan sebuah *draft* yang lebih pasti agar bisa dijadikan bahan utama dalam pembicaraan dengan Inggris. Maka ditugaskannya sebuah komisi kecil untuk menyusunnya. Komisi kecil ini terdiri dari Perdana Menteri Schermerhorn sendiri, Drees, van Royen, Logemann, de

---

<sup>33</sup>. Van der Wal.. *Op.,cit jilid II*. Hal 397.

<sup>34</sup>. Yong MunCheong. *Op., cit* Hal 66. Van der Wal.. *Op.,cit jilid II*. Hal 397.

<sup>35</sup>. *Ibid.*

Booy, Liefinck dan Beel. Tentu saja Van Mook hadir juga dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan tersebut.<sup>36</sup>

Setelah semua rampung, Perdana Menteri Schermerhorn memutuskan mengirim delegasi resmi Belanda ke Inggris yang dipimpinnya sendiri guna meminta dukungan pemerintah Inggris soal penyelesaian masalah di Indonesia. Rombongan kabinet Belanda ini terdiri dari Schermerhorn, Logemann, Van Mook, Van Verduynen (duta besar Belanda di London). Dari pihak Inggris hadir, Perdana Menteri Attlee, PJ Noel Baker (Menteri Sekretaris Negara) dan Allanbrooke. Pertemuan itu berlangsung di tempat peristirahatan Perdana Menteri, di Chequers London pada tanggal 27 Desember 1945. Hasil perundingan, antara lain Inggris setuju mendukung perundingan dengan Indonesia dan memberi tahu bahwa dalam waktu dekat tentara Inggris akan ditarik dari Indonesia. Selain itu Inggris akan bertindak sebagai penengah dalam perundingan Indonesia-Belanda dimana untuk ini akan ditugaskan Sir Archibald Clark Kerr, seorang diplomat Inggris yang dipercaya memiliki kemampuan tersebut.<sup>37</sup>

Setelah melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Belanda maupun di Indonesia, Menteri Seberang Lautan Logemann akhirnya menugaskan kepada van Mook untuk menyampaikan saran baru kepada Indonesia berdasarkan perundingan Inggris-Belanda di Chequers pada tanggal 27 Desember 1945 itu.

Di samping itu, baik Inggris maupun Belanda merasa bahwa sejumlah tokoh pimpinan mereka di Indonesia perlu diganti dengan tenaga baru. Maka dimunculkanlah kebijakan selanjutnya oleh kedua belah pihak pemerintahan, berupa pergantian personil. Let.Jen Christison digantikan oleh Let.Jen Montague Stopford selaku pimpinan AFNEI. Dan dipihak Belanda Panglima Angkatan Darat Jenderal Mayor van Oyen diganti, juga Panglima Angkatan Laut Helfrich. Sebagai pengganti jabatan Panglima angkatan Darat Belanda di Hindia ini, ditunjuk Kolonel SH Spoor dan sebagai Kepala Staf ditunjuk Kolonel DC Buurman van Vreeden. Untuk ini keduanya naik pangkat menjadi Jenderal Mayor. Untuk pimpinan angkatan laut Laksamana Helfrich digantikan oleh Kapten ter Zee A.S Pingke yang juga naik pangkat menjadi Laksamana Muda

---

<sup>36</sup>. *Ibid* hal .67

<sup>37</sup>. *Ibid.*, hal. 68.

(*Vice Admiral*). Selanjutnya, baik Spoor maupun Pinke ditetapkan sebagai *subordinat* dari Letnan Gubernur Jenderal van Mook.<sup>38</sup>

Setelah kunjungan ke London, Van Mook seyogyanya diharapkan cepat kembali ke Indonesia sebagaimana desakan Mountbatten. Tapi dengan alasan sakit dia istirahat sebentar di Cairo. Van Mook baru kembali ke Jakarta pada tanggal 18 Januari 1946. Banyak berita simpang siur mengenai keberadaannya semasa di Belanda. Misalnya muncul berita “van Mook kembalinya di tunda”. Berita Antara ini menggambarkan seolah adanya perselisihan Van Mook dengan anggota Majelis Rendah Belanda.<sup>39</sup>

Atas persetujuan Schermerhorn, saat di London pada tanggal 9 Januari 1946 bertempat di kantor Perdana Menteri Inggris, Downing street No. 10 London, Van Mook sempat berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Attlee. Dalam pembicaraan ini van Mook dengan nada protes kepada Inggris, mempersoalkan kerja sama bilateral Indonesia-Inggris, yaitu soal pengangkutan Jepang dan APWI. Antara lain dijelaskannya: “Saya merasa yakin akan sikap baik para pejabat militer Inggris yang kini terbukti minta bantuan Indonesia agar bisa mengevakuasi tawanan Jepang dan kaum APWI dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun hal tersebut cenderung memberikan kepercayaan besar kepada pemerintahan Indonesia yang semu (*Quasi Government*) yang pada gilirannya telah memperlemah posisi negosiasi Belanda-Indonesia secara menyeluruh”. Van Mook menekankan juga bahwa dia sering diabaikan para pejabat militer Inggris dalam pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan mereka (pihak Inggris) kurang ada pengertian terhadap politik yang sedang dilakukan pihak Belanda di Indonesia”.<sup>40</sup> Tidak jelas kelanjutan pertemuan ini selanjutnya.

Archibald Clark Kerr tiba di Batavia tanggal 1 Februari 1946. Pada tanggal 3 Februari 1946, dia telah bertemu tidak resmi dengan Perdana Menteri Sjahrir meskipun pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa.<sup>41</sup> Sementara, kabinet Sjahrir telah membuat keputusan bahwa pertemuan perundingan resmi Indonesia-

---

<sup>38</sup>. *Ibid.* hal 70. Rupanya kedua belah pihak merasa ada ketidak serasian kerja dari pejabat Inggris dan Belanda lama sehingga perlu diganti dengan tenaga baru.

<sup>39</sup>. S.K Soeara Merdeka; 16 Januari 1946. .

<sup>40</sup>. Van der Wal *Op.,cit jilid III* . hal 76-77. Ini terkait pada POPDA (Panitai Oeroesan Pemoelangan Djepang dan APWI). Christison amat merasa beruntung karena atas bantuan TRI itu tugas sekutu amat terbantu, terutama dalam rangka pengangkutan logistic makanan dari Jakarta ke Bandung. Yong Mun Cheong. *Op., cit.* hal. 68-69.

<sup>41</sup>. Yong Mun Cheong. *op.,cit.* hal 69

Belanda yang akan datang yang kini ditengahi utusan pemerintah Inggris itu akan diadakan kembali setelah dirinya bertemu resmi dengan Presiden R.I. Sukarno di Yogya. Tiga hari kemudian, tanggal 6 Februari 1946, jam 7.00 pagi Sjahrir dan rombongannya berangkat ke Yogyakarta dengan kereta api istimewa untuk bertemu Presiden Sukarno.

Sekembali Perdana Menteri Sjahrir di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1946, Van Mook memajukan usulan baru kepada Sjahrir (terdiri dari 7 pasal) yang merupakan *counter* proposalnya di Belanda. Kemungkinan dokumen ini dibuat sebagai jalan tengah karena proposal 21 Desember 1945 ditolak pemerintah Belanda dan bahan baru ini juga terkait pada hasil pembicaraan London. Konsep ini diberikan Van Mook langsung ketika Sjahrir kembali dari Yogyakarta.

Usulan Van Mook ini adalah:

1. Pembentukan suatu "Persemakmuran Bersama" (*Gemenebest* atau *Commonwealth*) di Indonesia.
2. Akan diadakan kewarganegaraan Indonesia bagi siapa saja yang lahir di Indonesia.
3. Soal dalam negeri diurus oleh sebuah institusi *Commonwealth* yang merdeka. Sebuah badan representatif yang terdiri dari Bangsa Indonesia, akan dibentuk. Akan ada kabinet selaku badan eksekutif yang mampu bekerja sama secara harmonis dengan badan representatif itu. Pimpinan pemerintahan merupakan representasi dari mahkota Belanda.
4. Representasi mahkota Belanda di atas harus memiliki kekuasaan agar dapat menjamin hak-hak asasi dasar, administrasi pemerintahan yang efisien serta manajemen keuangan.
5. Akan ada jaminan kebebasan beragama, pendidikan dan pengutaraan pendapat, kualitas hukum, perlindungan pribadi dan kepemilikan, perlindungan kaum minoritas serta perlindungan pada keadilan.
6. Akan ada institusi sentral bagi semua wilayah kerajaan.
7. Pemerintah Belanda akan mempromosikan keanggotaan Indonesia di PBB.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>. *Ibid.* hal 71

Dengan sendirinya usulan itu pun tidak memuaskan RI. Perdana Menteri Sjahrir menuntut tidak kurang pengakuan eksistensi RI<sup>43</sup>. Bahkan ketika konsep dibicarakan dalam sidang KNIP, langsung ditolak oleh PNI dan Masjumi.<sup>44</sup>

Seperti telah dijelaskan pada bulan Februari 1946 kabinet Sjahrir bubar. Setelah Sjahrir terpilih kembali sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinetnya yang kedua tanggal 11 Maret 1946, pada tanggal 13 Maret 1946 diadakan perundingan lanjutan yang resmi Inonesia-Belanda yang kini ditengahi Inggris.<sup>45</sup> Perundingan dihadiri oleh pihak Inggris yaitu Archibald Clark Kerr selaku ketua, Mac Kerth (Konsul Inggris di Indonesia) selaku anggota dan Witteridge selaku sekretaris. Pihak Belanda diwakili van Mook, Idenburg, Bylant, van Boetzelaer dan nyonya Stoldijk sebagai sekretaris pihak Belanda. Sedangkan Indonesia diwakili Perdana Menteri Sjahrir, Ir Soerachman (Menteri Keuangan), Maria Ulfah Santoso (Menteri Sosial), Mohamad Natsir (Menteri Penerangan) dan AG Pringgodigdo sebagai sekretaris pihak Indonesia.<sup>46</sup> Dalam perundingan ini, Republik Indonesia ngotot dan menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. RI diakui sebagai pemegang kedaulatan di wilayah ex Hindia-Belanda.<sup>47</sup>
2. Undang Undang Dasar RI sepanjang masih bisa digunakan dan sejalan dengan demokrasi yang fundamental, akan tetap berlaku
3. Untuk kesejahteraan rakyat diizinkan tenaga dan modal asing masuk.
4. Pinjaman yang menjadi beban Hindia-Belanda dan wilayah otonomi sebelum Maret 1946 menjadi beban RI
5. Untuk jangka waktu tertentu Indonesia-Belanda membentuk federasi di mana pimpinan bidang luar negeri dan pertahanan kedua negara dipercayakan kepada badan federal yang terdiri dari orang Indonesia dan Belanda.
6. Setelah persetujuan berlaku, tentara Belanda akan ditarik.
7. Pemerintah Belanda akan menyponsori keanggotaan Indonesia sebagai anggota PBB.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup>. *Ibid.* hal 73-79

<sup>44</sup>. *Ibid.*

<sup>45</sup>. Penengah Inggris Archibald Clark Kerr.

<sup>46</sup>. Van der Wal. *Op.,cit. jilid IV*, hal 564, lihat juga S.K Penyeloeh 22 Maret 1946.

<sup>47</sup>. Artinya kemerdekaan 100 %

<sup>48</sup>. Van der Wal. *Op.,cit. jilid IV*, hal 564

Belanda langsung menolak, namun demikian nampak kalau Van Mook dan kawan-kawannya mulai tampak letih dan pesimis untuk berunding lebih lanjut.<sup>49</sup> Pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 16 Maret 1946, yang dihadiri oleh orang yang sama, kecuali tambahan Dr. Koets di pihak Belanda dan dipihak Indonesia Ir. Soerachman. Maria Ulfah dan M. Natsir, digantikan oleh Ir. Darmawan, Dr. Darma Setiawan, H. Agus Salim dan Soewandi.<sup>50</sup>

Perundingan yang diadakan di kediaman Clark Kerr ini memakan waktu 2 jam lamanya, di mana kembali berlangsung perundingan yang sangat alot karena adanya beberapa tuntutan pihak pemerintah Indonesia, terutama berkaitan pada kemerdekaan yang harus 100 % itu. Tentu saja, hal ini tidak disetujui Belanda. Van Mook yang rupanya masih ingin membicarakan hal yang disampaikan R.I pada perundingan yang lalu menguraikan beberapa pertanyaan:

1. Apakah benar R.I menguasai seluruh wilayah Indonesia ?
2. Jika diadakan berbagai perjanjian dan persyaratan yang harus dipenuhi terhadap luar negeri, apakah R.I dapat memenuhinya ?
3. Apakah sudah dipertimbangkan bahwa hal itu akan mempengaruhi pengakuan internasional ?<sup>51</sup>

Agar perundingan-perundingan bisa dilanjutkan, dan untuk mempersiapkan bahan-bahan bagi perundingan lanjutan, dibentuk sub-sub komite.<sup>52</sup> Dua sub komite dibentuk terdiri dari unsur-unsur Indonesia dan Belanda. Anggota Sub komite pihak Indonesia terdiri dari H. Agus Salim, Mr. Soewandi, Mr. AK. Pringgodikdo, dan dari pihak Belanda Mr van Hoogestraten, Dr Koets. Mereka telah bertemu dan berapat pada tanggal 19 Maret 1946.<sup>53</sup> Nampaknya mereka mulai bekerja bersama dengan baik.<sup>54</sup> Menurut berita media cetak, pada tanggal 20 Maret 1946 kedua sub komite yang diangkat oleh Belanda dan Indonesia ini bertemu dan memajukan pendapatnya kepada Clark Kerr. Oleh

---

<sup>49</sup>. Basuki Suwarno. *Hubungan Indonesia-Belanda 1945-1950 jilid II* ; Jakarta: Setio Acnes, 1999, hal 115-126

<sup>50</sup>. *Ibid*

<sup>51</sup>. *Ibid*

<sup>52</sup>. S.K Pandji Ra'jat 28 Maret 1946.

<sup>53</sup>. Van der Wal, *op., cit.* jilid IV, hal 624

<sup>54</sup>. SK Penyeloeh , tanggal 20 Maret 19



Kerr, selanjutnya kepada sub komite ditugaskan untuk menyelidiki sedalam-dalamnya usulan Belanda dan Indonesia.

Dua soal penting yang menimbulkan perdebatan dalam pertemuan sub komite adalah:

1. Pengakuan terhadap adanya Republik Indonesia.
2. Perebutan pengaruh di antara kekuasaan ketentaraan Belanda dan Indonesia.

Pada tanggal 23 Maret 1946 di kediaman Archibald Clark Kerr di Jakarta terjadi perundingan lanjutan antara kelompok Inggris, Belanda dan Indonesia. Dari pihak Inggris hadir Clark Kerr, Mac Kerth dan Witteridge. Pihak Belanda hadir Van Mook, Idenburg, van Bylandt, Koets, van Boetzelaer dan Stokdijk. Dan dari pihak Indonesia hadir Sjahrir, Soerachman, Abdoel Karim, Putuhena dan A.G Pringgodigdo. Dalam kesempatan ini Van Mook mengajukan sebuah wacana baru dalam perundingan Indonesia-Belanda lanjutan. Disampaikannya bahwa dalam kebijakan apa yang dilakukan Perancis di Indocina kemungkinan besar bisa ditiru di Indonesia.

Mengikuti contoh yang terjadi di Indocina ini Van Mook merumuskan gagasannya mengenai federasi "Negara Indonesia Serikat" di mana RI merupakan salah satu anggota negara bagian di bawah sebuah "Uni Indonesia-Belanda".<sup>55</sup> Pada tanggal 25 Maret 1946 van Mook dan Sjahrir mengadakan pembicaraan informal soal wacana yang dimunculkan pada pertemuan 23 Maret 1945 di atas. Mereka berdua kemudian mengumumkan usulan itu yang terdiri atas empat hal.<sup>56</sup> Secara tidak sadar rupanya keduanya sudah beranjak pada tingkat persetujuan.

Hal ini dituangkan secara tertulis, yaitu:

1. Belanda mengakui RI sebagai kekuasaan *de facto* atas Jawa, kecuali wilayah yang dikuasai oleh AMACAB.<sup>57</sup>
2. RI menyetujui didatangkannya tentara Belanda untuk membantu tugas SEAC.

---

<sup>55</sup>. Van der Wal, *op.,cit. jilid IV* hal 639-642. Ketika itu Perancis mengadakan perundingan dengan Ho Chi Minh yang telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Vietnam di Hanoi. Perancis mengusulkan untuk mengakui kekuasaannya di Vietnam dengan imbalan diterimanya suatu federasi Indocina yang terdiri dari ketiga bagian dari Indocina itu dengan dipayungi oleh sebuah Uni Indocina-Perancis. Persetujuan perjanjian ini ditanda tangani tanggal 6 Maret 1946 di Hanoi.

<sup>56</sup>. Dikenal sebagai usulan 4 pasal, Menurut faham van Mook ini masih berdasarkan usulan sebuah model ala persetujuan 6 Maret 1946 diatas. Lihat Yong Mun Cheong *op.,cit.* hal 76

<sup>57</sup>. AMACAB: *Allied Military Administration Civil Affairs Branch.*

3. Indonesia-Belanda akan menghentikan permusuhan dan,
4. Pemerintah Belanda bersama R.I serta wilayah diluar R.I akan mengusahakan pemerintahan yang cocok untuk Indonesia.<sup>58</sup>

Nampaknya Sjahrir tertarik pada usulan 4 pasal ini dan keduanya menugaskan sub komite terkait yang terdiri dari Soewandi, AK Pringgodigdo Ali Budiardjo. Idenburg, Koets dan van Boetzelar. Pada tanggal 27 Maret 1946 mereka segera berunding dan bekerja sama. Hasil kerja sub komite ini dikenal sebagai "Persetujuan Pendahuluan antara RI dan Belanda yang terdiri dari 7 pasal, lengkapnya bernama, "*Preliminaire overeenkomst tusschen de nagenoemde hooge contracteerende partijen*".

Isinya yaitu:

Pemerintah Belanda diwakili oleh Dr. Hubertus van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda disatu pihak dan pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Presiden Ir Soekarno dan menteri pertama Sutan Sjahrir dipihak yang lain.

Mereka setuju sebagai mana urutan dibawah:

#### Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui pemerintah RI berkuasa *de facto* di Jawa dan Sumatera terkecuali atas daerah yang diduduki oleh pemerintah militer Sekutu.

Pemerintah Belanda sepakat dengan pemerintah RI bekerjasama untuk mewujudkan segera sebuah Negara Indonesia yang merdeka berasaskan federasi yang meliputi semua bagian-bagian dari Hindia Belanda dan bersekutu di dalam hubungan ketatanegaraan yang meliputi Nederland, Suriname dan Curacao sesuai dengan pokok-pokok umum dari pernyataan pemerintah Belanda tanggal 10 Februari 1946.

#### Pasal 2

Pemerintah R.I berkewajiban untuk menerima baik secara penuh dan bersahabat pasukan Sekutu termasuk pasukan Belanda yang telah berada atau akan masuk di Jawa dan Sumatera sesuai dengan keputusan pimpinan tertinggi komando Sekutu, serta memberikan bantuan kepada mereka guna menjalankan tugasnya untuk menangkap dan memberangkatkan pasukan Jepang serta untuk

---

<sup>58</sup>. Partisipasi wilayah lain dalam perundingan mengenai hari depan Indonesia harus disetujui RI.

membebasikan bekas kaum interniran dan para tahanan perang. Peraturan pelaksanaannya akan diselenggarakan kemudian oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 3

Segera setelah berlakunya persetujuan ini, kedua pihak akan menghentikan permusuhan dengan pengertian akan mempertahankan kedudukannya seperti sekarang, kecuali apa yang telah disepakati pada pasal 2.

Akan secepat mungkin diadakan perundingan-perundingan untuk membicarakan kerja sama yang dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan-peraturan itu secara nyata.

#### Pasal 4

Dalam waktu singkat oleh pemerintah Belanda akan diadakan perundingan dengan pemerintah R.I untuk membicarakan struktur Negara Indonesia Merdeka seperti dimaksud pada pasal 1, kedudukannya dalam tata negara bersama, hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan asing, kerja sama dengan pemerintah Belanda dan pelayanan bidang material serta kebudayaan bagi orang-orang Belanda dan asing lainnya di Indonesia. Perundingan dimaksud dapat dilaksanakan di Yogyakarta, Jakarta maupun Den Haag.

#### Pasal 5

Dalam perundingan dimaksud dalam pasal terdahulu diperkenankan juga ikut berunding wakil-wakil daerah luar Jawa dan Sumatera serta wakil dari golongan penduduk yang penting yang bukan keturunan Indonesia.

Daerah dan golongan tersebut yang diperkenankan akan mengirim wakil-wakilnya guna ditetapkan, atas persetujuan pemerintah RI. Daerah dan golongan dimaksud dalam pasal ini dapat mengirim perwakilannya kepada RI

#### Pasal 6

Apabila salah satu daerah melalui wakilnya menyatakan keberatan untuk bergabung tanpa syarat pada negara merdeka yang akan diwujudkan itu, maka untuk daerah yang demikian, buat sementara waktu diciptakan kedudukan istimewa sesuai dengan keberatan-keberatannya didalam negara merdeka dan kerajaan Belanda.

#### Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Belanda dan Indonesia.

Apa bila terjadi perbedaan pengertian atas suatu kata atau kalimat, maka yang akan berlaku adalah naskah dalam bahasa Belanda. Persetujuan ini segera berlaku setelah ditanda tangani .

Di tetapkan di Batavia....April 1946.<sup>59</sup>

Bahan-bahan ini kemudian dibahas dalam pertemuan selanjutnya yang berlangsung pada tanggal 30 Maret 1946. Dalam perundingan ini dari pihak Inggris tetap seperti yang hadir pada tanggal 23 Maret. Demikian pula Belanda kecuali Idenburg, absen. Di pihak Indonesia, Putuhena digantikan Soewandi dan satu orang ditambah yaitu Haji Abdulrasjid. Dalam pertemuan ini berhasil ditandatangani sebuah naskah akhir yang bisa diterima dan disetujui kedua belah pihak. Naskah ini dikenal sebagai "Konsep Batavia"<sup>60</sup>. Namun untuk bisa dipergunakan sebagai dokumen dalam perundingan selanjutnya, harus disetujui lebih dahulu oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.<sup>61</sup> Artinya bisa saja persetujuan dicapai antara Van Mook dan Sjahrir, namun ada keputusan yang lebih tinggi yang harus menentukan.

Untuk ini pada bulan April 1946. Ternyata pemerintah Belanda tidak setuju pada hasil perundingan Jakarta tanggal 30 Maret 1946 itu. Pertimbangannya adalah hasil perundingan ini amat janggal karena melawan konstitusi Belanda yang dalam konstitusi Belanda tersebut nyata bahwa Indonesia masih termasuk wilayah Kerajaan Belanda. Mestinya di dalam sebuah persetujuan yang mungkin terjadi, Republik merupakan sebuah kekuasaan yang berdaulat penuh. Yang lebih merisaukan lagi pada tanggal 17 Mei 1946 akan diadakan pemilu di Belanda. Dikhawatirkan persetujuan 30 Maret 1946 itu bakal dimunculkan sebagai isu politik oleh golongan oposisi pemerintah Belanda.<sup>62</sup> Oleh karena itu untuk lebih memunculkan pengertian di antara para pemimpin Indonesia dan Belanda, Van Mook mengusulkan perundingan dilanjutkan di Belanda saja. Keadaan ini menggambarkan bahwa meskipun Menteri Seberang Lautan Logemann telah memberi kuasa kepada Van Mook untuk berunding dengan pemerintah R.I, tapi hal itu amat terbatas. Menurut tafsiran Van Mook, tidak ada yang lebih baik

---

<sup>59</sup>. Van der Wal, *op. cit* jilid III, hal 666-667

<sup>60</sup>. Lihat J.J.P de Jong, *Mitra dalam perundingan Sutan Sjahrir dan HJ van Mook* dalam A.B Lapijan-P.J Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggajati*; Jakarta :Grafiti, 1992, hal 71.

<sup>61</sup>. *Ibid.* hal 682-684

<sup>62</sup>. Yong Mun Cheong. *op. cit.* hal 78

kecuali pemerintah Belanda bisa berunding sendiri dengan pihak Republik Indonesia. Hal ini rupanya bisa diterima pihak pemerintahannya di mana perundingan Indonesia-Belanda direncanakan akan berlangsung di Hoge Veluwe, sebuah tempat peristirahatan yang tidak jauh dari kota Arnhem di Belanda.

Berkaitan dengan hal ini Perdana menteri Schermerhorn sudah memikirkan bahwa akan dibuat sebuah "Persetujuan oral" (*Oral Agreement* berbentuk *Protocol*). Sudah dipikirkan pula bahwa di pihak Republik Indonesia nanti akan ditetapkan berlaku apa yang dikenal sebagai Badan Administrasi Sementara di Jawa (*Provisional Administration in Java*).<sup>63</sup>

Pada rapat kabinet tanggal 11 Maret 1946, konsep *protocol* dibuat pihak Belanda dengan tujuan sebagai bahan perundingan dengan delegasi Indonesia yang akan datang ke Belanda. *Protocol* yang terdiri dari 9 pasal itu pada dasarnya berbicara sebagaimana usulan 10 Februari 1946 kembali. Namun sebelum itu pemerintah Belanda merasa berkepentingan untuk berkonsultasi lebih dahulu dengan pemerintah Inggris di London.

Tanggal 12 April 1946 Perdana Menteri Schermerhorn dan menteri-menterinya mengadakan kunjungan kedua kepada Perdana Menteri Inggris, Attlee di Downing Street No.10 London. Rombongan pihak Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri Schermerhorn sendiri. Ikut dalam rombongan Menteri Luar Negeri van Roijen, Menteri Seberang Lautan Logemann, Van Mook dan Duta Besar Belanda di London, Michiels van Verduynen. Pihak Inggris dipimpin Perdana Menteri Attlee. Hadir Menteri Luar Negeri Bevin, stafnya Orme Sargent, Kepala Staf Kerajaan Alanbrooke, Clark Kerr bersama sekretarisnya Whitteridge, Nevile Biland, dan Jenderal Hasting Imay.<sup>64</sup>

Perdana Menteri Schermerhorn secara panjang lebar melaporkan hal-hal yang telah terjadi, terutama yang ada kaitannya dengan keterlibatan Clark Kerr selama di Indonesia. Dilaporkan juga rencananya akan diadakan perundingan Indonesia-Belanda di negeri Belanda dalam waktu dekat.

Inggris sangat berbesar hati mendengar Belanda-Indonesia telah menuju meja perundingan kembali. Bagi Inggris usaha apapun agar Sekutu bisa cepat

---

<sup>63</sup>. *Ibid.*

<sup>64</sup>. *Ibid.*

pergi dari Indonesia adalah gagasan yang perlu selalu didukung.<sup>65</sup> Lebih-lebih karena tuntutan dan desakan India yang keberatan warga negaranya dilibatkan memerangi bangsa Indonesia. Kunjungan ini tidak banyak memunculkan hasil permusyawaratan baru. Pada akhir perundingan berhasil dilanjutkan dengan penandatanganan sebuah komunike yaitu:

1. Kedua delegasi negara masing-masing (Belanda dan Inggris) yang dipimpin Perdana Menterinya telah mengadakan pertemuan pada sore hari tgl 12 April 1946 bertempat di Downing Street No. 10, London, untuk membicarakan kesimpulan soal perkembangan di Indonesia.
2. Telah dilakukan pertukaran pendapat sehingga disetujui bersama bahwa masih dibutuhkan usaha untuk menghindari konflik bersenjata dengan Jepang dan pergantian tentara Inggris dengan tentara Belanda<sup>66</sup>.

Perundingan Indonesia-Belanda diluar negeri tepatnya di Hoge Veluwe negeri Belanda, dimulai tanggal 14 April 1946.<sup>67</sup> Perundingan formal berlangsung sebanyak 5 kali dan informal, 1 kali. Perdana Menteri Sjahrir tidak hadir, tetapi mengutus Menteri Kehakiman Soewandi, Menteri Dalam Negeri dr. Soedarsono dan Menteri Negara A.K. Pringgodigdo. Delegasi Belanda dipimpin langsung Perdana Menteri Schermerhorn. Dalam delegasi Belanda, terdapat Menteri Sosial Dr. Drees, Menteri Urusan Seberang Lautan Logemann, Menteri Luar Negeri van Roijen, Van Mook (selaku Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda), dan Sanders sebagai sekretaris<sup>68</sup>. Dalam perundingan ini kedua delegasi bertukar pikiran untuk mencari solusi, antara lain terjadinya kemungkinan-kemungkinan dibuatnya persetujuan antara Indonesia dan Belanda.

Perundingan Hoge Veluwe dianggap gagal, karena berpijak pada konsep yang jauh berbeda dengan konsep persetujuan Jakarta pada tanggal 30 Maret 1946. Konsep yang disepakati Van Mook-Sjahrir saat itu diabaikan sama sekali

---

<sup>65</sup>. Jumlah tentara Inggris di Jawa sampai Awal April 1946 berjumlah 46.000 orang. Ini akan dikurangi sebanyak 40.000 orang. Tempat mereka akan diganti oleh tentara Belanda.

<sup>66</sup>. Van der Wal *op. cit* jilid IV, hal 113. Konflik dengan tentara Jepang secara sporadis memang masih terjadi di Indonesia.

<sup>67</sup>. Hoge Veluwe merupakan Taman Nasional di Belanda yang dipergunakan pada masa lalu sebagai tempat wisata berburu, tepatnya di provinsi Gelderland. Didirikan oleh Anton Kröller dan Helene Kröller-Müller pada awal abad ke 19, Disitu terdapat istana kecil perburuan (*Hunting lodge*) yang kemudian dipergunakan untuk perundingan Hoge Veluwe.

<sup>68</sup>. Van der Wal *op. cit* jilid IV, hal 127-128

oleh pemerintah Belanda. Perundingan seolah kembali pada dasar pernyataan Belanda tanggal 10 Februari 1946. Apa yang dibicarakan, merupakan sebuah konsep atau rumusan rancangan baru sama sekali yang berbentuk *protocol* yang maksudnya akan dipergunakan sebagai titik tolak pembicaraan Indonesia-Belanda selanjutnya.

Isi konsep *protocol* tanggal 14 April 1946 adalah:

Pada tanggal 30 Maret 1946 di Batavia diadakan perundingan antara delegasi Belanda dan delegasi Indonesia untuk membicarakan masalah politik. Pembicaraan dilanjutkan sampai awal bulan April 1946. Setelah diadakan lanjutan perundingan di negeri Belanda kesimpulannya adalah:

1. Dalam waktu singkat pemerintah Belanda akan mendesak secara konstitusional terbentuknya sebuah persemakmuran bersama berbentuk federasi dengan Indonesia yang akan menjadi sekutu (*deelgenoot*) bersama Belanda, Suriname dan Curacao sebagai bagian dalam kerajaan Belanda. Dalam persemakmuran ini pulau Jawa dan Madura merupakan bagian didalamnya yang berbentuk Republik otonom sesuai dengan pernyataan pemerintah Belanda pada tanggal 10 Februari 1946.
2. Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 demi kepentingan rakyat di Jawa, akan turut dalam persemakmuran ini, dan berjanji untuk menggunakan pengaruhnya dalam pembentukan sebagaimana tercantum pada *protocol* no.1. Menunggu terwujudnya undang-undang persemakmuran, pemerintah (akan disebut sementara) di Jawa tetap bisa dilanjutkan (kecuali daerah pendudukan militer sekutu) secara bertanggung jawab di bidang hukum, keamanan dan perlindungan warga serta harta benda milik mereka termasuk pembebasan kaum interniran melalui kerja samanya dengan pemerintah Belanda.
3. Daerah lain di Hindia Belanda akan mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatnya sendiri secara bebas mengenai statusnya dalam persemakmuran Indonesia yang akan datang.
4. Dalam persiapan Konferensi Kerajaan (*Rijks Conferentie*). Pemerintah Belanda akan memulai melakukan permusyawaratan dengan para wakil daerah Indonesia lainnya termasuk penduduk yang bukan warga negara, merencanakan membentuk persemakmuran Indonesia dan kedudukannya

dalam ketatanegaraan bersama. Permusyawaratan akan dilaksanakan di Indonesia atau di Belanda.

5. Para wakil dari bagian persemakmuran dan golongan yang bukan warga negara Indonesia, akan ditunjuk oleh organisasi masing-masing. Mengenai aturan dan hasil yang didapat akan diberi tahukan kepada pemerintahan di Jawa sesuai yang tercantum dalam *protocol no.2* .
6. Pemerintah sementara yang tercantum pada *protocol no.2* akan menerima dan membantu pasukan sekutu dan Belanda dalam melaksanakan tugas mereka untuk membebaskan kaum interniran dan tawanan perang serta menawan pasukan Jepang termasuk pelucutan senjata mereka. Aturan pelaksanaan tugas tersebut akan dibuat oleh yang bersangkutan.
7. Permusuhan harus segera dihentikan. Kedudukan kedua pihak akan tetap dipertahankan, kecuali apa yang telah dibicarakan di atas. Kerja sama yang diperlukan akan segera dilaksanakan sesuai dengan hal yang telah dibicarakan.
8. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pemerintahan umum Hindia Belanda yang disesuaikan melalui peraturan-peraturan tersebut dan dalam rangka menunggu terbentuknya perundang-undangan persemakmuran Indonesia dengan bekerja sama dengan pemerintahan sementara dalam *protocol no.2* dan dengan wakil-wakil daerah dan golongan penduduk bukan warga negara, maka akan dibentuk kembali dewan pimpinan departemen serta perwakilan rakyat sementara.
9. *Protocol* ini dibuat dalam bahasa Belanda dan Indonesia  
Apa bila terjadi perbedaan pengertian, maka yang akan berlaku adalah naskah dalam bahasa Belanda.<sup>69</sup>

Sebenarnya delegasi Indonesia di Hoge Veluwe tidak setuju rancangan *protocol* itu. Mereka menginginkan dalam bentuk perjanjian (*Treaty*), namun tidak bisa berbuat banyak sebab wewenangnya terbatas. Demikian pula van Mook ragu apakah rancangan mau diterima pihak Republik Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 15 April 1946, dalam rangka rapat internal pihak Belanda, Van Mook menyusun konsepnya sendiri yang baru yang lebih cocok. Tapi waktu konsep ini diperlihatkan, tokoh-tokoh kabinet Belanda (antara lain Drees), banyak

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 106-107



yang berkeberatan. Mereka bilang konsep Van Mook ini berbeda dengan konsep *protocol* Hoge Veluwe yang telah dibicarakan dengan delegasi Indonesia tanggal 14 April 1946<sup>70</sup>.

Menghadapi semua ketidak pastian ini, pemerintah Belanda masih tetap optimistis. Maka pada perundingan ke 4 (21 April 1946) dan ke 5 atau penutup (24 April 1946) mereka mengundang dan melibatkan Sultan Hamid Alkadri dari Pontianak dan Tahiya dari Ambon. Mungkin selain untuk menampung tanggapan daerah di luar Jawa, juga agar timbul kesan bahwa berunding dengan R.I berarti juga harus berunding dengan daerah diluar Jawa. Seperti sudah diperkirakan, kedua tokoh non Republik ini setuju pemerintahan yang akan datang akan berbentuk federasi karena daerah mereka tidak bersedia di dominir oleh Jawa serta bertekad untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan kebudayaan masing-masing dalam perserikatan negara federasi Indonesia tersebut<sup>71</sup>.

Dalam perundingan informal tanggal 22 April 1946, juga dalam kaitan perundingan ke 4 dan 5, telah dilibatkan tokoh-tokoh pemuda Indonesia seperti Maroeto Daroesman, Saroso dan Setiadjit<sup>72</sup>. Setelah itu, atas anjuran Belanda, ketiga tokoh Indonesia di Belanda ini (Dr.Saroso, Maroeto Daroesman dan Setiadjit), mengikuti delegasi Indonesia kembali ke tanah air. Tujuannya untuk menjelaskan kepada pemerintah R.I dan para pemimpin politik dalam negeri Indonesia mengenai perkembangan politik Belanda pasca perang dunia ke II.<sup>73</sup> Rancangan *protocol* Hoge Veluwe tetap dibawa sebagai bahan perundingan baru dengan Indonesia.

Dari pihak Belanda muncul keterangan yang terkesan bahwa mereka masih optimis menganggap Hoge Veluwe cukup berhasil. Misalnya Schermerhorn menyimpulkan: "Setelah terjadi pertukaran pendapat antara kedua belah pihak, biar bagaimanapun juga perundingan banyak hasilnya. Semoga berdasarkan hasil Hoge Veluwe ini bisa dilakukan perundingan lanjutan demi terlaksananya pengakhiran konflik Indonesia-Belanda". Van Roijen selaku Menteri Luar Negeri

---

<sup>70</sup>. *Ibid*, hal 128

<sup>71</sup>. *Ibid*

<sup>72</sup>. Van der Wal. *op.,cit. jilid IV*; hal. 120-125. Ketiganya merupakan tokoh Perhimpunan Indonesia sebelum perang.

<sup>73</sup>. Orang-orang ini kemudian justru terlibat dalam kabinet RI dibawah Perdana Menteri Sjahrir maupun Amir Sjarifudin.

juga menambahkan: “Perundingan Hoge Veluwe positif, di mana masing-masing pihak menyadari pendiriannya pada masalah politik di Indonesia”.

Kepada Van Mook pada tanggal 29 April 1946 diperintahkan oleh Perdana Menteri Schermerhorn untuk memperbaiki konsep *protocol*, agar menjadi konsep baru yang akan dibawa ke Indonesia.

Isi protocol yang dibuat Van Mook adalah:

1. Pemerintah Belanda akan berusaha melalui jalan konstitusional, dalam waktu dekat membentuk sebuah negara Indonesia merdeka berdasarkan federasi, sesuai dengan pernyataan 10 Februari 1946. Negara ini akan meliputi semua wilayah Hindia Belanda dan akan menjadi sekutu Belanda, Suriname, dan Curacao sebagai bagian didalam kerajaan Belanda.
2. Pemerintah Belanda mengakui pulau Jawa (kecuali daerah pendudukan sekutu) berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia secara *de facto*. Pemerintah Belanda akan memperhatikan tuntutan pihak Indonesia bahwa wilayah RI akan termasuk juga pulau Sumatera. Sumatera dan daerah lainnya di Hindia Belanda, akan mendapat kesempatan untuk menyatakan secara bebas keinginannya guna mendapat status di dalam negara Indonesia merdeka.
3. Pemerintah RI akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membangun negara Indonesia merdeka. Dalam rangka menunggu terwujudnya negara Indonesia merdeka tersebut, RI bertanggung jawab pada daerah kekuasaan *de facto* miliknya dibidang hukum, keamanan dan perlindungan warga, serta harta benda milik mereka termasuk pembebasan kaum interniran. Jika pihak RI tidak sanggup, badan pemerintahan Belanda akan melakukannya.
4. Pemerintah RI akan menerima baik secara bersahabat pasukan sekutu dan Belanda yang akan tiba (berdasarkan keputusan pimpinan sekutu) di pulau Jawa dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menawan pasukan Jepang termasuk perlucutan senjata, serta membebaskan kaum interniran dan tawanan perang. Aturan pelaksanaan tugas tersebut akan di buat oleh yang bersangkutan.
5. Permusuhan segera di hentikan dengan memperhatikan pasal 4 di mana akan dipertahankan kedudukan masing-masing, termasuk hubungan antara kedua kedudukan tersebut. Pembicaraan mengenai peraturan kerja sama yang diperlukan akan segera dilaksanakan

6. Untuk persiapan Konferensi Kerajaan (*Rijks Coferentie*) pemerintah Belanda dalam waktu dekat akan membicarakannya dengan pihak RI dan dengan wakil-wakil daerah lain di Indonesia serta penduduk yang bukan warga negara Indonesia. Pembicaraan akan mencakup bentuk negara Indonesia merdeka, kedudukan dan hubungan ketatanegaraan bersama, hubungan dengan kekuasaan asing, kerja sama dengan Nederland dalam memenuhi kebutuhan materi dan kebudayaan warga Belanda serta warga asing di Indonesia. Permusyawaratan akan diadakan di Indonesia atau di Belanda.
7. Penunjukan wakil dari Sumatera, kecuali wilayah yang diduduki militer sekutu, akan dilaksanakan oleh pemerintah Belanda setelah lebih dahulu mengadakan pembicaraan dengan pihak RI. Penunjukan wakil dari daerah lain dan wakil bukan warga negara akan diberi tahanan kepada pihak RI. Daerah dan kelompok bukan warga negara berhak menyerahkan perwakilannya kepada pemerintah RI yang akan menyediakan perwakilan golongan minoritas Indonesia dalam wilayah kekuasaan *de facto* RI serta memberi tahu soal peraturan di maksud kepada pemerintah Belanda.
8. Bila sebuah daerah menyatakan keberatannya menjadi anggota negara Indonesia merdeka tanpa syarat, untuk sementara diberikan kedudukan istimewa
9. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pemerintahan umum melalui persetujuan ini, dan dalam rangka menunggu terwujudnya negara Indonesia merdeka berdasarkan federasi, dalam pemerintahan Belanda akan segera dimasukkan wakil-wakil dari RI, wakil-wakil dari daerah lain dan wakil-wakil kelompok bukan warga negara Indonesia.
10. Protocol ini dibuat dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Apa bila terjadi perbedaan pengertian, maka yang akan berlaku adalah naskah dalam bahasa Belanda.<sup>74</sup>

Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1946, Logemann memerlukan memberikan penjelasan di muka parlemen Belanda soal Hoge Veluwe. Meskipun olehnya diusahakan untuk membeberkan hasil perundingan secara terbuka dan ditambah alasan-alasan yang masuk akal, sejumlah anggota parlemen dari kelompok

---

<sup>74</sup>. Van der Wal, *op., cit. Jilid IV* . hal 188-190

oposisi, menolak. Bahkan van Poll dari KVP sampai-sampai mengeluarkan mosi yang isinya: "Perundingan dilanjutkan kalau para tawanan orang Belanda di Indonesia di merdekakan lebih dahulu".<sup>75</sup>

Nampaknya miringnya opini masyarakat Belanda terhadap kebijakan pemerintah kabinet Schermerhorn disebabkan karena seolah-olah pemerintah Belanda terlalu banyak memberikan konsesi pada delegasi Indonesia. Hal ini menyebabkan partai PvdA menjadi lemah dalam menyongsong pemilihan umum yang sebentar lagi akan diadakan.

Mungkin untuk membela diri, Logemann menyatakan pada tanggal 20 Mei 1946 dalam pers di Belanda, antara lain berbunyi: "Mengharap supaya bangsa Indonesia jangan terlampaui meminta terlalu banyak, akan tetapi berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Hendaknya mereka menerima bantuan Belanda hanya untuk menghentikan kekacauan, perampasan dan penculikan dan akan menjadi anggota terhormat yang baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)".<sup>76</sup>

Setelah Van Mook kembali ke Indonesia, pada tanggal 19 Mei 1946 dirinya menyerahkan *protocol Hoge Veluwe* yang telah disempurnakannya tersebut kepada Sjahrir. Untuk ini Sjahrir berjanji akan menyampaikan *counter proposal* kepada Van Mook secepatnya. Pada tanggal 15 Juni 1946, *counter proposal* dimaksud diserahkan Sjahrir melalui konsul Inggris Mac Kereth. Surat Mac Kereth dengan lampiran *counter proposal* Sjahrir diberikan kepada van Mook, tertanggal 17 Juni 1946.<sup>77</sup>

Isi *counter proposal* Sjahrir ini adalah:

Judul: "Persetujuan pendahuluan antara pihak-pihak Agung sebagai berikut"

Pemerintah Belanda di satu pihak dan Pemerintah Republik Indonesia di lain pihak yang diwakili oleh Presiden Ir. Soekarno dan Perdana Menteri Soetan Sjahrir.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia berkuasa secara *de facto* atas Jawa dan Sumatera. Pemerintah Belanda sepakat dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan kerjasama guna mewujudkan

<sup>75</sup>. S.K Persatoean Soerat kabar oemoem tanggal 9 Mei 1946. *Tweede Kamer bersidang*

<sup>76</sup>. S.K Merdeka. Soera Rakyat R.I. tanggal 20 Mei 1946. *Tidak merintang perundingan*;

<sup>77</sup>. Van der Wal. *Opcit. Jilid IV*. hal 466

Negara Indonesia yang merdeka di dalamnya termasuk semua bagian dari Hindia Belanda dahulu. Negara merdeka ini akan mengadakan perserikatan dengan Nerderland.

#### Pasal 2

Pemerintah Republik Indonesia berjanji memberi bantuan yang bersahabat kepada pasukan-pasukan Sekutu, termasuk pasukan-pasukan Belanda yang masuk di Jawa dan Sumatera dengan persetujuan Pimpinan Tertinggi Sekutu, dalam tugasnya mengeluarkan pasukan-pasukan Jepang dan bekas interniran dan tahanan perang bila diperlukan. Cara pelaksanaan tugas ini secepat mungkin akan diatur oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 3

Segera setelah perjanjian ini berlaku kedua belah pihak akan menghentikan permusuhannya dengan pengertian dan mengingat apa yang telah dimufakati dalam pasal 2, di mana mereka akan mempertahankan posisinya masing-masing. Mereka segera akan mengadakan pembicaraan mengenai kerjasama yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan ini dan untuk memperbaiki keadaan pada umumnya. Pemerintah Indonesia berjanji tidak akan merekrut prajurit baru dan Pemerintah Belanda mengikat diri tidak akan mendatangkan pasukan-pasukan baru di wilayah Indonesia.

#### Pasal 4

Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pemerintah Belanda akan mengadakan perundingan dengan Pemerintah Republik mengenai pembentukan negara yang merdeka yang dimaksud dalam pasal 1. Juga mengenai perserikatan dengan Belanda, sebagaimana dimaksud dalam pasal yang bersangkutan, hubungannya dengan kekuasaan asing, kerjasama dengan Belanda dan guna memenuhi kepentingan materiil dan kebudayaan dari pihak Belanda dan pihak Luar Negeri pada umumnya di Indonesia. Perundingan tersebut dapat diadakan di Yogyakarta atau Den Haag.

#### Pasal 5

Pada perundingan yang dimaksud dalam pasal 4 dapat turut serta wakil-wakil dari daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera. Pengaturan mengenai jumlah dan penunjukan wakil-wakil tersebut akan ditetapkan atas persetujuan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda. Daerah-daerah yang

disebut dalam pasal ini mempunyai wewenang untuk menghibahkan perwakilannya kepada Republik.

#### Pasal 6

Jika suatu daerah dengan perantaraan wakilnya berkeberatan masuk tanpa bersyarat pada negara yang merdeka yang akan dibentuk itu, untuk daerah ini untuk sementara waktu akan dibuat suatu hubungan istimewa dalam negara yang merdeka ini dan dengan Kerajaan Belanda sesuai dengan keberatan-keberatan mereka. Sesudah tiga bulan suatu pilihan rakyat akan memberi keputusan mengenai masalah hubungan tersebut.

#### Pasal 7

Jika dalam masa berlakunya persetujuan ini terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang menandatangani persetujuan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik sepakat untuk mengajukan perselisihan itu kepada komisi banding (*arbitrage*) yang anggota-anggotanya satu orang ditunjuk oleh Pemerintah Belanda dan satu orang oleh Pemerintah Republik, sedangkan anggota ketiga dari seorang berkebangsaan lain yang ditunjuk atas persetujuan kedua belah pihak atau oleh Mahkamah Internasional. Pihak-pihak yang menandatangani persetujuan wajib patuh pada keputusan Komisi Banding (*arbitrage*) tersebut.

#### Pasal 8

Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah memiliki kekuatan yang sama, yang akan berlaku segera setelah ditandatanganinya. Jakarta 15 Juni 1946.<sup>78</sup>

Namun, *counter proposal* yang dibuat Sjahrir tidak bisa diterima pihak Belanda karena berarti kemunduran dari Hoge Veluwe. Justru ketika dalam suasana perundingan Indonesia-Belanda kali ini berlangsung, pada tanggal 27 Juni 1946 Sjahrir diculik. Sejak itu perundingan Indonesia-Belanda terhenti untuk beberapa bulan.<sup>79</sup> Perundingan baru dilanjutkan kembali pada periode kabinet Sjahrir ketiga.

---

<sup>78</sup>. *Ibid* . Hal 467-470

<sup>79</sup>. Sebabnya karena di Belanda sedang berlangsung pemilu dan di Indonesia juga terjadi masalah politik yang dasarnya konflik internal akibat ulah Persatuan Perjuangan (PP).

Sedikit ke belakang, tanpa diperkirakan sebelumnya, tiba-tiba pada tanggal 25 April 1946, panglima SEAC Laksamana Mountbatten datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Sjahrir.

Laurens van der Post bercerita mengenai kedatangan pimpinan militer sekutu ini untuk satu hari saja:

“Mounbatten tiba lebih cepat dari yang saya perkirakan dan ini menimbulkan perhatian berbagai lapisan masyarakat di kota Batavia. Dalam kurun waktu 4 abad, baru kali inilah Indonesia kedatangan seorang bangsawan yang paling dekat dengan keluarga raja Inggris. Tiba-tiba saja, sekitar jam setengah tiga siang, 3 buah jeep berhenti di muka asrama saya. Saya mendengar mereka datang, lalu saya melangkah ke beranda. Di sana nampak Mountbatten menyetir sendiri jeepnya bersama Ian Lauder. Rupanya Mountbatten tahu di mana saya bersembunyi hari itu dan menyadarkan saya, mengapa saya tidak berada di markas untuk bertemu dengannya ? Dia benar-benar marah kepada saya. Saya segera melompat ke dalam Jeep di sebelah Mountbatten dan menunjukkan jalan kepadanya menuju rumah Sjahrir. Kemudian keduanya melakukan pembicaraan yang memakan waktu lama. Akhirnya Mountbatten harus berusaha kembali terbang secepatnya ke Singapura dengan pesawat sebelum hari menjadi gelap”.<sup>80</sup>

Pertemuan Mountbatten dengan Sjahrir tidak disangsikan lagi penuh dengan hasil yang memadai guna meningkatkan keyakinan Indonesia kepada Inggris<sup>81</sup>. Bukan tidak mungkin Sjahrir dapat meyakinkan Mountbatten bahwa tidak benar di Indonesia terjadi kesemerawutan dan kelaparan sebagaimana laporan Belanda.

Setelah kunjungan tersebut pemerintah RI menyempatkan diri untuk memberitakannya melalui RRI. Antara lain komunike pemerintah: “Pada tanggal 27 April 1946, hari ini, bagi dunia semakin nyata dan terang bahwa Let.Jen Christison Panglima terdahulu (ketika itu Christison sudah digantikan Montague Stopford) sekutu di Indonesia dan Laksamana Mountbatten telah ditipu Belanda mentah-mentah dengan membuat mereka percaya bahwa di Indonesia terjadi bahaya kelaparan”. Rupanya segala laporan Belanda itu oleh Mountbatten dipercaya saja. Laporan Belanda kepada Inggris dikatakan, bahwa “bangsa

---

<sup>80</sup>. Laurens van der Post, *Admiral's baby*; Newyork: William Morrow and Company Inc, 1996, hal 179-180.

<sup>81</sup>. Van der Wal. *Opcit. Jilid IV*. hal 467-470

Indonesia masih bodoh dan tidak sanggup mengurus keperluannya sendiri kalau tidak dengan pertolongan Belanda”.<sup>82</sup>

Setelah periode kekacauan di mana Sjahrir di culik dan pimpinan pemerintahan dipegang langsung Presiden Soekarno, tanggal 15 Juli 1946 Sjahrir mulai mengatur strategi baru untuk berdiplomasi dengan Belanda. Sementara setelah pemilu di Belanda, ada perubahan kebijakan politik pemerintah dalam menghadapi masalah Indonesia. Antara lain, pada saat membuka sidang parlemen tanggal 24 Juli 1946, Ratu Belanda Wilhelmina berpidato tentang kebijakan politik Belanda terhadap “Hindia Timur”. Antara lain dikatakannya: “Sedang dirancang sebuah Konferensi Kerajaan, di mana lebih dahulu akan diutus “Komisi Jenderal” untuk persiapan itu. Konferensi Kerajaan akan dilangsungkan atas dasar kerja sama yang rapat dan atas dasar persamaan”. Dikatakan selanjutnya: “Negeri Belanda selamanya memelihara jalan damai dalam perhubungan dengan dunia internasional dan sejak dahulu dasar kerajaan selalu menjaga tetapnya hukum dan keadilan”.<sup>83</sup>

Dengan perkataan lain rencana adanya Komisi Jenderal itu sudah pasti, namun realisasinya baru terlaksana pada tanggal 10 September 1946. Pembentukan Komisi Jenderal ditetapkan dengan undang-undang dan Schermerhorn (saat itu sudah mantan Perdana Menteri dan anggota partai dari PvDA) ditunjuk sebagai ketua, Van Poll (dari KVP) dan F de Boer (dari partai liberal) sebagai anggota. Dalam realisasi tugasnya kemudian, Komisi Jenderal ditambah Van Mook sebagai anggota. Sanders yang selalu terlibat dalam diskusi masalah Indonesia dalam kabinet Schermerhorn, diangkat sebagai Sekretaris Jenderal.

Tokoh penengah Inggris pengganti Archibald Clark Kerr, ditetapkan Lord Killearn. Dia adalah seorang diplomat senior Inggris, mantan duta besar di Mesir sebelum perang. Resminya dia diangkat sebagai utusan khusus untuk Asia Tenggara terkait urusan pangan, tapi nyatanya dia lebih banyak berperan dalam perundingan Indonesia-Belanda. Pada tanggal 26 Agustus 1946, dengan menumpang pesawat Dakota dari Singapura, Lord Killearn tiba di lapangan

---

<sup>82</sup>. Osman Raliby, *op., cit.*, hal 301.

<sup>83</sup>. *Ibid.* hal 359



terbang Kemayoran, Jakarta<sup>84</sup>. Pada tanggal 29 Agustus 1946, dia telah mengunjungi Ibu Kota R.I Yogyakarta. Disana diterima Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar negeri Sutan Sjahrir. Dalam kesempatan ini, telah muncul kesepakatan bahwa Lord Killearn akan memberi tahu pihak militer sekutu di Jakarta agar gerakan militer mereka di setop. Kemudian kepada pihak RI dia meminta agar diutus beberapa opsir Indonesia ke Jakarta untuk membicarakan pengangkutan APWI yang terhenti beberapa lama akibat adanya salah pengertian. Sjahrir juga berjanji etnis India dan Tionghoa di Indonesia terjamin keselamatannya.<sup>85</sup>

Pada tanggal 31 Agustus 1946 mulai jam 11.00 pagi berlangsung pertemuan Indonesia-Inggris di Jakarta yaitu antara Menteri Muda Luar Negeri H. Agus Salim yang didampingi Mr. Utojo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan opsir-opsir dari kantor penghubung tentara Indonesia di Jakarta. Pihak Inggris diwakili Konsul Jenderal Inggris Mac Kereth, Jenderal Mayor Forman dan sejumlah perwira Inggris. Yang dibicarakan, persiapan pendahuluan peundangan gencatan senjata. Perundingan lanjutan Indonesia-Belanda terkesan sudah bisa dilaksanakan. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah suasana tidak menentu antara Indonesia dan Belanda. "Tidak damai dan juga tidak perang" (*no war no peace*). Maka untuk ini pada tanggal 12 September 1946, Dr Soedarsono selaku wakil resmi pemerintah, diutus ke Jakarta untuk berbicara dengan Van Mook, terutama dikaitkan dengan kedatangan Komisi Jenderal ke Indonesia ini dan persiapan perundingan gencatan senjata mengawali perundingan politik.

Sementara keadaan dalam negeri RI pada awal Oktober 1946, bertambah baik. Jabatan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Presiden sewaktu Sjahrir diculik yang dituangkan dalam maklumat no.1 tahun 1946 tertanggal 29 Juni 1946 itu telah dicabut<sup>86</sup>. Sebagai gantinya oleh pemerintah dikeluarkan maklumat no.2 tahun 1946 pada tanggal 2 Oktober 1946, yang isinya: "Oleh karena keadaan negara telah kembali seperti semula, sehingga kabinet dan lain-lain badan resmi

---

<sup>84</sup>. S.K Soember Penerangan 27 Agustus 1946. *Lord Killearn tiba di Djakarta*.

<sup>85</sup>. S.K Soeloeh Ra'yjat tanggal 30 Agustus 1946. *Perjalanan ke Yogya*;

<sup>86</sup>. Pada tanggal itu Presiden Soekarno memberlakukan Negara dalam keadaan perang (SOB) dan mengambil alih kekuasaan Perdana Menteri dengan persetujuan kabinet. Osman Raliby.*op.cit.* hal 323-324

dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka Maklumat Presiden No.1 tahun 1946 kami cabut kembali".<sup>87</sup>

Pada 27 September 1946 muncul berita pada beberapa surat kabar R.I yang sumber beritanya dari kantor berita Antara. Isinya: "Hari ini Perdana Menteri Sutan Sjahrir ditunggu kedatangannya di Jakarta". Sebenarnya saat itu Sjahrir belum lagi diangkat kembali menjadi Perdana Menteri, tapi telah ditetapkan sebagai formatur kabinet baru. Keberangkatannya ke Yogya pada beberapa hari sebelumnya adalah untuk bertemu dengan Soekarno. Tapi karena Soekarno sedang berada di Malang, maka segera dirinya berniat untuk menyusul. Untuk ini dia bermaksud menumpang pesawat terbang. Tragisnya pesawat yang akan ditumpangnya telah jatuh dan terbakar habis. Oleh karena itu untung jiwanya masih terselamatkan. Dirinya akhirnya menggunakan pesawat lain. Kunjungan ke Malang untuk menemui Soekarno adalah untuk membicarakan calon anggota kabinet baru, sekaligus menyampaikan hasil sementara perundingan Indonesia-Belanda.<sup>88</sup> Rupanya Soekarno setuju rencana Sjahrir dan semua prosedur berjalan mulus sehingga pada tanggal 2 Oktober 1946 sudah bisa diumumkan kabinet Sjahrir ketiga atau kabinet keempat Republik Indonesia.<sup>89</sup>

Dalam Kabinet Sjahrir ketiga ini, beberapa wajah baru muncul, misalnya Mohammad Roem (Masjumi) menggantikan Soedarsono sebagai Menteri Dalam Negeri. Wijono Soerio Koesoemo (BTI) menggantikan Samadikun sebagai Menteri muda Dalam Negeri. Harsono Tjokroaminoto (Masjumi) menggantikan Arudji Kartawinata sebagai Menteri muda Pertahanan. Mr Susanto Tirtoprodjo (PNI) menggantikan Mr Soewandi sebagai Menteri Kehakiman. Sjafrudin Prawiranegara (Masjumi) menggantikan Ir Surachman sebagai Menteri Keuangan. Sebagai Menteri muda Keuangan ditunjuk Mr. Lukman Hakim (PNI). Dr. AK Gani (PNI) menggantikan Ir. Darmawan Mangunkeosoemo sebagai Menteri Kemakmuran, dan sebagai Menteri Mudanya ditunjuk Mr Jusuf Wibisono (Masjumi). Ir. Djuanda menggantikan Ir. Abdul Karim sebagai Menteri Perhubungan dan sebagai Menteri Mudanya ditunjuk Setiadjit (Partai Buruh Indonesia/PBI). Mr Soewandi kemudian diangkat sebagai Menteri Pengajaran menggantikan Moh.Sjafei. Sebagai Menteri Muda Pengajaran ditunjuk Ir.

---

<sup>87</sup>. Osman Raliby, *op.cit*, hal 420

<sup>88</sup>. S.K Sin Po 28 September 1946. *Perundingan Indonesia-Belanda*

<sup>89</sup>. Osman Raliby; *op.cit*, hal. 419. *Kabinet Sjahrir*

Goenarso (Sosialis). Menteri Penerangan tetap M.Natsir. Sebagai Menteri Muda Penerangan diangkat orang baru yaitu AR Baswedan. Faturachman (Masjumi) menggantikan H. Rasjidi sebagai Menteri Agama. Selain itu diangkat pula 6 orang Menteri Negara yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX, Wahid Hasjim (Masjumi), Wikana (BKPI), dr. Soedarsono (Sosialis), Mr Tan Po Gwan dan Dr EFE Douwes Dekker.<sup>90</sup>

Susunan kabinet baru ini lebih baik karena didukung koalisi partai yang sedang berkuasa saat itu. Sementara tokoh-tokohnya merupakan pilihan yang tepat. Nampaknya Sjahrir sudah siap mental dan fisik menghadapi perundingan dengan Belanda yang didampingi kabinet barunya. Sejumlah nama menteri seperti Mohammad Roem, Soesanto Tirtoprodjo, AK Gani, Amir Sjarifudin, H. Agus Salim, dr Soedarsono, merupakan jaminan sebagai tokoh diplomasi handal saat itu.

Awal Oktober 1946 merupakan hari-hari panjang yang telah dipersiapkan sebaik-baiknya agar Indonesia dan Belanda bisa tenang untuk berunding. Dengan kebijakan pemerintah Belanda membentuk Komisi Jenderal dan di Indonesia telah berhasil dibentuk kabinet Sjahrir ketiga yang didukung Presiden, maka kedua delegasi Indonesia-Belanda ini siap berunding.

### **3.2 Konferensi Malino dan Bangkitnya Golongan Non Republik.**

Peristiwa yang terjadi kemudian, sebagai kelanjutan Hoge Veluwe adalah konferensi Malino.<sup>91</sup> Van Mook nampaknya ingin menarik perhatian pemerintah Belanda agar melaksanakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia.<sup>92</sup>

Seperti diketahui, pihak Belanda-Inggris telah bereaksi cepat, pada tanggal 10 Juli 1946 jam 0.00 tengah malam, dimulailah penyerahan wilayah di luar Jawa dan Sumatera oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Berdasarkan hal ini Belanda berhasil melakukan konsolidasi politiknya di wilayah Indonesia Timur. Bahkan di bidang pemerintahan, mampu menegakkan kembali sistem

---

<sup>90</sup>. *Ibid.*

<sup>91</sup>. Sebuah kota kecil peristirahatan di Sulawesi Selatan.

<sup>92</sup>. Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* ; Yogyakarta: Gajah Mada press, 1985, hal 39.

administrasinya, misalnya dengan menegakkan kembali *Corps Binnenlands Bestuur* (B.B) seperti zaman sebelum perang.<sup>93</sup>

Bagi Belanda pergantian ini sebenarnya merupakan hal yang tidak terlalu sulit karena selama kekuasaan Australia di daerah Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku dan Irian), di daerah tersebut sudah berlaku kekuasaan NICA dan tentara Belanda dengan bebas diizinkan masuk ke wilayah tersebut, sekaligus berkuasa di bidang pemerintahan daerah. Bagi Belanda, untuk melakukan gerak dan langkah politiknya di Indonesia Timur, tidak terlalu sulit apalagi besar kemungkinan bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh Indonesia setempat. Tentu saja mereka adalah kelompok non Republik. Di Jawa sedikit berbeda, Inggris membentuk badan yang namanya AMACAB dimana unsur NICA ada didalamnya. Akibatnya banyak kendala yang dihadapi NICA untuk bergerak bebas dan mandiri. Seolah pihak Inggris selalu melakukan pengontrolan. Sejak bulan Februari tahun 1946 Christison, termasuk para penggantinya memang melarang masuknya tentara Belanda ke Jawa secara besar-besaran. Ini bukan hal aneh, karena merupakan kebijakan regional Laksamana Mountbatten.

Sementara pemerintah RI pasca Proklamasi, pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan berdirinya 8 wilayah Propinsi di mana untuk ini pada tanggal 5 September 1945 diangkat para Gubernurnya. Untuk Sumatera, Teuku Mohammad hasan, Jawa Barat, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Jawa Tengah, Pandji Soeroso, Jawa Timur, Surjo, Sunda kecil, I Gusti Ktut Pudje, Kalimantan, Pangeran Muhammad Noor, Sulawesi, Dr GSS. Ratulangi dan Maluku J.Latuharhary<sup>94</sup>.

Dengan kembalinya Belanda ke wilayah Indonesia Timur, kedudukan penguasa Republik ini menjadi surut.<sup>95</sup> Akibat lebih lanjut adalah terjadinya perlawanan rakyat dari golongan yang pro Republik. Dalam konflik politik yang berlanjut dengan konflik bersenjata ini, tentara Australia bertindak tegas. Sebagian besar daerah Sulawesi Selatan diduduki dengan dalih "pemulihan pemerintahan sipil di wilayah tersebut". Dalam keadaan yang terdesak kelompok pro Republik kemudian mendirikan organisasi bernama "Pusat Keselamatan Rakyat".

---

<sup>93</sup>. *Ibid*, hal. 40-41

<sup>94</sup>. Osman Raliby, *op.,cit*, hal 33

<sup>95</sup>. Ide Anak Agung Gde Agung, *op.,cit*, hal. 62

Tokoh penting non Republik yang sangat aktif di Sulawesi Selatan adalah Nadjamudin Daeng Malewa.<sup>96</sup> Sejak awal dia telah menyatakan minat besarnya untuk bekerja sama dengan Belanda. Maka pada tanggal 8 - 9 Februari 1946 dirinya diundang Van Mook ke Jakarta. Setelah itu diadakanlah pembicaraan oleh pihak non Republik dan kabinet Hindia Belanda di Jakarta. Hal-hal yang dibicarakan selain masalah ekonomi, juga soal sosial dan politik. Disepakati pula untuk membentuk “Dewan Sulawesi Selatan” dalam waktu dekat. Dewan Sementara Sulawesi Selatan yang pro Belanda ini akhirnya memang berhasil terbentuk pada bulan April 1946.<sup>97</sup>

Pernyataan sepihak Najamudin dalam pertemuannya dengan Van Mook tanpa melibatkan kaum Republik ini, ahirnya memunculkan ketidak senangan kaum Republik yang tergabung dalam Pusat Keselamatan Rakyat yang dipimpin Ratulangi. Dampaknya sudah diperkirakan, yaitu penangkapan-penangkapan sejumlah orang Republik oleh pihak Belanda, termasuk Ratulangi pada tanggal 5 April 1946 sebagai Gubernur dan pimpinan Pusat Keselamatan Rakyat itu. Penangkapan di daerah Bali juga telah terjadi antara lain Gubernur (R.I) Bali Ktut Pudje yang ditangkap pada tanggal 12 Maret 1946.

Konsolidasi Belanda selanjutnya adalah pembentukan “Komisariat Pemerintahan Umum untuk Timur Besar (Indonesia Timur), di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1946. Tindakan ini didasarkan keputusan pemerintahan Hindia Belanda no.4 tahun 1946.

Kembali kepada masalah konferensi Malino, persiapannya dilaksanakan dengan baik atas kerja sama pihak Belanda dengan badan-badan non Republik didaerah Indonesia timur, yaitu Dewan Sementara Sulawesi Selatan, Paruman Agung dari Bali, Dewan Minahasa dari Sulawesi Utara dan Dewan Maluku Selatan dari Maluku. Bagi daerah lain yang belum teroganisir, telah diperintahkan kepada pimpinan NICA setempat untuk menghubungi wakil-wakil rakyat pimpinan masyarakat dan kepala pemerintahan atau kepala adat untuk mengirimkan wakil-wakilnya. Tempat yang dipilih oleh Van Mook untuk

---

<sup>96</sup>. Mantan pegawai Departemen Ekonomi dizaman sebelum perang.

<sup>97</sup>. Ide Anak Agung Gde Agung, *op.,cit*, hal. 61

mengadakan konferensi adalah lokasi peristirahatan Malino, 70 km dari Makasar di daerah pegunungan Lompo Batang.<sup>98</sup>

Menjelang konferensi, pasukan Australia telah ditarik seluruhnya dan digantikan pasukan Belanda dari KL dan KNIL serta dibantu polisi. Keadaan darurat perang yang berlaku dizaman pendudukan militer Australia di hapus dan pemerintahan sipil secara berangsur-angsur diberlakukan.

Adapun maksud dan tujuan Konferensi Malino ini terutama adalah untuk membahas gagasan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT). Di samping itu juga guna membuka wilayah lainnya di luar Jawa yang non Republik, seperti Kalimantan, Maluku, Flores, Bali, Lombok, Sumbawa, Bangka, Belitung dan sebagainya. Dalam rangka ini, konferensi Malino resmi berlangsung dari tanggal 16 - 22 Juli 1946. Dalam kesempatan konferensi ini, Van Mook berpidato berapi-api di muka para wakil rakyat Indonesia Timur yang pro Belanda. Para pejabat Belanda yang hadir dalam suasana sidang Konferensi Malino cukup banyak termasuk dari Jakarta. Konferensi ini dihadiri wakil dari 18 daerah atau sebanyak 51 orang utusan di Indonesia Timur atau saat itu dikenal sebagai Timur besar. Beberapa tokoh yang ikut dalam perundingan Hoge Veluwe, seperti Sultan Hamid ke II dan Tahiya juga tampak sebagai utusan daerahnya masing-masing.<sup>99</sup>

Sebagai bahan persiapan, salah satu yang menarik adalah ditetapkannya nota Van Mook pada tanggal 21 Desember 1945 sebagai salah satu acuan sidang. Isinya:

“Untuk menjamin terwujudnya otonomi yang sungguh-sungguh bagi daerah dan bagi bangsa Indonesia dan bagi perkembangan yang seimbang diantara daerah-daerah, Indonesia harus di bangun dalam bentuk federasi yang terdiri dari negara bagian dengan catatan susunan pemerintahannya disesuaikan dengan taraf kemajuan masing-masing negara”.<sup>100</sup>

Hasil Konferensi Malino seperti dituangkan dalam resolusi yang isinya:

1. Melulu untuk suatu peraturan federatif Indonesia, seluruh Indonesia, dengan nama: “Perserikatan negeri-negeri Indonesia”

---

<sup>98</sup>. *Ibid*, hal. 95.

<sup>99</sup>. W.A van Goudoever. *Malino Maakt Historie* ; Batavia: Regeering Voorlichtings Dients, 1948, hal 59-63 .

<sup>100</sup>. Ide Anak Agung Gde Agung. *op.,cit.* hal. 106. Van der Wal. *Op., cit jilid II.* hal. 396.

2. Membagi federasi ini dalam 4 bagian, seperti: Jawa, Andalas, Kalimantan dan Timur Besar, dengan mengingat kedudukan dari Kepulauan Sunda Kecil, dengan penggabungan dari raja-raja Kalimantan Timur pada Kalimantan, dan kedudukan Bangka, Biliton dan penggabungan pada Andalas.
3. Mengadakan segala rapat dari konferensi kedua untuk penyelenggaraan, dan mengerjakan usul untuk perubahan tata negara Kalimantan dan Timur Besar.
4. Persetujuan dengan usul supaya 7 wakil Indonesia dan Malino mendapat tempat untuk persiapan dari perubahan tata negara Kalimantan, Timur Besar, Bangka, Biliton dan Riau.<sup>101</sup>

Konferensi Malino memunculkan reaksi keras dari pihak Republik Indonesia. Tidak kurang Wakil Presiden Mohamad Hatta mengkritik pedas karya Van Mook tersebut. Dalam wawancara radio Yogyakarta tanggal 17 Juli 1946, dikatakannya antara lain: "Konferensi Malino diadakan atas paksaan di atas ujung sangkur oleh pemerintah Belanda dan peserta-pesertanya ditunjuk oleh van Mook". Pernyataan Hatta ini juga memunculkan reaksi keras pula dari para peserta konperensi. Mereka kemudian memunculkan mosi yang menyatakan bahwa: "Pernyataan Hatta melukai hati dan menyimpang dari kebenaran". Mosi ini ditanda tangani oleh, Sonda Daeng Mattajang (Sulawesi Selatan), Soekawati (Bali), Sultan Hamid II (Kalimantan Barat) dan Dengah (Minahasa). Van Mook sendiri kemudian menyinggung pidato Hatta itu dalam pidatonya dengan kata-kata yang agak sinis.<sup>102</sup>

Konferensi Malino, segera dilanjutkan dengan konferensi Pangkal Pinang yang direncanakan pada tanggal 6 September 1946. Namun karena satu dan lain hal terpaksa diundur menjadi tanggal 12 Oktober 1946. Peserta sidang konferensi rencananya terdiri dari golongan-golongan kecil (*minoriteit*), seperti golongan Arab, Cina, dan Belanda. Namun, ternyata tidak satu pun utusan keturunan Arab yang datang.<sup>103</sup> Hadir dari pemerintahan Hindia-Belanda, para pejabat tinggi pemerintahan dan rombongan Komisi Jenderal yang saat itu sudah di Indonesia.

Salah satu resolusi konferensi Pangkal Pinang adalah, diharapkannya Komisi Jenderal mendapat penyelesaian perundingan dengan Republik Indonesia

---

<sup>101</sup>. S.K Soeloeh Ra'jat 24 Juli 1946. *Resolusi dari Malino*.

<sup>102</sup>. S.K Pandji Ra'jat; 30 Juli 1946. *Bentara Merdeka*,

<sup>103</sup>. S.K Panji Rakjat tanggal 10 September 1946. *Keturunan Arab menolak*.

sehingga menjamin peraturan hukum yang bertanggung jawab yang mampu dipikul kerajaan Belanda.<sup>104</sup>

### 3.3 Pro dan Kontra Perundingan Indonesia-Belanda.

Kebijakan R.I berunding dengan Belanda, mendapat perlawanan sengit dalam negeri dari Persatuan Perjuangan (P.P) dibawah Tan Malaka.<sup>105</sup> Tujuan utama gerakan politik P.P adalah sebagai kekuatan oposisi yang akan mengganjal kebijakan politik kabinet Sjahrir khususnya guna berunding dengan pihak Belanda. Dalam hal ini Tan Malaka berkeyakinan bahwa R.I masih berkemampuan untuk tidak menerima betapa kecil pun tuntutan Belanda.

Kekuatan oposisi Pemerintah yang berkelompok ini lahir tanggal 6 Januari 1946 di kota Purwokerto. Jumlah masa pendukungnya, 143 organisasi, termasuk yang besar, yaitu PNI dan Masyumi.<sup>106</sup>

Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatra Barat. Pendidikannya adalah sekolah guru di Bukit Tinggi yang kemudian dilanjutkan ke negeri Belanda. Dia pernah jadi anggota Partai Komunis Indonesia angkatan dua puluhan. Tapi kemudian berbeda jalan dengan tokoh klasik lainnya seperti Semaun, Darsono, Muso dan Alimin. Dirinya dikategorikan pejuang nasionalis yang militan, radikal dan revolusioner. Dia banyak melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang berbobot dan berperan aktif memberi sumbangan penting khususnya di bidang politik dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Sejak tahun 1926, Tan Malaka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar negeri, dan terus menerus terancam penangkapan serta penahanan oleh penguasa di mana dirinya berada. Walaupun selalu tersingkir, Tan Malaka memainkan peran kepemimpinan yang penting dalam membangun jaringan komunisme internasional, khususnya dalam gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Tahun 1942, setelah Jepang menguasai Indonesia, Tan Malaka

---

<sup>104</sup>. S.K Merdeka Soeara Rakjat Repoebluk Indonesia. 12 Oktober 1946, *Persatoean Perdjoengan*.

<sup>105</sup>. Sejak zaman Jepang, Tan Malaka tokoh PKI tahun 1926 kembali ke Indonesia dan sejak tahun 1946, memimpin kekuatan politik oposisi melawan Pemerintah. (lihat Mengenang Sjahrir, Rosihan Anwar).

<sup>106</sup>. Tan Malaka menyebutnya 141 organisasi. Lihat Tan Malaka, *Dari Penjara ke penjara* ; Yogyakarta: Teplok Press, 2000 (cetakan ulang), hal 191.



pulang ke tanah air. Sejak Indonesia merdeka dirinya tidak pernah henti-hentinya melakukan gerakan oposisi politik terhadap pemerintah.

Adapun gerakan politik pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Tan Malaka di Indonesia ini ceritanya cukup panjang. Mula-mula Tan Malaka mencari simpatisannya. Antara lain dari Mr Ahmad Soebardjo. Kahin menulis dalam bukunya bahwa, "Subardjo (Ahmad Soebardjo adalah menteri luar negeri kabinet R.I pertama) dan Tan Malaka memiliki ambisi untuk duduk pada tingkat paling tinggi dalam pemerintahan Republik. Mereka berusaha mencapainya dengan sekuat tenaga. Mula-mula secara terpisah, kemudian bergabung".<sup>107</sup>

Soal hubungan Tan Malaka dan Sjahrir, mula-mula Tan Malaka tertarik pada kecemerlangan Sjahrir. Rencana pertama adalah menawarkan bekerja sama. Tapi Sjahrir menolak dengan alasan kemampuan Tan Malaka untuk mendapat dukungan rakyat tidak sebesar Soekarno. Dalam perkembangannya Subardjo dan kawan-kawan termasuk Soekarni, ternyata memiliki kemampuan lebih lanjut untuk mendukung Tan Malaka sehingga mampu mendapat simpati dari banyak partai. Kahin menyangsikan kalau Tan Malaka jujur dalam berpolitik. Salah satu contohnya dalam memunculkan rencana kedua apa yang dikenal sebagai testamen politik.<sup>108</sup>

Untuk memahami strategi rencana kedua Tan Malaka, yang dibuat dengan bantuan Subardjo, harus dilihat kondisi Jakarta saat itu (September 1945). Soekarno-Hatta tahu bahwa Belanda mendesak Inggris untuk menangkap mereka. Keduanya merasa, bila tidak ditangkap, besar kemungkinan bisa dibunuh Belanda. Keyakinan akan dibunuh Belanda, antara lain lebih dahulu ditandai terjadinya penembakan mobil Soekarno yang kebetulan dirinya tidak ada di dalamnya, namun sopirnya terluka. Dalam waktu yang tidak terlalu berbeda, tentara Belanda juga menembaki mobil Sjahrir dan Amir Sjarifudin. Lebih lanjut Tan Malaka menemui Soekarno dan menekankan kepadanya akan adanya bahaya yang mengancam bila Soekarno-Hatta tinggal di Jakarta. Ditambahkannya bahwa akan muncul bencana bila Republik kehilangan pemimpinnya saat kritis seperti itu. Dianjurkannya membuat semacam ketetapan tepat yaitu Tan Malaka dapat meneruskan kepemimpinannya RI bila Soekarno-Hatta tertangkap atau terbunuh. Dia

---

<sup>107</sup>. Mc. Turn Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*; New York: Cornell University Press, 1952, hal 147-148.

<sup>108</sup>. *Ibid*

menyarankan agar dibuat semacam testamen rahasia namun sah.<sup>109</sup> Testamen rahasia dimaksud setelah dibicarakan dipihak Soekarno, akhirnya bukan hanya diberikan kepada Tan Malaka saja, tetapi memunculkan beberapa nama orang yaitu: Tan Malaka, mewakili kelompok *Marxist* yang radikal, Sjahrir mewakili Sosialis yang moderat, Iwa Kusuma Sumantri mewakili golongan Islam, Wongsonegoro mewakili golongan priayi dan kelompok pegawai pemerintah zaman sebelum perang. Subardjo ditugaskan untuk memberitahukan 3 nama yang tidak hadir. Akan tetapi Subardjo tidak pernah melakukan tugasnya untuk memberi tahu Sjahrir, Iwa maupun Wongsonegoro.<sup>110</sup>

Dalam sebuah sidang kabinet, Soekarno pernah membicarakan soal testamen politik ini, tapi secara pasti belum dilaksanakan. Tan Malaka kemudian berbuat licik. Menurut Kahin: "Dalam sidang kabinet Soekarno mengumumkan bila dirinya atau Hatta terbunuh, dia sudah meninggalkan surat testamen di mana kabinet harus mematuhiya". Sementara Tan Malaka membuat testamen lain yang menyebutkan bahwa Soekarno-Hatta menyerahkan kekuasaan pada dirinya bila tidak mampu bertugas sebagai pemimpin dan sekaligus memalsu tanda tangan Soekarno-Hatta. Dengan surat ini, dia berkeliling daerah untuk memberitahukan bahwa Soekarno-Hatta sudah membuat semacam testamen politik. Selama Oktober-November 1945 dia berkeliling Jawa untuk menunjukkan testamen palsu itu kepada orang-orang terkemuka dan berkata bahwa Soekarno-Hatta sudah ditahan Inggris di Jakarta".<sup>111</sup>

Pertemuan besar P.P pertama diadakan di kota Solo pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946, yang dihadiri oleh 141 wakil organisasi. Dalam pertemuan itu setelah mendengarkan pengarahan Tan Malaka, dibentuklah panitia kecil (terdiri dari 11 orang) untuk merumuskan apa yang mereka sebut *minimum program*. Kesebelas orang tersebut antara lain, Ibnu Parna (Pesindo), Wali Alfatah (Masyumi), Ir Sakirman (dewan perjuangan Jawa Tengah), Soedirman (T.K.R), dan Tan Malaka sendiri. Isi *Minimum program* adalah:

1. Berunding dengan Belanda atas pengakuan kemerdekaan 100 %.
2. Pemerintahan dipegang rakyat.
3. Tentara berbentuk tentara rakyat.

---

<sup>109</sup>. *Ibid.* Lebih dikenal sebagai "Testamen Politik".

<sup>110</sup>. *Ibid.*

<sup>111</sup>. *Ibid.*; hal 150

4. Melucuti tentara Jepang, mengurus tawanan bangsa Eropah,
5. Menyita serta menyelenggarakan perkebunan milik musuh, menyita serta menyelenggarakan perindustrian musuh.<sup>112</sup>

Pemerintah Yogya segera bereaksi terhadap pertemuan Solo yang provokatif dan memecah belah rakyat tersebut. Oleh BP KNIP di Purworedjo, guna menunjukkan bahwa lembaga ini sejalan dengan pihak eksekutif, dikeluarkanlah pengumuman BP KNIP No. 20, pada tanggal 15 Januari 1946. Isinya yang penting adalah: "Menganjurkan persatuan, menghindari faktor yang bisa memecah belah, dan menghindari perbuatan yang dipandang dunia luar sebagai perbuatan agresif dan fasistik. Ditegaskan agar partai politik mengutamakan persatuan, tentara dan organisasi perjuangan perlu berusaha mengadakan persatuan siasat, didaerah segera disusun badan perwakilan sesuai undang-undang tentang KNI daerah."<sup>113</sup>

Aksi-aksi demo PP untuk menyerang kebijakan pemerintah, diselenggarakan disembarang tempat. Misalnya pada tanggal 14 Februari diadakan Rapat Raksasa di alun-alun utara Yogyakarta yang dikunjungi ribuan orang. Dalam kesempatan itu dikeluarkan mosi yang isinya, mengingat:

1. Soal Indonesia sudah dibicarakan dalam sidang UNO(PBB)
2. Vhysinsky dan Manuilsky telah memperjuangkan soal Indonesia dalam sidang UNO sesuai dengan yang sebenarnya.
3. Kini sedang dilangsungkan perundingan antara Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Van Mook dan Clark Kerr.

Memutuskan:

1. Mendorong rakyat Indonesia seluruhnya untuk mengadakan demonstrasi-demonstrasi terus menerus bahwa kita hanya berpendirian Merdeka 100 %. Menghargai dan berterima kasih atas sikap Sovyet Rusia, Polonia, dan Ukraina dalam sidang UNO.
2. Mendesak kepada pemerintah supaya hanya berunding kepada siapapun juga diatas pendirian kemerdekaan 100 %.

---

<sup>112</sup>.Tan Malaka, *op., cit*, hal 194.

<sup>113</sup>. Osman Raliby, *op., cit*, hal 566

3. Tidak mau mengakui segala macam perundingan yang mengenai soal Indonesia jika tidak dilangsungkan dengan pemerintah negara Republik Indonesia.
4. Mengajukan kepada rakyat Indonesia seluruhnya agar senantiasa siap sedia untuk berjuang terus dan membela kemerdekaan kita.<sup>114</sup>

Tekanan dari P.P menjadi sangat berarti karena mereka bertindak sebagai oposisi penuh. Selain itu P.P didukung oleh partai yang kurang setuju pada pendekatan-pendekatan baru untuk berunding dengan Belanda. Pada awalnya Sjahrir masih bisa mentoleransi dan bersedia mengikuti pola kebijakan menurut tuntutan *minimum program*. Bahkan setelah kabinetnya yang pertama bubar, sebagai formatur dia mengangkat anggota kabinet berbentuk koalisi dimana wakil Masjumi dan PNI ikut di dalam kabinet. Tapi menurut Sjahrir, ulah PP, tetap saja condong untuk menjatuhkan pemerintah.

Tan Malaka bersama kawan-kawan terus mengadakan rapat-rapat terbuka dan secara demonstratif menuduh pemerintah berbuat hal yang merugikan rakyat, khususnya melakukan perundingan dengan Belanda diluar keinginan rakyat. Setelah tindakan PP ini cukup jauh, pemerintah menganggap kalau ini dibiarkan maka situasi politik akan lepas kendali, akibatnya pemerintah akan mengalami kesukaran menjalankan kebijakannya. Maka pemerintah segera bertindak tegas. Surat penangkapan Tan Malaka dan sejumlah tokoh penting PP lainnya dikeluarkan atas perintah Amir Sjarifoedin dan Dr. Soedarsono. Pelaksananya adalah dua orang mahasiswa *Ika Dai Gaku*, Aboe Bakar Loebis dan Imam Slamet dengan bantuan Polisi Tentara dan pasukan Pesindo di Madiun tanggal 17 Maret 1946<sup>115</sup>. Ceritanya, setelah P.P melakukan kongresnya tanggal 15 - 17 Maret 1946 di Madiun, ketika para utusan akan kembali ke daerahnya masing-masing di tempat-tempat penting seperti jalan raya dan stasiun kereta api sudah menunggu alat negara. Sejumlah tokoh PP. seperti Abikusno Tjokrosoejoso, Muhammad Yamin, Chairul Saleh dan masih banyak lagi, langsung ditangkap. Tan Malaka

---

<sup>114</sup>. S.K Soeara merdeka 16 Februari 1946. *Menuntut Merdeka 100 %*.

<sup>115</sup>. Aboe Bakar Loebis. *Kilas Balik Revolusi*; Jakarta : UI Press, 1992, hal 152.

baru tertangkap belakangan saat akan minta perlindungan pada residen Madiun, Mr. Soesanto Tirtoprodjo<sup>116</sup>.

Surat kabar Merdeka tanggal 6 Juli 1946 berkomentar soal Tan Malaka ini: "Tan Malaka seorang Trotskyist yang pengaruhnya makin hari bertambah besar di Jawa Tengah, sehingga namanya sering dibisikkan orang. Beberapa peninjau menduga bahwa jumlah penganutnya ada 2.000.000 orang. Tan Malaka, meskipun ia mengandung pandangan politik yang sangat ekstrim sekali, bukan seorang teroris. Juga dengan Soetomo ia tidak mempunyai persamaan. Tetapi dengan melakukan aksinya di Jawa Tengah, pusat gerakan kemerdekaan, ia bukan saja membahayakan pengaruh Sjahrir, tetapi juga persatuan orang Jawa ketika pengharapan akan tercapainya persetujuan dengan Belanda lagi sebesar-besarnya. Oleh karena itu dengan bertindak atas instruksi Sjahrir dan Soekarno, Menteri Amir Sjarifudin memasukkan Tan Malaka dan dua asistennya dalam penjara, yang berarti suatu tindakan yang menghapuskan kekuatan lawan yang terkuat di Jawa Tengah dan Jawa Barat".<sup>117</sup>

Ternyata gerakan oposisi pemerintah yang terkait pada kebijakan politik Perdana Menteri Sjahrir guna berunding dengan Belanda, tidak juga sirna sampai pertengahan tahun 1946 di mana peranan golongan oposisi selanjutnya punya hubungan dengan penculikan Sjahrir tanggal 27 Juni 1946 dan peristiwa 3 Juli 1946.<sup>118</sup>

### 3.4 Peran dan Kebijakan Presiden Soekarno.

Soekarno adalah tokoh nasional *flamboyant* yang sejak berusia muda memunculkan gagasan-gagasan kebangsaan Indonesia di Hindia Belanda, dan ia bercita-cita untuk kemerdekaan Indonesia. Dia dilahirkan di kota Surabaya, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901. Ketika sekolah di HBS (*Hoogere Burger School*) di Surabaya, dia mondok di rumah tokoh politik kawakan Partai Sarikat Islam, Haji Omar Said Tjokroaminoto (H.O.S.Tjokroaminoto). Di sana dirinya sekaligus magang, menimba ilmu politik dari tokoh tua ini.<sup>119</sup> Setelah lulus THS

---

<sup>116</sup>. *Ibid.* hal 154-155.

<sup>117</sup>. S.K Merdeka Soera Rakjat Repoeblik Indonesia 6 Juli 1946. *Siapa Tan Malaka*.

<sup>118</sup>. Peristiwa 3 Juli sering dituduhkan sebagai usaha kup yang dilakukan oleh Jenderal Mayor Soedarsono bersama kelompok PP.

<sup>119</sup>. Soekarno adalah bagian dari keluarga H.Omar Said ini. Mengawali diri sebagai anak kos, kemudian menjadi menantu dan bertindak selaku kakak tertua dari putra-putri H.Omar Said.

(*Technische Hooge School*) di Bandung, Soekarno tidak menjalankan tugas profesinya secara ajek sebagai seorang insinyur sipil, tapi lebih aktif di bidang politik. Di Bandung, dia mendirikan kelompok belajar umum Bandung (*Algemene Studie Club Bandung*). Menimba pengalaman masa muda di Surabaya dari H.O.S Tjokroaminoto yang bersifat Nasionalisme-Islamisme, kemudian dari Marcel Koch dalam idiologi Sosialisme-Marxisme di Bandung. Mungkin segala rupa idiologi ini dalam pikirannya itu disatukannya sendiri dalam sebuah sintesa pemikiran Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Konsep ini disebutnya sebagai Marhaenisme.<sup>120</sup>

Kemudian tahun 1926 Soekarno dan teman-temannya mantan Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda seperti Iskak, Sartono, dan Sunarjo mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Bukan hal yang aneh kalau PNI banyak dipengaruhi pemikiran PI. Ali Sastro Amidjojo menulis dalam bukunya: "Maka tidak mengherankan bahwa asas dan tujuan P.N.I tahun 1928 ketika saya hendak memasukinya adalah pada hakekatnya sama dengan apa yang di ikrarkan oleh P.I di dalam keterangan asas-asasnya di tahun 1923 dan 1925".<sup>121</sup>

Partai Nasional Indonesia ini sifatnya radikal, sehingga akibat kegiatannya yang melawan pemerintah kolonial, pada tahun 1930 Soekarno ditangkap dan dipenjarakan di rutan Banceuy, kemudian rutan Sukamiskin Bandung. Setelah Soekarno dipenjarakan, PNI dibubarkan sendiri oleh para anggotanya yang dipimpin Sartono. Kemudian kelompok ini mendirikan Partai Indonesia (Partindo). Setelah keluar dari penjara, Soekarno juga ikut bergabung dengan Partindo. Sebelum itu, tahun 1927 muncul PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) yang didukung oleh PNI, Partai Sarikat Islam, Boedi Oetomo, *Studie Club* Surabaya, organisasi kedaerahan dan Kristen. Tujuan organisasi ini, untuk membentuk Front Nasional. Pemikiran-pemikiran Soekarno mendapat dukungan besar dari PPPKI. Tanggal 1 Januari 1932, saat pembebasan Soekarno dari penjara Sukamiskin, PPPKI menyambutnya dan menyelenggarakan kongres Indonesia Raya di Surabaya.

---

saat sang kepala keluarga ini dipenjara.

<sup>120</sup>. Lihat Lambert Giebels, *Soekarno*. (Terjemahan); Jakarta : Grasindo, 2001.

<sup>121</sup>. Ali sastroamidjojo. *Tonggak-tonggak di perjalananku*. Jakarta, PT Kinta, 1974, hal 75.

Dalam kegiatan selanjutnya, karena dianggap melakukan kegiatan politik praktis yang radikal kembali, tahun 1933 Soekarno dipenjara lagi dan dibuang pemerintah kolonial ke Ende di Flores. Tahun 1937 masa pembuangannya diperingan dengan memindahkannya ke Bengkulu sampai dengan pecahnya perang Pasifik dan pendudukan Jepang Maret 1942.

Di zaman Jepang, kecil kemungkinan Soekarno bisa melanjutkan ideologi politik Marhaenismenya, sehingga terkesan dia hanya mengikuti kebijakan politik pemerintahan pendudukan militer Jepang. Meskipun demikian, dengan bantuan Jepang Soekarno banyak sekali mendapat fasilitas untuk berhubungan dengan rakyat. Sejak Poetera (Mei 1943), kemudian Jawa Hokokai (Januari 1944) nama Soekarno melambung tinggi dan dikenal oleh rakyat. Di samping itu dalam sidang-sidang *Chuo Sangi In*, sejak tahun 1943, Soekarno adalah tokoh menonjol yang selalu berpidato bersemangat dengan bagus dan disambut banyak orang pendengarnya.

Pada tahun 1944-1945, Soekarno banyak berkeliling Jawa untuk memperkenalkan “Gerakan Rakyat Baru” sebuah kampanye Jepang untuk memobilisasi rakyat demi Perang Asia Timur Raya. Hasilnya, pada awal Revolusi Soekarno merupakan tokoh puncak yang sangat dikenal rakyat, khususnya di Pulau Jawa.<sup>122</sup>

Untuk peran aktifnya dalam kekuatan masa riel, maka ia mendirikan Barisan Pelopor. Dalam organisasi semi militer di bawah Jawa Hokokai ini, Soekarno dibantu seorang tokoh nasionalis, Dr Moewardi. Loyalitas Barisan Pelopor nampaknya mampu mengimbangi kelompok lain yang berusaha memojokkan Soekarno dengan tuduhan-tuduhan miring soal ulahnya di bidang politik maupun bidang lainnya di zaman Jepang itu. Dengan bergabungnya tokoh-tokoh tua sebelum perang dengan Soekarno, akhirnya ini semua memunculkan kekuatan politik baru yang berhadapan dengan golongan muda yang radikal.<sup>123</sup>

Setelah Proklamasi, dirasakan Soekarno adanya iklim politik yang berubah sehingga lebih memungkinkan memunculkan cita-citanya, tapi hambatan muncul dengan adanya kekuasaan sekutu untuk mengembalikan kolonialisme Belanda.

---

<sup>122</sup>. Meskipun di Jawa Hokokai Soekarno bukan ketua, hanya sebagai kepala kantor dan penasihat, tapi disitu peranannya diakui besar.

<sup>123</sup>. Benedict R.O.G. Anderson. *Java in a time of Revolution* ; Ithaca: Cornell University Press, 1972, hal 57-60.

Banyak informasi miring soal Soekarno dan Jepang telah dipelajari secara cermat oleh Sekutu maupun Belanda. Kebijakan baru yang harus ditempuhnya guna memenangkan kepemimpinan politik dalam negeri adalah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Tulisan Ong Hok Ham sebagai pengantar dalam mengawali buku Bernhard Dam versi Indonesia, lebih terkesan sebagai tulisan tanggapan, ada baiknya di simak.

Dia (Ong Hok Ham) mengatakan:

“Satu hal yang sangat penting menurut pendapat saya adalah bahwa pribadi Sukarno dan pemikirannya pun tidak dapat dipisahkan dari Sukarno sebagai politikus. Hal ini kurang ditekankan oleh Dahm atau lebih tepat ia memisahkan pribadi Sukarno dan politikus Sukarno. Dahm mendekati Sukarno sebagai fenomena budaya dan pendekatan budaya ini juga dipakai untuk menilai pemikiran Sukarno. Pendekatan semacam ini tidak saja dilakukan oleh Dahm tetapi banyak peneliti Indonesia, para penafsir Pancasila dan sebagainya. Padahal Sukarno adalah sebenarnya 100 % seorang *political animal*, pribadi politik. Ia selalu dapat menyesuaikan prinsip-prinsipnya dengan kondisi dan situasi politik yang ada.<sup>124</sup>

Rasanya ungkapan Ong Hok Ham di atas cukup beralasan. Kalau kita melihat apa yang dikerjakan Soekarno pada akhir September tahun 1945 dan bulan-bulan selanjutnya yang terkesan kalau pemikirannya amat dekat dengan pemikiran kaum Republikan lainnya yang bisa menerima kedatangan Sekutu. Seolah masa kampanyenya bagi kebesaran Jepang telah berlalu.

Dalam wawancaranya dengan wartawan perang Australia pada tanggal 20 September 1945 dikatakan Soekarno antara lain:

“Riwayat pergerakan politik bangsa Indonesia itu, akhirnya dapat dikemukakan kesimpulannya, bahwa gerakan kemerdekaan bukannya buatan Nippon atau atas anjuran Nippon, melainkan memang karena kemauan bulat dari bangsa Indonesia sendiri sejak dulu kala.<sup>125</sup> Atas pertanyaan mereka (wartawan Australia) tentang apakah kemerdekaan itu tidak dengan perkenaan Pimpinan Balatentara Dai Nippon di daerah selatan ? Maka diberi keterangan oleh Soekarno: “Bahwa benar tempo hari diadakan pembicaraan antara

---

<sup>124</sup>. Ong Hok Ham dalam Bernhard Dam. *Sukarno dan perjuangan kemerdekaan*. hal XX (Terjemahan).

<sup>125</sup>. Berita Repoebluk Indonesia Oktober 1945.



Jenderal Besar Terauchi di dekat Saigon dengan Soekarno-Hatta, akan tetapi setelah terdengar berita-berita desas-desus tentang menyerahnya Dai Nippon kepada Serikat, kabar mana tidak dapat dibenarkan atau disangkal oleh pemerintah Dai Nippon, maka lalu atas kemauan sendiri bangsa Indonesia telah menetapkan nasibnya dengan menyatakan dirinya merdeka. Dalam pada itu jikalau bangsa Indonesia menolak segala penjajahan itu tidak berarti bahwa bangsa kita itu mengadakan gerakan anti bangsa-bangsa kulit putih (*not anti white movement*) akan tetapi gerakan kita adalah sesuatu gerakan yang dengan positif mempertahankan kemerdekaan nasional.<sup>126</sup>

Sementara tokoh-tokoh seperti Sjahrir, dan Tan Malaka menjadi kendala baru dalam kedudukan Soekarno selaku pemimpin nasional. Lebih-lebih setelah terjadi perubahan sistem konstitusi pada November 1945 di mana Sjahrir terpilih sebagai Perdana Menteri. Sjahrir selama akhir tahun 1945 sampai dengan pertengahan 1947, lebih terkesan menyaingi Soekarno ketimbang sebagai rekan kerja. Meskipun Sjahrir bertindak sebagai bawahan yang tampak keluar bekerja sama secara rukun.

Dalam awal karirnya sebagai negarawan pada Republik Indonesia, Soekarno tetap berpegangan pada kebijakan “dari atas ke bawah” (*top down policy*), yang terkesan tidak demokratis. Misalnya penetapan Partai Nasional Indonesia tanpa berkonsultasi pada banyak orang. PNI (partai Negara) akhirnya sukar direalisasikan dan tidak pernah terdengar lagi. Kemudian dalam pidato-pidatonya yang selalu diucapkan adalah “tetap tenang, tinggal tenteram, memegang teguh disiplin dan siap sedia berjuang untuk Indonesia”<sup>127</sup>. Juga terlihat saat terjadinya peristiwa Rapat Raksasa menyambut berdirinya KNIP, tanggal 31 Agustus 1945. Sukarno amat mendukung Rapat Raksasa ini yang dilanjutkan arak-arakan keliling kota pada hari yang sama. Saat itu Sukarno, Hatta, Fatmawati dengan ceria menyambut rakyat yang berbaris di depan rumahnya di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tetapi ketika rakyat meminta dukungan pemerintah untuk mengadakan Rapat Raksasa Ikada tanggal 19 September 1945, Soekarno pada dasarnya tidak setuju. Ketika dengan terpaksa dia datang sesudah sore hari, pada acara yang diselenggarakan menurut azas demokrasi atau kebijakan dari bawah

---

<sup>126</sup>. *Ibid*

<sup>127</sup>. Osman Raliby, *op., cit.* Hal 17-18

keatas (*bottom up policy*), juga beserta sejumlah menteri, pidatonya tidak lebih dari lima menit. Pidatonya kurang lebih itu-itu juga, “ Jagalah persatuan, taat pada pemerintah, tunduk pada disiplin dan pulang ke rumah masing-masing”. Padahal, banyak orang yang menarik kesimpulan saat itu, Soekarno amat terkesan atas dukungan rakyat pada dirinya pasca kemerdekaan. Segala opini tentang dirinya yang negatif di zaman Jepang hilang berlalu bersama hiruk pikuknya Revolusi.<sup>128</sup>

Sementara kebijakan pemerintah yang penting pada pertengahan bulan Oktober 1945 sampai awal November 1945 yang menyangkut pemerintahan, beberapa buah ditandatangani oleh Hatta. Yang menjadi pertanyaan apakah Soekarno menyetujuinya secara tulus kebijakan Hatta yang demokratis ini ?<sup>129</sup>. Lebih-lebih lagi ketika Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) yang ketuanya Sjahrir, menerbitkan Pengumuman BP KNIP No.5, tanggal 11 November 1945. Presiden menerima baik usul Badan Pekerja, hingga dengan persetujuan tadi dimulailah adanya pertanggung jawaban para menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat dalam susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia<sup>130</sup>. Agak sukar menjelaskan bagaimana sikap Soekarno saat itu sehingga bisa menyetujui konsep yang dibuat BP KNIP ini.

Untuk bisa sedikit memahami jalan pikiran Soekarno, ada baiknya kita menyimak penjelasan Ali Sastroamidjojo ketika Soekarno berdiskusi dengan Sartono dan kawan-kawan dalam wadah PNI. pada tahun tiga puluhan: “Di Bandung pertemuan selalu diadakan di rumah Bung Karno di jalan Astana Anyar. Pemimpin daerah yang hadir tidak banyak. Terbatas pada mereka yang memegang pimpinan partai di daerah yang penting saja. Misalnya Mr.Sartono dari Jakarta, Mr.Sujudi dari Jawa Tengah dan Gatot Mangkupradja dari Bandung yang sering disertai dr. Samsi dari Jawa Timur. Ir.Anwari sering datang pula. Ki Suwandi dari Taman Siswa Yogya sering hadir juga. Dalam pertemuan terbatas seperti itu diadakan tukar pikiran tentang soal politik. Bung Karno adalah seorang idealis yang buat orang yang berfikir *nuchter*, memberi kesan bahwa idealismenya itu tergantung tinggi di angkasa. Sebenarnya pemimpin yang *nuchter* itu adalah Mr Sartono. Ia sebagai ahli hukum selalu berpikir secara tajam

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Soedarpo Sastrosatomo 12 Oktober 2003.

<sup>129</sup> Maklumat no.X, Haluan Politik pemerintah 1 November 1945, Maklumat 3 November 1945,

<sup>130</sup> Berita Repoeblrik Indonesia no.1 th 1. *Pengoemoeman Badan Pekerja Komite Nasional Poesat. No.5.*

dan logis serta bersandar pada realitas yang ada. Ia tidak begitu senang pada cita-cita yang muluk. Adalah Sartono yang selalu mengemukakan pertanyaan tentang cara bagaimana gagasan-gagasan Bung Karno yang muluk-muluk itu untuk bisa dilaksanakan. Tetapi Bung Karno tidak mau menyerah dan menjawab dengan jawaban yang sering menjengkelkan “Oh itu gampang, katanya”...<sup>131</sup>

Giebels dalam bukunya soal Soekarno, menambahkan:

“Perbedaan pendapat Soekarno dan Hatta-Sjahrir oleh Dahm dengan nada agak terlalu serius, ditempatkan dalam lingkup pertanyaan fundamental Hegel yaitu, mana yang lebih dahulu jiwa atau materi ?” Sama seperti Marx, Hatta dan Sjahrir berpendirian bahwa materi yang menjadi dasar kehidupan; mereka orang-orang materialistis. Soekarno yang mencari asal usul kosmos didalam jiwa menurut logika Dahm, termasuk golongan idealis pengikut Hegel juga. Hatta dan Sjahrir sebenarnya juga berpaham dialektik, tesis di hadapkan anti tesis. Soekarno cenderung melompati dialektik lalu langsung meraih sintesis.<sup>132</sup>

Nampaknya bagi yang bisa diyakinkannya, Sukarno adalah politikus yang melihat jauh ke muka di mana tujuan yang bagaimanapun sukarnya harus bisa dicapai, tanpa mempersoalkan terlalu penting bagaimana metodologinya. Kiat Sukarno untuk menerima strategi orang lain demi cita-citanya sendiri yang bisa dapat tercapai, akan terjadi berulang-kali dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia pada waktu kemudian.

Pada awal Januari 1946, keadaan Jakarta sangat tidak aman. Maka diputuskanlah untuk memindahkan ibukota RI. Kediaman resmi Presiden, wakil Presiden dan sejumlah anggota kabinet, dipindahkan keluar Jakarta. Pilihan jatuh di Yogyakarta. Tepatnya tanggal 4 Januari 1946, secara diam-diam Sukarno, Hatta bersama beberapa menteri dan keluarga mereka meninggalkan rumah di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dari pintu belakang di mana telah siap lokomotif beserta sejumlah gerbongnya. Rombongan lainnya segera menyusul dalam dua minggu berikutnya. Sebagian besar kantor pemerintah ikut pindah. Kementerian Pertahanan dan Penerangan, BP KNIP dan kementerian lain pindah

---

<sup>131</sup>. Ali Sastro Amidjojo. *Op.,cit.* Hal 84.

<sup>132</sup>. Lambert Giebels. *Soekarno Biografi 1901-1950*; Jakarta : Grasindo, 2001, hal 160.

ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang tinggal di Jakarta hanya kantor Perdana Menteri beserta staf dan kator Wali Kota Jakarta Soewirjo.<sup>133</sup>

Setelah menetap di Yogya, sejak tanggal 5 Januari 1946 Soekarno sering berpidato penuh semangat perjuangan yang menggambarkan seorang pemimpin nasional di lingkungan yang sangat mendukungnya. Dia seolah berada dalam benteng fisik dan idiologis yang kuat dan aman. Sekarang dia berada dalam lingkungan Jawa pribumi, sehingga mampu menyampaikan pidatonya yang bergelora, menggerakkan gema-gema yang paling dalam, dan tidak seorang pun yang dapat mengimbangnya dalam membakar daya khayal dan pembaktian rakyat.<sup>134</sup>

Kedudukan Perdana Menteri di Jakarta tetap dipertahankan pemerintah dengan perhitungan pentingnya hubungan dengan dunia luar dan kemudahan melakukan perundingan baik dengan Sekutu maupun Belanda. Namun justru timbul interpretasi bahwa sudah terjadi kebijaksanaan pemerintah yang mendua. Di satu pihak Sjahrir mendapat kebebasan di Jakarta<sup>135</sup>. Di lain pihak Soekarno kembali tenar pasca pendudukan Jepang, atau awal Revolusi. Kedua pemimpin Indonesia tersebut, yaitu Soekarno dan Sjahrir nampak bersaing di bidang politik dalam sistem konstitusi yang tidak jelas.<sup>136</sup>

Pada awal kemerdekaan, Soekarno mengalami ancaman fisik dan mental karena tuduhan kolaborasi dengan Jepang. Banyak yang melihat Sjahrir adalah rekan yang melindungi. Tapi setelah Soekarno di Yogya, Sjahrir justru kehilangan legitimasi politik nasionalnya. Yang masih ada hanya kepentingan perundingan Indonesia-Belanda di mana dirinya merupakan tokoh yang dibutuhkan Inggris dan Belanda. Soekarno menyadari hal ini, dan demi keseimbangan dalam negeri, kedudukan Perdana Menteri Republik Indonesia harus dijamin. Nampaknya Soekarno tahu membatasi diri dan bertindak bijaksana, termasuk mendukung semua kebijakan Sjahrir. Ketika tanggal 7 Januari 1946 KNI daerah Yogya mengadakan penyambutan besar-besaran kepindahan Presiden RI ke Yogyakarta, dan rombongannya, dalam kesempatan itu dikatakan Soekarno antara lain:

---

<sup>133</sup>. Kator Walikota Jakrta, disenut juga "Balai Agung pemerintahan Nasional Jakarta".

<sup>134</sup>. Osman Raliby, *op., cit.* hal 301.

<sup>135</sup>. Rudolf Mrazek, *Sjahrir Politics and Exile in Indonesia* ; Ithaca NewYork: Cornel University Press. 1994, hal 526.

<sup>136</sup>. *Ibid.*

“Kepindahan ke Yogya adalah kepindahan sementara. Saya minta kepada seluruh rakyat supaya jangan gugup dan jangan menganggap kepindahan sebagian pemerintahan ini adalah akibat perubahan politik yang besar”. Pidatonya ditutup dengan kata-kata: “Kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kita kuat”.<sup>137</sup>

Tanggapan Soekarno pada soal perundingan Indonesia-Belanda tegas, yaitu dirinya akan mendukungnya. Hal ini nampak terutama setelah situasi pemerintahan diambilalih Presiden, setelah Sjahrir diculik (akhir Juni 1946). Saat itu Sjahrir mendapat kekuasaan untuk melanjutkan berunding akan tetapi atas tanggung jawab Soekarno, maksudnya tidak sebagai Perdana Menteri lagi tetapi sebagai pejabat juru runding yang bertanggung jawab atas nama Soekarno.<sup>138</sup>

Ketika pertengahan tahun 1946 Belanda menolak pencalonan Soekarno selaku ketua delegasi perundingan politik Indonesia-Belanda, Soekarno tidak kecewa bahkan mendukung terus jalannya perundingan, termasuk setelah naskah Linggajati diparaf pada tanggal 15 November 1946.<sup>139</sup> Lebih lanjut dibuktikannya dukungan tersebut saat bulan Februari tahun 1947, saat pemerintah menghadapi sidang pleno parlemen dalam sidang pleno KNIP di Malang. Sehingga akhirnya Linggajati selesai di ratifikasi. Setelah itu, sesuai dengan janjinya, Soekarno-Hatta mengkampanyekan Linggajati ke seluruh Jawa. Sejak pertengahan sampai akhir bulan November 1946 Presiden Soekarno mengadakan perjalanan dinas ke Jawa Barat. Ia mengunjungi kota-kota Cirebon, Sumedang, Garut, Bandung, sampai Majalaya, Ciparay dan Cisarupan<sup>140</sup>. Menurut Kantor Berita Antara dalam kesempatan di Garut misalnya, Presiden berpidato dalam rapat raksasa dimana rakyat gelisah ketika Presiden mengumumkan artikel (pasal) 8 dari rencana perjanjian Linggajati itu (yang mengenai raja Belanda sebagai kepala UNI). Diterangkan oleh Presiden berkali-kali bahwa: “Raja Belanda sama sekali tidak menyinggung kedaulatan RI. Sebermula sebelum persetujuan tercapai, memang bunyi artikel 8 itu menghendaki supaya raja Belanda yang berkusa. Berkat kegiatan delegasi Indonesia, hal yang mengecewakan itu diubah dengan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak”<sup>141</sup>. Rupanya, sebelum itu Wakil Presiden Hatta telah pula mengadakan perjalanan ke Jawa Timur. Kantor

---

<sup>137</sup>. Osman Raliby, *Op., cit.*, hal 188.

<sup>138</sup>. S.K Soeloeh Rakjat 11 Juli 1946.

<sup>139</sup>. Van der Wal. *Opcit jilid V.* Hal 374.

<sup>140</sup>. Merdeka. Soeara Rakjat Repoeblik Indonesia 26 November 1946.

<sup>141</sup>. Berita Antara 18 November 1946.

Berita Antara menyebutkan: “Dalam rapat raksasa yang diadakan di gelanggang kota Malang hari ini, Wakil Presiden yang sedang mengadakan perdjalanannya di Djawa Timur memberi penjelasan tentang isi naskah rentjana perdjajjian Indonesia-Belanda”.<sup>142</sup>

### 3.5 Masalah Militer di pihak Belanda dan Indonesia

Belanda telah berhasil membangun kekuatan militernya di Indonesia secara berangsur-angsur sejak akhir tahun 1945. Belanda mendatangkan pasukan yang cukup besar dari negeri Belanda berbentuk pasukan KL (*Koninklijk Leger*), melakukan rehabilitasi maupun merekrut pasukan baru bagi kesatuan KNIL (*Koninklijke Nederlands-Indisch Leger*), Angkatan Laut (*Marine*), pelaut dan sebagainya. Ini belum lagi dibantu pasukan Polisi dan penjaga perkebunan (*ondernemings wacht*) yang dipersenjatai.

Kekuatan militer tersebut direncanakan pada daerah-daerah yang semula diduduki pasukan Inggris dalam melaksanakan apa yang disebut sebagai *Key Area Strategy*. Ketika Inggris meninggalkan Indonesia (November 1946), hampir semua daerah bekas Inggris memang diserahkan kepada Belanda.<sup>143</sup>

Perencanaan pendudukan militer pulau Jawa, dinilai sebagai sasaran strategis penting di Indonesia karena menurut perhitungan pihak Belanda, apabila Jawa sebagai pusat politik, ekonomi, dan militer telah dapat diduduki, maka akan dengan mudah untuk menegakkan kembali kekuasaannya di wilayah Indonesia lainnya. Pada awal tahun 1946, Belanda belum mampu melaksanakan hal tersebut karena masih kekurangan pasukan, di samping itu pihak Inggris tidak bersedia membantu dengan alasan politik dan bahkan tidak mengizinkan Belanda memasuki pulau Jawa apalagi untuk melancarkan operasi militer secara besar-besaran. Yang terjadi sifatnya hanya amat terbatas dengan mengizinkan sejumlah kecil atau sebagai bagian dari pasukan Sekutu (pihak Indonesia menyebutnya membonceng).<sup>144</sup>

Menurut perhitungan Belanda, untuk merealisasikan rencana militernya guna menguasai pulau Jawa pada tahun 1946, dibutuhkan kekuatan sebesar 5 Divisi

---

<sup>142</sup>. *Ibid.*

<sup>143</sup>. *Ibid.*

<sup>144</sup>. Himawan Soetanto. *Yogyakarta Jenderal Spoor versus Jenderal Soedirman*; Jakarta: Gramedia, 2006, hal 45-47.

infanteri didukung kekuatan bantuan Arteleri dan Kavaleri yang memadai. Selain itu untuk dukungan udara dibutuhkan 9 skuadron udara. Demikian pula dari arah laut, dibutuhkan kapal-kapal perang yang mampu melakukan penembakan ke darat dengan baik. Juga dibutuhkan kapal-kapal pendarat (*landingship tank*) dan pengangkut pasukan dari kapal perang ke darat, pada pantai yang landai.<sup>145</sup>

Jenderal Spoor yang sejak 1 Februari 1946 diangkat menjadi Panglima Tentara Belanda di Indonesia menyatakan bahwa secara riil kekuatan yang ada baru tiga Divisi (kombinasi KL, KNIL, dan Angkatan Laut). Itu sudah termasuk satu Divisi yang telah menduduki pulau-pulau di Indonesia sebelah timur. Dia menggambarkan pada bulan Agustus 1946, bahwa operasi untuk menduduki kembali Jawa dan Sumatera baru dapat dilancarkan kira-kira pada bulan Maret 1947. Inipun apabila Divisi Infanteri yang baru telah datang dari Belanda, lengkap dengan kekuatan pendukungnya.

Menjelang gencatan senjata 14 Oktober 1946, pada tanggal 9 Oktober 1946 tercatat kekuatan pasukan Inggris sebesar 40.500 orang, Belanda 55.650 orang yang akan ditambah lagi pasukan dari Divisi 7 Desember yang dalam perjalanan ke Indonesia sebesar 35.550 orang. Diperkirakan tentara Indonesia sebesar 140.000 orang di Jawa dan Madura dan 60.000 di Sumatera.<sup>146</sup> Sebelum Agresi Belanda pertama sekitar April 1947, di Jawa dan Sumatera telah tersedia kekuatan militer Belanda yang terdiri dari Angkatan Darat sebanyak 51.000 orang KL, 26.000 Marinir, 32.000 KNIL. Dibuktikan inipun hanya 79 % saja yang bersifat operasional. Kekuatan Angkatan Udara terdiri atas 10 skuadron dari berbagai jenis pesawat, sedangkan kekuatan laut terdiri atas 4 pemburu torpedo dan beberapa kapal pendarat. Satu divisi infanteri masih akan tiba pada bulan Juni 1947 dari Eropa, sehingga Jenderal Spoor yakin akan mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan operasi militer besar-besaran untuk merebut dan menduduki kembali Pulau Jawa sekaligus untuk menghancurkan Republik Indonesia.<sup>147</sup>

Pertempuran fisik paling hebat yang pernah terjadi antara Indonesia dan musuhnya adalah Pertempuran Surabaya pada bulan Oktober dan November 1945. Hal ini antara lain dikarenakan tersedianya logistik militer yang lebih dari cukup. Himawan Soetanto menguraikan keadaan Tentara Nasional Indonesia

---

<sup>145</sup>. *Ibid.*

<sup>146</sup>. Jan Bank, op.,cit, hal 300. (Sumber vander Wall, Buku V, hal 520).

<sup>147</sup>. *Ibid.*

pada tahun 1945 sebagai berikut: Divisi TKR besar dalam kekuatan manusianya, prajurit-prajurit rakyat sukarela, bukan prajurit yang terlatih secara militer (*well train soldier*) yang perlengkapannya dan persenjataannya sangat tidak memadai. Modal utama para prajuritnya adalah semangat yang menyala-nyala untuk mempertahankan kemerdekaan, sekalipun sebagian besar persenjataan adalah senjata yang dirampas dari *arsenal* maupun kesatuan-kesatuan tempur Tentara ke-XVI Jepang ditambah tombak, pedang, bambu runcing dan lain-lain<sup>148</sup>. Melihat gambaran ini maka amat sukar memperlawankan militer Indonesia dengan Belanda dalam perang terbuka.

Ketika Tentara Nasional Indonesia dengan nama TKR (Tentara Keamanan Rakyat) terbentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, para pelaku inti pertahanan negara saat itu, khususnya para perwiranya amat terkait terutama pada model pendidikan Jepang. Pasukan Sukarela Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan pasukan pembantu Jepang Heiho merupakan kekuatan terlatih utama yang ada saat itu. Ini belum lagi ditambah para pemuda yang mendapat latihan para militer. Personil ex KNIL baik perwira maupun bintara serta prajuritnya amatlah terbatas yang bersedia bergabung dengan Tentara Nasional. Disamping itu kemampuan militer pada tingkat manajemen ketentaraan sesuai pendidikan Jepang amatlah terbatas. Pada pasukan Peta misalnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan hanya dalam jangka waktu pendek yaitu kurang lebih 3 bulan saja. Pengetahuan-keterampilan militer yang diberikan amat terbatas karena kurangnya waktu. Karena itu tekanan diberikan kepada "semangat" atau moril.<sup>149</sup> Prof. Dr. Nugroho Notosutanto, seorang ahli sejarah militer dalam kesimpulan bukunya "Tentara Peta", menjelaskan: "Bahwa makna pengalaman Peta bagi kebanyakan orang Indonesia adalah merupakan suatu inspirasi. Hal ini memberikan kepada kita kepercayaan kepada diri sendiri yang sangat diperlukan untuk melawan tentara yang lebih unggul dalam latihan dan perlengkapannya, dengan sarana-sarana pada pihak sendiri yang serba kurang. Dari sana bangsa Indonesia dapat bertumpu kepada kemampuannya sendiri yang terus menerus bertambah, dan memperkembangkan dirinya lebih lanjut untuk mencapai taraf yang kini telah

---

<sup>148</sup>. Himawan Soetanto. *Op., cit*; hal 45-47.

<sup>149</sup>. Lihat Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta*; Jakarta: PT Gramedia, 1979, hal89.



mereka capai”<sup>150</sup>. Selama dua kali perang kemerdekaan (1947 dan 1948-1949), kenyataannya Tentara Nasional Indonesia telah mampu mengorganisir dirinya tahap demi tahap termasuk dalam penyesuaian strategi militer yang harus diambil, antara lain melakukan operasi perang gerilya.

Jenderal Spoor memperhitungkan bahwa kalau wilayah Indonesia diserang, tidak akan ada perlawanan yang berarti dari kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Pengalaman pasukan Belanda pada tahun 1946, ketika masih belum memiliki jumlah pasukan yang memadai, serangan yang dilakukan pada daerah posisi kunci (*Key Area*, yang diambil dari Inggris) menunjukkan bahwa TNI (maksudnya TRI) tidak berhasil menghalau pasukan Belanda baik melalui serangan umum atau perang gerilya. Jenderal Spoor memperhitungkan gerak ofensif Belanda dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada (daya gerak, daya tembak dan keunggulan udaranya) dengan momentum yang tinggi akan menimbulkan demoralisasi dan disorganisasi kekuatan pertahanan RI sehingga seluruh perlawanan dapat diruntuhkan dalam waktu singkat. Apabila hal ini terjadi tamatlah Republik Indonesia dan TNI nya, serta tercapailah tujuan politik dan ekonomi Belanda itu.<sup>151</sup> Tapi rupanya Belanda tidak pernah serius atau tidak mampu mengadakan operasi militernya yang mematikan bagi Republik. Ikut campurnya dunia Internasional antara lain karena keberhasilan lobi-lobi yang dilakukan Republik Indonesia dibawah Perdana Menteri Sjahrir juga menghambat usaha militer Belanda tersebut. Misalnya ketika Aksi Polisionil Pertama (Agresi Militer Belanda I) yang di mulai tanggal 21 Juli 1947, baru setengah bulan berlangsung, Belanda sudah harus bersedia mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB (tgl 4 Agustus 1947) dan menghentukan serangan-serangan militernya. Demikian pula, rencana pengepungan Yogya juga menjadi batal.

Seorang sejarawan militer Belanda, PMH Groen menguraikan sedikit soal agresi militer Belanda tersebut: “Sesudah aksi polisionil pertama berjalan, tampak bahwa serangan memang merupakan keberhasilan militer (dengan catatan bahwa kepungan yang direncanakan terhadap lawan tidak diwujudkan), tetapi di segi politik, tujuan ini tidak tercapai”.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup>. Ibid, hal 153.

<sup>151</sup>. Himawan Soetanto. *Op.cit*, hal 45-47.

<sup>152</sup>. PMH Groen. *Marsroutes en Dwaalsporen* ; The Haque: Historical Section of R.N.A, 1991, hal 347.

Sukarno bukanlah seorang ahli militer, namun dengan kasat mata diyakininya bahwa kalau saja terjadi perang besar antara Indonesia dan Belanda maka resikonya amat besar di mana akan jatuh korban harta dan jiwa yang amat besar di kalangan rakyat dan Republik Indonesia bisa dipaksa melalui kekuasaan militer itu untuk menerima konsesi politik atas keinginan Belanda. Tapi kalau saja kita pandai memainkan perjuangan diplomasi, maka keuntungan besar bukan tidak mungkin bisa diraih. Yang utama adalah, pengakuan internasional pada kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus membuka topeng Belanda yang ingin kembali menjajah yang terang-terangan berlawanan dengan semangat kemerdekaan pasca perang dunia kedua.

Dengan adanya usaha diplomasi yang tidak hanya menimbulkan jeda waktu yang cukup sehingga Tentara Nasional dapat lebih mengorganisir dirinya menjadi lebih baik, strategi politik “Berdiplomasi dan Bertempur” merupakan usaha yang paling cocok dalam memenangkan konflik Indonesia Belanda.

## BAB 4

### PERSETUJUAN LINGGAJATI

#### 4.1 Gencatan Senjata

Tanggal 18 September 1946 pukul 16.30, anggota Komisi Jenderal yang terdiri dari mantan Perdana Menteri Prof. Ir. W. Schermerhorn, F. De Boer, MJH Van Poll dan Dr. Piet. Sanders tiba di lapangan terbang Kemayoran. Di lapangan terbang ikut menyambut para pejabat tinggi Hindia Belanda seperti Letnan Gubernur Jenderal Van Mook, Direktur Umum Dr. PA. Idenburg, Penasihat Urusan Politik WFL Graaf van Bylant, Jenderal Mayor Buurman van Vreden dan Laksamana Pinke serta konsul Amerika Dr. WF. Foote. Dari pihak Inggris tampak konsul Mac Kereth dan Let. Jen. Mansergh.<sup>1</sup>

Dalam rangka perundingan politik Indonesia-Belanda, delegasi Belanda terdiri atas Komisi Jenderal di atas, ditambah Letnan Gubernur Jenderal Dr. Van Mook dan sebagai Sekretaris Jenderal delegasi Belanda, ditunjuk Dr. Piet Sanders. Delegasi RI terdiri dari Perdana menteri Sutan Sjahrir, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, dr. A. K. Gani, dan Mr. Mohammad Roem, sedangkan sebagai sekretaris delegasi Indonesia, Mr. Ali Budiardjo. Sebagai anggota tambahan Indonesia, Mr. Amir Sjarifudin, dr. Leimena, dr. Soedarsono dan Mr. A. G. Pringgodigdo.<sup>2</sup>

Kedua delegasi langsung menjadi dekat dan akrab, terutama antara Sjahrir dan Schermerhorn. Pada suatu hari keduanya pernah saling membuka hati sebagai *proloog* sebelum diadakannya perundingan Indonesia-Belanda. Keduanya memang mendapat mandat yang sama dari pemerintah masing-masing. Sebagaimana diceritakan Schermerhorn dalam bukunya "*Het dagboek van Schermerhorn*" pada halaman 19 :

Tanggal 2 Oktober 1946 diadakan acara makan siang bersama di tempat tinggal Lord Killearn.<sup>3</sup> Acara ini dihadiri oleh Lord Killearn, saya, Sjahrir dan Sekretaris Killearn, Wright. Setelah makan, Killearn dan Wright mengundurkan diri, sehingga Sjahrir dan saya berkesempatan bicara empat

---

<sup>1</sup> S.K Panji Ra'jat, 20 September 1946.

<sup>2</sup> Amir Sjarifudin, Leimena, Soedarsono dan A.G. Pringgodigdo adalah anggota pengganti.

<sup>3</sup> Sebenarnya hanya sebagai kediaman Lord Killearn selama di Indonesia, kini Museum Naskah Proklamasi, jalan Imam Bonjol No. 1.

mata selama dua setengah jam. Saya kemukakan bahwa baik dia (maksudnya Sjahrir) maupun saya dengan cara sendiri-sendiri mengaku sebagai orang Sosialis. Oleh karena itu kita berdua sesama orang politik yang harus mampu melakukan penyelesaian sengketa Belanda-Indonesia ini. Saya tekankan bahwa di atas pundak kita berdua terletak tanggung jawab sejarah untuk penyelesaian masalah tersebut. Perundingan ini akan berhasil, jika kehormatan kedua bangsa dapat terpelihara;<sup>4</sup> Selanjutnya, saya usulkan agar Sukarno-Hatta ikut dalam perundingan politik Indonesia-Belanda, Sjahrir menyatakan keberatan karena keduanya pasti tidak bisa datang di Jakarta yang merupakan wilayah pendudukan Belanda. Ketika Sjahrir mengusulkan ketua perundingan politik dipegang Lord Killearn, sebaliknya hal ini tidak bisa diterima delegasi Belanda. Saya berpendapat sebaiknya mereka berdua bergantian menjabat sebagai ketua. Hal ini dipertimbangkan agar dikemudian hari tidak ada tuduhan hasil perundingan diatur orang lain. Perundingan formal diputuskan akan diadakan seminggu kemudian, diawali dengan perundingan gencatan senjata.<sup>5</sup>

Pertemuan informal antara kedua pimpinan delegasi ini penting termasuk yang dipikirkan mereka bersama. Kalau pada perundingan sebelum keterlibatan Komisi Jenderal, Inggris terlibat aktif, maka sesuai rencana, perundingan kali ini bersifat bilateral Indonesia-Belanda tanpa ikut campur Inggris. Soal keikutsertaan Soekarno meskipun dalam pembicaraan diatas, Sjahrir menolak, kenyataannya belakangan terjadi juga dimana Soekarno-Hatta bisa ikut dalam perundingan di Kuningan.

Selama di Indonesia, Komisi Jenderal juga terlibat dalam sejumlah kegiatan pemerintah Hindia Belanda, seperti Konferensi Pangkal Pinang di pulau Bangka yang dimulai tanggal 1 Oktober 1946. Konferensi ini rupanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Van Mook sehingga dalam pembukaan konferensi, Komisi Jenderal bisa hadir. Rupanya jalannya Konferensi menjadi bertambah lebih marak dengan hadirnya para utusan resmi Belanda ini.

---

<sup>4</sup>. Schermerhorn, *Het dagboek van Schermerhorn* ; Groningen: Wolter-Noordhoff, 1970, hal 19-25.

<sup>5</sup>. *Ibid.*

Tanggal 7 Oktober 1946 diadakan perundingan awal gencatan senjata yang bertempat di konsulat Inggris Jakarta.<sup>6</sup> Perundingan dipimpin Lord Killearn. Dari pihak RI hadir Sjahrir, Roem, Soesanto, Sudarsono, dan Jenderal Mayor Sudibyo sebagai penasehat militer. Dari pihak Belanda hadir Komisi Jenderal dan Van Mook. Setelah berunding selama satu jam, disepakati akan diadakan perundingan resmi gencatan senjata pada tanggal 9 Oktober 1946 dan 14 Oktober 1946.<sup>7</sup>

Tanggal 14 Oktober 1946, bertempat di kediaman Lord Killearn pleno perundingan gencatan senjata berlangsung yang dipimpin Lord Killearn sendiri. Dari pihak Belanda hadir Komisi Jenderal ditambah Van Mook ditambah pula pejabat tinggi Belanda seperti Bylant, Idenburg dan Koets. Delegasi Indonesia dipimpin Sjahrir ditambah para penasihat militer Indonesia. Juga hadir H. Agus Salim, Amir Sjarifudin dan beberapa menteri kabinet RI. Dari pihak Inggris hadir konsul Inggris Mac Kereth bersama stafnya, serta para perwira tinggi Inggris.<sup>8</sup> Perundingan ini berjalan mulus dan berakhir dengan dicapainya kesepakatan gencatan senjata antara RI, Belanda dan Inggris. Naskah persetujuan kemudian ditandatangani semua pihak terkait. Disadari bahwa gencatan senjata ini bersifat *truce* atau semata-mata hanya penghentian permusuhan<sup>9</sup>.

Persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani oleh RI dan Sekutu yang terdiri atas Inggris dan Belanda tersebut, isinya adalah:

1. Delegasi Indonesia, Belanda dan wakil-wakil Inggris dengan suara bulat setuju mengadakan gencatan senjata atas dasar kedudukan militer pada waktu ini dan atas dasar jumlah kekuatan militer Sekutu dan Indonesia. Mereka, saling memberikan keterangan tentang jumlah kekuatan tentara Sekutu dan Indonesia yang diterima oleh semua pihak yang bersangkutan.
2. Para delegasi Indonesia, Belanda dan wakil-wakil Inggris menyetujui dengan suara bulat untuk membentuk Komisi Bersama Gencatan Senjata yang sempurna untuk memberi pimpinan atas penyelenggaraan teknis dari

---

<sup>6</sup>. Yang dimaksud konsulat juga kediaman Lord Killearn. Lihat Schermerhorn, *op., cit*, hal 25.

<sup>7</sup>. Perundingan gencatan senjata awal ini hanya persiapan perundingan.

<sup>8</sup>. Dari dokumen foto dan film tampak ruangan lobi yang sekarang Musium Naskah Proklamasi ini penuh sesak.

<sup>9</sup>. Van der Wal. *OBBNIB jilid V. S* ; Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1972, hal 449. *Truce* adalah istilah gencatan senjata yang terbatas pada penghentian permusuhan. Agak berbeda dengan *Armitice*, yaitu penghentian tembak menembak dan pembatasan penambahan pasukan serta pengiriman logistik.

gencatan senjata, seperti yang disetujui dalam pasal 1. Komisi ini akan berkewajiban menimbang dan memutuskan segala kesukaran yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan gencatan senjata serta segala laporan terhadap pelanggaran terhadapnya.

Komisi Bersama tersebut yang akan bekerja sampai tanggal 30 Nopember 1946 yang akan datang, terdiri dari pihak Inggris: Wright (sebagai ketua), Letnan Jendral Mansergh, Kapten Cooper, Aircommodore Stevens, Mayor Jenderal Forman. Dari pihak Indonesia: dr.Sudarsono, Panglima Besar Sudirman, Laksamana Muda Moh. Nazir dan Aircommodore Suryadarma. Dari pihak Belanda: Dr. Idenburgh, Jenderal Spoor, Laksamana Pinke dan Jenderal Mayor Kengen.<sup>10</sup>

Diputuskan juga, sesudah tanggal 30 Nopember 1946, jika semua pasukan Inggris sudah meninggalkan Indonesia, maka pihak Inggris berhenti dari keanggotaan Komisi Bersama tersebut, namun jika sesudah tanggal 30 Oktober 1946 ada perselisihan paham, Komisi akan menyerahkan hal itu kepada Panglima Besar Angkatan Darat Inggris di Asia Tenggara dan Komisi Bersama akan tunduk kepada keputusannya.

Para delegasi gencatan senjata Indonesia, Belanda dan wakil-wakil Inggris secara bulat menyetujui, bahwa Komisi Bersama itu harus membentuk satu Komisi Teknis (*technische commissie*) yang susunan, bentuk dan kewajibannya akan ditentukan lebih lanjut.

Setelah terbentuk, Komisi Bersama Gencatan Senjata kemudian menerbitkan maklumat sebagai berikut:

“Karena kedua pihak ingin agar gencatan perang ini mendjadi langkah pertama penyelesaian pertikaian politik sekarang ini, maka kekuatan militer kedua pihak saat ini harus dipandang sebagai kekuatan maksimum yang akan dikurangi, bilamana gencatan perang ini berhasil dan keadaan politik menjadi baik. Karena sebagian besar dari tentara Hindia Belanda terdiri atas milisi jang sudah lama dimobilisir, maka perlulah pula dipercepat satu penyelesaian secara damai, sehingga mereka itu kemudian dapat didemobilisir (dibubarkan)”.

---

<sup>10</sup>. Osman Raliby, *Documenta Historica* ; Bulan Bintang: Jakarta, 1953, hal 426-428

*Truce* di atas rupanya berjalan sukses dan memuaskan banyak pihak. Lord Killearn sendiri dalam suratnya kepada Departemen Luar Negeri Inggris bercerita tentang pertemuannya dengan Sutan Sjahrir tanggal 15 Oktober 1946. Antara lain dalam surat tersebut dikatakannya:

“Saya memuji keterampilan dan taktik Sjahrir khususnya dalam membatasi jumlah pengiriman tentara Belanda yang akan datang atau setelah bulan November 1946”<sup>11</sup>

Dua hari kemudian setelah diadakan *truce*, tanggal 18 Oktober 1946 di istana Rijswijk (sekarang istana Negara), antara jam 9.00 – 11.00 pagi, Sjahrir dan Schermerhorn bertemu untuk menentukan agenda perundingan politik Indonesia-Belanda. Di samping itu disampaikan pula oleh Sjahrir soal pelaksanaan gencatan senjata yang telah diumumkan oleh pihak RI.

Sjahrir mengusulkan dalam perundingan politik Indonesia-Belanda ini harus bisa dicapai:

1. Batas wilayah RI.
2. Hubungan RI dengan daerah lain non Republik dan hubungan RI-Belanda.
3. Kemudian akan dibicarakan masalah tentara Belanda, jumlah dan tugas mereka di Indonesia.
4. Dibicarakan pula masalah ekonomi dan keuangan di masa datang.
5. Dibicarakan masalah perwakilan RI di luar negeri dan,
6. Masalah kebudayaan, serta soal bahasa.<sup>12</sup>

Disepakati pula perundingan akan berlangsung secara bergantian di Pegangsaan Timur 56 dan di istana Rijswijk Jakarta. Ketua sidang akan dijabat secara bergantian pula.<sup>13</sup>

Setelah pembicaraan agenda perundingan selesai, untuk pertama kalinya para tokoh Republik Indonesia diundang makan siang oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook di istana Rijswijk. Hadir dari pihak Indonesia, Sutan Sjahrir, Amir Sjarifudin, Susanto Tirtoprodjo, Mohamad Roem, Natsir, dan Leimena. Dari pihak Belanda, hadir Komisi Jenderal dan para pejabat Belanda lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>. Van der Wal, *Op., cit* jilid V. hal 547-548

<sup>12</sup>. Schermerhorn. *opcit*, hal 51

<sup>13</sup>. Sjahrir di *Rijswijk* dan Schermerhorn di Pegangsaan Timur 56.

<sup>14</sup>. Istana Rijswijk merupakan kantor resmi letnan Gubernur Jenderal. Sekarang Istana Negara

## 4.2 Jalannya Perundingan Politik di Jakarta.

Perundingan Linggajati adalah perundingan politik Indonesia-Belanda yang berlangsung sebanyak sebanyak 11 kali. Mulai tanggal 22 Oktober 1946 sampai 16 November 1946. Perundingan pertama (22 Oktober 1946) sampai ke empat (3 November 1946) berlangsung di Jakarta. Perundingan kelima (11 November 1946) sampai kedelapan (13 November 1946) di Linggajati. Perundingan kesembilan (15 November 1946) sampai kesebelas (16 November 1946) kembali berlangsung di Jakarta. Perundingan bilateral Indonesia-Belanda ini tertutup bagi semua orang diluar delegasi atau petugas lain yang terlibat, dan juga tertutup bagi media pers.

Perundingan pertama tanggal 22 Oktober 1946 dipimpin Schermerhorn yang mulai berlangsung pukul 17.00 sore bertempat di jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Dari pihak Belanda semua anggota Komisi Jenderal hadir, kecuali Van Mook. Dari pihak Indonesia, hadir Sjahrir, Roem, Soesanto, AK. Gani ditambah Amir Sjarifudin dan Leimena.<sup>15</sup>

Perundingan nampaknya berlangsung penuh rasa persahabatan.

Sebagaimana tertulis dalam notulen perundingan, Schermerhorn sebagai pembicara pertama mencoba mengemukakan beberapa pemikirannya yang diharapkan dapat mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Antara lain dikatakan Schermerhorn:

“Yang pertama, janganlah kita memulai perundingan untuk memunculkan pendapat-pendapat yang bersifat sebagian saja, melainkan hendaknya langsung dalam bentuk menyeluruh sampai hasil akhirnya. Dengan demikian dapat dicegah reaksi-reaksi yang sesungguhnya tidak perlu muncul. Oleh karena itu, kita harus mengawasi agar sementara waktu tidak terjadi kebocoran publisitas (maksudnya hasil perundingan bersifat rahasia). Pemikiran kedua adalah mengenai metode (maksudnya cara) yang akan digunakan. Kita dapat memulainya dari waktu sekarang, kemudian dari titik ini membahas perkembangannya ke depan, namun dapat juga digunakan cara lain, yakni lebih dahulu merumuskan tujuan akhir yang ingin dicapai, kemudian membahasnya mundur sampai ke situasi hari ini. Saya pribadi lebih memilih metode terakhir ini, yang berarti terlebih dahulu harus

---

<sup>15</sup>. Notulen rapat tanggal 22 Oktober 1946. Lihat juga, Van der Wal, *Op.,cit jilid V*. hal 605--608



ada kesepakatan tentang situasi akhir yang ingin dicapai. Hal ketiga yang ingin di kemukakan adalah, menurut saya, pandangan dunia tentang kedaulatan negara sebagaimana yang dikenal pada abad yang lampau, kini telah berubah. Sehubungan dengan itu, saya ingin merujuk pada Eropa Barat dengan mengambil contoh Uni Ekonomi yang sedang dikembangkan antara Negeri Belanda dan Belgia. Tentu saja, ini akan menyebabkan hilangnya porsi yang cukup besar dari kedaulatan masing-masing negara. Ikatan internasional dewasa ini akan menciptakan bentuk-bentuk baru, yang seyogianya juga harus kita perhatikan dalam mencari solusi untuk masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Apa yang saya maksud secara ringkas adalah, pada satu pihak kita harus memperhatikan kenyataan dalam dunia internasional dimana telah tercipta hubungan antara apa yang dikenal sebagai negara-negara merdeka, yang hingga kini belum kita fahami".<sup>16</sup>

Setelah uraian itu oleh Schermerhorn disinggung juga soal perundingan di Hoge Veluwe dan *counter proposal* Sjahrir tanggal 17 Juni 1946.<sup>17</sup>

Dikatakannya antara lain (notulen):

"Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menjelaskan saat perundingan Hoge Veluwe. Kita tidak menduga kalau perkembangan selanjutnya akan berlangsung sedemikian negatifnya. Dua masalah yang dikemukakan di dalam perundingan itu, yaitu bentuk persetujuan dan soal Sumatera. Sesungguhnya sama sekali tidak ada alasan untuk menolaknya secara *definitif*. Untuk jelasnya saat itu ada telegram dari tuan Sjahrir, dan karena Dr. Van Mook sedang berada di Inggris, kami semua tidak mengerti maksudnya, sebab kami tidak tahu jelas isi perjanjian antara tuan Sjahrir dengan Dr. Van Mook sebelumnya. Dan disegi lain, adanya berita tak menguntungkan dari AP (Associated Press), tentang apa yang diucapkan oleh Dr. Soedarsono sebelum keberangkatannya ke Belanda.<sup>18</sup> Kedua hal tersebut telah memberikan dampak yang buruk pada seluruh perkembangan situasi. Kemudian, muncul saran-saran tuan Sjahrir pada tanggal 17 Juni 1946 itu yang bila dibandingkan

---

<sup>16</sup>. Van der Wal; *op. cit* jilid V; hal. 605-608.

<sup>17</sup>. Sebenarnya *counter proposal* Sjahrir tertanggal 15 Juni 1946, tapi karena dikirim melalui surat konsul Inggris tertanggal 17 Juni 1946, lebih dikenal tanggalnya seperti yang disebut Schermerhorn.

<sup>18</sup>. Associated Press adalah kantor berita Amerika.

dengan Hoge Veluwe, merupakan kemunduran bagi Belanda. Lagi pula semua itu tidak mungkin kami tangani semua karena di negeri Belanda sedang berlangsung pembentukan kabinet yang memakan waktu lama. Sesungguhnya baik dalam saran-saran Hoge Veluwe, maupun di dalam usul-usul 17 Juni, terdapat sejumlah titik temu yang berguna untuk masa depan Indonesia-Belanda, yang dapat disertakan pula kedalam agenda perundingan-perundingan mendatang. Namun, saya lebih suka untuk memulai dengan halaman baru dan menempuh jalur yang telah saya uraikan di atas".<sup>19</sup>

Menanggapi uraian Schermerhorn ini, Roem berkata:

"Saya berharap agar yang disampaikan oleh tuan Schremerhorn itu diwujudkan secara tertulis, agar dapat dipelajari bersama". Roem juga menganggap bahwa cara yang sama sebaiknya diberlakukan pada perundingan-perundingan yang akan datang. Schermerhorn menjawab: "Dengan senang hati saya menyetujui usul ini".<sup>20</sup>

Delegasi Belanda lainnya, Van Poll mengutarakan pendapatnya soal akan adanya perbedaan menyolok dengan perundingan-perundingan di waktu lalu.

Penjelasannya:

"Karena sekarang di negeri Belanda telah berdiri sebuah kabinet parlementer yang juga ada wakilnya di dalam Komisi Jenderal sat ini, maka wajar bisa dipastikan bahwa yang disepakati sekarang, kelak pun akan ditepati".<sup>21</sup>

Dengan segera Roem menambahkan:

"Hal yang sama dapat dikatakan juga terjadi pada pihak Indonesia. Kabinet yang sekarang ini (Kabinet Sjahrir III) adalah yang terkuat dibandingkan dengan yang sudah-sudah".<sup>22</sup>

Uraian tentang keadaan Negara masing-masing ini cukup penting mengingat di Belanda sekarang yang berkuasa adalah pemerintahan kabinet Beel, sedangkan di Indonesia kabinet Sjahrir ke III.

Menanggapi yang disampaikan Schermerhorn, berkaitan pada keadaan dalam negeri Republik Indonesia. Sjahrir menjelaskan (notulen):

---

<sup>19</sup>. Van der Wal; *op.,cit jilid V*, hal 605-608

<sup>20</sup>. *Ibid.*

<sup>21</sup>. *Ibid.*

<sup>22</sup>. *Ibid.*

“Secara teoritis saya setuju apa yang dikatakan oleh Prof.Schermerhorn. Namun saya hanya mengkhawatirkan, apabila kami menghadapi rakyat dengan hanya membawa wacana-wacana yang bersifat umum saja, semua ini akan semakin jauh dari mereka, dan mereka sama sekali tidak akan mau mendengarkannya lagi. Kita harus dapat memperhatikan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh banyak orang, sebab jika tidak, kita akan kehilangan pegangan pada mereka. Saya khawatir, kita mampu mewujudkan sebuah bentuk yang bagus dalam ruangan tertutup ini, namun kelak tidak akan diterima oleh rakyat. Walaupun kita membuat kajian mundur yang bertolak dari hasil akhir dan bagi kita ini akan merupakan sebuah kekuasaan tanpa kedaulatan, tetapi hal seperti itu untuk sementara tidak mungkin dicapai. Bisa saja orang mengatakan, marilah kita mulai mencobanya bersama dengan Belanda, namun justru di situlah bahayanya. Karena kita tidak menyadari keadaan yang sebenarnya di mana rakyat merasa bahwa mereka mampu mengatur nasib mereka sendiri, dengan kekuatan sendiri. Fakta-fakta inilah yang senantiasa harus diperhitungkan dalam pelaksanaan prakteknya. Oleh karena itu yang harus diperhitungkan adalah saran-saran fihak Indonesia yang bersumber pada kenyataan yang ada tersebut”<sup>23</sup>

Dalam keterangan diatas, jelas sekali kalau Sjahrir memahami apa yang terjadi didalam tubuh RI khususnya soal kemerdekaan dan hal ini ingin diekspresikannya kepada para peserta perundingan, betapa besarnya arti kemerdekaan itu.

Menanggapi para pembicara delegasi Indonesia ini, Schermerhorn menganggap bahwa peserta perundingan tidak realistik berfikir, apabila meninggalkan landasan kekuatan-kekuatan yang nyata. Maksudnya situasi pasca perang dimana Belanda akan berkuasa kembali di Indonesia adalah sebuah kenyataan. Nampaknya di sini mulai terdapat perbedaan olah pikir yang akan dipergunakan oleh masing-masing delegasi dalam menyampaikan hasil perundingan kepada rakyatnya masing-masin. Namun demikian anggota Komisi Jenderal, de Boer sependapat dengan Sjahrir. Dikemukakannya:

“Terhadap rakyat kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Metoda yang diusulkan untuk perundingan-perundingan pada hakekatnya adalah agar kita dapat bersama-sama menemukan bentuk cara kerja sama di masa yang akan

---

<sup>23</sup>. *Ibid.*

datang, serta bagaimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut secara praktis”.<sup>24</sup>

Mendengar penjelasan de Boer itu, Sjahrir mengingatkan kembali:

“Kenyataannya Indonesia-Belanda sekarang sudah satu tahun melakukan perundingan tanpa ada hasilnya sehingga pada kebanyakan orang Indonesia telah timbul perasaan bahwa orang Belanda-lah yang sebenarnya tidak punya niat yang jelas. Oleh karena itu, kepada mereka (rakyat) harus diberikan bukti nyata, apakah ada kemungkinan semua ini akan berhasil atau tidak”.<sup>25</sup>

Van Poll berusaha meyakinkan pihak delegasi Indonesia, katanya:

“Mesti ada kepastian untuk meyakinkan secara mutlak, bahwa orang Indonesia akan menjadi tuan di rumahnya sendiri. Kami tidak ada maksud untuk tawar-menawar dan di luar itu masalah yang penting adalah kerjasama antara kedua bangsa”.<sup>26</sup>

Rupanya, kecuali apa yang disampaikannya itu, van Poll tidak bersedia lebih lanjut menguraikan rencana apa yang akan dikemukakannya pada perundingan-perundingan yang akan datang.

Perundingan berikut (kedua) diadakan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 1946, yang dimulai pada jam 10 pagi bertempat di kantor Komisi Jenderal (Istana Rijswijk). Kini perundingan dipimpin Sjahrir. Hadir dari pihak Belanda, Schermerhorn, Van Mook, Van Poll dan de Boer. Dari pihak Indonesia, hadir Sjahrir, Amir Sjarifudin, AK. Gani dan Leimena.

Setelah rapat dibuka oleh Sutan Sjahrir selaku ketua, anggota Komisi Jenderal Van Poll minta diberi kesempatan untuk berbicara. Pidatonya panjang lebar berisi pendapatnya mengenai pokok-pokok perundingan yang akan berlangsung lebih lanjut dan cara-cara untuk memecahkan masalah-masalah politik. Diutarakannya pula, soal untuk menentukan nasib sendiri dan kedaulatan Indonesia. Kesimpulannya, van Poll menyarankan agar pembicaraan dalam perundingan ditujukan pada pokok akhir perundingan.

Van Poll mempertegas keterangannya bahwa pihak Belanda mempunyai pendirian yang jelas dalam hal ini dalam dua hal. Katanya:

---

<sup>24</sup>. *Ibid.*

<sup>25</sup>. *Ibid.*

<sup>26</sup>. *Ibid.*

1. Pihak Belanda menganggap bangsa Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam negeri sendiri. Sudah jelas pihak Belanda pada akhirnya menyetujui terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka.
2. Antara Belanda dan Indonesia harus diadakan kerja sama yang erat. Oleh karena itu tujuan pokok akhir dari perundingan, adalah perumusan suatu konsepsi politik yang jelas yang menggambarkan terbentuknya Negara Indonesia yang merdeka dan bersatu dengan Nederland yang berada dalam satu lembaga bernama UNI Indonesia-Belanda.<sup>27</sup>

Keterangan diatas nampaknya bukan hal yang baru karena sudah diutarakan Van Poll pada perundingan sebelum ini. Tapi rupanya saran Van Poll tersebut dapat disetujui oleh para peserta perundingan terutama dengan maksud agar perundingan memusatkan pembicaraan pada tujuan pokok terakhir, yaitu menuju terbentuknya Negara Indonesia yang merdeka yang akan bersatu dengan kerajaan Belanda dalam suatu UNI Indonesia-Belanda. Tentang bagaimana bentuk negara Indonesia yang merdeka, susunannya dan bagaimana kerangka UNI Indonesia-Belanda tersebut akan merupakan hal yang akan dirundingkan dalam pembicaraan berikutnya. Selanjutnya Van Poll juga menegaskan, bahwa dalam pembentukan Negara Indonesia yang merdeka itu kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Jawa tetap diakui.

Dalam perundingan ini, sebagai penutup Sutan Sjahrir mengusulkan agar pidato Van Poll tersebut diedarkan kepada semua anggota sidang agar dapat dipelajari dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembicaraan berikut. Sjahrir juga mengingatkan kepada hadirin agar mencoba mengkaitkan soal Indonesia pada teori dialektik Hegel. Dikatakannya:

“Pemahaman *anti these* politik pada dewasa ini dan usaha untuk mencapai *synthese* dalam persetujuan, jangan diabaikan sebagai realitas yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap semangat kebangsaan yang mencetuskan kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai suatu realita dan bukan sebagai suatu semboyan belaka. Sehingga jelas yang harus dirumuskan dan dipahami saat ini adalah soal kemerdekaan itu yang tidak

---

<sup>27</sup>. Van der Wal; *op.cit* jilid V, hal 629-636

dapat ditawar-tawar lagi. Hanya melalui kebijakan demikianlah yang akan dimengerti oleh rakyat dan akan memperoleh dukungan dari mereka”<sup>28</sup>.

Rupanya hal ini dapat dibenarkan oleh Van Mook, tanpa komentar lanjutan.

Sementara itu pada tanggal 28 Oktober 1946 telah dibuat konsep awal yang menjadi dasar persetujuan oleh pihak Belanda, yang diajukan kepada pihak RI sebagai bahan perundingan (dikenal sebagai *Ontwerp Overeenkomst*).

Isinya adalah:

1. Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera terkecuali wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan Sekutu atau Belanda.
2. Pemerintah Republik bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda secepat mungkin guna mewujudkan suatu Negara Indonesia merdeka yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, kecuali beberapa bagian yang akan ditentukan kemudian. Negara merdeka ini akan bernama “Negara Indonesia Serikat”. Pada saat terbentuknya negara merdeka ini akan diperhatikan dasar-dasar yang akan dijelaskan dalam lampiran 1 yang nantinya akan merupakan bagian dari persetujuan ini secara menyeluruh.
3. Pemerintah Republik bersedia untuk bekerja sama dalam menentukan aturan-aturan yang akan berdasarkan kesepakatan di mana pemerintah Belanda dan Negara Indonesia Serikat akan terikat dalam UNI Indonesia-Belanda berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
4. Pemerintah Belanda bersedia untuk menyerahkan daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu atau pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera kepada Republik setelah terbentuknya UNI Indonesia-Belanda, dengan memperhatikan kekuasaan Negara Indonesia Serikat yang akan membuat suatu peraturan khusus mengenai wilayah Ibu kotanya.
5. Pemerintah Republik bersedia untuk mengakui kedaulatan pemerintah Belanda di sebagian Negara Indonesia Serikat sampai saat penyelesaian perubahan-perubahan yang tercantum dalam peraturan sebelumnya. Juga bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur semua persoalan didalam maupun diluar kekuasaan Republik secara *de facto*,

---

<sup>28</sup>. *Ibid.*

yang menurut pendapat pemerintah Belanda harus diselesaikan secepatnya dengan pemerintah Republik untuk kepentingan perubahan-perubahan yang tercantum pada pasal-pasal sebelumnya, guna melindungi hak perorangan, maupun harta benda dan melindungi kepentingan hak asasi manusia berdasarkan hak kedaulatan Hindia Belanda.

6. Pemerintah Belanda bersedia untuk membantu pemerintah Republik dan memenuhi semua bantuan yang diminta guna membantu pelaksanaan kekuasaan *de facto* serta untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang di terima dan disetujui.
7. Pembentukan UNI Indonesia-Belanda dan Negara Indonesia Serikat sudah harus selesai pada tanggal 1 Desember 19.....<sup>29</sup>

Sesuai dengan notulen sidang tanggal 24 Oktober 1946, sedianya sidang lanjutan akan diadakan pada tanggal 29 Oktober 1946, tetapi tiba-tiba datang telegram dari kabinet Belanda yang berkeberatan atas perkembangan yang terjadi. Rupanya kabinet Belanda ingin campur tangan dan menetapkan kebijakannya sendiri dalam perundingan Indonesia-Belanda. Selain itu dianggap segala sesuatunya yang dilaksanakan oleh Komisi Jenderal harus dibicarakan lebih dahulu dengan Ratu Belanda dan Parlemen. Akhirnya diputuskan bahwa rapat berikutnya akan dilangsungkan pada tanggal 1 Nopember 1946 di kediaman Perdana Menteri Sutan Sjahrir di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta di mana akan bertindak sebagai ketua, Schermerhorn. Anggota sidang akan tetap seperti pada tanggal 24 Oktober 1946.<sup>30</sup>

Pada tanggal 1 November 1946 diadakanlah perundingan politik ketiga, bertempat di Pegangsaan Timur 56. Masalah utama yang dibicarakan, adalah soal UNI Indonesia-Belanda. Pihak Belanda, terutama van Poll dari KVP, sekali lagi dengan gencar memperjuangkan adanya UNI Indonesia-Belanda, namun delegasi RI tetap menolaknya.

Pada akhir sidang ada pertanyaan Sjahrir:

“Apakah delegasi Belanda dapat menerima disusunnya suatu persetujuan tanpa pembentukan UNI Indonesia-Belanda” ? Komisi Jenderal menjawab: “Kalau

---

<sup>29</sup>. Van der Wal; *op.,cit jilid VI*, hal 62-70. Sampai hari ini dokumen lampiran belum ditemui.

<sup>30</sup>. *Ibid.*

UNI tetap ditolak Indonesia, mereka akan pulang”.<sup>31</sup> Amir Sjarifuddin juga menyatakan kekhawatirannya jangan-jangan UNI menjadi sebuah “*superstaat*” (negara super). Tapi hal ini dibantah Komisi Jenderal.

Dibicarakan juga bahwa hasil perundingan akan berbentuk *Overeenkomst* atau persetujuan. Selanjutnya delegasi RI mengusulkan untuk menyusun sebuah konsep persetujuan yang akan menjadi landasan perundingan selanjutnya.<sup>32</sup> Konsep persetujuan memang disetujui yang akan dibuat oleh masing-masing delegasi, Indonesia dan Belanda. Konsep Belanda akan diserahkan oleh Van Mook kepada Sjahrir pada pertemuan informal tanggal 3 November 1946.<sup>33</sup> Tapi sebelumnya pada tanggal 2 November 1946 pihak Indonesia telah membuat konsep persetujuan “versi Indonesia”. Hal ini disampaikan kepada pihak Belanda.

Ada dua konsep versi Indonesia yang diajukan.

#### I. Konsep pertama:

Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia berhasrat untuk melestarikan dan memperkuat hubungan baik antara kedua bangsa berdasarkan persahabatan dan kerjasama sukarela yang bebas dan bermartabat. Kesepakatan untuk merealisasikan cita-cita tersebut adalah sebagai berikut:

##### Pasal 1.

Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia berkuasa secara *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatera. Kerajaan Belanda sepakat dengan Pemerintah Republik untuk mengadakan kerjasama untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka bernama Negara Republik Indonesia Serikat yang mencakup seluruh bagian dari wilayah Hindia Belanda sebelumnya.

##### Pasal 2.

Untuk mencapai tujuan ini akan secepat mungkin diadakan suatu badan konstituante yang terdiri dari wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil yang dipilih dari wilayah lain di lingkungan Indonesia yang sekarang masih berada dalam kekuasaan pengawasan Belanda. Konstituante akan menetapkan undang-undang dasar Negara Indonesia Serikat yang demokratis penuh sehingga dapat menjamin hak azasi dan kemerdekaan pribadi seperti kemerdekaan untuk

<sup>31</sup>. Van der Wal; *op., cit jilid VI*; hal 66.

<sup>32</sup>. Notulen rapat tanggal 22 Oktober 1946 sampai dengan perundingan IV tanggal 4 November 1946

<sup>33</sup>. Dibuat sekitar 27 dan 28 Oktober oleh van Mook dan pihak *secretariat*.



menyatakan pendapat, menulis, bersekutu, mengadakan rapat-rapat, beragama, hak perlindungan jiwa dan harta, hak mendapat pendidikan, hak mendapat perawatan kesehatan serta hak mendapat pekerjaan.

Pasal 3.

Negara Republik Indonesia Serikat membuat persetujuan jangka panjang (30 tahun) dengan Kerajaan Belanda dalam bidang politik, militer dan ekonomi dan dalam pelaksanaannya bersedia bekerja sama yang erat dengan Belanda untuk mewujudkan hubungan persekutuan, dan jika dipandang perlu membentuk badan bersama.

Pasal 4.

Setelah persetujuan itu terwujud Kerajaan Belanda akan segera mengusulkan Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 5.

Selama persetujuan ini masih berlaku dan sebelum Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika terjadi perselisihan antara kedua pihak yang mengadakan persetujuan itu, pemerintah Belanda dan pemerintah Republik sepakat untuk mengajukan perselisihan kepada Komisi Banding (*arbitrage*) yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh pemerintah Republik dan pemerintah Belanda serta anggota ketiga termasuk warga negara bangsa lain yang ditunjuk atas persetujuan kedua belah pihak atau oleh ketua Mahkamah Internasional.

Pasal 6.

Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Persetujuan ini akan segera berlaku pada tanggal.....

II. Konsep kedua:

Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia berhasrat untuk melestarikan dan memperkuat hubungan baik antara kedua bangsa, berdasarkan atas kerjasama dan persahabatan dua bangsa yang bebas dan bermartabat, serta bersepakat untuk mewujudkan tujuan itu sebagai berikut:

Pasal 1.

Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik berkuasa secara *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatera. Kerajaan Belanda bersepakat dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan kerjasama dalam waktu

singkat untuk mewujudkan suatu Negara yang merdeka bernama Negara Republik Indonesia Serikat yang mencakup seluruh bagian dari wilayah Hindia Belanda sebelumnya.

Pasal 2.

Untuk mencapai tujuan ini akan secepat mungkin diadakan suatu badan konstituante yang terdiri dari wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil dari wilayah lain Indonesia yang dipilih secara demokratis. Konstituante akan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat yang berasaskan demokrasi penuh sehingga akan menjamin hak azasi dan kemerdekaan pribadi seperti kemerdekaan menyatakan pendapat, menulis, bersekutu, beragama, hak perlindungan harta, hak untuk mendapat pendidikan, hak mendapat perawatan kesehatan serta hak mendapat pekerjaan.

Pasal 3.

Negara Republik Indonesia Serikat membuat persetujuan jangka panjang (30 tahun) dengan Kerajaan Belanda dalam bidang politik, militer dan ekonomi dan dalam pelaksanaannya bersedia bekerja sama yang erat sebagaimana disebutkan dalam persetujuan ini dan jika perlu membentuk badan bersama.

Pasal 4.

Setelah persetujuan ini terwujud Kerajaan Belanda akan segera mengusulkan Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 5.

Republik Indonesia menjamin kemerdekaan pribadi secara demokratis, berdasarkan hak menyatakan pendapat, kemerdekaan bergerak, hak perlindungan harta dan jiwa, hak mendapat pendidikan dan hak mendapat perawatan kesehatan dari warga Belanda di wilayahnya. Milik warga bangsa Belanda, seperti perkebunan dan perusahaan di wilayah Republik akan mendapat perlakuan yang sama seperti milik warga bangsa Indonesia. Perlakuan yang sama itu berlaku juga terhadap milik dan perusahaan warga bangsa Indonesia yang berada di wilayah Belanda. Semua milik warga bangsa Belanda yang telah jatuh dalam kekuasaan Pemerintah Republik akan dikembalikan kepada pemiliknya. Suatu komisi bersama akan dibentuk untuk mengurus persoalan ini.

Pasal 6.

Pemerintah Republik akan membuat peraturan yang menguntungkan bagi Belanda untuk mengizinkan warga bangsa Belanda dapat memasuki wilayah Republik Indonesia. Hanya bagi orang-orang yang dianggap memiliki kepribadian yang tidak disukai, tidak akan diberi izin masuk atau menetap di wilayah Republik Indonesia. Warga bangsa Belanda yang telah bermukim selama satu tahun lamanya di wilayah Republik Indonesia secara otomatis akan diberi kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 7.

Republik Indonesia yang setelah memperoleh pengakuan akan segera menempatkan wakil-wakil bidang perdagangan dan diplomatiknya di negara-negara tetangga yang penting dan akan mengadakan kerjasama erat dengan wakil-wakil pihak Belanda. Di negara-negara di mana Republik belum memiliki wakil-wakil tersendiri maka akan diwakili oleh kedutaan-kedutaan dan konsulat-konsulat Kerajaan Belanda. Pada kedutaan-kedutaan dan konsulat-konsulat Belanda akan diperbantukan sebanyak mungkin warga Indonesia guna mendapatkan pendidikan. Untuk menjamin kerja sama yang erat, jika perlu akan dibentuk Komisi Indonesia-Belanda mengenai masalah luar negeri yang bertugas guna mengadakan hubungan kerja sama secara langgeng, studi bersama dan jika perlu mengadakan koordinasi politik luar negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Pasal 8.

Segera setelah persetujuan ini ditandatangani pemerintah Belanda akan menarik mundur pasukannya dari Jawa dan Sumatera dan akan mengurangi jumlah pasukannya di Indonesia sampai 50.000 orang.

Pasal 9.

Selama persetujuan ini masih berlaku dan sebelum Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika terjadi perselisihan antara kedua pihak yang mengadakan persetujuan ini, pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk mengajukan perselisihan kepada Komisi Banding (*arbitrage*) yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh pemerintah Republik, dan pemerintah Belanda serta anggota ketiga dari warga negara bangsa lain yang ditunjuk atas persetujuan kedua belah pihak atau oleh Ketua Mahkamah

Internasional. Pihak yang menandatangani persetujuan ini berjanji akan tunduk kepada keputusan Komisi Banding (*arbitrage*) ini.

Pasal 10.

Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Persetujuan ini segera akan berlaku pada tanggal.....<sup>34</sup>

Seperti telah disebutkan di atas, pada tanggal 3 November 1946, pihak Belanda menyerahkan konsep mereka. Konsep inilah yang disepakati dan dipakai dalam sidang-sidang perundingan politik selanjutnya.

Isi konsep Belanda tersebut adalah:

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk pembangunan yang baru bagi kerjasama dengan sukarela yang merupakan jaminan yang sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus serta dengan kokoh teguh daripada kedua negeri itu di dalam masa datang dan akan memungkinkan perhubungan sejarah kepada kedua bangsa itu untuk mempererat perhubungan antara kedua pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan permufakatan seperti berikut dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran daripada Majelis Perwakilan masing-masing.

Pasal 1.

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera terkecuali wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan Sekutu dan Belanda.

Pasal 2.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat akan bekerjasama untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka dan demokratis berdasarkan federasi bernama Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3.

---

<sup>34</sup>. Van der Wal *Opcit jilid VI.* hal 68-69

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia-Belanda seluruhnya dengan ketentuan bahwa jika kaum penduduk daripada suatu bagian daerah setelah menyatakan menurut aturan demokrasi tidak atau masih belum suka masuk dalam perserikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu, boleh diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat dan terhadap Kerajaan Belanda.

Pasal 4.

Negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat ialah Republik (RI), Kalimantan dan Timur Besar dengan tidak mengurangi hak dari sekelompok penduduk dari salah satu wilayah untuk menyatakan secara demokratis keinginannya bahwa kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat diatur secara lain.

Pasal 5.

Dengan memperhatikan tanggung jawab terakhir Pemerintah Belanda dalam tahap ini, pihak-pihak yang bersangkutan akan mengadakan perundingan mengenai cara turut serta suatu wilayah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan Republik dan sekelompok penduduk yang tidak atau belum cukup diwakili oleh Republik untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimuat dalam pasal 2.

Pasal 6.

Pada pembentukan Negara Indonesia Serikat daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu dan pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera akan dimasukkan ke wilayah Republik, dengan memperhatikan kekuasaan Negara Indonesia Serikat untuk mengadakan suatu peraturan khusus mengenai wilayah ibu kotanya.

Pasal 7.

1. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan mengadakan kerjasama dalam hal mengatur kepentingan bersama Belanda dan Indonesia untuk mewujudkan UNI Belanda-Indonesia dan dengan terbentuknya itu, Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curacao, diubah bentuknya menjadi UNI Belanda-Indonesia yang terdiri dari Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Suriname, Curacao, dan di lain pihak Negara Indonesia Serikat.

2. Yang tersebut di atas tidak mengurangi kemungkinan diadakan peraturan di kemudian hari yang mengatur hubungan antara Belanda, Suriname dan Curacao.

Pasal 8.

1. UNI Belanda- Indonesia akan mempunyai alat kelengkapan sendiri yang akan mengurus kepentingan bersama Belanda dan Negara Indonesia Serikat.
2. Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan pemerintah Negara Indonesia Serikat, mungkin djuga oleh Majelis Perwakilan Rakjat negara-negara itu.
3. Adapun jang akan dianggap kepentingan-kepentingan dalam arti bekerdjasama itu ialah kerdjasama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan serta djuga hal-hal ekonomi dan kebudajaan.

Pasal 9.

1. Raja Belanda akan bertindak menjadi kepala UNI Belanda- Indonesia.
2. Apabila Raja meninggal dan tidak ada penggantinya sesuai dengan Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda dapat diadakan peraturan yang menyimpang.

Pasal 10.

Untuk membela, memelihara kepentingan Negara Indonesia Serikat di negeri Belanda dan kepentingan kepentingan Belanda di Indonesia maka pemerintah msing-masing kelak mengangkat komisaris Luhur.

Pasal 11.

Piagam UNI Belanda-Indonesia akan memuat antara lain peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Kepastian hak-hak kedua pihak satu terhadap yang lain dan jaminan untuk menepati kewajiban-kewajiban satu terhadap yang lain.
- b. Perlakuan kewarganegaraan timbal balik bagi warga Negara Belanda dan Indonesia
- c. Peraturan yang berisi kelengkapan apabila di antara badan-badan UNI itu tidak terdapat persetujuan.
- d. Peraturan mengenai cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh badan-badan Kerajaan Belanda jika memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat selama negara ini belum atau tidak cukup mempunyai badan-badan.

- e. Kepastian di kedua bagian UNI untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dengan rujukan kepada Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 12.

- a. Anggaran anggaran itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.
- b. Anggaran anggaran itu harus telah dibenarkan oleh Majelis Perwakilan Rakyat kedua belah pihak masing masing.

Pasal 13.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan berusaha supaya terwujudnya Negara Indonesia Serikat dan persekutuan Belanda Indonesia itu telah selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 14.

Setelah UNI Belanda-Indonesia terwujud Pemerintah Belanda segera akan mengambil langkah untuk mengusahakan agar Negara Indonesia Serikat dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 15.

1. Republik di wilayah kekuasaannya menjamin secara de facto kebebasan demokratis fundamental dan hak-hak seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan bertindak dan bergerak, perlindungan terhadap harta dan jiwa, kebebasan menuntut pendidikan untuk semua yang bermukim di daerahnya.
2. Milik dan perusahaan warga yang tidak termasuk warga Indonesia akan mendapat perlakuan sama dengan milik dan perusahaan warga Indonesia di wilayah Republik. Perlakuan yang sama ini akan berlaku juga untuk milik dan perusahaan Indonesia yang berada di wilayah Kerajaan.
3. Republik Indonesia mengakui tuntutan hak orang orang bukan bangsa Indonesia, akan menuntut dipulihkan hak hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang barang milik mereka yang lagi berada didalam daerah de fakto kekuasaannya. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 16.

1. Sebelum terbentuk Negara Indonesia Serikat dan UNI Belanda-Indonesia, kedudukan ketatanegaraan dan kedudukan dalam hubungan hukum antara bangsa Kerajaan Belanda akan dipertahankan, dengan pengertian bahwa pemerintah Belanda akan mendorong segera dibentuk perundang-undangan dengan tujuan untuk merubah pemerintah Hindia sedemikian rupa sehingga susunan dan cara bekerjanya sebaik mungkin agar dapat disesuaikan dengan pengakuan terhadap Republik dan struktur ketatanegaraan yang akan disusun.
2. Dalam waktu yang singkat juga akan dibuat ketetapan-ketetapan dengan tujuan untuk mengatur kerjasama di bidang hubungan luar negeri, pertahanan, kepentingan ekonomi, kebudayaan dan keuangan.

Pasal 17.

Setelah persetujuan ini tercapai kedua belah pihak segera akan berunding mengenai cara dan kecepatan dalam mengurangi jumlah psukan pada kedua belah pihak dan mengenai kerjasama di bidang militer.

Pasal penutup.

Persetujuan ini disusun dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah mempunyai keabsahan yang sama.<sup>35</sup>

Tanggal 4 November 1946, diadakan perundingan politik ke empat di Rijswijk. Sjahrir bertindak sebagai ketua dan anggota peserta sidang perundingan tetap seperti pada perundingan sebelumnya. Bahan perundingan, konsep persetujuan yang disusun oleh Komisi Jenderal atau pihak Belanda yang diserahkan tanggal 3 November diatas.

Setelah mempelajari dokumen ini, delegasi Indonesia berkeberatan. Mereka meminta waktu untuk membicarakannya lebih dahulu dengan pemerintah di Yogyakarta. Roem juga meminta agar setelah persetujuan diratifikasi daerah luar Jawa dan Sumatera yang diduduki Sekutu atau Belanda segera diserahkan kepada RI.

Konsep persetujuan yang dibawa Sjahrir ke Yogyakarta ternyata memunculkan banyak ketidak setujuan. Ketika kembali ke Jakarta, hal ini dibicarakan dengan Schermerhorn dalam perundingan informal tanggal 5 November 1946. Saat itu Schermerhorn mengusulkan agar Sukarno dan Hatta

---

<sup>35</sup>. Van der Wal; *Op., cit jilid VI*; hal. 103-106



dihadirkan saja dalam pertemuan selanjutnya. Sjahrir tidak bisa memutuskan langsung, namun Schermerhorn berpendapat sebuah pembicaraan dengan Soekarno di Yogya atau dimana saja adalah hal yang amat penting, agar semua menjadi final. Dia juga berpendapat hal ini bisa dilakukan pada tanggal 11 November 1946.<sup>36</sup> Tapi karena Sukarno-Hatta tidak mungkin ke Jakarta dan delegasi Belanda tidak diizinkan pemerintahnya ke Yogyakarta, jalan keluar ditawarkan pihak Indonesia atas saran Maria Ulfah, perundingan selanjutnya berlangsung di Linggajati, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Kedua delegasi langsung menyetujuinya.<sup>37</sup>

Lord Killearn bertemu Sjahrir sehari kemudian. Saat itu Sjahrir mengeluh soal pasal 9 konsep persetujuan Belanda dimana Raja Belanda akan menjadi kepala UNI. Hal ini pasti akan ditolak (terutama oleh golongan oposisi). Lord Killearn bertanya: "Berapa besar kekuatan golongan oposisi itu" ? Sjahrir menjawab: "Amat kuat dan kemungkinan akan berkembang terus". Ketika Lord Killearn mengusulkan agar dalam perundingan Indonesia-Belanda selanjutnya pihaknya bisa hadir dalam perundingan. Usul itu menurut Sjahrir telah ditolak Schermerhorn selaku ketua delegasi Belanda.<sup>38</sup> Ketika ketiganya (Sjahrir, Lord Killearn dan Schermerhorn) bertemu sekaligus untuk makan malam bersama, Schermerhorn beralih soal penolakannya tersebut, bahwa kalau Inggris ikut campur dalam perundingan, dikhawatirkan rencana selanjutnya akan berubah. Namun disepakati pada rapat paripurna (pleno), Lord Killearn dan stafnya bisa hadir.<sup>39</sup> Ketika sehari kemudian terjadi lagi makan malam bersama, semua sudah sepakat bahwa perundingan selanjutnya akan diadakan di Cirebon (maksudnya Linggajati Kuningan) pada hari Minggu tanggal 11 November 1946.<sup>40</sup>

Bagi Sjahrir timbul kesukaran baru yaitu bagaimana memberi tahu Soekarno agar dia mau datang ke Linggajati ? Lima hari sebelum berangkat ke Cirebon,

---

<sup>36</sup>. Van der Wal; *Op.,cit jilid VI*; hal. 142 (laporan Killearn kepada Dep.Lu Inggris). Lihat juga, Schermerhorn, *Op.,cit* hal 91-92

<sup>37</sup>. Maria Ulfah adalah Menteri Sosial Kabinet Sjahrir kedua. Ayahnya RAA Mohammad Achmad sekitar tahun 20- an pernah menjadi Bupati Kuningan. Lihat Gadis Rasid, *Maria Ulfah Subadio Pembela kaumnya*; Jakarta : Bulan Bintang. Lihat juga Ali Budiardjo dlm buku *Menelusuri jalur Linggarjati*. Jakarta: Grafiti , 1992, hal. 17. Linggajati merupakan komplek wisata dimana tersedia fasilitas perundingan seperti akomodasi hotel, transportasi darat dan keamanan yang amat mungkin di jamin pihak R.I.

<sup>38</sup>. Van der Wal; *Op.,cit jilid VI*; hal. 143

<sup>39</sup>. *Ibid*, hal. 144-145. Makan malam ini kemungkinan besar terjadi pada tanggal 7 November 1946.

<sup>40</sup>. *Ibid*, hal 147.

Sjahrir memanggil Soedarpo Sastrosatomo dan menginstruksikan agar memberitahukan dan meminta kesediaan Soekarno untuk ikut berunding di Cirebon. Sebagai “kurir politik”, Soedarpo segera berangkat naik kereta menuju Yogya. Namun, ketika tiba di Yogya, ternyata Soekarno sedang tetirah di Selecta Malang. Untuk itulah atas bantuan Profesor.dr Abdulrachman Saleh, Soedarpo diterbangkan dengan pesawat Jepang bersayap dua menuju lapangan terbang Bugis di Malang. Ternyata akhirnya Soekarno bersedia datang.<sup>41</sup>

### 4.3 Perundingan di Linggajati

Tanggal 11 November 1946 delegasi Belanda berangkat ke Cirebon menggunakan pesawat terbang Catalina, Lord Killearn menuju Cirebon lewat jalan laut dengan menggunakan kapal perang Inggris “*Veryan Bay*”. Delegasi Indonesia menggunakan mobil dengan jalan darat dari Jakarta. Sukarno-Hatta dan rombongannya dari Yogyakarta menuju Cirebon dengan kereta api.<sup>42</sup>

Hari pertama tidak banyak yang dapat dikerjakan, karena terjadi apa yang disebut sebagai insiden kapal Belanda “*Banckert*”. Yaitu peristiwa di mana kapten kapal *Banckert* berkeberatan para delegasi Belanda dipindahkan ke kapal angkatan laut KRI Gajah Mada.<sup>43</sup> Hal ini menimbulkan perdebatan berkepanjangan yang akhirnya bisa diselesaikan juga, tetapi akibatnya banyak waktu terbuang.

Selama di Linggajati, rombongan delegasi Belanda menginap di kapal *Banckert* kecuali Schermerhorn dan Sander. Keduanya menginap di Linggajati. Delegasi Indonesia dan Lord Killearn juga menginap di Linggajati. Sukarno-Hatta menginap di rumah Bupati di Kabupaten Kuningan.

Setelah semua dimungkinkan, pada jam 15.30 sore hari, dimulai perundingan politik kelima di gedung perundingan Linggajati.<sup>44</sup> Delegasi Belanda hadir Schermerhorn, Van Poll, De Boer, Van Mook, Maassen dan

---

<sup>41</sup>. Prof.dr Abdulrachman Saleh adalah perwira penerbang AURI. Rosihan Anwar, *Bertumbuh Melawan Arus*; Jakarta: Pusdok Guntur 49, 2001, hal 116-121

<sup>42</sup>. SK Soeleoeh Ra'jat 13 November 1946.

<sup>43</sup>. *Banckert* adalah kapal motor penyapu ranjau Belanda yang rencananya dipergunakan mengangkut delegasi Belanda dari Catalina ke pelabuhan Cirebon. Pihak ALRI menolak megizinkan *Banckert* merapat ke pantai wilayah RI. Oleh karena itu diputuskan KRI Gajah Mada yang akan mengangkutnya.

<sup>44</sup>. Notulen rapat tanggal 11 November 1946. Lihat Van der Wal *Op., cit, jilid VI*; hal. 202–204..

Samkalden. Delegasi Indonesia hadir, Sjahrir, Roem, Soesanto, AK.Gani, Amir Sjarifoedin, Soedarsono, Leimena dan AG.Pringgodigdo.

Bahan perundingan adalah konsep persetujuan perundingan yang dibuat Belanda, yang terdiri dari 17 pasal dan sebuah pasal penutup.

Sebelum mulai berunding, Schermerhorn yang bertindak sebagai ketua rapat, memberitahukan bahwa perundingan politik ini ditujukan untuk membahas seluruh konsep persetujuan yang telah disusun oleh pihak Belanda. Namun, terlebih dahulu ia ingin memberikan kesempatan kepada Van Mook untuk mengutarakan sebuah masalah pendahuluan Masalah ini sebenarnya di luar agenda pertemuan.

Uraian Van Mooka (notulen) adalah:

“Saya mengingatkan, tentang bahaya kekurangan pangan yang sedang mengancam kota Batavia (Jakarta) serta soal masalah keuangan. Meskipun sudah ada perjanjian bahwa setiap hari akan didatangkan 200 ton beras, ternyata dalam hari-hari terakhir ini sama sekali tidak ada yang masuk. Saya mengkhawatirkan sebagai akibatnya akan timbul kesulitan besar. Saya ingin hari ini juga dikirim kawat kepada tuan Van Hoogestraten, menjelaskan bagaimana menanggulangi masalah ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang paling baik, apabila dari pihak Indonesia ditunjuk seorang yang diberikan tugas khusus soal ini dan punya kekuasaan penuh. Hal itu harus diputuskan sekarang juga. Penanggung jawab soal ini sekarang adalah tuan Abdoerachman. Soal pengiriman beras dari Soekaboemi pun harus dibicarakan juga, karena itu kepada Residen Bogor, tuan Gaos dimintakan agar kepadanya diberikan instruksi. Soal keuangan, soal ini seyogyanya ditangani oleh tuan Sjafrudin (Prawiranegara), yang saat ini adalah Menteri Keuangan RI”<sup>45</sup>

Uraian Van Mook ini meskipun tidak ada hubungannya dengan topik perundingan di Linggajati, tapi bisa menggambarkan bagaimana gamangnya NICA pada situasi akibat ulah kaum Republik. Soal pangan, khususnya beras menjadi penting karena itu datang dari luar Jakarta.

Setelah itu, perundingan baru beralih pada pembahasan konsep-persetujuan pasal demi pasal. Mengenai soal pembukaan dalam naskah yang sedang dibahas, Schermerhorn mengutarakan bahwa telah dilakukan permintaan kepada para

---

<sup>45</sup>. Van der Wal *Op., cit.*, jilid V; hal. 629-632.

pembantunya yang terdiri dari para ahli hukum, agar pada bagian pembukaan didahului dengan menyebut kedua pemerintahan. Kemudian terjadilah persesuaian pemikiran seperti tertulis dalam notulen.<sup>46</sup>

Mendengar uraian Schermerhorn ini, Sjahrir menjelaskan:

“Hal ini tidak terlalu penting”.

Kemudian Soesanto menambahkan:

“Dalam persetujuan ini justru kedua pemerintahanlah yang menjadi pihak-pihak yang berunding”.

De Boer berkata:

“Butir ini (soal pemerintah) dalam pembukaan untuk sementara dikesampingkan saja dan lebih dahulu dipelajari konsep persetujuan secara menyeluruh”.

Para perunding ternyata dapat menyetujui saran ini.

Dari Schermerhorn ada tambahan lagi. Seperti dalam notulen:

Schermerhorn meminta untuk mencoret kata *hubungan sejarah* diganti dengan kata *membuka jalan*.

Ternyata dalam soal ini tidak ada yang berkeberatan.

Soesanto juga ingin agar kata *mempererat hubungan* pada alinea pertama diganti dengan kata *membangun hubungan*.

Dia menambahkan:

“Pada bagian pertama dari alinea berikutnya yakni: *menetapkan permufakatan sebagai berikut*, kenapa tidak disederhanakan saja menjadi *melakukan persetujuan sebagai berikut*”.

Schermerhorn menjelaskan:

“Soal ini adalah istilah yang telah dipilih oleh Komisi seperti itu, karena instruksi yang mereka terima memang demikian. Padahal, secara juridis *permufakatan* atau *persetujuan* adalah hal yang sama”.

Amir Sjarifudin mengutarakan pendapatnya:

“Diantara *permufakatan* dengan saat melakukan *persetujuan* menurut pengertian saya terdapat suatu jeda waktu”.

Schermerhorn berpendapat:

---

<sup>46</sup>. *Ibid*,

“Yang terpenting kedua pihak harus saling mempercayai. Redaksi yang dibuat ini tidak dimaksudkan untuk mencoba saling menghindar”.

Setelah siding perundingan dilanjutkan dengan beberapa kali pertukaran pikiran, akhirnya diambil keputusan untuk memperbaiki alinea pembukaan ini sebagai berikut : *menetapkan permufakatan seperti berikut dengan ketentuan akan mengajukan persetujuan ini secepat-lekasnya untuk memperoleh kebenaran dari majelis perwakilan masing-masing-masing.*<sup>47</sup> Peserta sidang perundingan akhirnya menyetujuinya. Sidang dilanjutkan dengan mulai membahas pasal 1.

Pada pembahasan pasal 1. Schermerhorn berpendapat (notulen):

“Sebaiknya sebelum membahas pasal-pasal ini ada hal-hal yang dijadikan pokok pembicaraan. Ia mengingatkan bahwa, selain dari yang sudah tertera di dalam pasal-pasal persetujuan, juga ada penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan selama perundingan sebelumnya yang dicatat di dalam notulen. Hal inipun seharusnya mengikat. Misalnya pihak Indonesia dapat berpegang pada apa yang telah diucapkan oleh Van Mook soal pasal 1 dalam pertemuan sebelumnya”.<sup>48</sup>

Kemudian terjadilah persesuaian pendapat soal pasal 1 ini seperti tertulis dalam notulen.

Roem mengungkapkan keyakinannya:

“Kedua belah pihak pada dasarnya tidak berbeda pendapat. Ada kesamaan pendapat bahwa apabila serah terima kekuasaan dilakukan, bukan tidak mungkin segera muncul kendala. Oleh karena itu, pihak Indonesia ingin agar segera dibuat penjabaran lebih lanjut, seperti bagaimana keadaan ini akan berkembang selanjutnya”.

Van Mook mengingatkan pula:

“Sebenarnya kekhawatiran terbesar terletak pada suatu peralihan yang mendadak. Hal seperti ini akan mengakibatkan kesulitan yang sama rumitnya bila pihak Belanda mengizinkan para pengusaha perkebunan untuk masuk ke pedalaman (maksudnya daerah RI). Tentu saja, tidak tertutup kemungkinan ada daerah perbatasan tertentu di mana peralihan kekuasaan dapat dilaksanakan lebih cepat daripada di daerah lain. Mungkin keinginan tuan Roem akan terpenuhi,

---

<sup>47</sup>. *Ibid.* Inilah kalimat yang menjadi bagian dari pembukaan yang diterima semua pihak.

<sup>48</sup>. *Ibid.*

apabila dalam pasal 1 ini kata-kata *terkecuali* diubah menjadi kalimat *dengan memperhatikan apa yang ditentukan dalam pasal 6* ?

Kemudian Sjahrir berkata:

“Saya mengusulkan bagian akhir dari Pasal 1 berbunyi sebagai berikut, *dengan pengertian bahwa daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu atau Belanda, secara berangsur-angsur dan dengan kerja bersama, antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam daerah Republik. Menurut pendapat saya, ini akan lebih jelas memperlihatkan niat baik kedua belah pihak. Dengan demikian, pasal 6 dapat dihapus. Bukankah ketentuan mengenai ibukota seyogyanya merupakan bagian dari ketentuan mengenai federasi*” ?

Van Mook menyetujui dan menambahkan :

“Saya ingin agar di belakang kata *berangsur-angsur* disisipkan kalimat *tetapi selambat-lambatnya pada tanggal atau waktu yang disebutkan dalam pasal 13*”.<sup>49</sup>

Setelah itu rupanya kedua pihak puas. Karena redaksi pasal 1 menjadi meluas dan praktisnya isi pasal 6 yang disesuaikan dipindahkan ke pasal 1 ini. Setelah pembahasan pasal 1 selesai, dilanjutkan dengan pembahasan pasal 2.

Seperti tertulis dalam notulen:

Soesanto bertanya: “Apakah di sini tidak dapat digunakan sebutan *Republik Negara Indonesia Serikat*”?

Schermerhorn berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk dalam agenda rapat, tetapi merupakan wewenang dari Sidang Konstituante Negara-negara Serikat yang akan datang, yang dalam sidang itu ditentukan apakah ingin menjadi Republik atau bentuk lain.

Menanggapi hal tersebut De Boer menyela dan bertanya:

“Kenapa berbicara tentang sebuah Republik, karena bentuk tersebut belum dilahirkan”.

Leimena kemudian menanggapi:

“Istilah Republik tersebut lebih sesuai dengan perasaan rakyat”.

Hal itu kembali ditolak oleh De Boer yang menjawab:

Istilah yang dipakai pihak Belanda lebih cocok dengan perasaan pemerintahnya”.

---

<sup>49</sup>. Pasal 13 yang membicarakan soal batas waktu pembentukan N.I.S. belakangan menjadi pasal 12 karena pasal 6 dihapus.

Akhirnya Soesanto menyarankan agar seluruh sebutan "*Negara Indonesia Serikat*" ditiadakan saja.

Van Mook memberikan pendapatnya:

"Saya merasa sebaiknya hal itu jangan dilakukan, karena istilah ini merupakan pencerminan kepribadian Indonesia berhadapan dengan Kerajaan Belanda".

Sjahrir kemudian mengusulkan:

"Menurut pendapat pihak Indonesia, pada *Negara Indonesia Serikat*, perlu ditambahkan kata-kata *sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan demokratis*". Kalau hal ini dianggap kepanjangan, Sjahrir bersedia menangguk masalah ini sampai tiba waktunya kelak. Keputusan akhir yang diambil, rupanya sesuai dengan akhir pembicaraan ini atau redaksi tidak berubah sesuai konsep asli.<sup>50</sup>

Apa yang disampaikan Sjahrir soal NIS yang berdaulat itu memang menjadi pemikiran delegasi Belanda juga dimana belakangan mereka sepakat untuk disetujui saja istilah berdaulat bukan merdeka. Tapi rupanya saat itu pasal ini dibiarkan seperti aslinya.

Sebelum pembahasan pasal 2 ini di tutup, rupanya De Boer kurang puas juga dan menambahkan pendapatnya:

"Saya merasa lebih baik tidak menggunakan terlalu banyak kata-kata".

Sedangkan Van Poll merujuk pada uraiannya pada perundingan politik kedua katanya:

"Saya memperingatkan agar sebaiknya kita berhati-hati penggunaan istilah-istilah yang mudah menimbulkan salah-tafsir, misalnya kata *kedaulatan*".<sup>51</sup>

Sebelum melangkah pada pasal selanjutnya, rupanya Amir Sjarifudin juga belum beranjak dan masih berbicara soal kata-kata tambahan pada pasal 2, yang *berdasarkan federasi*. Seperti tertulis dalam notulen:

Amir Sjarifudin berpendapat, "Sesungguhnya semua orang belum mengetahui hubungan-hubungan apa yang terkandung didalam federasi itu".

Schermerhorn mencoba menjelaskan:

"Hal ini justru dimaksudkan agar membiarkan pintu pendapat terbuka kesemua jurusan. Mungkin saja ada daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera

---

<sup>50</sup>. Walaupun demikian terkesan kalau pasal ini ditunda pembahasannya sifatnya.

<sup>51</sup>. Van der Wal *Op., cit, jilid V*; hal. 629-632.

yang ingin bergabung dengan Republik. Hal ini tidak menyalahi sistem federasi itu. Seandainya hal ini benar-benar terjadi, dikemudian hari bisa dilakukan perubahan undang-undang dasar. Sebaiknya saat ini kita bertolak dari landasan federasi itu sajalah dahulu”.

Kemudian Van Mook menambahkan:

“Apabila kita ingin memelihara persatuan negara, maka tindakan terbaik adalah memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada daerah-daerah. Kita dapat menggunakan landasan federasi yang masih akan ditetapkan ini”.

Rupanya Van Poll tidak keberatan terhadap hal ini, namun ia ingin juga mengajukan pendapatnya:

“Kata-kata tambahan tersebut sebenarnya tidak perlu”.

Amir Sjarifudin dan anggota yang lain dapat menyetujui penghapusan kata-kata *berdasarkan federasi* itu.<sup>52</sup>

Akhirnya disepakati, pada pasal 2 dalam naskah yang disetujui, tambahan untuk menjelaskan NIS adalah *berdasarkan perserikatan*. Bagi kedua delegasi, mungkin ini menjadi lebih dapat diterima.

Pada jam 17.00 ketua sidang menutup perundingan ini, yang akan dilanjutkan esok hari. Malam harinya, Presiden Soekarno mengundang seluruh delegasi datang ke Kabupaten Kuningan di mana diadakan malam resepsi. Semua pihak, kedua delegasi menampakkan wajah mereka dengan berseri-seri terutama dengan diadakannya pertunjukan pagelaran musik angklung dan pertunjukkan tari-tarian tradisional Indonesia. Schermerhorn yang rupanya untuk pertama kali mendengar angklung, menulis dalam memoirnya secara panjang lebar soal alat musik tersebut. Dalam makan malam ini juga tidak lupa dilakukan penyuguhan makanan khas Indonesia.<sup>53</sup>

Pada hari berikutnya tanggal 12 November 1946 pagi hari, perundingan politik keenam dibuka lagi, peserta sidang perundingan sama dengan hari sebelumnya. Sjahrir bertindak sebagai ketua. Pembahasan dimulai langsung membahas pasal 3.<sup>54</sup>

Seperti tertulis dalam notulen. Schermerhorn menyatakan:

---

<sup>52</sup>. *Ibid*.

<sup>53</sup>. SK Soeloeh Ra'jat 13 November 1946, *Perundingan politik di Tjirebon*. Lihat juga Schermerhorn. *opcit*, hal 113

<sup>54</sup>. Notulen rapat tanggal 12 November 1946 scsion pertama (pagi hari). Lihat juga Van der Wal *Op., cit, jilid VI*; hal. 205-209



“Pasal ini, seperti juga yang berikutnya, bertolak dari pemikiran bahwa daerah-daerah yang bukan peserta persetujuan tidak perlu diajak berunding. Tetapi apabila mereka tidak diberi kesempatan bersuara, hal ini akan memunculkan veto”.

Soesanto menginginkan:

“Suara daerah-daerah lain juga harus didengar, sejalan dengan daerah bagian lainnya. Oleh karena itu harus diusulkan kalimat tambahan sebagai berikut, *..namun hal ini dilakukan sejalan dengan perwakilan terpilih dari daerah-daerah bagian lainnya*”.

Menanggapi ucapan Schermerhorn, soal kemungkinan munculnya veto dari daerah-daerah lain, Soesanto menyambung:

“Itu bukanlah tujuannya, tetapi justru untuk mencegah terjadinya pengambilan keputusan yang belum sempurna”.

Kemudian Van Poll menyela:

“Tidak pantas melakukan pembatasan terhadap hak-hak yang telah diberikan. Untuk ini sebaiknya jangan bertindak setengah-setengah. Berkenaan ucapan tuan Soesanto, yang dimaksudnya itu hanyalah suatu kesepakatan saja sebelum diambil keputusan seperti itu”.

Rupanya Roem menganggap pasal 3, agak berlebihan. Dikatakannya:

“Apa yang dikenal sebagai hak menentukan nasib sendiri berlaku untuk sebuah negara seutuhnya, bukan untuk bagian-bagiannya. Setiap daerah bagian dapat mengatakan mereka ingin berdiri sendiri, karena disini sebutan *daerah bagian* tidak diberi penjelasan lebih lanjut”.

Van Mook menambahkan:

“Apabila ketentuan seperti itu tidak dimasukkan, dapat mengakibatkan terjadinya protes-protes besar-besaran, sedangkan apabila dimasukkan, menurut pendapat saya tidak akan terjadi apa-apa.

Van Poll lalu menyela:

“Saya tidak akan setuju bila daerah bagian tidak masuk ke dalam federasi”.

Van Mook mencoba menjelaskan kembali:

“Merujuk pada pengalaman saya sewaktu berlangsung Konperensi Malino, pada permulaan memang ada kaum yang secara tegas menginginkan hubungan khusus tersendiri. Namun, setelah melalui diskusi panjang lebar, pendirian itu

dilepaskan sehingga tercapai kesepakatan untuk berpartisipasi ke dalam federasi. Delegasi Belanda tidak ingin mencegah daerah-bagian untuk masuk ke dalam federasi, justru sebaliknya, perlu didorong agar mereka berpartisipasi dalam federasi itu. Oleh karena itu saya mengusulkan agar setelah kalimat *jika kaum penduduk dari suatu bagian daerah*, ditambahkan kata-kata *setelah dimusyawarakan dengan lain-lain bagian daerah juga*.<sup>55</sup>

Akhirnya, inilah kalimat yang disetujui dan diputuskan kedua delegasi. Maka pasal 3 selesai dibahas.

Setelah itu dibahas pasal 4. Pasal ini disetujui secara bulat. Walaupun demikian hal ini masih dipertanyakan Roem juga:

“Apakah kata-kata *diatur secara lain* juga mencakup makna untuk bergabung ke dalam Republik ”? Oleh delegasi Belanda dijawab dengan "ya".

Dalam pembahasan pasal 5 terjadi perdebatan serius seperti tertulis dalam notulen, mula-mula Roem mengajukan pertanyaan:

“Apakah yang dimaksud dengan *tanggung jawab terakhir* ”?

Van Mook menjawab:

“Dengan kata-kata itu dinyatakan bahwa pemerintah Belanda memikul tanggung jawab untuk daerah-daerah bagian serta golongan-golongan penduduk yang diuraikan di dalam pasal ini, dan akan sederajat dengan Republik, untuk Jawa dan Sumatera”.

Inilah yang diterima menjadi keputusan. Namun Roem rupanya belum puas juga. Ia meminta:

“Apakah pasal ini tidak dapat dicoret saja secara keseluruhannya. Bukankah hal itu sudah berlaku dengan sendirinya”?

De Boer lalu berkata:

“Adanya pasal ini sebenarnya tidak akan mengganggu”.

Van Poll juga menambahkan:

“Kata-kata *dalam tahap ini* perlu diganti dengan *hingga Negara-negara Serikat kelak terbentuk*”.

Roem lalu menyatakan:

---

<sup>55</sup>. *Ibid.*

“Untuk ini Republik bersedia memikul tanggung jawab. Redaksi pasal tersebut, mencederai makna persamaan derajat kedua belah pihak dalam persetujuan. Kalimat pembukaannya tidak memperlihatkan kenyataan, bahwa pada saat persetujuan diberlakukan, status hukum Republik akan berubah”.

Menanggapi itu Schermerhorn mengajukan pendapatnya:

“Sebelum Negara Indonesia Serikat terbentuk, status hukum ketatanegaraan dan kependudukan dari Kerajaan Belanda tetap akan berlaku sesuai pasal 16”.

Van Mook juga menambahkan:

“Secara internasional, tanggung jawab itu baru dapat dialihkan jika seluruh masalah sudah terselesaikan. Memang untuk ini diperlukan waktu untuk memindahkan dari suatu situasi ke situasi yang lain. Sehingga untuk membuktikan bahwa penyelesaian yang diusulkan oleh Belanda itu memang didorong oleh suatu keterpaksaan dan bukan karena merasa senang melakukannya”.

Sebagai contoh Van Mook lalu mengutip masalah hutang-negara. Penjelasannya:

“Perlu diketahui, bahwa para pemegang hak mengetahui dengan siapa mereka harus berurusan. Penyelesaian yang diusulkan itu memberatkan negeri Belanda dengan sejumlah besar kewajiban, sehingga dalam waktu dua tahun mendatang harus dicari kesepakatan dengan pihak Republik, agar tidak menjadi beban negeri Belanda”.

Akhirnya Sjahrir menyela dan menyampaikan pendapatnya:

“Sekarang kedua belah pihak sudah berdebat tentang persoalan-persoalan pasal 16, yang belum masuk agenda. Yang dibahas sekarang baru pasal 5”. Dalam hubungan ini, Sjahrir berpendapat bahwa ayat pertama dari pasal 2 dalam konsep usulan Indonesia lebih jelas.

Van Mook lalu mengingatkan:

“Golongan Indo mengharapkan agar negeri Belanda mewakili kepentingan mereka. Begitu pula penduduk pulau Borneo (Kalimantan) dan Timur Besar atau *de Groote Oost*. (Indonesia Timur)”.

Schermerhorn juga berpendapat:

“Karena pasal 1 di dalam rapat kemarin atas permintaan pihak Indonesia telah berubah, sehingga pengakuan *de facto* mencakup Jawa dan Sumatera langsung

dapat diterima sidang, maka kini pasal 5 betul-betul tidak boleh dikesampingkan”.

Van Mook menjelaskan lagi:

“Setelah mempelajari teks dari konsep Indonesia pasal 2 ayat pertama, saya menganggap di sini tidak disinggung perihal sidang konstituante seperti dalam konsep Belanda. Seyogyanya itu harus ada”. Berknaan dengan masyarakat Cina, Van Mook menilai: “Sebagai suatu masalah yang amat sulit dan tidak dapat begitu saja diselesaikan dengan sebuah undang-undang. Melalui pembicaraan antara pihak-pihak terkait, dapat diketahui jalan terbaik untuk memahami masyarakat yang sedang akan dibangun ini”.

Van Mook sengaja memilih contoh ini, oleh karena ini terkait dengan luar negeri, secara jelas memperlihatkan bahwa golongan-golongan tersebut tidak dapat diabaikan dalam persetujuan”.

Selanjutnya, Schermerhorn meminta berhati-hati dalam pembahasan lebih lanjut (notulen):

“Apa yang saya tangkap dari ucapan-ucapan delegasi Indonesia, meskipun persiapan penandatanganan persetujuan ini segala sesuatunya sudah beres termasuk soal persamaan derajat dengan negeri Belanda, juga secara organisatoris. Namun ini bertentangan dengan kenyataan yang ada yang akan mengakibatkan kesulitan besar serta memunculkan kewajiban-kewajiban pihak Indonesia yang sukar dipenuhi, sehingga akibatnya akan memicu persoalan-persoalan rumit di tingkat internasional”.

Rupanya Schermerhorn ingin menggaris bawahi bahwa negeri Belanda tidak mengharapkan hal tersebut terjadi.

Roem mengulangi keberatannya terhadap pembukaan dari pasal 5 ini. Katanya:

“Oleh karena disini diperlukan adanya kesamaan derajat kedua belah pihak, pasal ini tidak mencantumkan hal tersebut didalamnya secara jelas”.

Sjahrir menyela dan menambahkan menjelaskan:

“Redaksi dari pasal 5 ini dirumuskan kurang baik. Titik berat terlalu banyak diberikan pada golongan-golongan tertentu, pada hal seharusnya kepentingannya dititikberatkan pada golongan-golongan yang besar”.

Van Mook berpendapat lain, dan mengutarakan pendapatnya:

“Keberatan dari tuan Roem dapat diselesaikan dengan redaksi yang menyebutkan adanya tanggung jawab tersendiri pada masing-masing pihak. Pasal itu sendiri hendaknya tetap dipertahankan, agar golongan lain melihat mereka tidak dilupakan. Begitu pula di dalam pasal ini dapat dimasukkan keberadaan sidang konstituante itu”.<sup>56</sup>

Akhirnya sebuah konsep baru dari pasal 5 diajukan kepada sidang, dan ini dapat diterima secara bulat setelah melalui pembahasan singkat. Isinya berbentuk 2 ayat sebagai berikut:

1. *Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentukan Negara (konstituante), yang akan didirikan dari pada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal 5 ini.*
2. *Kedua belah pihak akan bermusyawarat tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentukan negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk yang tidak ada atau tidak tjukup perwakilannya segala itu dengan mengingat tanggung jawab daripada pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia masing-masing.*<sup>57</sup>

Berarti pasal 5 selesai dibahas. Selanjutnya dibahas pasal 6.

Mengingat perubahan-perubahan yang telah diadakan pada pasal 1, sekarang pasal ini sudah dapat dihapus, dengan pengertian, bahwa ketentuan mengenai Ibukota akan dicantumkan didalam pasal 4.<sup>58</sup> Sebagai konsekwensinya, pasal 7 (lama) kemudian menjadi pasal 6 dalam naskah perbaikan.

Dalam pembahasan pasal 7 (lama). Sjahrir ingin agar terbentuknya Kerajaan sebagaimana dicantumkan dalam pasal ini, sebaiknya ditiadakan saja, karena hanya merupakan suatu pemberitahuan yang bersifat akademis.

Seperti tertulis dalam notulen, Van Mook menyatakan:

“Ini justru perlu dicantumkan untuk menjelaskan, bahwa struktur Kerajaan akan berubah, dan bagaimana bentuknya perubahan itu”.

---

<sup>56</sup>. *Ibid.*

<sup>57</sup>. *Ibid.*

<sup>58</sup>. Selanjutnya nomer baru dari konsep perjanjian mengikuti penghapusan pasal 6 ini.

Soesanto mengingatkan:

“Di dalam pasal ini telah dicantumkan tentang pembentukan UNI. Saya ingin agar disisipkan juga bagian-bagian dari UNI itu adalah negara-negara yang *berdaulat*. Kecuali itu, saya menganggap UNI itu sebagai persekutuan antara Negara Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, saya berpendapat perlunya ditambahkan kata kerja sama, pasal ini menurut saya, selanjutnya akan berbunyi sebagai berikut, *„agar tercapai tujuan, di satu pihak Kerajaan Belanda yang mencakup negeri Belanda, Suriname dan Curacao, dan di lain pihak Negara Indonesia Serikat, kedua-duanya sebagai negara yang berdaulat, secara sukarela melangsungkan perikatan khusus, bernama UNI Nederland-Indonesia”*.

Ternyata Schermerhorn khawatir pada keterangan tersebut katanya:

“Dengan demikian kedua pihak akan melepaskan landasan konstitusional, yang semestinya dipegang teguh. Kalimat tentang perubahan Kerajaan hendaknya dipahami dari sudut pandang seperti itu. Semua harus secara berangsur-angsur beralih dari situasi revolusioner ke situasi legal, dimana delegasi Belanda dengan senang hati bersedia memenuhi usul-usul perubahan redaksionalnya, agar rasa ketersinggungan pihak Indonesia dapat diatasi. Dalam hal ini, rupanya semua pihak sedang menghadapi persoalan amat berat, yakni meninggalkan dasar konstitusional yang menjadi pijakan bersama. Dalam kasus ini, delegasi Belanda tidak boleh beralih ke konsep pihak Indonesia yang bertujuan guna menghindari ketersinggungan perasaan itu”.<sup>59</sup>

Seperti tergambar dalam notulen, perundingan pasal ini yang sudah menyangkut pembahasan UNI cukup sensitif bagi kedua delegasi. Van Poll meramalkan yang selanjutnya diungkapkannya:

“Redaksi yang diajukan pihak Indonesia ini dijamin akan membuat orang di Belanda menolak usulan ini. Maksudnya ditolak, bila dua negara berdaulat yang akan mengadakan perikatan. Bukankah Kerajaan Belanda itu memang sudah eksis ? Yang penting, bagaimana dapat dibentuk suatu UNI Nederland-Indonesia itu ? Mengingat bahwa ini merupakan tujuan yang secara pasti bagi kedua belah pihak. Jadi janganlah sampai gagal hanya karena masalah istilah”.

---

<sup>59</sup>. Van der Wal *Op., cit, jilid VI*; hal. 205-209

Soesanto lalu coba menjelaskan kembali:

“Pihak Indonesia justru menganggap persoalan istilah sangat penting. Apabila UNI dibentuk oleh dua negara yang berdaulat, usulan ini akan lebih mudah diterima”.

Schermerhorn berkata lagi:

“Apabila kedua negara ini membentuk sebuah UNI, maka masing-masing akan melepaskan sebagian kedaulatannya masing-masing untuk bisa bekerja sama”.

De Boer ikut menambahkan:

“Akan sulit untuk menjelaskan masalah ini kepada masyarakat Belanda khususnya rakyat jelata, bukan kaum intelektual. Hendaknya semua pihak menyadari, bahwa disini tersembunyi dinamit yang bisa meledak”<sup>60</sup>.

Van Mook lalu mencoba menerangkan:

“Kami semua ini (maksudnya delegasi Belanda) dapat memahami jalan pikiran delegasi Indonesia, namun apabila hal yang diusulkan itu memang ingin dicapai dengan cepat, maka harus ada kerjasama dengan pihak Belanda yang akan memperkenalkan Negara Indonesia Serikat ke dunia internasional. Redaksi yang diusulkan tuan Soesanto, bagi pihak Belanda kedengarannya seperti mempertentangkan kedua bangsa ini, hal mana tentu saja bukanlah maksud tuan Soesanto”<sup>61</sup>.

Van Poll lebih menggarisbawahi hal ini dan berkata:

“Secara internasional, kedaulatan negeri Belanda atas daerah-daerah di Indonesia sudah diakui. Delegasi Belanda bersedia untuk bekerja sama dengan delegasi Indonesia dan mau mengorbankan sebagian dari kedaulatan Belanda itu yang nantinya akan diserahkan kepada UNI. Pada hakekatnya sangat keliru untuk memahami dua negara berdaulat (Indonesia-Belanda) melakukan ikatan, karena dapat melukai perasaan bangsa Belanda, sehingga hal ini dapat menutup kemungkinan penyelesaian banyak masalah”<sup>62</sup>.

Rupanya perundingan pagi ini khususnya dalam membahas pasal 7 tetap menemui jalan buntu. Sjahrir akhirnya berpendapat:

---

<sup>60</sup>. *Ibid*

<sup>61</sup>. *Ibid*

<sup>62</sup>. *Ibid*

“Lebih baik pasal 7 ini dikesampingkan dahulu atau ditunda pembahasannya, dan sore dilanjutkan dengan pasal-pasal yang lain”.

Semua sepakat kalau pasal 7 ini ditinggalkan dahulu. Rapat ditutup jam 13.30.

Ketika rehat makan siang, Soekarno-Hatta datang dari Kuningan dan ikut makan. Saat itu Schermerhorn berusaha duduk satu meja makan dengan Presiden Soekarno, di mana kemudian dia bertanya kepada Soekarno: “Kapan bisa bicara dengan Presiden” ? Presiden menjawab, dia menantikan kedatangan delegasi Belanda di kabupaten Kuningan, kira-kira antara jam 18.00-20.00.<sup>63</sup>

Pertanyaan Schermerhorn ini bukan tidak sengaja diutarakan, karena maksud diadakannya perundingan di Linggajati justru agar Soekarno terlibat. Nampaknya di banding delegasi Indonesia, delegasi Belanda sangat memperhatikan rencana untuk bertemu Presiden Soekarno itu. Seperti telah dibicarakan dengan Sjahrir, Schermerhorn yang untuk pertama kali bertemu dengan Soekarno di Linggajati bukan tidak mungkin berfikir, kehadiran dan berbicara dengan Soekarno merupakan kunci untuk mencapai persetujuan. Kelihatannya ada persamaan pemikiran antara Schermerhorn dan Mountbatten bahwa Soekarno-lah tokoh penentu di dalam penetapan kebijakan pihak Indonesia soal perundingan Indonesia-Belanda, walaupun Sjahrir adalah pelaksananya.

Setelah rehat, perundingan politik ke-7 dibuka kembali di bawah pimpinan ketua yang dipegang Prof. Schermerhorn. Sidang langsung membahas pasal 8 (lama).<sup>64</sup>

Seperti tertulis dalam notulen jalannya perundingan sebagai berikut.

Soesanto bertanya:

“Kenapa dalam ayat pertama disebut *alat kelengkapan sendiri*. Apakah tidak lebih baik *alat kelengkapan bersama* ? “

Van Poll mengingatkan:

“Hal itu semestinya juga dicantumkan dalam ayat kedua, yang terkait komposisi dari pemerintah terkait”.

Sjahrir menyambung:

---

<sup>63</sup>. Schermerhorn.*opcit*, hal 115. Soekarno berkata diantara jam 6.00 dan jam 8.00 malam.

<sup>64</sup>. Notulen rapat tanggal 12 November 1946 sesion kedua (sore hari). Lihat juga Van der Wal *Op., cit.*, jilid VI; hal. 210-221



“Saya menganggap lebih tepat untuk tidak secara apriori berpegang pada komposisi gabungan pemerintah-pemerintah anggota UNI itu. Apakah kita tidak akan terbentur kelak bila kita ingin mengangkat hanya satu pihak saja ?”

Van Mook lalu berkata:

“Karena yang diurus adalah kepentingan-kepentingan bersama, sudah jelaslah bahwa UNI bukan merupakan sebuah Negara Super di atas negara. Ayat pertama dari pasal ini sesungguhnya dapat berbunyi sebagai berikut, *untuk membela dan memelihara kepentingan-kepentingan Negara-negara tersebut didalam pasal terdahulu, persekutuan (UNI) Belanda-Indonesia akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri*”.<sup>65</sup>

Ahirnya redaksi inilah yang diterima, dan pasal 8 selesai dibahas. Tapi rupanya Amir Sjarifudin kurang puas juga, lalu bertanya:

“Kenapa di dalam ayat ke-2 disebut ..  *mungkin juga oleh majelis perwakilan rakyat negara-negara itu*”.

Van Poll menjawab:

“Dengan demikian, pintu akan tetap terbuka untuk membentuk badan-badan perundingan”.

Selanjutnya atas permintaan Amir Sjarifudin, Van Mook memberikan penjelasan ayat ke-3 pasal 8. Van Mook berkata:

“Redaksi tersebut telah dipertimbangkan secara seksama. Oleh sebab itu tidak digunakan sebutan *hubungan luar negeri dan pertahanan*, melainkan *kerja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan....*, mengingat bahwa kedua bidang, saling berkaitan. Sebaliknya, untuk bidang keuangan ditambahkan kata-kata *..seberapa perlu...*, karena bidang urusan ini sebaiknya dikerjakan secara terpisah. Dan di bidang ekonomi dan kebudayaan, di samping apa yang menjadi urusan masing-masing bangsa tersendiri, terdapat pula hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama kedua belah pihak.

Rupanya Amir Sjarifudin cukup puas dan dapat menerima penjelasan ini.<sup>66</sup>

Sidang kemudian membahas pasal 9 (lama). Rupanya atas keinginan delegasi Belanda, pasal 9 (lama) ini telah berubah. Seperti tercantum dalam notulen, Schermerhorn membacakan kepada sidang, konsep redaksi baru sebagai

---

<sup>65</sup>. *Ibid.*

<sup>66</sup>. *Ibid.*

pengganti dari ayat pertama dalam konsep asli (Belanda), yang berbunyi sebagai berikut :

*Di puncak perserikatan Belanda-Indonesia, duduklah Raja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan persekutuan itu atas nama Baginda Raja.*

Kali ini pun terjadi lagi pembahasan serius seperti dapat dilihat pada notulen, Roem lalu bertanya:

*"Apakah tidak cukup hanya menyebut. Berkenaan dengan kepentingan bersama sebagaimana disebut di dalam pasal terdahulu, maka Raja Negeri Belanda mewakili UNI Nederland-Indonesia".*

Van Mook berpendapat:

*"Redaksi seperti itu memberi kesan seakan-akan hal ini berada di luar masalah kepentingan bersama tersebut. UNI masih perlu diwakili di bidang-bidang lain". Schermerhorn lalu menanyakan: "Apa sebenarnya makna dari istilah me/diwakili" ? Bukankah Ini hanya sebuah pengertian hukum sipil yang cenderung diberi tambahan di dalam dan di luar hukum". "Di mana sesungguhnya letak perbedaan antara redaksi tuan dengan yang disampaikan pihak Belanda" ?*

Lalu Roem menjawab:

*"Dalam hal ini, terutama yang berperan adalah alasan-alasan perasaan".*

Schermerhorn membalas:

*"Hal serupa dapat pula menjadi alasan pihak Belanda".*

Amir Sjarifudin mengajukan pendapatnya:

*"Istilah yang menjurus pada mengepalai UNI, sesungguhnya tidak tepat. Akibatnya, siapa yang mengepalai sesuatu, mempunyai kekuasaan untuk memerintah".*

Van Mook lalu menyatakan:

*"Istilah ini tidak menyebutkan tentang kewenangan, maka untuk itulah diperlukan kalimat kedua di dalam konsep Belanda. Sebagai contoh, seorang Presiden Perancis yang tidak mempunyai kewenangan apapun, dapat mengepalai Republik Perancis, sebaliknya yang mengepalai Amerika Serikat*

adalah seorang Presiden dengan banyak kewenangan. Oleh karena itulah, kalimat pertama memerlukan penjelasan lebih jauh”.

Soesanto lalu menanyakan:

“Apakah kalimat pertama itu tidak dapat dihapus saja?”

Schermerhorn menolak usul ini. Katanya :

“Ketentuan ini seperti sudah seharusnya ditempatkan di depan”.

Soesanto khawatir dan coba menjelaskan kembali:

“Dengan adanya Raja Negeri Belanda mengepalai UNI, orang akan mengatakan bahwa hubungan kenegaraan pada masa lalu yang sudah tidak dikehendaki itu kini muncul dan diterima kembali. Dengan kata lain kita dianggap menyambut baik UNI”.

Nampaknya pihak Indonesia perlu tetap ngotot. Soesanto dalam hal ini didukung oleh Leimena, yang juga mengharapkan pengertian pihak Belanda agar menghapus kalimat pertama.<sup>67</sup>

Rupanya pihak Belanda ingin bertahan. Untuk ini Van Poll perlu ngotot juga, katanya:

“Tidak tepat kalau Belanda diminta untuk sekali lagi mengalah pada Indonesia. Belanda telah menyerahkan begitu banyak, sedangkan sebaliknya pihak Indonesia tidak satu pun hal pokok yang dimunculkan. Seyogyanya ini harus dipahami, bahwa masalah ini bagi Belanda bukanlah suatu bahan perundingan yang mudah ditawar-tawar lagi. Raja sebagai kepala UNI tidak merupakan rintangan bagi kemerdekaan Indonesia. Perundang-undangan federasi sepenuhnya bebas. Lalu kenapa Raja Belanda secara khusus tidak boleh mengepalai UNI ?”

Van Poll kemudian menyambung keyakinannya:

“Seharusnya ada peluang untuk memberikan penjelasan kepada bangsa Indonesia, kalau Raja Belanda tidak bermaksud buruk terhadap kemerdekaan mereka. Keadaan yang dihadapi di negeri Belanda akan jauh lebih sulit untuk memperoleh persetujuan seperti ini. Bagi bangsa Belanda hal ini justru merupakan perubahan yang benar-benar sangat penting”.

Serasa tidak sabar, Amir Sjarifudin menyela:

---

<sup>67</sup>. *Ibid.*

“Saya berkeinginan agar pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, hendaknya dihadapi secara rasional murni. Masalahnya ini penting karena berkisar pada tugas pokok seorang Raja”.

De Boer menambahkan dan menyatakan:

“Jika pihak Indonesia tidak menginginkan bentuk yang diusulkan tersebut, maka Komisi Jenderal harus pulang ke negeri Belanda lebih dahulu guna membawa persoalan ini ke sana, sebab hal seperti ini tidak dapat diselesaikan melalui hanya komunikasi telegram. Lagi pula, masih ada badan lain yang harus dilibatkan, yaitu Jang Mulia Ratu Belanda sendiri”.<sup>68</sup>

Akhirnya Sjahrir berpendapat, bahwa lebih baik pasal ini ditunda dahulu. Semua setuju. Para perunding langsung membahas pasal 10 (lama), di mana semua pihak meyakini bisa menerima pasal ini tanpa perubahan. Artinya redaksinya tidak berubah.

Pada pembahasan pasal 11 (lama), Schermerhorn berusaha memberikan penjelasan lebih jauh tentang ketentuan dalam butir a. Dalam notulen tertulis:

“Maksud dari pasal ini, antara lain kewajiban-kewajiban keuangan yang dibuat di masa lalu akan diambil-alih oleh perserikatan (maksudnya Negara Indonesia Serikat). Kami pernah mempertimbangkan untuk memformulasikannya kedalam pasal tersendiri, namun menganggap dengan adanya keterangan di dalam notulen terdahulu yang juga bersifat mengikat, kami cantumkan saja cukup di dalam butir a pasal ini. Lagi pula, bukankah dengan sendirinya sipewaris tidak hanya menikmati keuntungannya, tetapi juga beban dari warisan yang ditinggalkan itu” ?

Van Mook menambahkan:

“Pengambilalihan harus diberlakukan sebagai sebuah prinsip. Dalam rangka kerjasama, tentu saja pelaksanaannya harus diatur secara praktis, di mana kesulitan masing-masing harus saling diperhatikan dan masalah-masalah seperti jangka waktu, angsuran, konversi, dan lain sebagainya, harus dapat dicarikan solusinya dengan tepat. Hal ini harus pula berlandaskan prinsip tersebut, sebab kalau tidak Indonesia akan terlibat dalam kesulitan-kesulitan besar menghadapi dunia luar. Pasal 11 butir a antara lain berkenaan dengan hutang negara serta kewajiban masa pensiun. Memang masih ada kewajiban

---

<sup>68</sup>. *Ibid.*

kewajiban lain terkait para pegawai negeri yang bertugas dalam pemerintah Hindia Belanda. Karena berkembangnya situasi, mereka tidak bisa disalahkan juga dimana sekarang mereka sudah tidak menduduki jabatannya yang lalu”.

Sjahrir rupanya bisa menyepakati prinsip itu tapi lebih dahulu ditanyakannya: “Namun, bagaimana mengenai biaya yang telah dikeluarkan saat ini” ? Schermerhorn menjelaskan (notulen):

“Biaya-biaya yang berkaitan dengan konflik, adalah persoalan lain. Namun, di luar biaya militer yang kini sedang berjalan, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan konflik, masih perlu dirundingkan. Kewajiban-kewajiban finansial yang sekarang mulai berlaku, termasuk seluruh kewajiban finansial yang terjadi sebelum konflik, hendaknya diakui secara integral”.

Lalu van Mook memberikan penjelasan dengan beberapa contoh:

“Ada kontrak-kontrak yang diadakan untuk pembangunan kapal pengeruk timah. Kewajiban yang berasal dari waktu sekarang harus diambil-alih, karena hal ini memang merupakan bagian takterpisahkan dari proses pertambangan timah. Begitu pula telah dilakukan perjanjian-perjanjian internasional berkenaan dengan konversi *valuta*. Juga mengenai karet. Ini hanya beberapa contoh saja. Semua ini sudah harus mulai diambilalih pihak Indonesia. Bila diinginkan, kelak tentu saja dapat dilakukan penyesuaian atau penolakan”.

Sjahrir menanyakan lagi: “Apa yang terjadi dengan hutang negara selama waktu perang” ?

Van Mook melanjutkan:

“Saya memperkirakan hal ini tidak terjadi peningkatan yang berarti. Berkenaan dengan kewajiban kewajiban terhadap Suriname dan Curacao sebagaimana yang dtanyakan oleh tuan Sjarifoedin saya juga percaya bahwa jumlahnya tidak besar.

Merasa Indonesia akhirnya akan menanggung hutang itu, Soesanto berpendapat:

“Apabila hutang-hutang itu diambilalih secara integral, jelas akan merupakan suatu kewajiban yang sangat berat bagi Indonesia. Dalam hubungan ini, saya memperkirakan angka pensiun akan tinggi”.

De Boer lalu menyatakan:

“Bahwa tinggi atau rendah angka pensiun, tidak perlu dipersoalkan. Bukankah ini kewajiban yang harus diterima”.

Van Mook lalu menambahkan pula (notulen):

“Saya menganggap, bahwa pada umumnya dalam hal pengambil alihan hutang negara serta kewajiban pensiun itu, kita berada di atas angin, karena nilai valuta telah menurun. Uang pensiun yang dahulu tinggi, sekarang tidak lagi. Secara umum, bunga pinjaman di Indonesia lebih rendah daripada di Cina dan negara Amerika Selatan. Ini justru karena masyarakat berkeyakinan kewajiban kewajiban bagi mereka akan dipenuhi”.<sup>69</sup>

Akhirnya rapat dapat menyetujui, bahwa yang diatur didalam pasal ini adalah pengambilalihan seluruh hak dan kewajiban dari negeri Belanda dan Hindia Belanda, sampai pada periode konflik (sebelum konflik), oleh pihak Indonesia. Hal-hal yang telah berlangsung selama periode konflik, akan dipelajari kembali melalui perundingan-perundingan sebagaimana cara yang telah digariskan di atas.

Pasal 11 selesai dibahas. Pada pembahasan pasal 12 (lama) tidak ada komentar dan bisa disetujui semua. Demikian pula pada pembahasan pasal 13 (lama). Kedua pasal ini dalam persetujuan akan menjadi pasal 11 (baru) dan 12 (baru).

Dalam pembahasan pasal 14 (lama), untuk ini delegasi Belanda mengajukan sebuah redaksi yang telah disusunnya kembali, yang berbunyi: *“Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan- tindakan, agar supaya setelah terbentuknya persekutuan Belanda Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat itu diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa bangsa”*.

Sebagai pembahas awal, Roem bertanya:

“Kenapa harus menunggu UNI ? Bukankah Republik bisa diterima sebagai anggota ? Bukankah India dibawah Inggris telah memperoleh keanggotaan tersebut ?”

Schermerhorn berpendapat:

“Kasus itu menyangkut secara keseluruhan dan bukan satu bagian saja, seperti Benggala. Afrika Selatan pun menjadi anggota PBB secara keseluruhannya.

Menurut Van Mook:

---

<sup>69</sup>. *Ibid*

“Mungkin saja untuk saat ini juga Indonesia menempatkan perwakilan di dalam delegasi Belanda di PBB”.

Leimena menganggap:

“Suatu perwakilan tersendiri dari Republik akan memberi kesan psikologis yang luar biasa”.

Dalam hal ini Schermerhorn berpendapat:

“Ini memang tidak mustahil. Namun, dia sangat meragukannya, dan memberi contoh Portugal, yang di dalam Dewan Keamanan batal masuk karena di *veto* oleh Rusia”.

Akhirnya redaksi dari pasal 14 (lama) dapat disetujui, yang kemudian menjadi pasal 13 (baru). Sidang kemudian melanjutkan untuk membahas pasal 15 (lama). Pada pembahasan pasal 15 (lama) seperti tertulis dalam notulen:

Roem menanyakan:

“Apakah ayat pertama tidak dapat dirumuskan secara bilateral”.

Van Mook secara prinsip tidak keberatan, namun ia berpendapat:

“Hendaknya disadari bahwa Republik mampu memenuhi kewajiban-kewajiban ini, dan dalam prakteknya kelak dapat mengalami sejumlah kesulitan”.

Soesanto mengusulkan:

“Alinea pertama saja yang dihapus. Bukankah perjuangan Republik sudah jelas”.

Van Mook dapat menyepakati usul ini. Ayat pertama tersebut memang agak mengulangi pasal 11 ayat e. Akhirnya sidang memutuskan menghapus ayat ini.

Mengenai ayat ke-2, Schermerhorn berpendapat:

“Manfaat ketentuan ini untuk informasi konsumsi dunia, tentang apa yang direncanakan dan dilakukan Republik mengenai pemilikan perkebunan perkebunan yang bukan milik Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah Belanda memang sudah menerima pesan dari Kementerian Luar Negeri Amerika”.

Tiba-tiba Sjahrir menyela dan mengingatkan:

“Di dalam redaksi yang sekarang juga tercakup perkebunan-perkebunan milik orang Cina”.

Van Mook menyatakan:

“Maksud untuk merujuk konsep perjanjian oleh pihak Indonesia ini, sebenarnya tidak menyangkut bagaimana mereka diperlakukan, tapi lebih banyak berkenaan posisi menguntungkan yang akan diberikan kepada orang Belanda”.

Soesanto berpendapat:

“Lebih baik dihapus saja ayat 2 ini, karena maksudnya sudah jelas”.

Schermerhorn dapat menyetujui hal ini. Katanya:

“Bukankah perlakuan istimewa yang akan dinikmati orang Belanda, sudah tercantum dengan jelas di dalam notulen ? Soal ini seyogyanya tidak perlu disertakan kedalam sebuah perjanjian induk yang sedang kita rundingkan sekarang. Untuk itu seharusnya harus dibuat suatu pengaturan tersendiri antar kedua belah pihak. Hal ini juga berlaku mengenai pemberian kebebasan berdagang dan bergerak, sebagaimana tertera didalam ayat 1 yang telah dihapus itu. Selain itu, terdapat pula berbagai masalah pelaksanaan yang terkait dengan hal tersebut. Suatu konsep yang bersifat umum akan memberikan makna kecil dan hanya akan menyebabkan kesulitan-kesulitan saja. Oleh karena itu hendaknya disadari, bahwa masih perlu dibuat berbagai pengaturan lanjutan, berdasarkan pasal 11 ini”.

Akhirnya ayat 2 juga dihapus. Kemudian perundingan melanjutkan pembahasan ayat 3. Ayat ini adalah satu-satunya yang harus dipertahankan dari Pasal 15, dengan ketentuan, untuk kata "*Republik*" hendaknya dibaca "*Pemerintah Republik*".<sup>70</sup>

Semua pihak setuju bahwa pasal 15 tanpa dibagi menjadi ayat-ayat atau hanya terkait pada pasalnya saja.

Dalam pembahasan pasal 16, (lama) Van Mook mengupas pasal ini lebih hat-hati dan menjelaskan secara panjang lebar. Rupanya disadari oleh Van Mook bahwa akan terjadi perbedaan faham yang amat tajam yang akan membuat pembahasan menjadi bertele-tele dan akan memakan waktu yang panjang. Seperti tertulia didalam notulen, mula-mula dia melempar pertanyaan:

“Yang menjadi pokok pembahasan saat ini, bagaimana kita dapat berpindah dari situasi pemerintahan ke situasi yang lain, tanpa menimbulkan

---

<sup>70</sup>. *Ibid*



kekosongan. Maksudnya untuk mentransformasikan pemerintahan Hindia Belanda dalam waktu singkat ke dalam semacam pemerintahan *interim*, dengan sejauh mungkin memperhatikan struktur pemerintahan yang sedang bersama-sama kita rancang sekarang (NIS), sehingga perubahan-perubahan sudah harus mencapai bentuknya secara lengkap pada tanggal 1 Januari 1949.

Menanggapi pernyataan van Mook, Sjahrir merujuk pada pasal 7 dalam konsep Indonesia, yang didasarkan pada pemikiran yang berbeda dengan pihak Belanda, di mana disana tercantum kalimat, *keberadaan perwakilan diplomatik dan perdagangan Indonesia*.

Amir Sjarifudin berpendapat lain, katanya:

“Pasal 16 bernafaskan hal yang sama sekali berbeda dengan pasal-pasal lain di dalam perjanjian ini. Di sini tercantum dengan jelas adanya kedaulatan pemerintah Belanda terhadap wilayah kekuasaan *de facto* Republik.

Rupanya van Mook ingin memperjelas lagi dan memperagakan beberapa contoh yang telah terjadi:

“Dewasa ini di London sedang berlangsung pembicaraan tentang perdagangan karet. Di sana negeri Inggris Indonesia harus terwakili dan tidak boleh absen. Dengan Siam (Thailand) kini sedang dilakukan perundingan mengenai pemulangan warga negara Belanda. Semua ini harus dapat dilanjutkan pula. Oleh karena itu kita harus memunculkan suatu bentuk pemerintahan pendahuluan sebelum Negara Indonesia Serikat terbentuk. Meskipun hal ini sedikit banyak bersifat semi legal, tapi perlu, jika tidak akan terjadi kekosongan-kekosongan. Di sini sama sekali tidak ada maksud untuk memunculkan masalah baru menjelang terbentuknya Negara Indonesia Serikat itu”.

Amir Sjarifudin dapat mengerti hal ini, tapi dia masih belum puas dan berkata:

“Akan tetapi hendaknya ditemukan lebih dahulu suatu konsep yang sedemikian rupa, di mana pengakuan terhadap Republik tetap berlaku sebagai suatu kenyataan, dan tidak dianggap hilang terserap ke dalam pemerintahan Hindia Belanda”.

Sjahrir sekali lagi mengingatkan. Dia menganggap, bahwa hal ini sudah secara jelas dijabarkan dalam pasal 7 dari konsep Indonesia. Republik menginginkan agar segera memperoleh status internasional dan tidak ingin

didesak mundur ke posisi sebuah propinsi yang otonom. Tiba-tiba Van Poll menolak pendapat Sjahrir seperti itu. Katanya:

“Selama periode peralihan, Republik tetap eksis sebagaimana keberadaannya sekarang”.

Van Mook menyela dan mengutarakan pendapatnya lagi:

“Apa yang dikehendaki oleh delegasi Indonesia, pada hakekatnya menggambarkan Republik yang sekarang harus diakui sebagai suatu negara merdeka, di mana kemudian negeri Belanda mengadakan perjanjian-perjanjian dengannya. Pada satu sisi, hal ini cukup mudah, karena pihak Belanda akan segera datang menyodorkan sebuah daftar keinginan yang panjang. Namun, pada sisi lain, secara internasional Belanda akan tetap diminta bertanggung jawab”. Apa yang diinginkan pihak kami adalah untuk memperkenalkan Indonesia dengan cara yang pantas ke dalam dunia internasional. Oleh karena itu diperlukan waktu guna menata kembali negara yang sekarang sedang berada dalam keadaan kacau balau ini. Apabila ini tidak dilaksanakan, ada risikonya, yaitu keterlibatan dunia internasional. Maka untuk itulah negeri Belanda harus mampu menghindarinya”.

Menanggapi keterangan Van Mook ini, Sjahrir mengatakan:

“Di dalam perundingan yang lalu disebut bahwa apa yang telah ditawarkan kepada Republik sudah melebihi apa yang kini dipunyai Australia. Akan tetapi, pemerintah Australia sesungguhnya adalah berdaulat, sedangkan Gubernur yang akan diangkat oleh Raja tidak punya peran apa-apa”.

Lalu Schermerhorn mencoba menjelaskan:

“Perbandingan dengan Australia itu memang sudah tepat sekali serta pendapat pihak Indonesia dapat dibenarkan, apabila yang dimaksud adalah Negara Indonesia Serikat. Kesulitannya, pihak Indonesia ingin menganggap Republik (Indonesia) sama dengan Negara Indonesia Serikat. Meskipun tuan Sjahrir menyebut-nyebut pendapatnya bahwa Republik kembali mundur ke status sebuah propinsi yang otonom, tetapi propinsi ini sesungguhnya mempunyai arti yang berbeda dengan hakekat sebuah negara sebagai bagian dari sebuah federasi”.

Untuk membela diri, Sjahrir kemudian menjawab dan mencoba merumuskan pendapatnya:

“Sekarang Republik (Indonesia) disisipkan ke dalam pemerintahan Hindia Belanda, agar kelak dapat dipindahalihkan kedalam Negara Indonesia Serikat”. Apa seperti itu ?

Schermerhorn berkata:

“Saya menganggap rumusan seperti itu juga tidak tepat. Dalam pasal 1 telah tercantum pengakuan terhadap Republik, dan saya dapat menyebutkan sejumlah pasal satu persatu yang disebutkan pemerintahan Belanda dan pemerintahan Republik sedang melakukan sesuatu secara bersama-sama. Pasal 16 ini, maksudnya suatu kerjasama juga yang serupa tapi selama periode peralihan. Dengan perkataan lain, soal kemerdekaan Republik tetap dinyatakan dengan sangat jelas di dalam persetujuan ini”.

Amir Sjarifudin ikut bicara dan berkata:

“Hal seperti itu hanya berlaku untuk urusan kedalam, tetapi tidak terhadap dunia internasional. Oleh karena itulah, masalah perwakilan sendiri yang dimaksud, amat diminati pihak kami”.

Schermerhorn menyatakan:

“Waktu guna membentuk sebuah pemerintahan interim adalah selama dua atau tiga bulan, dan pasti selama itu tidak akan ada usaha diplomatik apa pun juga. Maka, apakah tidak lebih baik jika ditempuh jalan sebagaimana tersebut terdahulu, yaitu memberi kemungkinan penunjukan orang Indonesia sebagai perwakilan. Hal ini dapat tercapai lebih cepat”.

Lalu Soesanto ikut bicara dan menyatakan:

“Keinginan pihak Republik adalah untuk menyelesaikan konflik dengan negeri Belanda secara damai. Guna mencapai tujuan itu, pihak Indonesia bersedia memberikan konsesi-konsesi soal UNI dan federasi. Di luar itu, hendaknya jangan direkayasa lagi, agar Republik dilebur ke dalam pemerintahan Hindia Belanda. Bagi rakyat, pengakuan Republik (Indonesia) harus dinyatakan secara jelas”.

Schermerhorn menganggap pencitraan seperti itu tidak tepat, katanya:

“Sikap menerima federasi bukanlah merupakan konsesi kepada negeri Belanda, melainkan sebuah sikap yang bijaksana dari Republik sendiri. Bukankah ini merupakan jalan yang paling tepat untuk pembangunan negeri ini ? Selang dua tahun lagi, federasi akan mempunyai perwakilan

diplomatiiknya melalui UNI. Maka, untuk apa sekarang seluruh bentuk akan dipertaruhkan dengan menuntut perwakilan tersendiri bagi Republik “?

Kemudian Van Mook mengingatkan:

“Pihak Indonesia mempunyai gambaran yang keliru dengan mengatakan akan terjadi peleburan Republik ke dalam pemerintahan Hindia Belanda. Semestinya rakyat diperlihatkan pada hal yang benar dengan mengampnyekan dan pengarahan kepada struktur yang akan datang. Sepanjang pihak Indonesia masih menghendaki suatu perwakilan diplomatik tersendiri dimana negeri Belanda hanya boleh membantu, itu pun bila ada permintaan. Dan karena kekurangan tenaga (ahli) sendiri mustahil akan ada kerjasama (Indonesia-Belanda) yang kokoh, sebagaimana yang diinginkan. Apabila kerjasama memang tidak dikehendaki, dan ingin bertindak diatas jalan sendiri, maka bagi pihak Belanda mungkin hanya tinggal menawarkan jasa-jasa kami saja lagi, dan tentu hal mana menjadi kurang menarik”.

Lalu Schermerhorn mengajukan pertanyaan kepada Sjahrir:

“Apabila pasal 16 diterima, apakah Republik dianggap akan mengalami kemunduran, dibandingkan dengan situasinya pada hari ini ?”

Sjahrir menjawab:

“Pasal ini menggambarkan Republik setelah kenyataannya berhasil memperjuangkan seluruh negerinya melalui suatu perjuangan yang sangat berat, kini harus mengaburkan kenyataan tersebut dan bersembunyi didalam pemerintahan Hindia Belanda, sambil menunggu sampai Negara Indonesia Serikat kelak terbentuk !”.

Schermerhorn bertanya kembali:

“Kalau demikian tolonglah tunjukkan suatu bentuk lain yang legal atau setidaknya sedemikian rupa, sehingga dapat dipertahankan secara wajar dalam sidang perundingan, kemudian kita dapat keluar dari situasi hari ini untuk beralih ke bentuk yang baru”.

Merasa kurang puas, Sjahrir member contoh:

“India pun mempunyai perwakilannya sendiri, tanpa merupakan sebuah negara berdaulat”.

Van Mook mencoba mencari jalan keluar katanya:

“Kami menganggap, bahwa apabila masalahnya hanya terbatas pada cara mewakili kepentingan Indonesia di luar negeri, rasanya ada kemungkinan untuk menemukan pemecahannya. Akan tetapi, adalah mustahil untuk terlebih dahulu memperoleh pengakuannya internasional, sebagaimana yang dikehendaki Republik (Indonesia). Kita membutuhkan waktu dua tahun bagi Indonesia Serikat. Itupun agaknya masih kurang untuk menjadikan Indonesia sebuah federasi yang solid yang kemudian akan memperoleh pengakuan dunia”.<sup>71</sup>

Sampai di sini, keadaan persidangan perundingan yang rumit tidak mungkin dilanjutkan lagi. Padahal masih 2 pasal lagi yang perlu dibahas, yaitu pasal 17 (lama) dan penutup. Di samping itu Schermerhorn meminta agar sidang dapat diakhiri saja sekarang, mengingat Komisi Jenderal ingin berbicara dengan Soekarno dan Hatta pada jam 18.00 di Kuningan, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan Ir. Soekarno siang tadi.<sup>72</sup>

Kesimpulan hasil perundingan politik ke 7 ini cukup pelik, di mana tidak berhasil dicapai kesepakatan pada pasal-pasal tertentu. Pada pasal 2,7, dan 9 (lama) ditunda pembahasannya. Mereka hanya berhasil menyelesaikan untuk mencapai persetujuan pada pasal 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di mana disini tidak banyak terjadi perbedaan prinsipil.

Pada pembahasan pasal 16 (lama), terjadi perbedaan pendapat yang tajam yang gagal disepakati sampai sidang selesai. Telah diuraikan, yang menjadi masalah dalam pasal ini adalah dimunculkannya kedaulatan kerajaan Belanda dalam masa peralihan sebelum Negara Indonesia Serikat dibentuk dan soal perwakilan di luar negeri.<sup>73</sup>

Seperti disebutkan diatas pembahasan terpaksa di stop pada jam 18.00 karena delegasi Belanda telah berjanji untuk bertemu Presiden Soekarno dan wakil Presiden Hatta di kediaman mereka di kabupaten Kuningan.<sup>74</sup>

Sebelum berangkat Schermerhorn menugaskan kepada Sanders agar merinci pasal-pasal yang masih mengganjal yaitu pasal 2 (lama), 7 (lama), 9 (lama) dan 16 (lama). Maksudnya akan menjadi bahan pembicaraan dengan Soekarno-Hatta.

---

<sup>71</sup>. *Ibid.*

<sup>72</sup>. Schermerhorn. *opcit*, hal 115-116.

<sup>73</sup>. Dalam naskah terahir yang ditanda tangani, pasal ini menjadi pasal 15.

<sup>74</sup>. Undangan Sukarno merupakan kesempatan satu-satunya bisa berunding dengan Presiden RI.

Dalam diskusi intern mereka, di antara delegasi Belanda, atas saran van Mook, pada pasal 2 (lama), kata-kata merdeka diganti berdaulat. Sehingga akan berbunyi, “*Suatu negara berdaulat dan berdemokrasi.....*”.<sup>75</sup> Nampaknya hal ini dapat diterima semua anggota delegasi Belanda. Hal ini memang sudah sesuai dengan usul Sjahrir pada awal perundingan membahas pasal 2. Namun oleh Belanda strategi tersebut, di mana pasal 2 dianggap amat mahal, akan dimintakan imbalan agar Indonesia menyetujui pasal 7, 9 dan 16. Dan tentu saja agar pasal 17 dan penutup yang belum dibahas itu bisa dilanjutkan terus.

Sjahrir tidak ikut dalam rombongan ke kabupaten Kuningan ini dengan alasan sakit kepala dan perlu beristirahat. Tapi Amir Sjarifudin dan AK. Gani ikut.<sup>76</sup> Dalam pertemuan ini Schermerhorn terkesan, dengan menempatkan dirinya diantara korsi duduk Soekarno dan Hatta, Amir Sjarifudin berharap masih terbukanya kesempatan-kesempatan berunding yang akan memunculkan butir-butir kesepakatan yang baru. Ternyata Soekarno menanggapi hasil perundingan Linggarjati bahwa dalam persetujuan ini, Republik telah menuju selernya di mana akan muncul resiko paling kecil. Schermerhorn menjelaskan kepada pihak Indonesia: “Seharusnya itulah yang benar, karena terkait pada persetujuan ini yang harus dilakukan adalah dilanjutkannya soal-soal pekerjaan ketimbang hal-hal lain yang bukan masanya lagi”. Selanjutnya Schermerhorn menerangkan juga: “Ketika melanjutkan perundingan, kami teringat pada pembahasan pasal 7 (lama) dimana terjadi perdebatan soal kedaulatan dengan AK Gani. Maka ketika Van Mook memunculkan penggantian kata merdeka dengan berdaulat untuk pasal 2, Gani menjadi sangat antusias karena itulah yang seharusnya katanya. Para hadirin yang lain juga setuju”.<sup>77</sup>

Ali Budiardjo dalam tulisannya pada buku “menelusuri jalur Linggarjati” menambahkan kalau Sjahrir mengira kunjungan Komisi Jenderal sifatnya hanya kunjungan kehormatan dan tidak membahas pasal-pasal hasil perundingan.<sup>78</sup>

Jadi kesimpulannya, saat delegasi Belanda bertemu Soekarno-Hatta di Kuningan, terjadilah peristiwa yang amat menentukan jalannya sejarah. Inilah

---

<sup>75</sup>. Schermerhorn.*opcit*, hal 115-116.

<sup>76</sup>. *Ibid*

<sup>77</sup>. *Ibid*

<sup>78</sup>. Ali Budiardjo, dalam A.B Lapijan, dan P.J Drooglever. *Menelusuri jalur Linggarjati* ; Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1992, hal 19

perundingan informal di Kuningan yang justru paling penting, karena Soekarno muncul sebagai tokoh penentu, yaitu setuju dengan delegasi Belanda setelah diterangkan Van Mook soal pasal 2, yang berubah redaksinya dari Negara Indonesia Serikat yang merdeka, menjadi sebagai Negara Indonesia Serikat yang berdaulat. Seperti telah dijelaskan, nampaknya hal ini bagi pihak Belanda tidak ada perbedaan prinsipil antara negara merdeka (*vrije*) dan berdaulat (*souvereine*).<sup>79</sup> Tapi kepada Soekarno, Van Mook tidak mengutarakan bahwa masih ada soal lain yang belum terpecahkan terutama soal perwakilan RI di luar negeri (pasal 16). Ia justru kemudian menanyakan kepada Soekarno, apakah dengan diterimanya perubahan merdeka menjadi berdaulat pada pasal 2, Presiden dapat menyetujui konsep perjanjian Linggajati seluruhnya? Atas pertanyaan ini Soekarno menjawab dengan nada antusias bahwa dia dapat menyetujuinya.<sup>80</sup> Bahkan selain itu Soekarno juga bersedia mendukung pasal lainnya yang masih mengganjal. Ditambahkannya juga dirinya berjanji akan menggunakan seluruh pengaruhnya untuk menggolkan perundingan Linggajati agar diterima rakyat.<sup>81</sup> Setelah itu pertemuan dianggap selesai.

Ketika jam 21.00 Sjahrir menerima laporan tersebut dari Amir Sjarifudin dan AK.Gani, dirinya amat kecewa dan menyesalkan mengapa Soekarno menyetujui konsep persetujuan Linggajati begitu cepat, padahal masih banyak pasal lain yang belum disetujui bersama oleh kedua delegasi.

Yang paling berbicara keras akibat tipu muslihat Belanda ini adalah Mohammad Roem. Secara agresif dinyatakan keberatannya kepada Schermerhorn atas siasat Komisi Jenderal untuk memperoleh persetujuan pasal-pasal yang masih mengganjal dari Soekarno-Hatta. Roem juga menyatakan bahwa Soekarno tidak punya hak untuk menyatakan persetujuannya pada konsep Belanda itu dan harus meminta persetujuan Sjahrir lebih dahulu selaku ketua delegasi.<sup>82</sup> Roem merasa pantas melakukan hal tersebut karena kedudukannya dalam kabinet maupun atas dukungan partainya yaitu Masyumi.

---

<sup>79</sup>. Schermerhorn; *op. cit.*, hal. 116

<sup>80</sup>. Ali Budiardjo; *op. cit.*, hal. 19

<sup>81</sup>. Schermerhorn; *op. cit.*, hal. 116

<sup>82</sup>. Van der Wal; *op. cit.*, jilid V.. hal. 219

Bagi delegasi Indonesia, meskipun amat tertekan, dalam perundingan selanjutnya pada jam 22.00 di penginapan Lord Killearn, akhirnya mau menerima hasil keputusan Linggajati tersebut.

Lord Killearn menyatakan kegembiraannya perundingan telah mencapai titik klimaks keberhasilan. Schermerhorn memberi sambutan dengan penampilannya yang bergairah sedangkan Sjahrir lesu tanpa menyebutkan kalimat-kalimat yang berarti. Perdebatan kemudian, ternyata tidak dapat membatalkan persetujuan di Kuningan antara Soekarno dan delegasi Belanda yang dianggap oleh delegasi Belanda sebagai keputusan kekuasaan tertinggi negara.

Untuk mendapat penjelasan resmi langsung, delegasi Indonesia melakukan rapat tertutup dengan Soekarno di Kuningan. Soekarno yang tampaknya santai, dalam perundingan intern yang berlangsung sampai menjelang pagi, berusaha menjelaskan apa yang menjadi dasar keputusannya. Rupanya apapun kebijakannya, akhirnya Sjahrir tunduk pada keputusan Presiden Soekarno.<sup>83</sup>

Untuk memuaskan delegasi Indonesia yang setengah kecewa, tanggal 13 November 1946 (pagi hari) atau keesokan harinya, diadakan perundingan lanjutan atau perundingan ke-8 di Linggajati. Perundingan diikuti oleh anggota delegasi yang sama, kecuali Van Mook yang harus ke Jakarta. Pimpinan sidang, adalah Sutan Sjahrir.

Dalam kesempatan ini, Schermerhorn menjelaskan hal-hal yang terjadi saat bertemu Soekarno-Hatta di Kuningan semalam, terutama menyangkut pasal 2. Tujuan sidang perundingan ke-8 ini adalah membahas pasal-pasal yang masih menggantung. Mengenai pasal 7 dan 9 akhirnya pihak Indonesia menerima konsep Belanda. Tapi untuk merubah beberapa ayat pada pasal 16, sidang berjalan ulet kembali yang akhirnya pihak Belanda mau menerima keputusan pihak Indonesia.<sup>84</sup> Lengkapnya, mengenai pasal 16 ayat 1, pihak Belanda menyetujui redaksi yang diusulkan oleh Sjahrir. Namun karena ayat 1 sudah mencakup semua persoalan maka disetujui untuk menghapus ayat 2 dan ayat 3 pasal 16 ini, sebagaimana dirumuskan oleh pihak Belanda sehingga redaksi pasal yang telah menimbulkan begitu banyak perdebatan berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Ali Budiardjo; *op. cit.*, hal. 19.

<sup>84</sup> *Ibid.*



"Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerdja seboleh-bolehnya sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk susunan menurut hukum Negara, yang dikehendaki itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan supaya dengan segera dilakukan aturan undang-undang, akan supaya sementara menantikan berwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu"<sup>85</sup>

Pasal 16 (lama) ini dalam hasil persetujuan menjadi pasal 15 (baru). Demikian pula pasal 17 (lama) atau pasal 16 (baru) disepakati tidak berubah. Dan pasal penutup, redaksi dan isinya juga tidak berubah.<sup>86</sup>

Setelah itu perundingan ditutup, sehingga dengan demikian secara resmi perundingan di Linggajati telah berakhir. Semua pasal diterima kedua pihak delegasi. Saat itu juga di keluarkan pengumuman pers yang disampaikan kepada wartawan dalam dan luar negeri. Isinya:

"Dalam perundingan di Linggajati antara R.I dan Belanda telah dicapai kata sepakat".<sup>87</sup>

Dapat dikatakan perundingan politik di Linggajati sudah mencapai hasil yang diharapkan yaitu menyepakati bersama sebuah konsep dasar dari persetujuan Linggajati.

Semua rombongan segera berkemas. Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta dengan kereta api. Dalam kesempatan ini Soekarno berpakaian dinas militer dengan pangkat Jendral.<sup>88</sup> Rombongan delegasi Indonesia dengan kendaraan darat (mobil). Delegasi Belanda kembali menggunakan pesawat Catalina, dan seperti delegasi Indonesia, Lord Killearn menggunakan jalan darat dengan mobil.

Pada tanggal 15 November 1946 dilaksanakan perundingan politik kesembilan di istana Rijswijk Jakarta, Sjahrir berhasil menambah satu pasal tambahan mengenai *arbitrage* (pasal 17 baru), sehingga konsep persetujuan kembali lagi menjadi 17 pasal. Isi dari pasal ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Lihat pasal 6 konsep yang diparaf.

<sup>87</sup> Berita Antara ; 13 November 1946.

<sup>88</sup> Lihat film berita Linggajati. RVD November 1946.

1. Untuk kerja-bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri daripada delegasi-delegasi yang ditunjukkan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnya, dengan sebuah sekretariat bersama.
2. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, maka menyerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, yang diangkat dengan semufakat antara dua pihak delegasi itu atau, jika tidak berhasil semufakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.<sup>89</sup>

Pada perundingan politik kesepuluh bertempat di Pegangsaan Timur 56 tanggal 15 November 1946 sore hari, kedua delegasi sepakat membubuhi parafnya pada naskah Persetujuan Linggajati.

Perundingan politik kesebelas, diadakan pada tanggal 16 November 1946 pukul 8.00 pagi, bertempat di kantor Komisi Jenderal. Kedua delegasi membubuhi parafnya pada terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Terjemahan bahasa Inggris dibuat oleh van Mook. Sedangkan bahasa Indonesianya dibuat oleh H. Agus Salim<sup>90</sup>.

Pihak Sekutu di Jakarta amat bergembira mendengar telah dicapainya persetujuan Linggajati tersebut. Kebahagiaan sekutu tersebut muncul karena pasukan Inggris sesuai dengan rencana telah siap akan meninggalkan Indonesia. Untuk ini, pada tanggal 27 November 1946 Perdana Menteri Sjahrir mengadakan resepsi perpisahan dengan pasukan Inggris<sup>91</sup>.

Ada bagian dari kesepakatan untuk menerima Linggajati yang belum terlaksana penuh di dalam negeri. Khususnya apa yang dihasilkan baru terbatas pada pengertian delegasi Indonesia dan Soekarno-Hatta saja. Meskipun hal ini telah disampaikan dalam sidang kabinet, banyak anggota yang masih bingung.

---

<sup>89</sup>. Lihat pasal 17 konsep yang diparaf.

<sup>90</sup>. Ali Budiardjo; *op. cit.*, hal. 21

<sup>91</sup>. S.K Merdeka, *Soeara Rakjat Repoeblik Indonesia*. 27 November 1946

Oleh karena itu, pada tanggal 21 November 1946, diadakan sidang kabinet lengkap yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dengan mengambil tempat juga di Linggajati.<sup>92</sup> Dalam sidang selama 3 jam tersebut, setelah dijelaskan satu demi satu, maka 17 pasal persetujuan Linggajati akhirnya diterima oleh kabinet RI seluruhnya.<sup>93</sup>

#### 4.4 Pelaksanaan Ratifikasi oleh KNIP dan Parlemen Belanda

Seperti sudah diperkirakan Perdana Menteri Sjahrir didukung penuh Soekarno-Hatta untuk menyelesaikan perundingan Indonesia-Belanda guna mencapai persetujuan Linggajati. Meskipun ada sejumlah partai politik yang mendukung persetujuan Linggajati, tapi sebagian besar oposisi pemerintah menentangnya. Yang mendukung hanya Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, PKI (Partai Komunis Indonesia), Pesindo, Partai Kristen, Partai Katolik, BTI (Barisan Tani Indonesia), SOBSI (Sarekat Organisasi Buruh Sosialis Indonesia), dan PRP (Partai Rakyat Pasundan).<sup>94</sup>

Khususnya partai besar seperti PNI dan Masjumi menolak persetujuan itu. Kalau PNI resmi menolak tanggal 28 November 1946, Masjumi menolak secara resmi pada tanggal 4 Desember 1946. Kekuatan politik yang menentang Linggajati ini lalu mendirikan kelompok oposisi bernama "Benteng Republik Indonesia". Benteng Republik Indonesia didukung kekuatan massa lainnya seperti. BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia), LRDR (Laskar Rakyat Djawa Barat), Partai Wanita Rakyat, AKOMA (Angkatan Komunis Muda), Partai Rakyat, Barisan Banteng dan KRIS.<sup>95</sup>

Buat anggota delegasi Indonesia yang berasal dari Masjumi yaitu Mohamad Roem maupun dari PNI, yaitu Susanto Tirtoprodjo dan AK. Gani, keadaannya menjadi serba salah karena diserang terus menerus oleh anggota partainya sendiri.

Rupanya golongan oposisi sudah bersiap akan menggagalkan Linggajati dalam sidang pleno KNIP kelima di Malang yang berlangsung dari 25 Februari 1947 - 5 Maret 1947. Peserta sidang pleno yang berlangsung pada bekas gedung

<sup>92</sup>. SK Merdeka Suara Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 November 1946. *Persidangan kabinet*.

<sup>93</sup>. SK Merdeka Suara Rakyat Republik Indonesia tanggal 26 November 1946. *Sidang kabinet menerima rencana perjanjian*.

<sup>94</sup>. *Ibid.*

<sup>95</sup>. *Ibid.*

Concordia Malang itu cukup banyak, termasuk dihadiri wartawan dalam negeri dan asing.<sup>96</sup>

Untuk mendesak agar parlemen Indonesia mau menerima persetujuan Linggajati, tanggal 29 Desember 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6, 1946 yang isinya tentang penyempurnaan susunan KNIP, berbentuk penambah jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang.<sup>97</sup> Tentu saja hal ini mendatangkan protes dari partai-partai besar yang menganggap pemerintah telah membentuk hukum (*wetgevend*) dan tidak sah. Kemudian para anggota KNIP memunculkan RUU (Rancangan Undang-undang) pembatalan PP No.6 tahun 1946 itu.<sup>98</sup> Ternyata Soekarno bereaksi keras. Untuk membela diri Sukarno berpidato dimana antara lain dikatakannya: “Menjadi tugas dari Presiden untuk memilih dan menetapkan anggota KNIP karena presiden merupakan respresentasi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>99</sup> Demikian pula BP KNIP dengan ketuanya Mr Asaat juga bereaksi, tapi rupanya tidak berani mengeluarkan pernyataan keras dan menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan yang akan diambil kepada sidang pleno KNIP.

Pada sidang paripurna (pleno) KNIP di Malang tersebut, Hatta yang mewakili Sukarno, berpidato dengan sangat bersemangat dan bersedia mempertaruhkan jabatannya untuk meraih suara terbanyak demi dapat diratifikasinya persetujuan Linggajati secara bulat oleh sidang KNIP.<sup>100</sup> Ternyata peserta sidang mau menurut pendapat Hatta. Tanggal 28 Februari 1947 muncul keputusan KNIP untuk menerima baik Peraturan Pemerintah No. 6, dan memberikan kepercayaan kepada kebijaksanaan pemerintah guna menyetujui penandatanganan Persetujuan Linggajati.<sup>101</sup> Dengan perkataan lain “Linggajati telah diterima KNIP”.

Di Belanda naskah Linggajati tidak dapat diterima parlemennya begitu saja dan secara bulat seperti di Indonesia. Dalam perundingan yang terjadi khususnya

---

<sup>96</sup> Parada Harahap; *Saat Bersejarah*; Jakarta: Penerbit Gapura N.V, 1951, hal 5

<sup>97</sup> Deliar Noer & Akbarsyah; *K.N.I.P Parlemen Indonesia 145-1950*; Jakarta: Yayasan Risalah, 2005, hal 95-96.

<sup>98</sup> *Ibid*, Hal 105.

<sup>99</sup> Abu Hanifah; *Tales of a Revolution*, Sydney Australia : Angus & Robertson P.T.Y Ltd, 1972,hal 207.

<sup>100</sup> Saat itu Soekarno berhalangan karena Ibu Fatmawati sakit mendadak. Hatta menantang kalau sampai sidang menolak ratifikasi, silahkan mencari Presiden dan wakilnya yang baru.

<sup>101</sup> Deliar Noer & Akbarsyah; *op.cit*, hal 120

di dalam Majelis Rendah Parlemen Belanda, naskah yang telah diparaf di Jakarta tersebut tidak dapat diterima. Komisi Jenderal segera mengalami perlawanan politik dari Parlemen Belanda, di mana kekuatan anti Linggajati Belanda mulai bereaksi keras dan tidak mungkin diredam seperti di Indonesia.

Ketika Komisi Jenderal tiba kembali di Belanda pada pertengahan November 1946, tanggal 28 November 1947 mereka menjelaskan soal perundingan dan persetujuan Linggajati kepada Dewan Menteri Belanda. Menyambung hal itu, pada tanggal 10 Desember 1946, Menteri Seberang Lautan Jonkman sebagai wakil pemerintah, memberi penjelasan tentang Linggajati kepada Parlemen Belanda. Proses kemudian yaitu rapat-rapat dalam parlemen Belanda ternyata penuh perdebatan sengit yang akhirnya terkesan menolak persetujuan Linggajati yang telah diparaf oleh kedua delegasi Indonesia dan Belanda. Parlemen bahkan sempat mengeluarkan resolusi, yang membuat kedudukan Komisi Jenderal menjadi lemah.

Berdasarkan keadaan ini tanggal 11 Desember 1946, pihak Belanda mengeluarkan *komunike* bahwa Pemerintah Belanda memandang persetujuan Linggajati hanya sebagai kebijakan belaka. Pemerintah hanya terikat pada persetujuan ini selama persetujuan tidak menyimpang dari apa yang diterangkan oleh Pemerintah Belanda dan diterima rakyat. Pendapat yang muncul kemudian, Linggajati sudah diberi tafsiran sendiri oleh pemerintah Belanda dengan tambahan keterangan-keterangannya sendiri. Keterangan ini dianggap menyatu dengan naskah Linggajati yang telah diparaf. Selanjutnya kepada pihak pemerintah Republik Indonesia diminta menerima tafsiran tersebut.

Kebijaksanaan pemerintah Belanda berkaitan persetujuan Linggajati yang di interpretasi sepihak itu kemudian dikenal sebagai *Aangeklede Linggajati* (Linggajati disandangi) atau Linggajati yang diberi baju.<sup>102</sup>

Secara lengkap, maksudnya pemberian baju, naskah Linggajati yang telah diparaf Indonesia-Belanda tanggal 15 November 1946, selain ditambahkan berbagai keterangan dan penjelasan Komisi Jenderal kepada Dewan Menteri Belanda pada tanggal 28 November 1947 juga keterangan Menteri Seberang Lautan Jonkman pada tanggal 10 dan 19 Desember 1946 di depan Parlemen.

---

<sup>102</sup>. Mohamad Roem, *Diplomasi ujung tombak perjuangan RI*, ; Jakarta : Gramedia, 1969, hal 74

Inilah keputusan terakhir pihak Belanda yang muncul sebelum Komisi Jenderal kembali ke Indonesia. Jelas ini merupakan keberhasilan intervensi kelompok (fraksi) partai Katolik (KVP) yang kuat dalam parlemen yang dipimpin Prof. Romme. Selain itu ada indikasi KVP bekerja sama dengan kelompok partai buruh (PvDA) yang dipimpin van der Goes van Naters.

Romme sebagai tokoh yang berpengaruh dan menentukan politik Belanda, bersama van der Goes van Naters, pada tanggal 19 Desember 1946 mengeluarkan mosi dalam rangka pencerahan 17 pasal Linggajati menurut versi Belanda. Kelompok Romme juga berhasil mengusulkan nama-nama Profesor Posthuma dan Prof Verzijl untuk menjadi anggota baru Komisi Jenderal, tapi rupanya ini belakangan batal.

Bagi Komisi Jenderal yang dipimpin Schermerhorn bukan berarti bisa ditundukkan dengan kebijakan partai Katolik itu. Sebagaimana dikabarkan oleh Koran "*Het Algemeen Handelsblad*", yang mengutip dari "*Het Binnenhof*" yaitu salah satu corong partai Katolik Belanda, mereka (KVP) nyatanya amat kecewa pada Komisi Jenderal. Dikatakan antara lain:

"Komisi Jenderal telah melakukan berbagai-bagai hal dengan tidak meminta pengesahan dari kabinet di Den Haag".<sup>103</sup>

Bersebrangan dengan partai Katolik dan PvDA, Partai Komunis Belanda merasa kurang puas terhadap hasil perundingan Linggajati. Dalam sebuah kongresnya, anggota *Tweede Kamer* Belanda dari Partai Komunis Belanda, Paul de Groot berkata:

"Sikap Partai Komunis Belanda adalah, persetujuan itu (Linggajati) bukanlah pemecahan soal. Masih harus terus diperjuangkan kemerdekaan dalam lapangan politik luar negeri dan politik ekonomi Indonesia dan tentang penarikan kembali tentara Belanda".<sup>104</sup>

#### 4.5 Naskah Linggajati yang Disandangi Ditandatangani 25 Maret 1947

Waktu Komisi Jenderal kembali lagi ke Indonesia tanggal 9 Januari 1947, perundingan sudah tidak secerah saat mereka meninggalkan Indonesia setelah

---

<sup>103</sup>. SK Merdeka Suara Rakyat Republik Indonesia 23 November 1947. *Komisi Jenderal bertindak sendiri*.

<sup>104</sup>. SK Merdeka Suara Rakyat Republik Indonesia 29 November 1947. *Persetujuan Sekarang Bukan Pemecahan Soal*.

permarafan. Keadaannya sudah sangat buruk, di mana perundingan penuh perdebatan-perdebatan yang tidak perlu sehingga tersendat-sendat, dan nyaris gagal ditandatangani. Pihak Indonesia menganggap naskah Linggajati yang ditambah-tambah tersebut tidak murni lagi karena sudah terdapat interpretasi yang berbeda jauh dibandingkan saat di paraf.

Amerika dan Inggris yang memperhatikan jalannya perundingan Indonesia-Belanda, menjadi risau dan khawatir. Sebagai kekuatan internasional yang eksis pasca Perang Dunia ke II, mereka mulai ikut campur. Melihat kesungguhan pemerintah RI untuk mencapai persetujuan Linggajati dalam sidang KNIP, memunculkan simpati dan *goodwill* di kalangan pers luar negeri dan sejumlah pemerintahan asing. Sebaliknya Belanda yang membahas naskah secara bertele-tele karena memperhitungkan untung rugi, banyak dikritik dunia Internasional.<sup>105</sup>

Sebagaimana diketahui meskipun pada tanggal 14 Oktober 1946 telah dicapai persetujuan gencatan senjata, nyatanya militer kedua belah pihak masih terus melakukan saling tembak menembak. Schermerhorn menganggap hal ini serius di mana tidak mungkin diadakan penanda tangan kalau masih terjadi pelanggaran-pelanggaran militer antara kedua pihak. Sementara dengan segala tipu muslihat, Belanda secara terus menerus mendatangkan pasukannya ke Indonesia. Untuk ini dengan leluasa mereka mengadakan operasi militernya di daerah non Republik.<sup>106</sup>

Sebagai realisasi hasil Konferensi Denpasar pada tanggal 24 Desember 1946 berdirilah Negara Indonesia Timur, yang dalam kesempatan itu telah diangkat Presiden NIT, Sukawati dan Perdana Menteriya Nadjamudin Daeng Malewa. Reaksinya di Sulawesi terutama oleh golongan Republik amat menentang berdirinya NIT itu dan melakukan perlawanan bersenjata. Oleh karena itu sejak tanggal 7 Desember 1946 sampai 25 Januari 1947 di Sulawesi Selatan diadakan gerakan penumpasan dan pembersihan terhadap orang-orang Republik. Termasuk di antaranya peristiwa yang terkenal dengan pembantaian 40.000 orang di

---

<sup>105</sup>. SK Merdeka Suara Rakyat Republik Indonesia 21 November 1947. *Reaksi Amerika tentang dasar-dasar persetujuan*. Lihat juga SK Suluh Rakyat 21 September 1946, *SK Times tentang Indonesia*.

<sup>106</sup>. S.K Suluh Rakyat 27 Desember 1946, *Penangkapan di Makassar*

Sulawesi Selatan oleh Kapten Raymond Westerling, yang berlangsung pada bulan Desember 1946.<sup>107</sup> Peristiwa ini juga merisaukan Komisi Jenderal.

Kekacauan yang dilakukan oleh tentara Belanda, juga terjadi di daerah Republik. Seperti di Bogor pada tanggal 18 Desember 1946. Tanggal 1 Januari 1947 Palembang di bom Belanda. Pada tanggal 4 Januari 1947 Medan dan sekitarnya juga di bom Belanda, dan pada tanggal 24 Januari 1947, Krian dan Sidoarjo diserbu dan diduduki Belanda. Pertempuran di sini terjadi cukup hebat karena Belanda telah menggunakan senjata-senjata berat. Satu minggu sebelum penandatanganan Linggajati, atau tanggal 17 Maret 1947, Pasukan Belanda dengan kendaraan lapis bajanya bergerak ke Mojokerto dan menduduki kota itu dan daerah sekitarnya. Alasan serangan ini adalah perlindungan sumber air dan perbaikan bendungan.<sup>108</sup>

Di bidang ekonomi, Belanda mulai mengadakan blokade atas ekspor Indonesia. Misalnya pada tanggal 20 Februari 1947 terjadi apa yang dikenal sebagai “insiden Kapal *Martin Behrmann*”. Yaitu peristiwa dicekalnya kapal berbendera Amerika milik *Isbranden Line* yang kemudian di tarik Belanda ke Tanjung Priok. Sebenarnya kapal ini sedang berlabuh di pelabuhan Cirebon guna memuat komoditi Indonesia untuk di eskpor ke luar negeri. Dan karena dianggap melanggar, ditindak oleh pihak *Marine* (Angkatan laut) Belanda. Akibat ulah pemerintah Hindia Belanda ini, pada tanggal 5 Maret 1947, kepada pihak Belanda pemerintah Amerika melalui kedutaan besarnya di Den Haag memprotes insiden “*Martin Behrmann*” tersebut.<sup>109</sup>

Perundingan lanjutan Indonesia-Belanda baru dimulai kembali tanggal 22 Januari 1947. Dalam sidang ini ternyata memunculkan banyak sekali masalah. Kedua delegasi akhirnya sepakat membicarakan hal yang mendesak lebih dahulu misalnya soal masalah militer.

Pada tanggal 22 Januari 1947 itu juga, delegasi Belanda mengirim surat kepada delegasi Indonesia. Isinya meminta pendapat soal pidato Jonkman di parlemen Belanda tanggal 10 dan 19 Desember 1946. Surat jawaban Sjahrir tanggal 23 Januari 1947, berisi pertanyaan: “Apakah sebenarnya keberatan pihak

---

<sup>107</sup>. *Ibid.*

<sup>108</sup>. S.K Repoeblik, *Harian oemoem Indonesia* 24 Maret 1947, *Tentang Naskah Linggajati dan Peristiwa Mojokerto.*

<sup>109</sup>. S.K Soeloeh Ra'jat. 14 Maret 1947, *Perkara Behrman.*



Belanda untuk segera menandatangani perjanjian Linggajati” ? Jawaban kembali delegasi Belanda disampaikan dalam pertemuan tanggal 3 Februari 1947. Isinya terutama berusaha menjelaskan soal pidato Jonkman tersebut yang dianggap bagian yang menyatu dengan naskah Linggajati yang dibawa kembali ke Indonesia, termasuk pendirian pemerintah Belanda mengenai soal persetujuan Linggajati.<sup>110</sup>

Sjahrir lalu mengirim jawaban kembali pada tanggal 14 Februari 1947. Dalam surat delegasi Indonesia ini dilampirkan komunike pemerintah RI tertanggal 8 Pebruari 1947, yang menyebutkan: “Pendirian pemerintah RI tidak berubah terhadap perjanjian Linggajati”. Secara tegas dikatakan pula: “Dengan adanya tambahan keterangan-keterangan itu (pidato Jonkman dan keterangan pemerintah Belanda) yang merupakan pernyataan sepihak dari pemerintah Belanda, status persetujuan Linggajati menjadi tidak relevan”. Ditambahkannya lagi: “Menurut pendapat pihak R.I pernyataan sepihak Komisi Jenderal dan Menteri Jonkman soal Linggajati akan mengurangi arti dan makna persetujuan yang disepakati di Linggajati yang di paraf pada tanggal 15 November 1946 itu dan akan menimbulkan adanya salah paham mengenai semua pasal dalam persetujuan tersebut”.<sup>111</sup>

Dengan demikian terjadilah jalan buntu perundingan. Dalam surat Komisi Jenderal pada tanggal 2 Maret 1947 untuk menjawab surat Sjahrir terakhir itu, delegasi Belanda suaranya melunak. Kesimpulan mereka adalah tidak ada maksud sedikitpun dari pihak Belanda untuk memaksa pihak Indonesia. Tentu saja hal ini dijawab Sjahrir secara baik pula dalam suratnya tanggal 15 Maret 1947. Jawaban Sjahrir ini menjadi dasar laporan Komisi Jenderal kemudian kepada Menteri Seberang Lautan Jonkman pada tanggal 16 Maret 1947.<sup>112</sup>

Dalam rapat Dewan Menteri Belanda tanggal 17 Maret 1947, diputuskan pemerintah Belanda menyetujui dilaksanakannya penandatanganan naskah persetujuan Linggajati. Berarti ini merupakan sebuah langkah maju pemerintah Belanda. Pada tanggal 22 - 23 Maret 1947, kabinet RI melakukan sidang di Yogya. Keputusannya bisa menerima akan ditandatanganinya naskah Linggajati, namun tetap menggaris bawahi soal penyerangan Belanda ke Mojokerto dan hal

---

<sup>110</sup> Lihat S.K Soeloeh Ra'jat. 12 Maret 1947, *Soal tafsiran Linggadjadi*.

<sup>111</sup> Lihat S.K Soeloeh Ra'jat. 24 Maret 1947, *Keterangan Jonkman*

<sup>112</sup> *Ibid*.

itu tidak dapat dipisahkan dengan niat baik penandatanganan.<sup>113</sup> Pada tanggal 24 Maret 1947 surat persetujuan resmi dikirim delegasi Belanda kepada delegasi Indonesia yang isinya “pemerintah Belanda setuju untuk penandatanganan perjanjian Linggajati”.<sup>114</sup> Tapi ketika hari baik ini akan benar-benar datang, tiba-tiba De Boer salah seorang anggota Komisi Jenderal pada tanggal 22 Maret 1947 telah mengajukan surat untuk minta berhenti. Didalam sidang penandatanganan persetujuan tanggal 25 Maret 1947, De Boer memang sudah tidak hadir.<sup>115</sup>

Pada tanggal 25 Maret 1947 bertempat di istana Risjwijk (sekarang istana negara) persetujuan Linggajati ditandatangani. Acaranya sungguh meriah karena dihadiri dan direkam media secara lengkap. Dalam film yang dibuat, acaranya nampak sangat agung, seolah kedua pemerintahan akan segera melangkah menuju meja bundar. Selesai penandatanganan diadakan resepsi. Hadir berbagai tokoh Belanda dan Indonesia termasuk kaum federalis serta undangan perwakilan dari negara asing.

Dalam kesempatan tersebut berbicara pihak terkait seperti Sjahrir, Schermerhorn dan van Mook. Tapi yang paling indah menurut banyak orang adalah pidato Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pada alinea terakhir pidatonya berbunyi: *“Dunia penuh dengan pertentangan, penuh dengan bahaya perjuangan, dunia gelap. Di Indonesia kita menyalakan obor kecil, obor kemanusiaan, obor akal yang sehat, yang hendak menghilangkan suasana gelap, suasana pertentangan yang menjadi akibat dari pada, serta pula mengakibatkan perkosaan dan pembinasaan. Susana sesak gelap. Marilah kita pelihara obor ini supaya dapat menyala terus serta menjadi lebih terang. Mudah-mudahan akan ia merupakan permulaan terang diseluruh dunia”*.<sup>116</sup>

Demikianlah naskah persetujuan Linggajati telah di tanda-tangani dan merupakan dokumen penting karena merupakan dasar dari persetujuan selanjutnya dalam rangka dekolonisasi di Indonesia. Uraian dokumen naskah yang telah disetujui tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

Nampaknya dunia Internasional, ikut mensyukuri apa yang terjadi di Indoensia. Mendukung kemajuan yang terjadi ini, Inggris segera mengakui secara

---

<sup>113</sup>. S.K Repoeblik, Harian oemoem Indonesia 24 Maret 1947, *Tentang Naskah Linggajati dan Peristiwa Mojokerto*.

<sup>114</sup>. *Ibid*.

<sup>115</sup>. SK Soeloeh Ra'jat. 22 Maret 1947, *Sekitar Komisi Oemoem*.

<sup>116</sup>. S.K Merdeka, Soera Rakjat Repoeblik Indonesia. Tanggal 26 Maret 1947.

*de facto* Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 persetujuan Linggajati pada tanggal 31 Maret 1947, dan Amerika Serikat pada tanggal 17 April 1947.<sup>117</sup>

#### 4.6 Kebijakan Kabinet Beel dan Kendala yang Muncul

Berbagai tanggapan yang terjadi di negeri Belanda ternyata berwarna-warni. Ada kelompok yang dapat segera mendukung ada pula yang kecewa. Kelompok yang masih ragu-ragu pada masa depan hubungan Indonesia-Belanda ini terutama di pacu pada kepentingan politik dalam negeri Belanda sendiri.

Pemerintahan kabinet Beel yang di dukung kekuatan politik mayoritas di parlemen yang masih tetap berpikiran kolot dan kaku. Dalam proses selanjutnya, hambatan datang dari kelompok KVP ini. Seperti telah disebutkan LJM.Beel terpilih sebagai Perdana Menteri dan dilantik pada tanggal 3 Juli 1946. Tapi seperti jalannya pemilihan umum majelis rendah yang didukung partai-partai yang berlawanan secara seimbang sehingga kabinet merupakan pemerintah koalisi, maka KVP yang pada dasarnya anti Linggajati itu harus mau bekerja sama dengan partai besar lain, terutama PvdA. Namun demikian sebagai tokoh Katolik, Beel juga harus menerima dan mematuhi kebijakan KVP. Ini berarti harus menerima prinsip-prinsip idiologinya yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh ketua fraksi, Romme.

Dengan latar belakang sifatnya, pendidikan dan pengalaman kerja, terutama selama menjabat Perdana Menteri, Beel terkesan seorang pemimpin bermental birokrat yang kaku, yang selalu harus terkait pada peraturan dan perundang-undangan negara. Lebih lanjut, bergantung pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara pasti termasuk ia harus bisa menerima usul kelompok lain. Akhirnya Beel adalah Perdana Menteri yang nampaknya selalu penuh keraguan untuk bertindak.<sup>118</sup>

Kebijakan KVP sebelum pemilu 1946, mengenai soal Indonesia erat hubungannya dengan pidato Ratu Belanda Wilhelmina, tanggal 7 Desember 1942. Inti pidato ini sebenarnya adalah mengusahakan sedapat mungkin agar Hindia Belanda tetap bersatu dalam wadah Imperium kerajaan Belanda. Selain

---

<sup>117</sup>. Kementerian Penerangan R.I. *Lukisan Revolusi*. Hal 357

<sup>118</sup>. *Ibid*

itu hubungan antara negeri Belanda dan daerah seberang lautannya (termasuk Suriname dan Curacao) harus ditinjau dengan memperhatikan kesejahteraan seluruh negeri dan masing-masing bagiannya.<sup>119</sup>

Nampaknya dalam membina kekuatan politik partai Katolik, Romme lebih menonjol kekuasaannya ketimbang sang Perdana Menteri. Hal ini termasuk pada soal Indonesia. Dalam salah satu pidatonya Romme pernah berkata “untuk menyelamatkan Hindia harus dapat diberikan pengorbanan apapun bentuknya dan berapapun bobotnya”. Rupanya para anggota KVP tanpa banyak ribut mendukung hal tersebut.<sup>120</sup>

Setelah pembentukan kabinet koalisi, Beel banyak berdiskusi dengan tokoh PvdA. Diantaranya dengan Jonkman yang bertindak sebagai Menteri Seberang Lautannya. Gagasan yang kemudian timbul adalah memprioritaskan konferensi kerajaan, membentuk Komisi Jenderal dan meskipun dengan berat hati menerima usul 10 Februari 1946 dari van Mook, meskipun usul itu kurang berkenan dihatinya.

Untuk diulangi, tanggal 10 Februari 1946, van Mook mengusulkan :

1. Pembentukan suatu “Persekemakmuran Bersama” (*Gemenebest* atau *Commonwealth*) di Indonesia.
2. Akan diadakan kewarganegaraan Indonesia bagi siapa saja yang lahir di Indonesia.
3. Soal dalam negeri diurus oleh sebuah institusi *Commonwealth* yang merdeka. Sebuah badan representatif yang terdiri dari Bangsa Indonesia, akan dibentuk. Akan ada kabinet selaku badan ekecutif yang mampu bekerja sama secara harmonis dengan badan representatif itu. Pimpinan pemerintahan merupakan representasi dari mahkota Belanda.
4. Representasi mahkota Belanda harus memiliki kekuasaan agar dapat menjamin hak-hak asasi dasar, administrasi pemerintahan yang efisien serta manajemen keuangan.
5. Akan ada jaminan kebebasan beragama, pendidikan dan pengutaraan pendapat, kualitas hukum, perlindungan pribadi dan kepemilikan, perlindungan kaum minoritas serta perlindungan pada keadilan.

---

<sup>119</sup>. Lihat Jan Bank, op.,cit hal 260-266

<sup>120</sup>. *Ibid*.

6. Akan ada insitusi sentral bagi semua wilayah kerajaan.
7. Pemerintah Belanda akan mempromosikan keanggotaan Indonesia di PBB.<sup>121</sup>

Ketidaksenangan kaum anti Linggajati di Belanda bukan merupakan hal yang dibuat-buat sehingga memunculkan kebencian kepada van Mook. Dia segera dituduh sebagai penyebab golnya persetujuan Linggajati, karena berhasil mempengaruhi Komisi Jenderal sehingga perundingan Indonesia-Belanda tersebut bisa menjadi seperti sekarang. Bahkan ada ide lebih ekstrim lagi yaitu untuk mengganti Van Mook dengan Romme sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Orang-orang Katolik itu merasa Romme lebih tegas dan pasti bisa dimunculkan sehingga ada hal-hal baru yang bisa memuaskan banyak orang Belanda. Pertentangan ini juga memunculkan keputusan pendek van Mook untuk berhenti sebagaimana apa yang disampaikan kepada Lord Killeam.<sup>122</sup>

Berkaitan pada proses selanjutnya dari implementasi persetujuan Linggajati, dikaitkan dengan kebijakan kabinet Beel diatas, maka timbullah berbagai pertanyaan. Apakah Belanda bersedia mengikuti pendapat Indonesia yang tidak setuju pada Linggajati yang disandangi itu atau sebaliknya pihak Indonesialah yang justru mengikuti keinginan Belanda termasuk setuju pada pidato penjelasan Jonkman pada tanggal 10 dan 19 Desember 196 di muka parlemen Belanda itu ? Padahal sesuai persetujuan Linggajati pemerintahan Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia (maksudnya UNI) sudah harus selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949.<sup>123</sup> Waktu yang tersedia sejak tanggal 25 Maret 1947 dengan tanggal diatas kira-kira tidak sampai 2 tahun lagi.

Perundingan Indonesia-Belanda pasca penandatanganan Linggajati baru dimulai lagi pada tanggal 14 April 1947.<sup>124</sup> Hadir pihak Belanda, Komisi Jenderal ditambah van Mook, Koets, van Hoogestraten, Massen, Boon, Weisglass dan Samkalden. Dari Indonesia hadir delegasi Indonesia ditambah Leimena, Soedarsono dan Hamid Algadri (bukan Sultan Pontianank).<sup>125</sup> Tempat perundingan, istana Rijswijk.

---

<sup>121</sup>. Lihat bab III soal *Perundingan Indonesia-Belanda*.

<sup>122</sup>. Lihat Jan bank.*op., cit* hal 307-309.

<sup>123</sup>. Lihat pasal 12 Persetujuan Linggajati,

<sup>124</sup>. Setelah Sjahrir kembali dari lawatannya menghadiri Konperensi Inter Asia atas undangan Nehru tanggal 24, Maret-2 April 1947; Van der Wal; *op., ci., t jilid VIII.*, hal. 214-218.

<sup>125</sup>. Perlu diketahui menjelang pendaratanganan, de Boer sudah mengundurkan diri.

Beberapa hal yang dibicarakan antara lain soal kedudukan pemerintahan Hindia Belanda dan Republik Indonesia dalam masa peralihan. Seperti apa yang terjadi sebelum penandatanganan, hal yang menghambat adalah soal perwakilan di luar negeri dan tidak disetujuinya kemandirian dalam keikutsertaan RI dalam pertemuan-pertemuan internasional bukan sebagai utusan bersama Belanda.

Dalam perundingan ini pihak Belanda lebih menitikberatkan perhatiannya pada pembentukan Negara Indonesia Serikat dengan seluruh permasalahannya. Juga dibicarakan pasal 16 dari naskah yang ditandatangani yaitu soal pengurangan pasukan. Kedua pihak berbicara panjang lebar soal ini dan tendensius saling tuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Selain itu dengan Van Hoogestraten (direktur urusan ekonomi pemerintahan Hindia Belanda) AK.Gani melakukan pembicaraan masalah-masalah ekonomi.

Bagi Van Mook yang memiliki tugas dan tanggung jawab berat, mungkin yang penting adalah bagaimana pemerintahan peralihan (interim) itu diselenggarakan? Dia mengusulkan dalam notanya, untuk membentuk apa yang dikenal sebagai "Pemerintahan Federal Sementara (*Federal Interim Government*)" yang akan mengambil tugas pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Federal Sementara ini yang akan berperan sebelum berdirinya pemerintahan Negara Indonesia Serikat.

Menurut Van Mook, pemerintah peralihan akan terdiri dari Gubernur Jenderal, didampingi Dewan Federal yang terdiri dari wakil-wakil pemerintahan R.I, pemerintahanan N.I.T dan Borneo. Tugas pemerintahan interim adalah perencanaan penyesuaian pengelolaan pemerintahan Hindia Belanda lama dan Republik Indonesia dengan susunan pemerintahan yang baru, yaitu Negara Indonesia Serikat yang medeka dan berdaulat.<sup>126</sup> Kelihatannya perundingan ini tidak banyak membawa hasil apa-apa.

Karena masalah luar negeri nampaknya menjadi obsesi utama bagi pihak Indonesia, pada pertemuan selanjutnya, tanggal 16 April 1947, dalam perundingan yang di hadiri oleh orang yang sama, dimana Schermerhorn bertindak sebagai ketua.<sup>127</sup> Akhirnya, disepakati antara lain soal hubungan luar negeri Republik Indonesia dalam masa peralihan yang akan datang. Pada butir 1

---

<sup>126</sup>. Van der Wal; *Op., cit jilid VIII*; hal. 214-218.

<sup>127</sup>. Berlangsung di Pegangsaan Timur 56.

hasil perundingan disebut bahwa, hal-hal mengenai masalah luar negeri akan diputuskan bersama oleh delegasi Indonesia dan Belanda. Dalam hal ini mereka akan dibantu oleh Direktorat Timur Jauh Kementerian Luar Negeri Belanda.<sup>128</sup>

#### 4.7 Faktor Politik, Militer dan Ekonomi

Rupanya untuk lebih mengadakan pendekatan yang lebih realistis, pada tanggal 6 Mei 1947, Perdana Menteri Belanda Beel bersama Menteri Seberang Lautan Jonkman berkunjung ke Indonesia dan Sjahrir bersedia menemuinya. Selain ke Jakarta dikunjunginya pula daerah-daerah federal seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Bangka.

Kemudian, di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1947 diadakan pertemuan formal antara Komisi Jenderal dan Perdana Menteri Beel beserta rombongannya yang juga terdiri dari menteri-menteri kabinet Belanda. Pertemuan satu hari ini, berlangsung dalam 3 sesi (jam 10.30, 11.30 dan 15.00). Hadir dalam pertemuan ini, Beel, Jonkman, Schermerhorn, van Poll, Sanders, Idenburg, Albarda, Hirschfeld, Friederichy, E.Schuurman, H.Boon (sekretaris), Van Hoogstaten, dan Massen. Dan pada sesi terakhir ikut pula kaum militer, yaitu Spoor, Pinke Buurman van Vreeden serta J.Kist. Pimpinan rapat, selalu dipegang oleh van Mook.<sup>129</sup> Inilah sidang kabinet Belanda yang hampir lengkap yang dilakukan di Indonesia. Tujuan pertemuan antara lain untuk mendapat gambaran secara pasti keadaan atau situasi sebenarnya tentang administrasi kolonial Belanda saat itu dan guna memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi pada masa mendatang, khususnya soal politik dan ekonomi.

Sebelum itu, di Indonesia telah berlangsung pertemuan-pertemuan antara Komisi Jenderal dan pejabat tinggi Belanda yang bertugas di bidang ekonomi-keuangan ini secara estafet baik yang formal maupun tidak formal berlangsung selama beberapa hari. Sidang pleno nampaknya baru terjadi pada tanggal 22 Mei 1947 yang telah disebut di atas.

Secara garis besar, selama pertemuan kedua pihak mengemukakan pendapatnya masing-masing tentang berbagai hal yang dikhawatirkan akan terjadi kalau perundingan Indonesia-Belanda tidak mengalami kemajuan. Saat itu

---

<sup>128</sup>. Van der Wal; *op., cit jilid VIII*; hal. 277-278

<sup>129</sup>. *Ibid.*

telah disepakati penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar yang rencananya akan diadakan awal tahun 1949 sesuai persetujuan Linggajati pasal 12. Namun banyak yang ragu apakah bisa tercapai ?

Sementara, perkembangan keuangan Belanda di Indonesia diprediksi akan menjadi bertambah suram karena sejumlah besar alat produksi belum bisa berjalan, padahal dibutuhkan uang banyak untuk pembangunan dan pembiayaan militer. Akibatnya, atas desakan kaum anti Linggajati di Belanda yang sudah tidak sabar menunggu perubahan terjadi, pilihan jatuh pada tindakan militer, dengan tujuan lebih lanjut agar segera dapat dilakukan pembangunan ekonomi dan perdagangan. Namun masih ada pertimbangan lain. Kalau ditempuh jalan militer, beayanyapun tidak kecil. Penjelasan Menteri Albarda seorang pejabat penting di bidang keuangan Belanda yang ikut hadir, menggambarkan kalau sampai terjadi operasi militer di Jawa akan diperlukan anggaran tidak kecil, sekitar 300 juta *gulden*.<sup>130</sup>

Meskipun berat memutuskannya, akhirnya rapat tetap berkesimpulan bahwa tindakan militer adalah salah satu alternatif yang harus dipikirkan. Dengan perkataan lain mau tidak mau, sejak akhir bulan Mei 1947 Komisi Jenderal mulai memikirkan soal perang. Jenderal Spoor sebagai pelaku dan penanggung jawab militer, bersiap dibidang profesinya itu termasuk mendatangkan banyak pasukan baru dari Belanda dengan persenjataan yang modern.

Pada acara rapat tanggal 16 Mei 1947, yang maksudnya juga sebagai laporan tengah bulan kabinet, sempat dipaparkan *Analisa dan Perspektif* masalah Indonesia, isinya, mengenai keadaan dibidang ekonom, politik, bidang matriel dan bidang morel. Juga dimunculkan “pedoman jangka pendek” pemerintah soal Indonesia, antara lain alternatif tindakan yang perlu diambil segera berupa tindakan militer terhadap Jawa Barat yang kaya perkebunan itu.<sup>131</sup>

Rencana tindakan militer ini akan disesuaikan dengan kemampuan Belanda, dan akan dibicarakan lebih dahulu dengan Amerika dan Inggris yang kemungkinan besar akan memprotes dan memajukan masalah Indonesia ini dalam sidang PBB. Selain itu akan diajukan usulan *ultimatif* bila RI menolak pedoman jangka pendek diatas. Dalam hal ini Komisi Jenderal akan memberi

---

<sup>130</sup>. Schermerhorn; *op., cit*, hal 530.

<sup>131</sup>. *Ibid*



saran-saran kepada pemerintahnya untuk segera membatalkan perundingan dan mengambil jalan lain sesuai kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya di Indonesia.

Apa bila hal itu terjadi, Letnan Gubernur Jenderal maupun Komisi Jenderal dapat lebih mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai kedudukannya, apapun resikonya, termasuk jika pemerintah memutuskan memilih salah satu alternatif yang telah disebutkan.<sup>132</sup>

Tanggal 27 Mei 1947, sebelum berangkat ke Belanda, Komisi Jenderal mengirim nota kepada delegasi Indonesia. Isinya merujuk pasal-pasal persetujuan Linggajati dikaitkan *Analisa* dan *Perspektif* diatas. Dalam nota tersebut diuraikan secara panjang lebar segala alasan diadakannya pertemuan Komisi Jenderal dan para pejabat pemerintah Belanda pada tanggal 22 Mei 1947, termasuk menjelaskan masalah politik, militer, ekonomi dan keuangan pemerintah Hindia Belanda saat ini. Untuk pertama kali dalam lampiran III nota mereka, disebut-sebut perihal kerja sama militer dan pelaksanaan pasal 16 persetujuan Linggajati, disitu antara lain tercantum disebutkan istilah *Gendarmerie*.

Secara resmi nota itu berisi :

1. Membentuk bersama suatu Pemerintah Peralihan (interim) ;
2. Mengeluarkan uang bersama, dan mendirikan lembaga *deviezen* (devisa) bersama.
3. Republik supaya mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah pendudukan Belanda
4. Menjelenggarakan bersama ketertiban dan keamanan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah Republik yang memerlukan bantuan militer Belanda (*gendarmerie* bersama);
5. Menjelenggarakan penilikan bersama atas import dan export.<sup>133</sup>

Pemerintah R.I segera bereaksi untuk menjawab nota ini. Seperti biasa Sjahrir berangkat ke Yogya lebih dahulu untuk berkonsultasi dengan Presiden dan parlemen. Dalam komunike yang disampaikan pada wartawan Merdeka,

---

<sup>132</sup>. *Ibid*, hal. 905-919.

<sup>133</sup>. Kementerian Penerangan R.I. *op., cit.* hal. 358

pada tanggal 5 Juni 1947 Perdana Menteri Sutan Sjahrir lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

“Tentang hal nota Belanda ini sebenarnya tidak *definitief*. Usul kita yang mengenai soal tersebut lebih tegas dari pada nota yang disampaikan oleh Komisi Jenderal. Kita menghendaki satu Pemerintahan Nasional yang meliputi seluruh Indonesia, hingga jembatan yang menghubungkan tingkatan (fase) sekarang dengan tahun 1949 mudah dapat dilalui. Pertanyaan yang lebih penting lagi ialah, bagaimana kedudukan pemerintahan sementara itu, di mana kedudukan Gubernur Jenderal? Sampai sekarang Gubernur Jenderal memiliki semua fungsi kekuasaan *executief*. Kita menghendaki sebuah pemerintahan yang benar-benar merupakan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan *executief* sepenuhnya seperti umumnya sebuah pemerintahan. Kekuasaan dari Gubernur Jenderal perlu diletakkan dengan tegas. Kita berharap bahwa Gubernur Jenderal akan selalu tersangkut dalam menjalankan kekuasaan *executief*, tapi mungkin juga terjadi keadaan ia bisa tampil kemuka”. Sjahrir berpendapat bahwa kemungkinan untuk menjusun suatu pemerintahan yang sedemikian, banyak sekali dan antara lain ia mengingatkan adanya satu dewan *executief* (*Executief Council*) seperti di India”.<sup>134</sup>

Saling mengirim nota ini ternyata berlanjut terus. Sebagai jawaban tanggal 20 Juni 1947 Sjahrir membalas secara pendek, yang dilampirkannya pidato radionya tanggal 19 Juni 1947. Jawaban Sjahrir kali ini terlihat sangat *kompromistis* dimana secara umum dua soal penting dapat diterima Indonesia. Pertama soal pemerintahan peralihan (*interim*) dimana wakil mahkota Belanda akan diakui secara *de jure* dan pemerintahan sementara ini akan dilebur dalam negara R.I.S yang berdaulat. Yang kedua soal badan-badan federal.<sup>135</sup>

Surat nota jawaban Komisi Jenderal selanjutnya pada tanggal 21 Juni 1947, isinya, mereka menyatakan merasa gembira atas jawaban positif Sjahrir itu, hanya beberapa pertanyaan muncul khususnya soal badan federal yang disetujui R.I yang belum jelas bagi Belanda. Rupanya Sjahrir tidak mau menjawab langsung kecuali setelah berkonsultasi dengan Presiden Soekarno. Akibatnya

---

<sup>134</sup>. S.K Merdeka. Suara Rakyat Republik Indonesia 7 Juni 1947

<sup>135</sup>. Masalah badan federal rupanya sangat mengganggu pikiran Sjahrir.

kemajuan perundingan Indonesia-Belanda amat lambat dan bertele-tele ini ditambah kesukaran karena perkembangan dalam negeri yang memanas karena ulah kaum oposisi yang menentang kebijakannya. Sjahrir berniat mengunjungi Yogyakarta untuk memberikan penjelasan kepada Presiden dan parlemen.

Konsul Inggris di Jakarta Mac Kereth menganjurkan untuk menunda kunjungan ke Yogyakarta tersebut agar dapat lebih dahulu membalas nota Belanda terakhir pada tanggal 21 Juni 1947 dengan harapan Sjahrir bisa menambahkan konsesinya. Sjahrir setuju dan hanya mengutus Abdul Madjid salah seorang menterinya yang selalu terlibat dalam perundingan dengan Belanda, guna memberikan penjelasan di Yogya tentang hasil terahir perundingan Indonesia-Belanda.<sup>136</sup>

Sesuai janjinya Sjahrir membalas surat Belanda tanggal 21 Juni 1947, pada tanggal 23 Juni 1947. Jawaban Sjahrir, pada prinsipnya tidak keberatan soal terbentuknya badan federal sesuai yang disetujui Belanda, tapi mengenai "Direktorat Urusan Keamanan Dalam Negeri" yang antara lain menyebutkan adanya pasukan polisi istimewa (*Gendarmerie*) pada daerah yang diduduki Belanda menurut Sjahrir, agar tidak terjadi kesalah pahaman, sehingga harus dibicarakan lebih dahulu secara mendalam. Ternyata inilah hal penting yang mengganjal perundingan selanjutnya. Tiba-tiba, pada hari yang sama (tgl 23 Juni 1947) van Mook mengirim *aide memoire* bernada *ultimatif* yang dasarnya mengulangi tuntutan Belanda dalam suratnya tanggal 27 Mei 1947. Ini amat menyulitkan kedudukan Sjahrir, apalagi jawaban harus paling lambat diterima tanggal 27 Juni 1947.

#### **4.8 Keadaan dalam Negeri, Menjelang Agresi Militer Belanda Pertama**

Tanggal 24 Juni 1947, Sjahrir berangkat ke Yogya untuk memberi penjelasan tentang kemajuan perundingan Indonesia-Belanda. Setibanya di Yogya, kedaan politik sudah sangat keruh disana. Hampir semua kelompok politik menentang keras kebijakan Perdana Menteri Sjahrir selaku pimpinan pemerintahan yang berunding dengan Belanda. Abdul Madjid teman separtai yang diutusnya lebih dahulu, ternyata telah bertindak melawannya dan

---

<sup>136</sup>. Niat Sjahrir ke Yogyakarta sekalian untuk menjelaskan pidato radionya tanggal 19 Juni 1947 tentang pengakuan *de jure* wakil mahkota Belanda yang bisa disalahtafsirkan orang.

memberikan keterangan yang negatif kepada pihak lain. Partai besar PNI, Masyumi bahkan sayap kiri sendiri yang merupakan partai Sjahrir bersama Pesindo menentangnya dengan keras. Orang yang menjadi kawan seperjuangan sejak lama, yaitu Amir Sjarifudin ikut tidak setuju pada tindakannya.

Sjahrir tidak dapat berbuat lain. Sesuai dengan asas dan sopan santun demokrasi yang berlaku, tanggal 27 Juni 1947 Perdana menteri Sjahrir meletakkan jabatan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dengan berakhirnya kabinet Sjahrir ketiga, kepala pemerintahan dipegang langsung Soekarno sebelum dapat dipilihnya formatir untuk membentuk kabinet yang baru.

Tanggal 2 Juli 1947 Soekarno menunjuk Amir Sjarifudin, dr .AK Gani dan Setiadjud Soegondo bertindak sebagai formatir dalam membentuk kabinet Republik Indonesia yang baru. Kabinet kelima R.I dilantik pada tanggal 3 Juli 1947, dipimpin oleh Amir Sjarifudin sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dinamakan kabinet Amir Sjarifudin pertama. Mereka tidak membuat kebijakan baru dan menjalankan kebijakan yang lama termasuk melanjutkan perundingan dengan Belanda. Dasar perundingan Indonesia-Belanda selanjutnya tetap yaitu persetujuan Linggajati. Tapi situasi nasional sudah demikian buruknya sehingga ditambah kemunduran Sjahrir, Belanda menjadi ragu-ragu melakukan perundingan yang serius, dan siap untuk berperang. Walaupun campur tangan Amerika telah diupayakan untuk mencegah meluasnya konflik politik menjadi konflik militer, tgl 21 Juli 1947 Belanda melakukan aksi polisionil pertamanya yang di Indonesia dikenal sebagai "Agresi Militer Belanda yang Pertama".

Demikianlah meskipun pihak Belanda mengatakan saat melaksanakan agresinya bahwa Persetujuan Linggajati masih berlaku, namun persetujuan Linggajati yang mana ? Sejak muncul istilah Linggajati yang disandangi, maka timbul pendapat bahwa sesungguhnya ada dua linggajati. Pertama Linggajati yang disetujui dan diparaf bersama oleh delegasi Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 November 1946 dan Linggajati yang diberi interpretasi sendiri oleh Belanda dan ditambah keterangan pidato Menteri Seberang Lautan Jonkman dimuka parlemennya pada tanggal 10 dan 19 Desember 1946. Naskah ini dikenal sebagai "*Aangeklede Linggajati* " atau Linggajati yang disandangi.

## BAB 5

### KESIMPULAN

Perundingan Indonesia-Belanda yang berlangsung dari tanggal 22 November 1946 sampai 16 November 1946 dikenal sebagai Perundingan Linggajati. Perundingan yang menghasilkan Persetujuan Linggajati yang diparaf tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 itu penting dan menentukan. Kalau gagal akan muncul dampak yang kurang baik.

Sebelum perundingan, Perdana Menteri Sutan Sjahrir sebagai ketua delegasi Indonesia pernah memberitahukan delegasi Belanda, kalau perundingan gagal ia akan meletakkan jabatan. Profesor Ir. W. Schermerhorn selaku ketua delegasi Belanda juga menyatakan, kalau perundingan gagal ia kembali ke Negeri Belanda. Dengan perkataan lain perundingan Indonesia-Belanda pada akhir tahun 1946 ini kalau terhenti atau menemui jalan buntu, maka persetujuannya akan mengalami kegagalan.

Karena perundingan di Jakarta ternyata berjalan alot dan banyak soal yang mengganjal, pada perundingan informal tanggal 5 November 1946, atas kesepakatan kedua delegasi Indonesia-Belanda dan penengah Inggris Lord Killern, diusahakan untuk melibatkan Soekarno-Hatta bertempat di Linggajati Kuningan Jawa Barat.

Perundingan selanjutnya di Linggajati berlangsung mulai tanggal 11 November 1946 sampai dengan 13 November 1946. Kedua delegasi membahas konsep persetujuan yang dibuat delegasi Belanda dan diserahkan tanggal 3 November 1946. Hasilnya antara lain disetujui ditetapkannya dengan pasti status dan kedaulatan RI secara *de facto* atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatera. Selanjutnya pihak RI dan Belanda setuju akan dibentuknya Negara dengan sistim pemerintahan federal bernama Negara Indonesia Serikat (NIS). Mereka kemudian juga setuju dibentuknya perserikatan Indonesia-Belanda bernama UNI Indonesia-Belanda. Disetujui pula Negara Indonesia Serikat (NIS) yang akan dibentuk itu memiliki wilayah pada bekas Hindia Belanda, dan sebagaimana usul Sjahrir untuk menggantikan kata "*vrije staat*" (Negara merdeka) pada konsep Belanda dengan kata "*souvereigne staat*" (Negara berdaulat) pada naskah persetujuan yang disepakaati. Padahal istilah awalnya ditolak Belanda.

Perundingan Indonesia-Belanda yang menghasilkan persetujuan Linggajati sangat penting bagi bangsa Indonesia, paling sedikit ada lima hal, yaitu:

1. Persetujuan Linggajati merupakan kesepakatan internasional pertama yang dihasilkan oleh Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.
2. Persetujuan ini dilaksanakan hanya oleh delegasi RI dan delegasi Kerajaan Belanda saja tanpa campur-tangan pihak Inggris
3. Nampaknya Inggris berhasil mempengaruhi Belanda agar bersepakat dengan Indonesia guna penyelesaian dekolonisasi dengan cepat melalui perundingan.
4. Persetujuan Linggajati merupakan pemikiran dasar semua persetujuan yang kemudian dilaksanakan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, yang akhirnya berhasil menyelesaikan masalah dekolonisasi pada tahun 1949.
5. Persetujuan Linggajati bisa dicapai dengan tuntas karena keputusan yang diambil Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta dalam perundingan informal dengan delegasi Belanda yang di pimpin oleh Prof. Ir. W. Schermerhorn pada tanggal 12 November 1946 malam di Kuningan..

Rupanya pernyataan Presiden Soekarno dan wakil Presiden Hatta yang menyetujui konsep terakhir persetujuan Indonesia-Belanda dan berjanji akan mempertaruhkan jabatan, kekuasaan dan martabat mereka untuk menggolkan hasil perundingan Linggajati guna ratifikasi di sidang paripurna parlemen RI (KNIP), menggambarkan bahwa Soekarno-Hatta merupakan tokoh-tokoh Republik Indonesia, pendukung utama dalam perundingan Indonesia-Belanda di Linggajati, Kuningan pada bulan November 1946, sehingga pada akhirnya naskah Linggajati dapat disetujui dan diterima pihak Indonesia.

Nampaknya hal itu berkaitan dengan keputusan tentara Inggris untuk meninggalkan Jawa dan Sumatra paling lambat tanggal 30 November 1946. Padahal pihak tentara Belanda sejak minggu pertama Oktoberr 1946 sudah mengeluarkan pernyataan, kalau sampai tanggal 30 November 1946 belum tercapai kesepakatan politik, tentara Belanda akan menyerbu Yogyakarta..

Memang sejak awal tahun 1946 tentara Belanda dalam jumlah besar secara berangsur-angsur telah diizinkan Inggris memasuki luar Jawa dan Sumatra. Di samping itu masih banyak lagi yang menunggu di Irian Jaya, Malaka dan Australia. Itu artinya akan terjadi perang besar Indonesia-Belanda. Disadari oleh pihak pemerintah RI, bahwa secara fisik amat berat bagi TRI (kemudian menjadi

TNI) untuk melawan tentara Belanda. Dan kalau terjadi perang ini akan menelan korban yang tidak sedikit di pihak rakyat. Kemungkinan besar, oleh karena bayang-bayang perang yang tidak seimbang itulah yang mendorong Soekarno-Hatta mengambil keputusan penting di Kuningan untuk menerima naskah persetujuan. Sebaliknya kalau perundingan diplomasi Indonesia-Belanda bisa berakhir sukses, kedudukan RI menjadi lebih kuat, terutama karena campur tangannya kekuatan politik internasional dalam soal proses dekolonisasi di Indonesia.

Sejarah membuktikan, perjuangan diplomasi Indonesia merupakan ujung tombak penyelesaian dekolonisasi sekaligus menggambarkan bahwa Bangsa Indonesia yang bersatu mampu mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 hanya sekedar kenyataan politik bahwa pernyataan Kemerdekaan itu telah diakui dunia internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip Dokumen

- Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekingen 1945-1950. Deel I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
- Document on Australian Foreign Policy 1937-1949, Vol IV
- Dokumen perundingan Linggajati dari Arsip Nasional. Notulen 22 Oktober - 12 November 1945
- Dokumen Foreign Relation of the United States (The Far East).1945, 1946, 1947

### Koran Sezaman

- Berita Republik Indonesia, November 1945 - Februari 1947
- Surat kabar dan penerbitan cetak berkala (daftar terlampir).

### Buku

- Adisubrata, Y (koordinator penulis).(1980). *J.J Kasimo Hidup dan perjuangannya*, Jakarta : PT Gramedia.
- Adams, Cindy. (1966). *Bung Karno*. (Terjemahan), Jakarta: PT Gunung Agung.
- Abdullah, Taufik. (1978). *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: L.P3.E.S
- Abdullah, Taufik & A.C. Van Der Leeden. (1986). *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor.
- Anak Agung Gde Agung, Ide. (1995). *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*. Yogyakarta: Yay. Pustaka Nusantara, Sebelas Maret University Press.
- Ananta Toer, Pramoedya. (1999). *Kronik Revolusi Indonesia*, Jakarta: KPG
- Anderson, Ben. (1972). *Java in Time of Revolution*. Ithaca: Cornel University Press.
- Algadri, Hamid. (1993). *Prime Minister Sjahrir as Statesman and Diplomat*. Jakarta: LP3ES.
- Alisjahbana, St Takdir. (1952). *Symposion Tentang Kesulitan Zaman Peralihan Sekarang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anwar, Rosihan. (1980). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: PT Gramedia
- Anwar, Rosihan. (1995). *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*. Jakarta: Pusata Utama Grafiti.



- Bank Jan. (1999). *Katolik Di Massa Revolusi Indonesia* (terjemahan). Jakarta: Grasindo.
- Benda, Harry J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bogaarts, M.D. (1995). *Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945*, Nijmegen: Gerard Noodt Instituut.
- Boomgaard, Peter. (2004). *Anak Jajahan Belanda*. (Terj) Jakarta: KITLV.
- Burke, Peter. (2001). *Sejarah dan Teori Sosial*. (Terj), Jakarta: Yayasan Obor.
- Chaniago, J.R (pewawancara Arsip Nasional R.I.). (1981). *Diantara Hempasan dan Benturan Kennang-kenangan dr Halim 1945-1950*. Jakarta: ANRI.
- Cribb, Robert Bridson. (1990). *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 – 1949*. (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Diah, B.M. (1983). *Angkatan Baru '45*. Jakarta: PT Masa Merdeka.
- Dijk, Van. (1983). *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (2000). *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dahm, Bernhard. (1964). *Sukarno en de Strijd om Indonesie's Onafhankelijkheid*. Uitgevers te Mempel Nederlands: J.A. Boom en Zoon.
- Engelen O.E, Loebis, Aboe Bakar, Patiasina, F, Ciptoprawiro, Abdullah, Joedodibroto, Soejono, Oetarjo, Siregar, Idris. (1997). *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara*. Jakarta: U.I Press.
- Fredrick, William H. (1989). *Pandangan dan gejolak*. (Terjemahan). Jakarta: Gramedia.
- Gerbrandy, P.S. (1950). *Indonesia*. London: Huchinson & Co.
- Giebels, Lambert. (2001). *Soekarno*. (Terjemahan). Jakarta: Grasindo.
- Giebels, Lambert. (1996). *Beel van Vazal tot Onderkoning*. Den Haag: Sd Uitgevers.
- Groen P.M.H. (1991). *Marsroutes en Dwaalsporen*. The Hague: Historical Section of the Royal Netherlands Army.
- Goudoever W.A. (1946). *Malino Maakt Historie*. Batavia: Regeerings Voorlichtings Dients.
- Harahap, Parada. (1951). *Saat Bersejarah*. Jakarta: Penerbit Gapura N.V.

- Hering, Bob. (2002). *Soekarno. Founding Father of Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Hanifah, Aboe. (1972). *Tales of Revolution*. Sydney Australia: Angus & Robertson P.T.Y Ltd.
- Hanafiah, S.M., Djohan. Bahder, Surono. (1976). *125 tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976*. Jakarta: Panitia peringatan 125 tahun Dokter di Indonesia.
- Hatta, Mohammad. (1952). *Verspeide Geschriften*. Amsterdam: C.P.J van Der Peet & Penerbitan Balai Buku Indonesia.
- Hatta, Mohammad. (1982). *Memoar*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hatta, Mohammad. (1972). *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hatta, Mohammad (2002). *Kumpulan Pidato III*. Jakarta: Gunung Agung.
- Harjono, Anwar dan Hakiem, Lukman. (1997). *Disekitar Lahirnya Republik*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah.
- Ingelson, John. (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- I.N, Soebagijo. (1983). *Mr Sudjono mendarat dengan Pasukan Jepang di Banten tahun 1942*. Jakarta: Gunung Agung.
- I.N, Soebagijo. (1982). *Wilopo 70 th*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jacobs Hans/Roelands Jan. (1970). *Indisch ABC*. Amsterdam: NV Boekhandel Visser.
- Jong, L De. (1991). *Pendudukan Jepang di Indonesia*. (Terjemahan) Jakarta: Kesaint Blanc.
- Jong L De. (1979). *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld Oorlog*. London. Den Haag.
- Jonkman, J.A. (1977). *Nederland en Indonesie Beide Vrij*. Assen/Amsterdam: van Gorcum.
- Kadt, J.de. (1949). *De Indonesische Tragedy*. Amsterdam: van Dorschot.
- Kahin, George Mc.Turn. (1952). *Nasionalism and Revolution in Indonesi*. New York: Cornel University Press.
- Kusnodiprodjo, (1951). *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2 pemerintah RI 1945*. Jakarta: SK.Seno.

- Kertapati, Sidik. (2000). *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Pustaka Pena.
- Lapian, A.B dan Drooglever, P.J. (1992). *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Legge, J.D. (1993). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*. (Terjemahan) Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Legge, John D. (2001). *Sukarno Biografi Politik*. (Terjemahan) Jakarta: Sinar Harapan.
- Lemon M.C, (2003). *Philosophy of History*. London-Newyork: Routledge Taylor & Frabcis Group.
- Lloyd, Christopher. (1989). *The Structure of History*. Oxford U.K: Blackwell Publisher.
- Loebis, Aboe Bakar. (1992). *Kilas Balik Revolusi*. Jakarta: U.I Press.
- Loebis, Nina (editor). (2002). *Iwa Kusuma Sumantri, Sang Pejuang Dalam Gejolak Sejarah*. Bandung: Satya Historica.
- McMilands, Richard, (2005). *The British occupation of Indonesia* ; London: Routletge.
- Magenis, Alice and Conrad Appel, John. (1961). *A History of The World*, Newyork: American Book Company.
- Malik, Adam. (1950). *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Wijaya.
- Malaka, Tan. (2000). *Gerpolek*. Jakarta: Jendela.
- Malaka, Tan. (2000). *Dari Penjara ke Penjara*. Jakarta: Teplok Press.
- Mani, P.R.S. (1989). *Jejak Revolusi 1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mee, Charles. (1995). *Potsdam de Verloren Vrede*. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
- Mustoffa, Sumono. (1986). *Sukarni Dalam Kenangan Teman-temannya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mook, H.J Van. (1949). *Indonesie, Nederland en De Wereld*. Batavia: De Brug-Opbouw.
- Mun Cheong, Yong. (1982). *H.J.van Mook and Indonesian Independence*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Mrazek, Rudolf. (1994). *Sjahir Politics and Exile in Indonesia*, Ithaca NewYork: Cornel University Press.

- Mrazek, Rudolf. (1994). *Tan Malaka Semesta*. (Terjemahan), Jakarta: Biograf Publishing.
- Nasution, A.H. (1956). *TNI*. Jakarta: Yayasan Pustaka Militer.
- Nasution, A.H. (1982). *Memenuhi Panggilan Tugas* (buku I). Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*.(buku IV) Bandung: Angkasa.
- Nasution, A.H. (1955). *Tjataan Sekitar Politik Militer di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing CV.
- Noer Deliar. (1991). *Mohammad Hatta, Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Noer Deliar, (2005). *Komite Nasional Indonesia Pusat. Parlermen Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Risalah.
- Notosutanto, Nugroho, (1979). *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Oorthuys, Cas. (1947). *Een Staat in Wording*. Amsterdam-Antwerpen Nederland : Nederlads Press.
- Pringgodigdo, A.K. 1994. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Panitia Peringatn Sjahrir 90 th. (1999). *Guru Bangsa*. Jakrta: Pusat Dokumentas Politik Guntur 49.
- Poeze, Harry A. (1999). *Pergulatan menuju Republik*. Tan Malaka 1925-1945. (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Raliby, Osman. (1953). *Documenta Historica*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rasid Gadis. (1982). *Maria Ulfah Subadio Pembela kaumnya*. Jakarta: Bulan Bintang
- Reid, Antony J.S. (1996). *Revolusi Nasional Indonesia*. (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Roem, Mohamad. (1989). *Diplomasi : Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakrta: Gramedia.
- Roem, Mohamad. (1972). *Bunga Rampai dari sejarah I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Roem, Mohamad. (1977). *Bunga Rampai dari sejarah II*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ricklefs M.C, 1981, *Sejarah Indonesia Modern*. (Terjemahan), Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Ricklefs M.C. (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. (Terjemahan). Jakarta: Serambi.
- Rose, Mavis. (1991). *Biografi Politik Mohammad Hatta*. (Terjemahan) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sastroamidjojo, Ali. (1974). *Tonggak-tonggak di perjalananku*. Jakarta: PT Kinta.
- Sastrosatomo, Soedarpo. (2001). *Pertumbuhan melawan arus*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik guntur 49.
- Sastrosatomo, Subadio. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
- Saleh, R.H.A. (2000). *Mari Bung Rebut Kembali*. Jakarta: Pustaka SinarHarapan.
- Saleh, R.H.A. (1992). *Dari Jakarta kembali ke Jakarta*. Jakarta: Dinas museum Pemda DKI Jaya.
- Schermerhorn, Willem. (1970). *Het Dagboek* . Groningen: Wolter-Noordhoff.
- Schermerhorn, Willem. (1947). *Indonesie en Nederland's Roeping* . Amsterdam : NV de Arbeiderspers.
- Sjahrir, Sutan. (1990). *Renungan dan Perjuangan*. Jakarta: Jambatan – Dian Rakyat.
- ...  
Sjahrir, Sutan. (1999). *Perjuangan kita*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49.
- Sjahrir, Sutan. (2000). *Pikiran dan Perjuangan*. Jakarta: Jendela.
- Smit,C (1959). *Het Akkoord van Linggadjati*. Brussel-Amsterdam: Elsevier.
- Somers, Jan.A. (2005). *Nederlandsch Indie. Staatkundige ontwikkelingen binnen een koloniale relatie*. Utrecht : Welburg Pers.
- Sumarsono, Tatang. (1980). *Didik Kartasasmita, Pengabdian bagi Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sundhaussen, Ulf. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. (Terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Sudiro. (1972). *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus '45*, Jakarta: Yay.Idayu.
- Subardjo, Ahmad. (1972). *Lahirnya Republik Indonesia*. Jakarta: PT Kinta.

- Subardjo, Ahmad. (1978). *Kesadaran Nasional*. Jakarta : Gunung Agung.
- Soetanto, Himawan. (2006). *Yogyakarta Jenderal Spoor versus Jenderal Soedirman* ; Jakarta: Gramedia,
- Suwarno, Basuki. (2005). *Hubungan Indonesia-Belanda 1945-1950* Jilid I, II, III dan IV. Jakarta: Penerbitan DepLu.
- Swasono, Meutia Farida (penyunting), (1980). *Bung Hatta Pribadinya dalam kenangan*, Jakarta : Penerbit Sinar harapan – Universitas Indonesia.
- Tauchid, Moch. (1966). *Pahlawan Sjahrir*. Yogyakarta: Jajasan Sjahrir Djawa Tengah.
- Team penulis, (2008). *Pro memorie. Bijdragentot de Recgtgeschiedenis den Nederlanden*, Haarlem: Sticting OVR.
- The Reader's Digest. (1989). *Illustrated History of World War II*.
- Tjokropranolo. (1993). *Jenderal Soedirman*. Jakarta: CV H.Mas Agung.
- Thaib, Alizar. (1993). *19 September dan Angkatan Pemuda Indonesia (API)* Jakarta: Yayasan Padepokan Pancuran Mas Jakarta.
- Tilly, Charles. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House.
- Team penulisan Yayasan Kawedri. (1996). *Aku Ingat....* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Team redaksi S.M.T. (1998). *Jembatan Antar Generasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Oey Beng, To. (1991) *Sejarah kebijakan moneter Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Van Der Post, Laurens. 1997. *The Admiral's baby*. New York : William Morrow and Company Inc.
- Wertheim W.F. (1976). *Gelombang pasang Emansipasi*. (Terjemahan). Jakarta: Garba Budaya.
- Wolf, Charles Jr. (1848). *Indonesian Story*. New Yoork: The John Day Company.
- Zuhdi, Susanto. (1995). *Jakarta kota Proklamasi* . Jakarta: Pemda DKI Jaya.
- Ziegler Philip. (1985). *Mountbatten The official Biography*, London: Collins

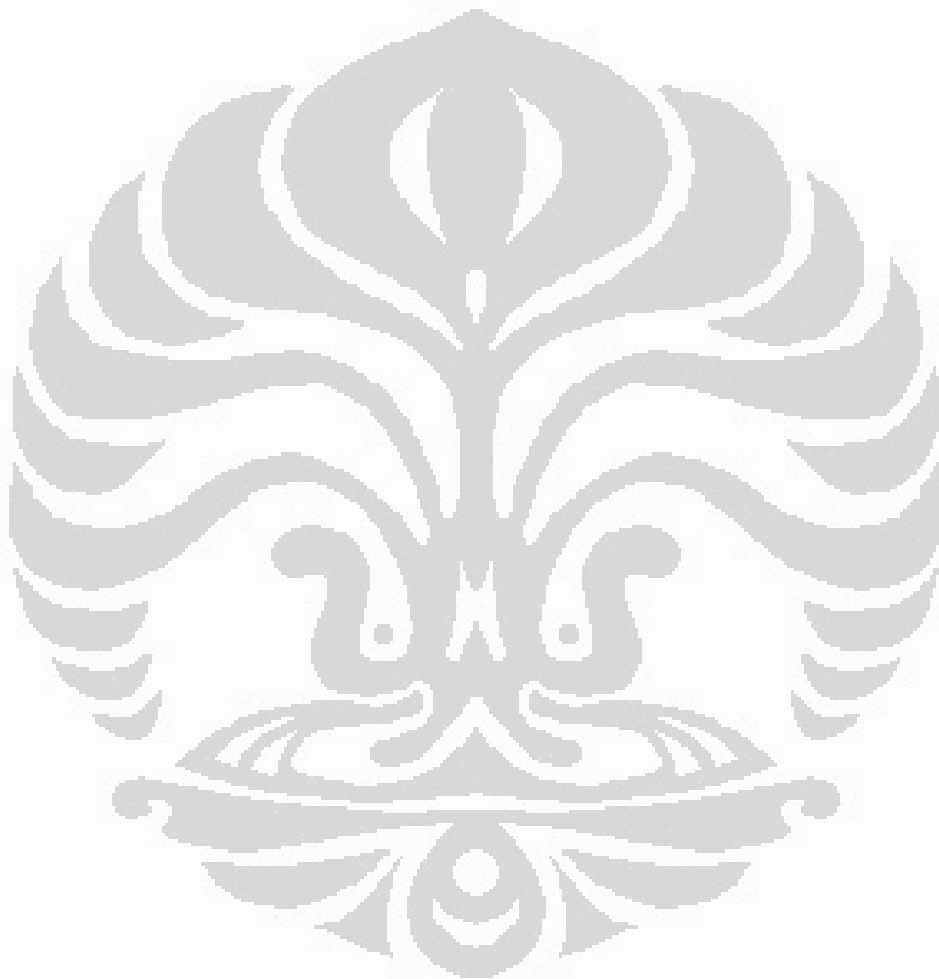
## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ABDA	American, British, Dutch, Australia
AFNEI	Allied Forces Netherlands East Indie
AKOMA	Angkatan Komunis Muda
AMACAB	Allied Military Administration Civil Affairs Branch
AMS	Algemene Middelbare School
API	Angkatan Pemuda Indonesia
APWI	Allied Prisoners of War and Internees
BB	Binnenlands Bestuur
BKPI	Badan Kongres Pemuda Indonesia
BKR	Badan Keamanan Rakyat
BO	Boedi Oetomo
BP	Badan Pekerja
BPRI	Barisan Pemberontak Republik Indonesia
BPUPKI	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BTI	Barisan Tani Indonesia
CG	Commissie Generaal
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ELS	Europeesche Lagere School
GERINDO	Gerakan Rakyat Indonesia
HBS	Hoogere Burger School
IM	Indonesia Moeda
ISDP	Indisch Social Democratische Partij
ISDV	Indische Social Democratische Vereniging
KL	Koninklijke Leger
KNIL	Koninklijke Nederlands Indisch Leger
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
KRI	Kapal Republik Indonesia
KRIS	Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi
KVP	Katholieke Volkspartij
LRDR	Laskar Rakyat Djawa Barat
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat

MULO	Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NHM	Netherlandsche Handel Maatschappij
NICA	Netherlands Indie Civil Administraton
NIS	Negara Indonesia Serikat
NSB	National Socialistische Beweging
NIT	Negara Indonesia Timur
ORI	Oeang Republik Indonesia
OSVIA	Opleiding Scholen voor Inlandsche Ambtenaren
PARINDRA	Partai Indonesia Raya
PARAS	Partai Rakyat Sosialis
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PBI	Persatuan Bangsa Indonesia
PETA	Pembela Tanah Air
PP	Persatuan Perjuangan
PPPI	Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia
PPKI	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
POPDA	Panitia Oeroesan Pemulang Djepang dan APWI
POW	Prisoners of War
PPPKI	Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia
PRI	Pamuda Republik Indonesia
PVDA	Partij van de Arbeid
RAPWI	Rehabilitation Allied Prisoner of War and internis
RI	Republik Indonesia
RKSP	Rooms Katholieke Staats Partij
RR	Regering Reglement
RRI	Radio Republik Indonesia
SACSEA	Supreme Allied Comander South East Asia
SDI	Sarikat Dagang Islam
SDAP	Sociaal Democratische Arbeiders Partij
SI	Sarikat Islam
STOVIA	School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen
SEAC	South East Asia Command



SWPA	South West Pacific Area
THS	Technische Hooge School
TKR	Tentara Keamanan Rakyat
UNO	United Nation Organisation
UUD	Undang Undang Dasar



## LAMPIRAN

### Konsep Persetujuan Linggajati (versi Belanda)

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk pembangunan yang baru bagi kerjasama dengan sukarela yang merupakan jaminan yang sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus serta dengan kokoh teguh daripada kedua negeri itu didalam masa datang dan akan memungkinkan perhubungan sejarah kepada kedua bangsa itu untuk mempererat perhubungan antara kedua pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan permufakatan seperti berikut dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran daripada Majelis Perwakilan masing-masing.

#### Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera terkecuali wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan Sekutu dan Belanda.

#### Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat akan bekerjasama untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka dan demokratis berdasarkan federasi bernama Negara Indonesia Serikat.

#### Pasal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya dengan ketentuan bahwa jika kaum penduduk daripada suatu bagian daerah setelah menyatakan menurut aturan demokrasi tidak atau masih belum suka masuk dalam perserikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu, bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat dan terhadap Kerajaan Belanda.

#### Pasal 4

Negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat ialah Republik, Kalimantan dan Timur Besar dengan tidak mengurangi hak dari sekelompok penduduk dari salah satu wilayah untuk menyatakan secara demokratis keinginannya bahwa kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat diatur secara lain.

#### Pasal 5

Dengan memperhatikan tanggung jawab terakhir Pemerintah Belanda dalam tahap ini, pihak-pihak yang bersangkutan akan mengadakan perundingan mengenai cara turut serta suatu wilayah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan Republik dan sekelompok penduduk yang tidak atau belum cukup diwakili oleh Republik untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimuat dalam pasal 2.

#### Pasal 6

Pada pembentukan Negara Indonesia Serikat daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu dan pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera akan dimasukkan ke wilayah Republik, dengan memperhatikan kekuasaan Negara Indonesia Serikat untuk mengadakan suatu peraturan khusus mengenai wilayah Ibu kotanya.

#### Pasal 7

1. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan mengadakan kerjasama dalam hal mengatur kepentingan bersama Belanda dan Indonesia untuk mewujudkan UNI Belanda-Indonesia dan dengan terbentuknya itu, Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao, dirubah bentuknya menjadi UNI Belanda-Indonesia yang terdiri dari Kerajaan Belanda yang meliputi Belanda, Suriname, Curacao, dan di lain pihak Negara Indonesia Serikat.
2. Yang tersebut di atas tidak mengurangi kemungkinan diadakan peraturan di kemudian hari yang mengatur hubungan antara Belanda, Suriname dan Curacao.

#### Pasal 8

1. UNI Belanda Indonesia akan mempunyai alat kelengkapan sendiri yang akan mengurus kepentingan bersama Belanda dan Negara Indonesia Serikat.
2. Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan pemerintah Negara Indonesia Serikat, mungkin djuga oleh Majelis Perwakilan Rakjat negara-negara itu.
3. Adapun jang akan dianggap kepentingan-kepentingan dalam arti bekerdjasama itu ialah kerdja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan serta djuga hal-hal ekonomi dan kebudajaan.

#### Pasal 9

1. Raja Belanda akan bertindak menjadi kepala UNI Belanda- Indonesia.

2. Apabila Raja meninggal dan tidak ada penggantinya sesuai dengan Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda dapat diadakan peraturan yang menyimpang.

#### Pasal 10

Untuk membela, memelihara kepentingan Negara Indonesia Serikat di negeri Belanda dan kepentingan Belanda di Indonesia maka pemerintah masing-masing kelak mengangkat Komisaris Luhur.

#### Pasal 11

Piagam UNI Belanda-Indonesia akan memuat antara lain peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Kepastian hak-hak kedua pihak terhadap satu terhadap yang lain dan jaminan untuk menepati kewajiban-kewajiban satu terhadap yang lain.
- b. Perlakuan kewarganegaraan timbal balik bagi warga Negara Belanda dan Indonesia
- c. Peraturan yang berisi kelengkapan apabila di antara badan-badan UNI itu tidak terdapat persetujuan.
- d. Peraturan mengenai cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh badan-badan Kerajaan Belanda jika memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat selama negara ini belum atau tidak cukup mempunyai badan-badan.
- e. Kepastian di kedua bagian UNI untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dengan rujukan kepada Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

#### Pasal 12

- a. Anggaran itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.
- b. Anggaran itu harus setelah dibenarkan oleh Majelis Perwakilan rakyat kedua belah pihak masing masing.

#### Pasal 13

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan berusaha supaya terwujudnya Negara Indonesia Serikat dan persekutuan Belanda Indonesia itu telah selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949.

#### Pasal 14

Setelah UNI Belanda-Indonesia terwujud Pemerintah Belanda segera akan mengambil langkah untuk mengusahakan agar Negara Indonesia Serikat dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

#### Pasal 15

1. Republik di wilayah kekuasaannya menjamin secara de facto kebebasan demokratis fundamental dan hak-hak seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan bertindak dan bergerak, perlindungan terhadap harta dan jiwa, kebebasan menuntut pendidikan untuk semua yang bermukim di daerahnya.
2. Milik dan perusahaan warga yang tidak termasuk warga Indonesia akan mendapat perlakuan sama dengan milik dan perusahaan warga Indonesia di wilayah Republik. Perlakuan yang sama ini akan berlaku juga untuk milik dan perusahaan Indonesia yang berada di wilayah Kerajaan.
3. Republik Indonesia mengakui tuntutan hak orang-orang bukan bangsa Indonesia, akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka yang lagi berada didalam daerah defakto kekuasaannya. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

#### Pasal 16

1. Sebelum terbentuk Negara Indonesia Serikat dan UNI Belanda-Indonesia, kedudukan ketatanegaraan dan kedudukan dalam hubungan hukum antara bangsa Kerajaan Belanda akan dipertahankan, dengan pengertian bahwa pemerintah Belanda akan mendorong segera dibentuk perundang-undangan dengan tujuan untuk merubah pemerintah Hindia sedemikian rupa sehingga susunan dan cara bekerjanya sebaik mungkin agar dapat disesuaikan dengan pengakuan terhadap Republik dan struktur ketatanegaraan yang akan disusun.
2. Dalam waktu yang singkat juga akan dibuat ketetapan-ketetapan dengan tujuan untuk mengatur kerjasama di bidang hubungan luar negeri, pertahanan, kepentingan ekonomi, kebudayaan dan keuangan.

#### Pasal 17

Setelah persetujuan ini tercapai kedua belah pihak segera akan berunding mengenai cara dan kecepatan dalam mengurangi jumlah pasukan pada kedua belah pihak dan mengenai kerjasama di bidang militer.

#### Pasal penutup

Persetujuan ini disusun dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua naskah mempunyai keabsahan yang sama.

## **Persetujuan Linggajati yang diparaf tgl 15 November 1946**

Pemerintah Belanda, dalam hal ini berwakilkan Komisi Jenderal dan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini berwakilkan delegasi Indonesia.

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk pemangunan yang baru, bagi kerjasama dengan sukarela, yang merupakan jaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kokoh teguh daripada kedua negeri itu, didalam masa datang dan yang membuka jalan kepada kedua bangsa itu untuk mempererat perhubungan antara kedua pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan permufakatan seperti berikut dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran daripada Majelis Perwakilan masing-masing.

### **Pasal 1**

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra. Adapun daerah-daerah yang diduduki tentara Serikat atau tentara Belanda dengan oleh berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak dan dimasukkan pula kedalam daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera diambil tindakan yang perlu-perlu supaya selambat-lambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

### **Pasal 2**

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan dan dinamai dengan Negara Indonesia Serikat.

### **Pasal 3**

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya dengan ketentuan, bahwa jika kaum penduduk daripada suatu bagian daerah, setelah dimusyawaratkan dengan lain-lain bagian daerahpun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk kedalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Kerajaan Belanda.

#### Pasal 4

1. Adapun Negara-Negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia (Jawa, Madura dan Sumatera), Borneo dan Timur Besar, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk dari sesuatu bagian daerah untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis, supaya kedudukannya didalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.
2. Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat 1 pasal 4, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

#### Pasal 5

1. Undang-undang Dasar dari Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan Pembentukan Negara, yang akan didirikan daripada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal 5.
2. Kedua belah pihak akan bermusyawarat tentang cara turut campurnya dalam persidangan Pembentuk Negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk yang tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung jawab daripada Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

#### Pasal 6

1. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela, memelihara kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia akan bekerja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia yang dengan terbentuknya itu kerajaan Belanda yang meliputi negeri Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persekutuan itu yang terdiri daripada satu pihak daripada kerajaan Belanda yang meliputi negeri Belanda, Suriname dan Curacao dan pada pihak lainnya daripada Negara Indonesia Serikat.
2. Yang tersebut di atas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian berkenaan dengan kedudukan antara negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnya.

### Pasal 7

1. Untuk membela dan memelihara kepentingan-negara-negara yang tersebut di dalam pasal 6, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.
2. Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat, mungkin juga oleh Majelis Perwakilan Rakyat negara-negara itu.
3. Adapun yang akan dianggap kepentingan-kepentingan dalam arti bekerja sama itu ialah kerja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan, serta juga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

### Pasal 8

Dipucuk persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah Raja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama baginda Raja.

### Pasal 9

Untuk membela, memelihara kepentingan Negara Indonesia Serikat di negeri Belanda dan kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia, maka pemerintah masing-masing kelak mengangkat Komisaris-Luhur.

### Pasal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain akan mengandung juga ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Pertanggung jawaban hak-hak kedua pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak menepati kewajiban-kewajiban yang satu kepada yang lain.
- b. Hal kewarganegaraan untuk warganegara Belanda dan warganegara Indonesia, masing-masing didaerah lainnya.
- c. Aturan cara bagaimana menyelesaikannya apabila dalam alat-alat kelengkapan persekutuan itu tidak dapat dicapai semufakat;
- d. Aturan cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.



e. Pertanggunggaan dalam kedua bagian persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, yang dimaksudkan juga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 11

1. Anggaran-anggaran itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.
2. Anggaran-anggaran itu harus setelah dibenarkan oleh Majelis-Majelis Perwakilan Rakyat kedua belah pihak masing-masing.

#### Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai sebelum tanggal 1-1-1949.

#### Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan agar supaya setelah terbentuknya Persekutuan Belanda-Indonesia itu dapatlah Negara Indonesia Serikat itu diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka yang lagi berada di dalam daerah kekuasaannya de facto.

Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

#### Pasal 15

Untuk mengubah sifat pemerintah Hindia Belanda sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara yang dikehendaki itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan undang-undang, agar supaya sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

#### Pasal 16

Dengan segera setelah persetujuan ini menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan balatenteranya masing-masing.

Kedua belah pihak akan bermusyawarat tentang sampai seberapa dan lambat-cepatnya melakukan pengurangan itu, demikian juga tentang kerja bersama dalam hal ketentaraan.

#### Pasal 17

1. Untuk kerja bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini, Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia hendak diwujudkan sebuah badan yang terdiri daripada delegasi-delegasi yang ditunjukan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masing dengan sebuah secretariat-bersama.
2. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara kedua delegasi yang tersebut itu, akan menyerahkan keputusan kepada arbitrage.

Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain dengan suara memutuskannya yang diangkat semufakat kata antara kedua pihak delegasi itu, dan jika tidak berhasil semufakat itu diangkat oleh Ketua Dewan Pengadilan Internasional.

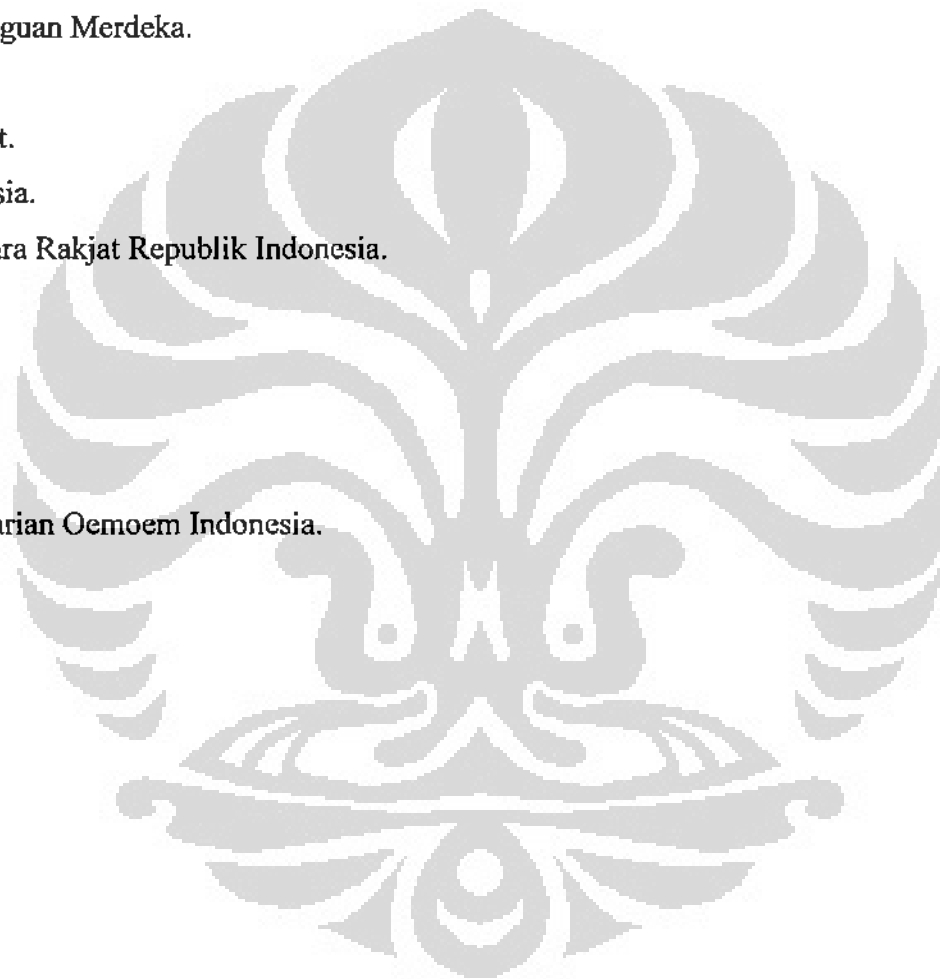
#### Pasal penutup

Persetujuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua-dua nakah itu sama kekuatannya.

Jakarta 15 November 1946

## DAFTAR SURAT KABAR DAN MAJALAH SEBAGAI SUMBER

1. Asia Raja.
2. Tjahaja.
3. Soeara Merdeka.
4. Soeara Ra'jat.
5. Berita Indonesia.
6. Majalah Mingguan Merdeka.
7. Pelita Rakjat.
8. Soeloeh Ra'jat.
9. Warta Indonesia.
10. Merdeka Soeara Rakjat Republik Indonesia.
11. Penyeloeh.
12. Pandji Ra'jat.
13. Sin Po.
14. Antara.
15. Repoeblik, Harian Oemoem Indonesia.



## BIODATA

Rushdy Hoesein dilahirkan pada tanggal 4 Juni 1945 di desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Jatinegara kota Jakarta Raya, saat itu masih dalam ruang lingkup Propinsi Jawa Barat. Ayah bernama Hoesein dan Ibu Maemunah. Istri satu, Dr Karmini Srimastuti SpOG. Memiliki dua anak, Ir Nadhia Vitari dan Muhamad Arief.

Pendidikan umum, Sekolah Dasar Perguruan Cikini Jakarta, lulus tahun 1959. Sekolah Menengah Pertama pada Perguruan Cikini Jakarta, lulus pada tahun 1962. Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri III Setia Budi Jakarta, lulus tahun 1965. Perguruan tinggi, awalnya pada Fakultas Psikologi UI, namun karena berhasil lolos pada ujian saringan masuk tahap ke II, diterima pada Fakultas Kedokteran UI. Selesai pendidikan dan dilantik sebagai Dokter Umum pada awal tahun 1973. Tahun 1990 mengikuti pendidikan Pasca Sarjana pada Bagian Farmakologi FKUI. Tahun 2000, mengikuti pendidikan S2 pada Fakultas Ilmu Budaya UI, jurusan Sejarah dan selesai pada tahun 2003. Sejak tahun 2004, mengikuti program S3 pada Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Sejarah sampai sekarang.

Setelah lulus pendidikan dokter, rencananya akan aktif di dunia wiraswasta. Sempat mendirikan Perusahaan Film bersama-sama teman-teman bernama P.T Kartika Indah Film dan sempat memproduksi 3 buah film layar lebar. Karena perusahaan bangkrut, selanjutnya diterima sebagai tenaga pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan. Sejak tahun 1975-1978 sebagai dokter Puskesmas Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur. Sempat menjabat wakil direktur Rumah Sakit Kabupaten Magetan. Tahun 1980, pindah bekerja pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan Jakarta. Awalnya sebagai Kepala Seksi Pengembangan Rumah Sakit, terakhir pada tahun 1987 sebagai Kepala Sub.Direktorat Penunjang Medik. Setelah mengikuti pendidikan pasca sarjana di Farmakologi FKUI, kembali ke Dep.Kes dan ditempatkan pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dit. Jen Yan Med.

Tahun 2000, pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam tugas jabatan, sempat mengikuti pendidikan Hospital Planning Course sehingga setelah itu banyak difungsikan sebagai tenaga konsultan pembangunan Rumah Sakit.

Sejak tahun 1978, aktif pada kegiatan Keluarga Berencana Nasional. Mula-mula sebagai anggota PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional) kemudian PKMI (Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia). Untuk ini ikut aktif sebagai tenaga pelayanan medis, penyuluh (KIE) dan organisator. Tahun 1978, mengikuti pendidikan KB di Singapura dan Filipina.

Sejak tahun 1990, aktif dalam organisasi Veteran Indonesia seperti Badan Kontak Resimen 4, 6 dan Kantor Penghubung Tentara Jakarta, Yayasan POPDA, Yayasan 19 Desember 1948 serta organisasi Veteran Siliwangi. Tahun 1996 mengikuti rombongan Veteran Siliwangi yang diundang dalam acara peringatan 50 tahun Divisi 7 Desember di Ermelo negeri Belanda. Setelah kembali mendirikan Yayasan Ermelo Grup. Tahun 2003, bersama Bapak-bapak Ali Alatas, Frans Seda, Harjono (ex Du.Bes di Portugal), Urip Santoso, Hafas dan Jimy mendirikan APKIP (Assosiasi Persahabatan dan Kerja Sama Indonesia Portugal. Pada tahun yang sama atas penunjukan anggota senior diangkat sebagai Ketua Yayasan Prapatan 10. Pada tahun 2007 bersama teman-teman mendirikan Persekin (Perhimpunan Sejarah Kedokteran Indonesia).